



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026**

TAHUN 2023



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin Periode 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 21 September 2023 dan akan ditunjuk Penjabat Bupati Merangin untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Merangin definitif agar pembangunan daerah di Kabupaten Merangin tetap terselenggara dengan baik, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam Perencanaan Pembangunan.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat Kabupaten Merangin.
16. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
17. Sasaran adalah terget atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD Kabupaten Merangin.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- b. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040;
- c. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028;
- d. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 -2023;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- f. Isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- g. Peraturan perundang -undangan.

Pasal 4

- (1) Maksud dari RPD adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat Tahun 2024-2026.
- (2) RPD merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama empat tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

- (2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Merangin dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

Pasal 8

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 31 - 3 - 2023



Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 31 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR..4.



KATA PENGANTAR

ASSALAMMU 'ALAIKUM WR. WB

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Kami berharap semua pihak yang terkait khususnya kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dapat menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ini ke dalam program dan kegiatan yang nyata dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berharap semoga rencana yang kita susun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perjalanan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dapat berjalan dengan lancar agar kesejahteraan Masyarakat Merangin Bumi Tali Undang Tambang Teliti dapat kita wujudkan. Amin.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan	I-17
1.6 Sistematika Penulisan	I-24
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-42
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-61
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-93
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
3.3 Kebijakan Kerangka Pendanaan	III-35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Isu Strategis	IV-10
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Tujuan	V-3
5.2 Sasaran	V-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI -1
6.1. Strategi	VI -1
6.2. Arah Kebijakan	VI -4
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Makro	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-2
8.3. Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	VIII-3
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1. Pedoman Transisi	IX-2
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-2
9.3. Penutup	IX-3



DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disandingkan dengan agenda pokok RPJMN Tahun 2020-2024	I-12
Tabel I-2	Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Daerah dan Provinsi	I-14
Tabel I-3	Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disandingkan dengan misi dan pentahapan kelima RPJPD Tahun 2028-2028	I-16
Tabel II-1	Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin Tahun 2022	II-3
Tabel II-2	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin, 2022	II-6
Tabel II-3	Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-7
Tabel II-4	Jenis Tanah beserta luas wilayah dan persentasenya di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-8
Tabel II-5	Jenis Formasi Geologi di Kabupaten Merangin	II-11
Tabel II-6	Prakiraan Sifat dan Curah Hujan Bulan Oktober 2021	II-12
Tabel II-7	Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-13
Tabel II-8	Kelas Tutupan Lahan Beserta Luasan di Kabupaten Merangin Tahun 2019	II-14
Tabel II-9	Distribusi dan Luas Penutupan Lahan Tahun 2019 Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-16
Tabel II-10	Jenis Ekoregion Beserta Luasan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-17
Tabel II-11	Distribusi dan Luas Ekoregion Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-18
Tabel II-12	Luas Area Budidaya Perairan Umum, Kolam, Keramba Jaring Apung (KJA) dan Mina Padi di Kabupaten Merangin, 2019	II-20
Tabel II-13	Luas Kawasan Pertanian untuk Kelompok Komoditi Padi, Non-Padi, dan Sayuran Semusim Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2017	II-22
Tabel II-14	Luas Kawasan Pertanian untuk Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2019	II-23
Tabel II-15	Daftar Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Merangin	II-24
Tabel II-16	Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan dan Desa	II-27
Tabel II-17	Rekapitulasi Laporan Bencana di Kab. Merangin Tahun 2019	II-28
Tabel II-18	Sebaran Wilayah Rawan Longsor di Kabupaten Merangin	II-29
Tabel II-19	Luas dan Persentase Kawasan Hutan di Kabupaten Merangin	II-30
Tabel II-20	Sebaran Lokasi Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Merangin	II-32
Tabel II-21	SK Menteri Beserta Luas Hutan Desa di Wilayah Kabupaten Merangin	II-33
Tabel II-22	Produksi Hasil Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2006-2014	II-33
Tabel II-23	Sebaran Lokasi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Merangin	II-34
Tabel II-24	Banyaknya Penduduk Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022	II-40

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel II-25	Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	II-41
Tabel II-26	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Tahun 2022	II-42
Tabel II-27	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Merangin Tahun 2017 – 2022	II-44
Tabel II-28	Tingkat Inflasi Kabupaten Bungo *Bulanan Tahun 2017-2022	II-45
Tabel II-29	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Merangin, 2018-2022	II-46
Tabel II-30	Data Pelaksanaan Indikator Kinerja Pada Bidang Ketenaga Kerjaan Sampai dengan Tahun 2022	II-46
Tabel II-31	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022	II-47
Tabel II-32	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Merangin, 2017-2021	II-48
Tabel II-33	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Merangin, 2017-2021	II-49
Tabel II-34	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Merangin, 2017-2021	II-50
Tabel II-35	Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021	II-51
Tabel II-36	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	II-53
Tabel II-37	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022	II-53
Tabel II-38	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022	II-54
Tabel II-39	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022	II-55
Tabel II-40	Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022	II-56
Tabel II-41	Angka Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022	II-56
Tabel II-42	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021	II-57
Tabel II-43	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu Kabupaten Merangin 2017-2022	II-58
Tabel II-44	Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas yang Berstatus Bekerja Menurut Status Pada Pekerjaan Utama, 2021-2022	II-59
Tabel II-45	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman dan Keparahen Kemiskinan di Kabupaten Merangin, 2017-2022	II-59
Tabel II-46	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-62

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel II-47	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-63
Tabel II-48	Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan SPM Tahun 2021 dan 2022	II-64
Tabel II-49	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-65
Tabel II-50	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-66
Tabel II-51	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-67
Tabel II-52	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-68
Tabel II-53	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-69
Tabel II-54	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-70
Tabel II-55	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-70
Tabel II-56	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-71
Tabel II-57	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-72
Tabel II-58	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-73
Tabel II-59	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-74
Tabel II-60	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-75
Tabel II-61	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-75
Tabel II-62	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-76
Tabel II-63	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-76
Tabel II-64	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-77

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel II-65	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-78
Tabel II-66	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-79
Tabel II-67	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-79
Tabel II-68	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-80
Tabel II-69	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-81
Tabel II-70	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-81
Tabel II-71	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-82
Tabel II-72	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-83
Tabel II-73	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Pertanian di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-83
Tabel II-74	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-85
Tabel II-75	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-86
Tabel II-76	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-86
Tabel II-77	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-87
Tabel II-78	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pendukung Sekretariat DPRD di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-88
Tabel II-79	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Perencanaan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-88
Tabel II-80	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Keuangan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-89
Tabel II-81	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Kepegawaian di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-90
Tabel II-82	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-90
Tabel II-83	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-91
Tabel II-84	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-92
Tabel II-85	Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Merangin 2018-2022	II-92
Tabel II-86	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Merangin, 2017-2022	II-94

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel II-87	Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022	II-95
Tabel II-88	Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022	II-96
Tabel II-89	Perkembangan Luas Panen, Produksi Padi Tahun 2018-2021	II-97
Tabel II-90	Perkembangan Luas Panen Dan Produksi Tanaman Jagung. Kacang-Kacang Dan Umbi-Umbian Di Kabupaten Merangin Tahun 2018 Dan Tahun 2021	II-97
Tabel II-91	Luas Tanaman Produksi Produktivitas Dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Merangintahun 2020 Dan 2021	II-98
Tabel II-92	Jumlah Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan di Kejaksaan Negeri Bangko dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat, di Kabupaten Merangin Menurut Jenis Perkara, 2021-2022	II-100
Tabel II-93	Rekapitulasi Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2022	II-101
Tabel II-94	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Merangin, 2022	II-102
Tabel II-95	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Merangin, 2017-2022	II-103
Tabel II-96	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Merangin, 2021	II-105
Tabel II-97	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Merangin 2017-2021	II-106
Tabel II-98	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Merangin Tahun 2021	II-106
Tabel II-99	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Merangin Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2019-2022	II-108
Tabel II-100	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-133
Tabel II-101	Persentase Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2022 di Kabupaten Merangin	II-135
Tabel II-102	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019-2022	II-137
Tabel III-1	Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018-2022	III-5
Tabel III-2	Neraca Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021	III-7
Tabel III-3	Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021	III-14
Tabel III-4	Rasio Solvabilitas Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021	III-16
Tabel III-5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)	III-21
Tabel III-6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023 (PP Nomor 12 Tahun 2019)	III-23
Tabel III-7	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)	III-26
Tabel III-8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023 (PP Nomor 12 Tahun 2019)	III-27



Tabel III-9	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)	III-31
Tabel III-10	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023 (PP Nomor 12 Tahun 2019)	III-33
Tabel IV-1	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Merangin	IV-2
Tabel IV-2	Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Merangin Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024	IV-16
Tabel IV-3	Kabupaten Merangin dalam Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-18
Tabel IV-4	Kabupaten Merangin dalam Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	IV-18
Tabel IV-5	Identifikasi Awal Isu Strategis Berdasarkan Tantangan Capaian TPB yang Perlu Perhatian	IV-20
Tabel IV-6	Pertambahan Nilai Pada 5 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-27
Tabel IV-7	Perubahan Distribusi Kontribusi Pada 5 Sektor Terhadap Total PDRBKabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-28
Tabel IV-8	Perkembangan Investasi Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Merangin 2019-2020	IV-37
Tabel IV-9	Hasil Penilaian MCP oleh KPK Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022	IV-53
Tabel IV-10	Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Publik Kabupaten Merangin Tahun 2019-2021	IV-55
Tabel V-1	Keselarasan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin 2024-2026 dengan Misi Rencana Pembangunan Provinsi Jambi dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	V-6
Tabel V-2	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-15
Tabel VI-1	Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	VI-2
Tabel VI-2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Merangin 2024-2026	VI-4
Tabel VI-3	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	VI-12
Tabel VI-4	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Perlindungan Sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga	VI-14
Tabel VI-5	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	VI-15
Tabel VI-6	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	VI-16
Tabel VI-7	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima	VI-16

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel VI-8	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel	VI-17
Tabel VI-9	Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel	VI-19
Tabel VII-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel VII-2	Kapasitas Riil Kerangka Pendanaan Kabupaten Merangin	VII-4
Tabel VII-3	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin	VII-5
Tabel VII-4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Merangin 2024-2026	VII-6
Tabel VIII-1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026	VIII-2
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026	VIII-3
Tabel VIII-3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026	VIII-4

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-11
Gambar I-2	Tahapan Penyusunan Dokumen RPD	I-18
Gambar II-1	Peta Administrasi Kabupaten Merangin	II-4
Gambar II-2	Peta Topografi di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-7
Gambar II-3	Peta Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-10
Gambar II-4	Tutupan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin	II-15
Gambar II-5	Peta Sebaran Objek Wisata Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-25
Gambar II-6	Peta Kawasan Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-30
Gambar II-7	Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-39
Gambar II-8	Grafik Capaian SPM Kabupaten Merangin per Triwulan Tahun 2022	II-135
Gambar II-9	Grafik Realisasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Kabupaten Merangin per Triwulan Tahun 2022	II-136
Gambar IV-1	Perkembangan Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-24
Gambar IV-2	Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-25
Gambar IV-3	Perkembangan Nilai Pada 5 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022	IV-26
Gambar IV-4	Perkembangan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-30
Gambar IV-5	Lokus Pembangunan Sektor Pertanian	IV-33
Gambar IV-6	Lokus Pembangunan Sektor Pariwisata Berbasis Geopark	IV-35
Gambar IV-7	Perkembangan Perbandingan IPM Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-39
Gambar IV-8	Perbandingan IPM Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2022	IV-40
Gambar IV-9	Tingkat Pertumbuhan Indikator IPM Kabupaten Merangin Tahun 2020-2022	IV-40
Gambar IV-10	Perkembangan Nilai Indeks Dimensi IPM Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022	IV-41
Gambar IV-11	Perkembangan Perbandingan Indikator RLS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-44
Gambar IV-12	Perkembangan Perbandingan Indikator HLS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-45
Gambar IV-13	Perkembangan Perbandingan Indikator AHH Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2018-2022	IV-49
Gambar IV-14	Perkembangan Perbandingan Indikator IPG Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-51
Gambar V-1	Keselarsan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028	V-3
Gambar V-2	Struktur Tujuan Pembangunan dan Unsurnya Pada RPD Tahun 2024-2026	V-4
Gambar V-3	Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-8
Gambar V-4	Lokus Pembangunan Sektor Pertanian pada Tujuan 1 Sasaran 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-9

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Gambar V-5	Lokus Pembangunan Sektor Pariwisata Berbasis Geopark pada Tujuan 1 Sasaran 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-10
Gambar V-6	Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 2 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-12
Gambar V-7	Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 3 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026	V-13



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018- 2023 atau periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.



Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 merupakan kebijakan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selama periode Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 dengan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2008-2028. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Merangin di tahun berkenaan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, dan RPJMD



Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku.

Sebagaimana diketahui Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2018-2023 akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 22 September 2023, bersamaan dengan itu pula RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13) akan berakhir periodesasinya dan tentunya Kabupaten Merangin tidak memiliki pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian Penyusunan APBD.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Merangin pada periode tahun 2024-2026;
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026
4. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026; dan
5. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Merangin selama periode tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarnya;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi;
5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
6. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan



- dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional; dan
 8. Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

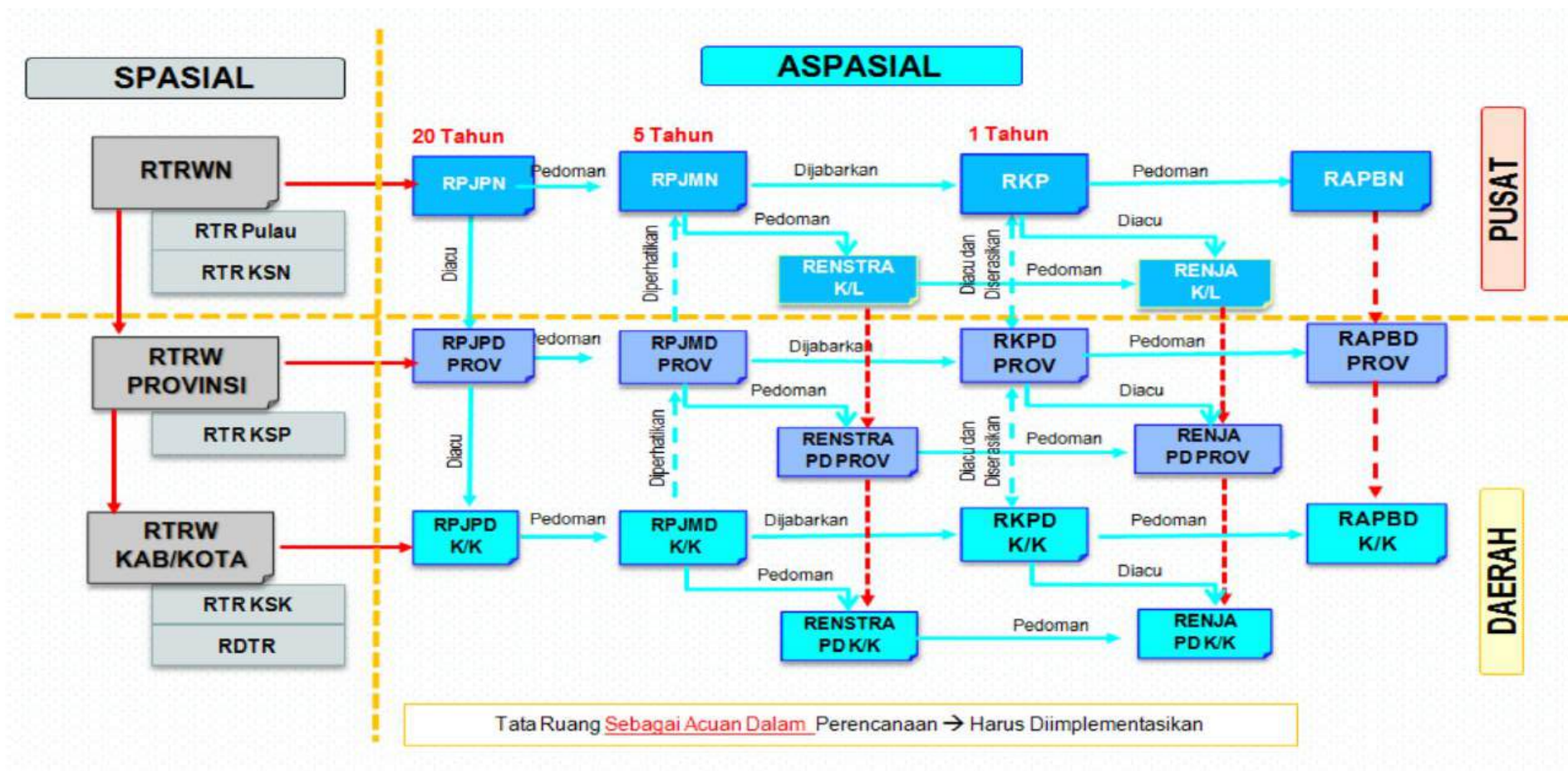
Pada pemerintahan Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan pertahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang pada akhirnya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RPJMN juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana strategis kementerian dan lembaga (Renstra K/L) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana kerja kementerian dan lembaga (Renja K/L).

Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 senantiasa berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan



Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan gamblang bila dituangkan ke dalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar I-1. Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Merupakan Penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1. Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disandingkan dengan agenda pokok RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN	RPD Tahun 2024-2026		
Agenda Pokok	Tujuan		Sasaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Ketahanan untuk yang (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Ketahanan untuk yang (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas	Meningkatnya kualitas akses pendidikan
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Ketahanan untuk	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang



RPJMN	RPD Tahun 2024-2026	
Agenda Pokok	Tujuan	Sasaran
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel

1.4.2. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 Merupakan Penjabaran visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Merangin empat tahun mendatang.

RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun dengan memerhatikan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026.



Tabel I.2. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Daerah dan Provinsi

RPJMD Provinsi Jambi		RPD Tahun 2024-2026	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima
Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan
	Meningkatnya industri pengolahan		Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga
	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata		
	memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar		
	Meningkatnya kualitas lingkungan		
	Menurunnya tingkat pengangguran		
	meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan		
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan	Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan
	Meningkatnya		Meningkatnya kualitas akses pendidikan



RPJMD Provinsi Jambi		RPD Tahun 2024-2026	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
gender	kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya		
	Meningkatnya toleransi intra dan antar agama		
	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan		

1.4.3. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan RPJPD Kabupaten Merangin

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan Rencana Pembangunan tahap kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Karena itu, dalam penyusunan RPD Kabupaten Merangin sasaran dan arah kebijakan tahun ke lima dalam RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2008-2028 menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Dalam RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 ditetapkan Visi yang akan dicapai yaitu "**MERANGIN YANG MAJU, MANDIRI, LESTARI, ADIL DAN BERBUDAYA**". Visi Pembangunan Kabupaten Merangin tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 - 2025 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 yang pada akhirnya diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.



Tabel I.3. Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disandingkan dengan misi dan pentahapan kelima RPJPD Tahun 2028-2028

Misi RPJPD Kabupaten Merangin 2008-2028	RPD Tahun 2024-2026	
	Tujuan	Sasaran
Misi ke-1: Mewujudkan Merangin yang punya daya saing dan maju dalam perekonomian daerah.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga
Misi ke-2: Mewujudkan Merangin yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas akses pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan
		Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
Misi ke-3: Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan
Misi ke-4: Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel
Misi ke-5: Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tentram dan tertib di tengah masyarakat.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel

1.4.4. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan RTRW Kabupaten Merangin

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, harus berpedoman juga pada RTRW Kabupaten Merangin sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Merangin melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.



1.4.5. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan subkegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

1.4.6. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

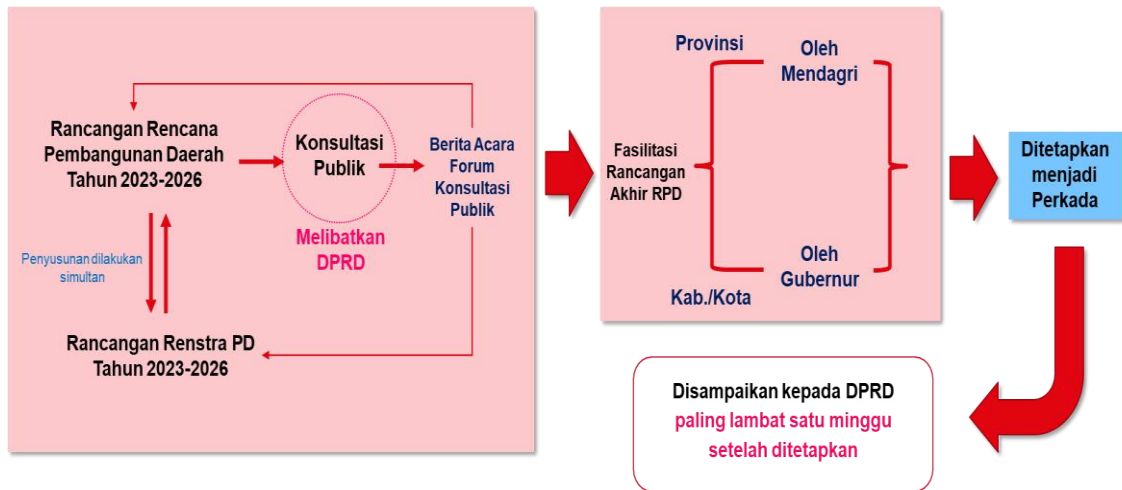
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.5. TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RPJMD Propinsi atau Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 dan RKPD Propinsi Tahun 2024. Tahapan penyusunan dokumen dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-2.Tahapan Penyusunan Dokumen RPD

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 dilakukan secara bertahap dan simultan. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

1.5.1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dalam penyusunan RPD meliputi:

a. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026;

Tim penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 terdiri dari Bupati sebagai penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai wakil penanggungjawab, Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, Kepala Bappeda sebagai wakil ketua dan Sekretaris Bappeda sebagai sekretaris tim. Anggota tim terdiri dari unsur Asisten dan Bagian pada Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda. Tim penyusunan RPD bertugas menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026.



b. Orientasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026;

Orientasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, teknis penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026.

c. Penyusunan agenda kerja;

Penyusunan agenda kerja dalam bentuk time schedule penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 ditujukan untuk memenuhi jangka waktu penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 yang sangat ketat dan padat. Agenda kerja merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026.

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.2. Tahapan Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut:



a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi merupakan penyajian seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026.

b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Merangin mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, yang dilengkapi dengan analisis.

c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

Analisis ekonomi daerah Kabupaten Merangin dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah Kabupaten Merangin adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam analisis kondisi ekonomi daerah Kabupaten Merangin, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merangin sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Merangin



terdiri dari data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

d. Evaluasi kinerja RPJMD;

Evaluasi kinerja tahun lalu di Kabupaten Merangin dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD antara lain untuk menilai/mengidentifikasi apakah sasaran strategis daerah telah tercapai atau belum dan pilihan alternatif program yang efektif untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat/provinsi;

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 melewati proses penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun dalam RPJPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan rencana Kabupaten Merangin yang direncanakan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Upaya untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

f. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Pada tingkat



nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isuisu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah;

g. Perumusan prioritas, sasaran pembangunan daerah dan program prioritas beserta pagu indikatif;

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.



1.5.3. Tahapan Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. Forum konsultasi publik disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

1.5.4. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir untuk Fasilitasi dan Evaluasi

Berita acara forum konsultasi publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 dan rancangan renstra sebelum diajukan untuk fasilitasi.

Evaluasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026, dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan melampirkan

- 1) Surat Permohonan Fasilitasi;
- 2) Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024- 2026;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023;
- 4) Berita Acara Forum Konsultasi Publik;
- 5) Hasil revidi APIP.

Dengan hasil fasilitasi berupa rekomendasi gubernur sebagai wakil pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan: 1) Kepentingan umum; 2) Akuntabilitas; 3) Rasionalitas; 4) Efektivitas; 5) Efisiensi; 6) Partisipatif; 7) Kesiambungan; 8) Keselarasan; dan 9) Kesiuaian dengan peraturan perundang-undangan.



1.5.5. Penetapan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026

Hasil Rekomendasi Gubernur terhadap proses fasilitasi merupakan pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan Kepala daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan antar dokumen, tahapan penyusunan perencanaan, sistematika penulisan dokumen RPD Kabupaten Merangin.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Merangin sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan



strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan–tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Merangin serta pagu anggaran setiap tahunnya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Merangin 2024-2026.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Merangin didirikan pada tanggal 22 Desember 1949 ditandai dengan Bupati Kabupaten Bangko dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Tahun 1952 tentang Pengangkatan M.Kamil sebagai Bupati Merangin terhitung mulai 1 Januari 1950, pada tahun 1956 diterbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, selanjutnya pada tahun 1965 dibentuklah Kabupaten TK II Sarko dan Tanjung Jabung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Tk. II Sarko dan Tanjung Jabung. Sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tk. II Sarolangun-Bangko namanya diubah kembali menjadi Kabupaten Merangin.

Ditinjau dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan perlu disajikan gambaran umum tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan, berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dengan demikian, apa yang dibahas di bab ini merupakan pondasi tentang perencanaan tahunan pembangunan di Kabupaten Merangin.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografi Wilayah

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Merangin Secara geografis, terletak pada titik koordinat antara 101°32'39" – 102°38'35" Bujur Timur dan antara 1°39'23" – 2°46'9" Lintang Selatan, dengan luas 7.679 km² atau 767.900 ha. Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Kota Jambi (ibukota Provinsi Jambi) sejauh ±256 km. Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan:



- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tebo (Permendagri Nomor 81 Tahun 2016), Kabupaten Bungo (Permendagri Nomor 82 Tahun 2016)
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Muko Muko (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013, Kabupaten Lebong (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013)
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri Nomor: 62 Tahun 2019), Kabupaten Musi Rawas Utara (Permendagri Nomor: 131 Tahun 2017)
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri Nomor: 80 Tahun 2016)

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah 7.554,24 Km² berdasarkan lampiran luasan batas permendagri dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 951.54 Km² atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 733.28 Km² dan 672.9 Km².

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran kecamatan baru, untuk Nama Kecamatan dan luas wilayah kecamatan sampai dengan tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

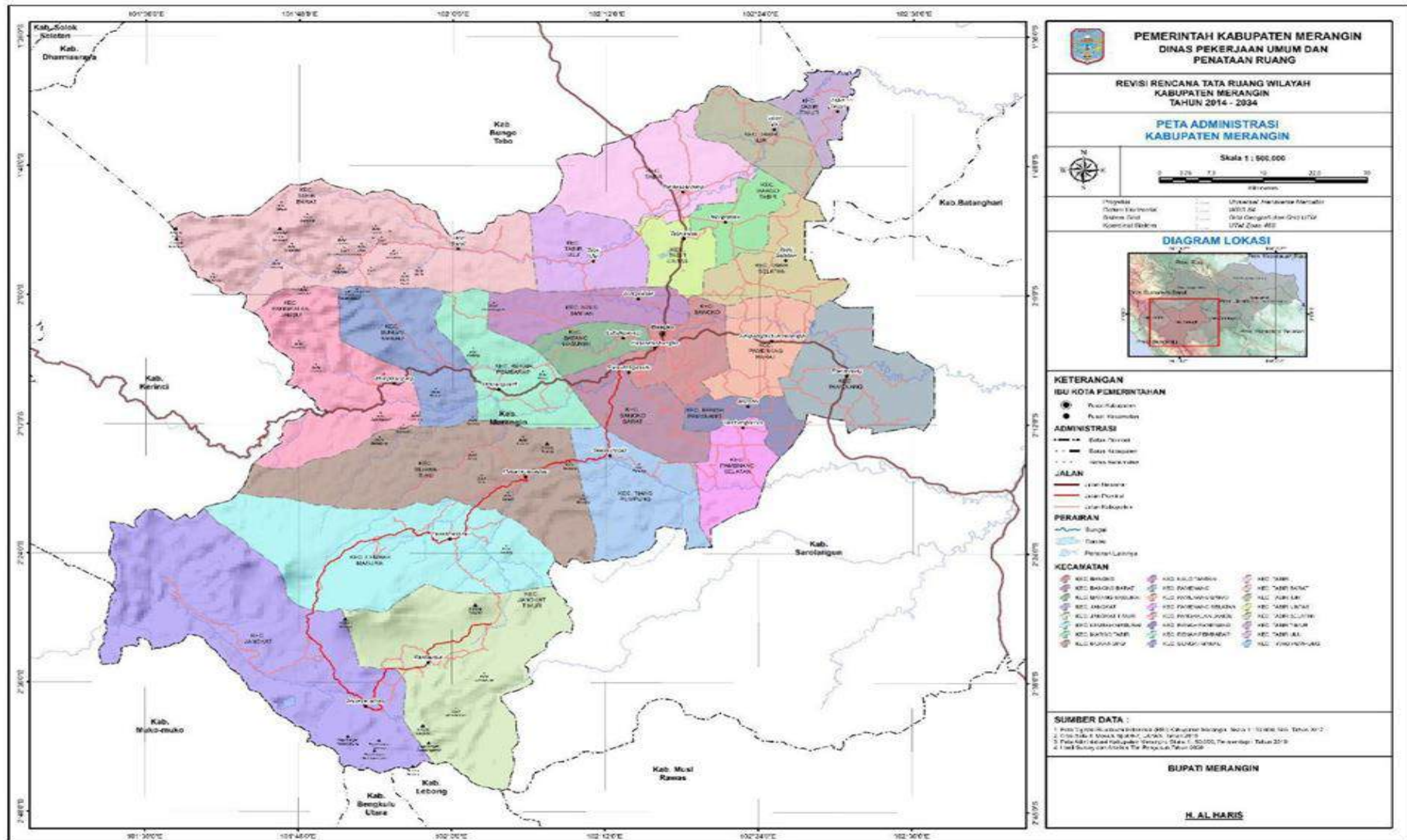


Tabel II-1. Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas	
					km ²	%
1	Jangkat	Muara Madras	11	-	951.54	12,60
2	Sungai Tenang	Rantau Suli	14	-	649.48	7,73
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	17	-	631.36	8,53
4	Lembah Masurai	Pasar Masurai	15	-	672.9	8,97
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	-	290.42	3,58
6	Pamenang	Pamenang	13	1	329.92	4,51
7	Pamenang Barat	Sp. Limbur Merangin	8	-	188.38	2,60
8	Renah Pamenang	Meranti	4	-	93.65	1,40
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-	152.18	2,18
10	Bangko	Bangko	4	4	166.17	2,19
11	Bangko Barat	Pulau Rengas	6	-	192.08	2,56
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	7	-	194.42	1,45
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	10	-	101.65	2,69
14	Sungai Manau	Sungai Manau	10	-	279.79	3,85
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	-	93.65	3,55
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-	403.52	5,56
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5	350.5	4,34
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-	208.75	2,86
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-	191.73	2,56
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-	183.29	2,07
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-	93.74	1,42
22	Tabir Lintas	Mensango	5	-	113.26	1,50
23	Margo Tabir	Margo	6	-	120.94	1,67
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	-	733.28	9,63
Total			205	10	7.554,24	100

Sumber: Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Gambar II-1. Peta Administrasi Kabupaten Merangin



2.1.1.2. Posisi Geostrategik

Wilayah Kabupaten Merangin memiliki kawasan strategis nasional, kawasan strategis propinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis nasional di Kabupaten Merangin adalah Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 166.297,34 ha yang mencakup 17 desa di 7 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Lembah Masurai, Muara Siau, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, dan Tabir Barat.

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Merangin adalah Kawasan Strategis Provinsi Bangko Sarolangun yang sekaligus merupakan kawasan strategis kabupaten yang meliputi wilayah Kecamatan Pamenang, Renah Pamenang, Pamenang Barat, Bangko, Tabir Selatan, Nalo Tantan dan Batang Masumai. Selain itu, terdapat kawasan strategis provinsi panas bumi (geothermal) yang terdapat di wilayah Kecamatan Tabir Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Sungai Tenang. Kawasan strategis kabupaten selain Bangko Sarolangun, juga terdapat kawasan strategis kabupaten perkotaan Bangko dan kawasan strategis kabupaten Lembah Jang Tenang di wilayah Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang dan Lembah Masurai.

2.1.1.3. Morfologi dan Topografi Wilayah

Kabupaten Merangin secara umum terbagi kedalam tiga bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10 – 2.935 mdpl dengan bentang alamnya yang rata-rata bergelombang. Dataran rendah terletak pada ketinggian 10-100 mdpl dengan luas 41,20% dari luas Kabupaten Merangin. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 – 500 mdpl seluas 35,79 % dari luas Kabupaten Merangin, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 23% dari luas Kabupaten Merangin. Penyebaran ketinggian pada masing-masing Kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan merupakan dataran rendah dan sedang. Kecamatan terendah di Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Pemenang yang berada pada ketinggian 51 mdpl. Sedangkan kecamatan yang berada di dataran tinggi adalah Kecamatan Jangkat yang berada di ketinggian



1.035 mdpl. Adapun sebaran ketinggian wilayah di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin, 2022

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
1.	Jangkat	1.035	138
2.	Jangkat Timur	720	142
3.	Muara Siau	425	47
4.	Lembah Masurai	540	62
5.	Tiang Pumpung	172	29
6.	Pamenang	51	32
7.	Pamenang Barat	60	14
8.	Renah Pamenang	65	28
9.	Pemenang Selatan	62	28
10.	Bangko	87	0
11.	Bangko Barat	96	13
12.	Batang Masumai	97	10
13.	Nalo Tantan	115	10
14.	Sungai Manau	209	41
15.	Renah Pembarap	204	33
16.	Pangkalan Jambu	213	51
17.	Tabir	73	28
18.	Tabir Ulu	106	44
19.	Tabir Selatan	60	33
20.	Tabir Ilir	62	46
21.	Tabir Timur	69	65
22.	Tabir Lintas	65	18
23.	Margo Tabir	61	33
24.	Tabir Barat	138	56

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023

Kabupaten Merangin memiliki kelerengan yang didominasi sangat curam. Seluas 258.507,24 ha atau sebesar 34,96% berada pada kelerengan >40%. Variasi kelerengan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Merangin kaya

Tabel II-3. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Kemiringan (%)	Klasifikasi	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	0 – 8	Datar	153.069,29	20,70
2	>8 – 15	Landai	201.849,47	27,30
3	>15 – 25	Agak Curam	-	-
4	>25 – 40	Curam	126.074,00	17,05
5	>40	Sangat Curam	258.507,24	34,96
	Jumlah		739.500,00	100,00

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah | 7



2.1.1.4. Kondisi dan Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Merangin terdiri dari 5 (lima) jenis. Seluas 503.485,91 ha atau sebesar 68,08% wilayah Kabupaten Merangin didominasi oleh jenis tanah podsolik. Tanah podsolik terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu udara rendah yang umumnya terdapat di daerah pegunungan. Selain itu, tanah ini selalu berada di daerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun. Tanah podsolik memiliki karakteristik kesuburan sedang dan berwarna merah atau kuning, memiliki tekstur yang lempung atau berpasir, memiliki pH rendah, serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi. Karena karakteristik tanah podsolik yang memiliki daya simpan unsur hara yang sangat rendah karena sifat lempungnya yang beraktivitas rendah dan juga kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg-nya juga rendah sehingga jenis tanah ini tidak memadai untuk tanaman semusim. Selain itu, tanah podsolik juga memiliki kadar bahan-bahan organik yang rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah. Disamping itu, daya simpan terhadap air juga sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Luas dan persentase wilayah Kabupaten Merangin berdasarkan jenis tanahnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-4. Jenis Tanah beserta luas wilayah dan persentasenya di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Andosol	176.518,89	23,87
2	Hidromorfik	19.534,92	2,64
3	Kompleks Podsolik Latosol	20.155,01	2,73
4	Organosol	19.805,26	2,68
5	Podsolik	503.485,91	68,08
	Total	739.500,00	100,00

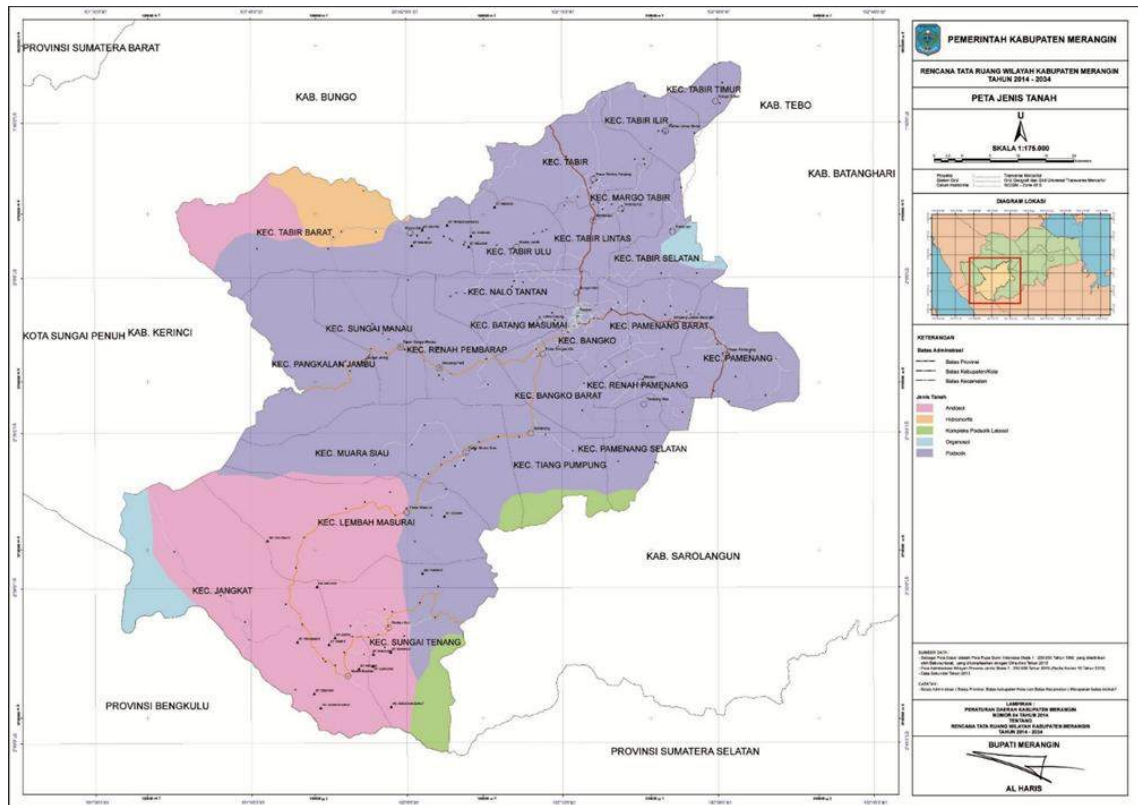
Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2017; Penyesuaian Data, 2020

Sebesar 23,87% wilayah Kabupaten Merangin atau seluas 176.518,89 ha berjenis tanah andosol. Jenis tanah andosol didapati di wilayah Kabupaten Merangin bagian selatan, khususnya di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu



Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Tenang dan Kecamatan Jangkat yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Andosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material erupsi gunung berapi, sehingga tak heran jika penyebarannya terkonsentrasi di dataran tinggi mulai dari ketinggian 600 – 2.000 mdpl, namun ada pula tanah andosol pada dataran rendah di beberapa wilayah dengan ketinggian hingga 500 meter. Karena bersifat subur, tanah ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya pertanian, itulah kenapa mata pencaharian utama penduduk di daerah yang banyak terdapat andosol umumnya petani sayur, palawija ataupun produk hortikultura lainnya.

Tekstur tanah di Kabupaten Merangin terdiri dari tekstur tanah halus, tersebar di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Sungai Manau, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Kecamatan Pamenang. Untuk tekstur sedang terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Merangin. Sedangkan tanah gambut hanya terdapat di Kecamatan Tabir, Pamenang, dan Tabir Ulu. Kedalaman efektif tanah akan membatasi perkembangan dan kebebasan perakaran tanaman dan menentukan pertumbuhan serta produktifitas tanaman. Kedalaman efektifitas tanah dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, dan 90 cm. Kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya dapat digunakan untuk rumput-rumputan atau tidak diusahakan. Sedangkan pada kedalaman efektif 30 - 60 cm, terbatas hanya untuk tanaman semusim yang berakar pendek (palawija dan padi-padian) untuk tanaman keras tidak cocok karena akan menyebabkan pertumbuhan yang kerdil penetrasi akar akan terhalang. Tanah gambut tahap kedalaman efektif hanya dibedakan tebalan gambutnya. Di Kabupaten Merangin sebagian besar kedalaman efektif tanahnya lebih dari 90 cm yang tersebar di setiap kecamatan.



Gambar II-3. Peta Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

2.1.1.5. Formasi Geologi

Satuan formasi geologi di Kabupaten Merangin terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jenis. Sebesar 23,04% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin atau seluas 176.934,52 ha terdiri dari Formasi Kasai (QTK). Formasi Kasai terdiri atas tufa batupung bersifat asam, batupasir tufaan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang tersilisifikasi biasa diketemukan. Berumur Plio-Plistosen dengan tebal maksimum 700 meter. Selain itu, beberapa formasi geologi seperti Batuan Gunungapi Rhio-Andesit (Qtv), Formasi Asai (Ja) dan Palau Sebesi (Qhv) juga merupakan formasi yang cukup mendominasi dengan persentase di atas 10% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin. Selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel II-5. Jenis Formasi Geologi di Kabupaten Merangin

No	Jenis Formasi Geologi	Kode Formasi	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Aluvium	Qa	7.335,19	0,96%
2	Andesit dan Basal	pTab	378,04	0,05%
3	Anggota batugamping meta formasi Ngaol	PCnl	491,80	0,06%
4	Batuan Gunung Api Asam Tak Terpisahkan	Qou	6.522,83	0,85%
5	Batuan Gunung Api Tak Terpisahkan	Qyu	3.833,74	0,50%
6	Batuan Gunungapi Muda	Qv	7.146,65	0,93%
7	Batuan Gunungapi Rhio-Andesit	Qtv	91.745,74	11,95%
8	Batuan Intrusi	Tm	5.195,48	0,68%
9	Diabas	pTdb	414,63	0,05%
10	Diorit	Jd	2.070,18	0,27%
11	Endapan Aluvium	Qh	6.477,53	0,84%
12	Endapan Aluvium dan Endapan Pantai	Qal	82,23	0,01%
13	Formasi Air Benakat dan Andesit	Tma	30.607,24	3,99%
14	Formasi Asai	Ja	88.356,87	11,51%
15	Formasi Bandan	Tb	736,09	0,10%
16	Formasi Kasai	QTK	176.934,52	23,04%
17	Formasi Mengkarang	Pm	14.452,90	1,88%
18	Formasi Mersip	KJpm	965,58	0,13%
19	Formasi Muaraenim	Tmpm	9.608,10	1,25%
20	Formasi Ngaol	PCn	4.658,50	0,61%
21	Formasi Palepat	Pp	39.175,52	5,10%
22	Formasi Peneta	KJp	33.770,94	4,40%
23	Formasi Tabir	Jt	6.264,22	0,82%
24	Formasi Talangakar	Tomt	1.877,72	0,24%
25	Granit	Jgr	24.281,87	3,16%
26	Granit	Tpgde	156,59	0,02%
27	Granit Arai	Kgr	37,06	0,00%
28	Granodiorit Langkup	Tpgdl	2.587,31	0,34%
29	Granodiorit Nagan	Tpegd	8.888,53	1,16%
30	Granodiorit Tantan	TRJgd	12.953,15	1,69%
31	Hulu Simpang	Tomh	30.380,65	3,96%
32	Palau Sebesi	Qhv	149.512,60	19,47%
	Jumlah		767.900,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2017; Olah data, 2018; dan berbagai sumber

2.1.1.6. Keadaan Iklim

Kabupaten Merangin memiliki iklim tropis sebagaimana kondisi umum di Indonesia. Musim hujan di Kabupaten Merangin berada di kisaran bulan September sampai Juni tahun berikutnya, sedangkan musim kemarau berkisar antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Pada bagian timur dan utara Kabupaten Merangin adalah dataran rendah dengan temperatur 30°C. Kemudian pada bagian barat Kabupaten Merangin adalah deretan pegunungan bukit barisan yang temperaturnya maksimum mencapai 28°C. Menurut tipenya, iklim Kabupaten Merangin adalah tipe A (Smitch Ferguson) dengan cerah hujan



pada wilayah dataran rendah berkisar antara 2.200 mm sampai dengan 3.200 mm. Pada daerah perbukitan, curah hujan berkisar antara 1.600 mm sampai dengan 3.600 mm per tahun.

Dari hasil pantauan data curah hujan yang diterima dari pos hujan kerja sama yang ada di Provinsi Jambi dan kondisi dinamika atmosfer yang mempengaruhi iklim di Pulau Sumatera dan Provinsi Jambi khususnya. Selain itu juga memuat Analisis Tingkat Kekeringan Tiga Bulanan (Juni – Agustus 2021), serta Prakiraan Tingkat Kekeringan Tiga Bulanan (Agustus – Oktober 2021) yang memberikan gambaran mengenai tingkat kekeringan berdasarkan nilai curah hujan tiga bulanan dengan menggunakan metode *Standardized Precipitation Index* (SPI). selengkapnya disajikan prakiraan sifat dan curah hujan daerah perkiraan masing-masing kecamatan pada bulan oktober tahun 2021 pada tabel berikut.

Tabel II-6. Prakiraan Sifat dan Curah Hujan Bulan Oktober 2021

Daerah Prakiraan	Curah Hujan (mm)	Normal (mm)	Sifat Hujan
Tabir Selatan/II	259	175-237	AN
Tabir	287	200-270	AN
Pamenang Selatan	267	96-130	AN
Pamenang II	262	270-366	BN
Muara Siau	283	218-294	N
Jangkat	290	145-197	AN
Sungai Manau	274	175-237	AN
Pamenang I	255	155-209	AN
Tabir Ulu	343	234-316	AN
Bangko	252	146-198	AN
Nalo Tantan	270	111-151	AN
Margo Tabir	274	114-154	AN
Tabir Ilir	264	104-140	AN
Lembah Masurai	272	156-210	AN
Sungai Tenang	283	207-279	AN
Pamenang Barat	257	104-140	AN
Renah Pamenang	261	102-138	AN
Tabir Dusun Baru	277	127-171	AN
Renah Pembarap	280	167-227	AN
Bangko Barat	266	129-175	AN
Pangkalan Jambu	277	179-242	AN
Tabir Barat	324	224-302	AN
Tabir Timur	264	134-182	AN

Sumber: Analisis BMKG Stasiun Klimatologi Muaro Jambi Tahun 2022



2.1.1.7. Daerah Aliran Sungai

Wilayah Kabupaten Merangin berada dalam pemangkuan BPDAS Ketahun yang terbagi ke dalam 6 wilayah Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Dikit, DAS Ipuh, DAS Bantal, DAS Seblat, DAS Majunto Selagan dan DAS Batanghari. Sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam pemangkuan BPDAS Ketahun dengan mayoritas wilayah berada dalam wilayah DAS Majunto Selagan dengan luas 238.594,07 ha atau sebesar 32,26% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-7. Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Nama DAS	Pemangku Wilayah DAS	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	DAS Dikit	BPDAS Ketahun	160.740,71	21,74
2	DAS Ipuh		116.962,85	15,82
3	DAS Bantal		62.467,94	8,45
4	DAS Seblat		160.734,42	21,74
5	DAS Manjuntio Selagan		238.594,07	32,26
Jumlah			739.500,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2017; Penyesuaian Data, 2020

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Merangin merupakan tutupan lahan yang didominasi oleh hutan dan kebun campuran, semak/alang-alang dan padang rumput. Sedangkan kawasan hutan terdiri dari hutan alam dan hutan lahan kering. Selain itu, terdapat kawasan budidaya lainnya yang terdiri dari rawa, perkebunan, pemukiman/pekarangan, kebun campuran, sawah, tegalan/ladang, semak/belukar, tanah terbuka, dan tambak/empang. Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut.



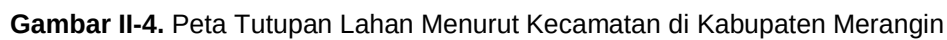
Berdasarkan data hasil pengolahan citra satelit dan sudah mendapatkan rekomendasi asisten peta dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), tutupan lahan di Kabupaten Merangin pada tahun 2019 terdiri dari 12 kelas tutupan lahan. Jenis tutupan lahan yang mendominasi adalah area penutupan lahan berupa hutan. Luas penutupan lahan berupa hutan masih mendominasi dengan persentase 54,0% atau seluas 407.419 ha dan perkebunan seluas 142,483 ha serta semak belukar seluas 131,018 ha.

Tabel II-8. Kelas Tutupan Lahan Beserta Luasan di Kabupaten Merangin Tahun 2019

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1	Danau	570	0.1%
2	Gumuk Pasir	103	0.0%
3	Hutan	407.419	54.0%
4	Perkebunan	142.483	18.9%
5	Permukiman	7.919	1.0%
6	Rawa	1.024	0.1%
7	Sawah	3.203	0.4%
8	Semak Belukar	131.018	17.4%
9	Sungai	3.837	0.5%
10	Tanah Kosong / Gundul	159	0.0%
11	Tegalan / Ladang	57.293	7.6%
12	Waduk	37	0.0%
Jumlah		755.065	100.0%

Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit, 2019

Seluruh wilayah kecamatan memiliki 3 jenis penutupan lahan yaitu berupa perkebunan, permukiman, dan tegalan/ladang. Namun terdapat beberapa jenis penutupan lahan hanya dapat ditemui di beberapa wilayah di kecamatan tertentu saja, karena tidak terdistribusi secara luas sebagai contoh penutupan lahan rawa dan sawah. Untuk area penutupan lahan berupa permukiman tersebar dominan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang, dan Kecamatan Tabir Selatan. Data distribusi penutupan lahan menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada peta dan tabel sebagai berikut.





Tabel II-9. Distribusi dan Luas Penutupan Lahan Tahun 2019 Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Kecamatan	Penutupan Lahan											Waduk
		Danau	Gumuk Pasir	Hutan	Perkebunan	Permukiman	Rawa	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tanah Kosong/Gundul	Tegalan/Ladang	
1	Bangko	1.0	4.4	198.3	9,387.3	1,175.2	0.6	-	4,778.5	219.1	9.1	842.9	-
2	Bangko Barat		0.2	2,307.3	6,180.2	251.9	-	-	8,490.6	106.0	-	1,871.8	-
3	Batang Masumai	0.1	-	662.0	1,648.3	146.1	-	-	3,450.9	128.1	-	4,129.3	-
4	Jangkat	369.8	1.5	80,691.9	5,720.0	156.6	-	567.6	3,408.0	201.1	-	3,785.9	0.5
5	Jangkat Timur	34.1	-	47,888.1	4,097.4	127.6	-	216.4	5,490.3	57.7	-	6,983.6	-
6	Lembah Masurai	10.5	-	36,521.1	1,928.2	215.0	-	-	5,100.7	270.3	-	23,266.9	0.1
7	Margo Tabir	18.8	-	-	2,463.7	354.3	87.8	4.7	9,063.2	0.4	-	99.2	-
8	Muara Siau	-	-	47,636.4	185.1	115.9	-	-	10,726.1	263.7	-	4,149.5	-
9	Nalo Tantan	1.2	-	3,173.9	4,226.0	273.1	-	-	11,437.8	56.8	142.8	130.2	0.5
10	Pamenang	11.3	5.1	0.2	26,379.4	901.4	7.2	-	4,833.7	384.6		461.7	3.5
11	Pamenang Barat	8.4	12.0	-	13,268.1	544.6	7.0	-	4,762.9	158.0	7.5	61.8	7.5
12	Pamenang Selatan	0.6	2.2	7,450.9	7,220.5	403.8	-	-	-	75.5	-	61.6	-
13	Pangkalan Jambu	0.2	58.1	39,300.1	35.3	83.0	-	438.0	24.5	178.2	-	233.9	0.2
14	Renah Pamenang	-	-	154.7	8,204.9	637.5	-	-	310.4		-	57.8	-
15	Renah Pembarap	1.8	-	6,348.1	2,614.0	156.0	-	21.1	9,599.4	186.4	-	7,202.6	0.2
16	Sungai Manau		0.2	22,723.0	556.9	166.9	-	719.1	2,948.7	161.4	-	700.9	0.9
17	Tabir	7.4	1.4	12,235.2	6,634.3	602.6	574.6	638.0	13,599.3	241.3	-	508.4	6.4
18	Tabir Barat		4.6	66,368.9	2,107.9	96.6	0.1	210.8	3,008.6	431.9	-	1,092.9	3.5
19	Tabir Ilir	0.3	-	-	9,597.4	203.3	248.6	7.2	7,975.4	138.3	-	155.2	3.4
20	Tabir Lintas	94.5	-	14.4	2,451.2	229.0	70.6	45.5	8,254.4	11.8	-	144.4	10.0
21	Tabir Selatan	4.4	-	0.9	15,481.1	686.8	-	-	2,961.3	2.4	-	31.3	-
22	Tabir Timur	5.3	-	139.8	8,483.3	201.8	22.3	28.3	212.4	200.2	-	79.4	-
23	Tabir Ulu	-	12.7	11,680.1	1,925.4	105.8	5.7	306.0	5,509.6	186.7	-	1,143.5	-
24	Tiang Pumpung	-	0.8	21,923.9	1,686.7	84.5	-	-	5,070.8	177.0	-	98.3	-
Jumlah		569.7	103.3	407,419.3	142,482.6	7,919.3	1,024.5	3,202.6	131,017.6	3,836.7	159.5	57,292.9	36.8

Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit, 2019 (Dokumen RTRW Kab. Merangin Tahun 2014-2034)



2.1.1.9. Ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Merangin, jenis ekoregion di Kabupaten Merangin terdiri dari 8 jenis saja. Jenis ekoregion berupa Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan Patahan (terban) merupakan yang paling luas yakni sebesar 32,92% atau seluas 252.809,16 ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali di Jangkat, Sungai Tenang, Masurai dan Pangkalan Jambu. Sedangkan ekoregion yang paling sempit adalah Perbukitan Patahan dengan persentase 0,50% atau seluas 3.858,93 ha. Data luasan ekoregion di Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-10. Jenis Ekoregion Beserta Luasan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Jenis Ekoregion	Luas (ha)	(%)
1	Kaki Gunungapi	118.328,01	15,41
2	Kerucut dan Lereng Gunungapi	34.666,11	4,51
3	Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (<i>Terban</i>)	252.809,16	32,92
4	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (<i>Intermountain Basin</i>)	26.761,13	3,48
5	Pegunungan Lipatan	163.575,35	21,30
6	Pegunungan Patahan	103.887,90	13,53
7	Perbukitan Lipatan	64.013,41	8,34
8	Perbukitan Patahan	3.858,93	0,50
Jumlah		767.900,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2018

Karakteristik wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin sangat bervariasi. Wilayah Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang, Bangko dan Bangko Barat hanya memiliki satu jenis ekoregion, yaitu Lembah antar Perbukitan/Pegunungan Patahan (Terban). Sedangkan wilayah Kecamatan Muara Siau hampir memiliki jenis ekoregion yang ada di Kabupaten Merangin kecuali Kerucut dan Lereng Gunung Api. Data distribusi dan luas ekoregion menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-11. Distribusi dan Luas Ekoregion Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

No	Kecamatan	Jenis Ekoregion							
		Kaki Gunungapi	Kerucut dan Lereng Gunungapi	Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (Terban)	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	Pegunungan Lipatan	Pegunungan Patahan	Perbukitan Lipatan	Perbukitan Patahan
1	Jangkat	9.820,34	8.707,52	-	576,29	-	56.194,50	19.600,93	1.131,05
2	Sungai Tenang	17.320,04	11.666,42	-	476,24	4.955,54	24.890,72	6.617,81	-
3	Muara Siau	36.694,38	-	102,51	7.454,27	15.703,69	69,37	3.009,17	595,37
4	Lembah Masurai	46.640,94	14.292,17	-	4.482,26	1.831,23	-	35,43	-
5	Tiang Pumpung	-	-	9.722,73	1.262,11	-	14.776,40	2.235,05	-
6	Pamenang	-	-	33.378,75	-	-	-	-	-
7	Pamenang Barat	-	-	19.052,34	-	-	-	-	-
8	Renah Pamenang	-	-	10.227,25	-	-	-	-	-
9	Pamenang Selatan	-	-	13.619,89	-	2.942,88	-	1.397,88	-
10	Bangko	-	-	16.984,61	-	-	-	-	-
11	Bangko Barat	-	-	19.400,80	-	-	-	-	-
12	Nalo Tantan	-	-	13.509,69	-	2.164,04	-	3.960,43	-
13	Batang Mesumai	-	-	8.270,80	-	341,83	-	1.743,53	-
14	Sungai Manau	-	-	709,58	-	24.909,18	-	1.746,83	916,55
15	Renah Pembarap	-	-	6.732,74	-	11.965,89	-	7.450,98	280,25
16	Pangkalan Jambu	7.852,30	-	-	989,48	31.719,53	-	425,47	935,70
17	Tabir	-	-	27.011,68	3.636,55	-	249,17	5.737,48	-
18	Tabir Ulu	-	-	7.907,60	2.755,39	-	3.473,39	7.007,27	-
19	Tabir Selatan	-	-	16.543,51	1.438,21	-	-	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



No	Kecamatan	Jenis Ekoregion							
		Kaki Gunungapi	Kerucut dan Lereng Gunungapi	Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (Terban)	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	Pegunungan Lipatan	Pegunungan Patahan	Perbukitan Lipatan	Perbukitan Patahan
20	Tabir Ilir	-	-	16.966,77	1.315,65	-	-	345,69	-
21	Tabir Timur	-	-	8.250,72	2.109,40	-	-	-	-
22	Tabir Lintas	-	-	11.227,17	207,43	-	-	-	-
23	Margo Tabir	-	-	12.240,41	46,99	-	-	-	-
24	Tabir Barat	-	-	949,62	10,86	67.041,55	4.234,34	2.699,44	-
	Jumlah	118.328,01	34.666,11	252.809,16	26.761,13	163.575,35	103.887,90	64.013,41	3.858,93

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2018; Olah Data, 2020



2.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Kawasan Budidaya Perikanan

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Merangin terdapat di seluruh kecamatan untuk jenis perairan umum dan kolam. Kecamatan yang memiliki luas kolam terluas berada di Kecamatan Pamenang Barat dengan luas 36,28 ha, sementara untuk wilayah paling sedikit budidaya perikanan kolamnya berada di Kecamatan Tiang Pumpung dengan luas 3,57 ha.

Sementara untuk sistem budidaya keramba jaring apung (KJA) hanya terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pamenang, Kecamatan Pangkalan Jambu, dan Kecamatan Tabir dengan total 2,8 unit. Sedangkan untuk luas area budidaya mina padi di Kabupaten Merangin pada tahun 2019 berada di tiga kecamatan saja, yakni di Kecamatan Bangko, Kecamatan Tabir Timur, dan Kecamatan Tabir Lintas dengan total luasan sebesar 383 ha. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-12. Luas Area Budidaya Perairan Umum, Kolam, Keramba Jaring Apung (KJA) dan Mina Padi di Kabupaten Merangin, 2019

No	Kecamatan	Perairan Umum (ha)	Kolam (ha)	Mina Padi (ha)	Keramba Jaring Apung (unit)
1	Jangkat	-	19,50	-	-
2	Jangkat Timur	-	7,88	-	-
3	Muara Siau	-	6,56	-	-
4	Lembah Masurai	-	13,40	-	-
5	Tiang Pumpung	-	3,57	-	-
6	Pamenang	-	22,20	-	0,2
7	Pamenang Barat	-	36,28	-	-
8	Renah Pamenang	-	22,45	-	-
9	Pamenang Selatan	-	20,25	-	-
10	Bangko	-	17,82	85	-
11	Bangko Barat	-	6,29	-	-
12	Nalo Tantan	-	4,78	-	-
13	Batang Masumai	-	13,02	-	-
14	Sungai Manau	-	23,76	-	-
15	Renah Pembarap	-	9,28	-	-



No	Kecamatan	Perairan Umum (ha)	Kolam (ha)	Mina Padi (ha)	Keramba Jaring Apung (unit)
16	Pangkalan Jambu	-	14,49	-	0,5
17	Tabir	-	16,98	-	2,1
18	Tabir Ulu	-	6,10	-	-
19	Tabir Selatan	-	18,96	-	-
20	Tabir Ilir	-	8,54	-	-
21	Tabir Timur	-	8,14	16	-
22	Tabir Lintas	-	13,76	282	-
23	Margo Tabir	-	12,65	-	-
24	Tabir Barat	-	4,32	-	-
Merangin		-	330,98	383	2,8

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2020

B. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Merangin yang dihitung dalam pembangunan daerah terdiri dari luas panen untuk komoditi pertanian yang ditanam secara umum di wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin. Komoditi tersebut dikelompokkan menjadi tanaman pangan padi, tanaman pangan non-padi dan tanaman sayuran semusim serta luas areal untuk komoditi perkebunan.

Tanaman pangan padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang; tanaman pangan non-padi yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; dan tanaman sayuran semusim yang terdiri dari kentang, ketimun, terung dan kacang panjang. Berdasarkan luas panen komoditi tersebut, luas kawasan untuk pertanian padi, non-padi dan sayuran semusim pada tahun 2017 di Kabupaten Merangin adalah seluas 38.391 ha. Kawasan terluas terletak di Kecamatan Tabir dengan luas panen 4.785 ha atau sebesar 12,46%. Sedangkan luas terkecil terletak di Kecamatan Bangko dengan luas hanya 332 ha atau sebesar 0,86%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-13. Luas Kawasan Pertanian untuk Kelompok Komoditi Padi, Non-Padi, dan Sayuran Semusim Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Kawasan Pertanian (ha)			Total (ha)	Persentase (%)
		Padi	Tanaman Pangan Non-Padi	Sayuran Semusim		
1	Jangkat	2.834	362	265	3.461	9,02
2	Jangkat Timur	3.766	188	45	3.999	10,42
3	Muara Siau	1.482	51	9	1.542	4,02
4	Lembah Masurai	799	73	48	920	2,40
5	Tiang Pumpung	619	28	3	650	1,69
6	Pamenang	2.484	393	95	2.972	7,74
7	Pamenang Barat	1.365	340	133	1.838	4,79
8	Renah Pamenang	585	307	55	947	2,47
9	Pamenang Selatan	840	327	18	1.185	3,09
10	Bangko	114	120	98	332	0,86
11	Bangko Barat	228	104	111	443	1,15
12	Nalo Tantan	457	85	14	556	1,45
13	Batang Masumai	330	60	11	401	1,04
14	Sungai Manau	1.492	22	13	1.527	3,98
15	Renah Pembarap	611	221	35	867	2,26
16	Pangkalan Jambu	478	8	7	493	1,28
17	Tabir	4.363	355	67	4.785	12,46
18	Tabir Ulu	2.359	50	20	2.429	6,33
19	Tabir Selatan	555	268	120	943	2,46
20	Tabir Ilir	1.003	109	66	1.178	3,07
21	Tabir Timur	833	252	105	1.190	3,10
22	Tabir Lintas	812	383	100	1.295	3,37
23	Margo Tabir	2.252	434	124	2.810	7,32
24	Tabir Barat	1.445	126	57	1.628	4,24
	Merangin	32.106	4.666	1.619	38.391	100,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, 2018; Olah Data, 2018

Komoditi perkebunan yang diusahakan oleh rakyat di Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sendiri untuk luasan area pertanian untuk komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Merangin mencapai 215.414 ha dengan total produksi mencapai 277.325 ton. Untuk tahun 2019 luas area kawasan pertanian untuk komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Merangin meningkat menjadi 216.883 ha



dengan total produksi mencapai 285.917 ton. Adapun selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-14. Luas Kawasan Pertanian untuk Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2019

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)		Jumlah Petani (KK)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karet	139.224	139.010	74.441	73.038	941	941	54.742	54.608
2	Kelapa Sawit	57.258	59.034	190.577	199.668	4.253	4.254	36.646	36.666
3	Kelapa Dalam	1.485	1.395	768	764	708	706	10.267	10.071
4	Kelapa Hibrida	128	123	41	39	345	336	516	494
5	Cassia vera	4.190	4.165	2.926	2.944	1.654	1.654	2.651	2.594
6	Kopi Robusta	11.066	11.145	8.240	9.137	1.223	1.317	9.302	9.315
7	Kopi Arabika	88	88	4	4	1.000	1.000	34	34
8	Kemiri	22	18	9	9	692	692	187	167
9	Pinang	291	289	44	47	291	294	2.008	1.994
11	Kakao	251	249	54	53	659	654	2.180	2.170
12	Aren	21	24	12	12	706	706	207	213
13	Nilam	1.355	1.312	185	183	200	200	3.016	2.930
14	Kapuk	6	4	6	4	1.000	1.000	111	91
15	Tembakau	29	27	18	15	720	714	17	16
Jumlah		215.414	216.883	277.325	285.917	14.392	14.468	121.884	121.363

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2020

C. Kawasan Pariwisata

Potensi Pariwisata Kabupaten Merangin dianugerahi berbagai objek dan daya tarik wisata yang alami serta didukung oleh budaya dan kesenian daerah yang beragam dan memiliki kekhususan/ kekhasan. Adapun potensi wisata unggulan baik yang telah dikembangkan maupun yang belum/sedang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel II-15. Daftar Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Merangin

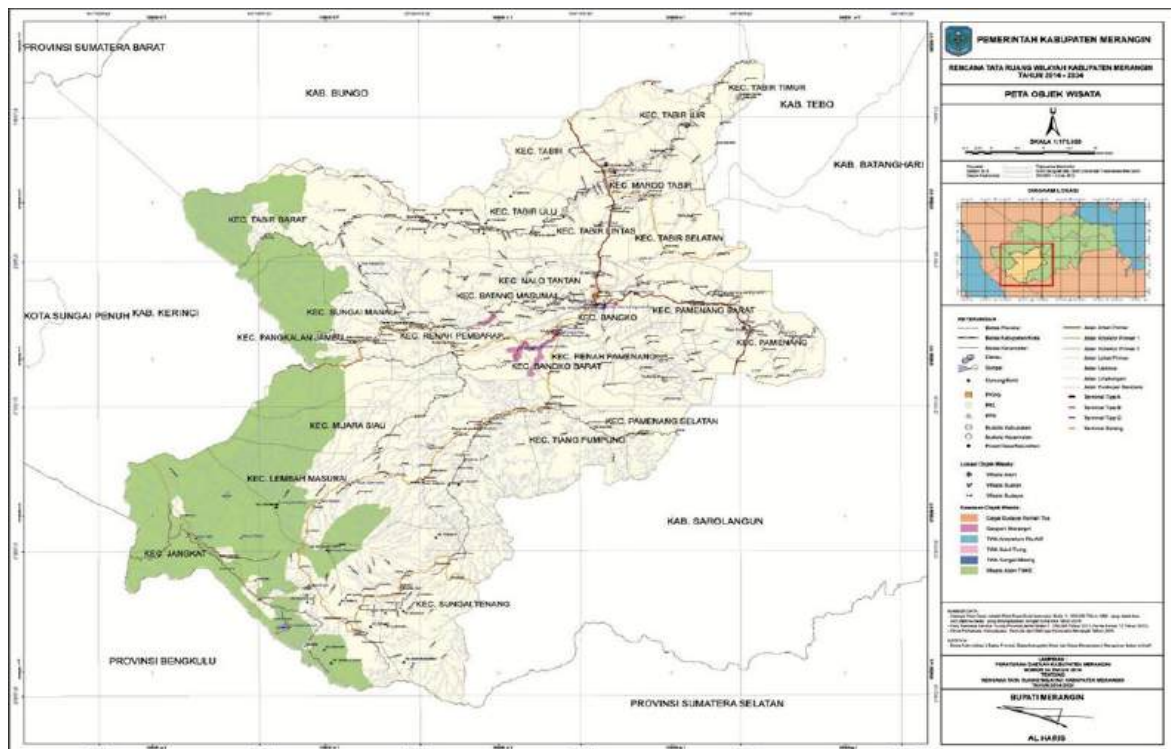
NO	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1	2	3
1.	Taman Wisata Arboretum Rio Alif	Desa Langling Kecamatan Bangko
2.	Dam Betuk	Kecamatan Tabir Lintas
3.	Jam Gento	Kota Bangko Kec. Bangko
4.	Goa Sengayau	Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Manau
5.	Teluk Wang Sakti	Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat
6.	Taman Rekreasi Bukit Tiung	Kota Bangko Kecamatan Bangko
7.	Wisata Sejarah Perkampungan Rumah Tuo	Desa Baruh Kecamatan Tabir
8.	Wisata alam Danau Pauh	Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
9.	Wisata Alam Danau Depati empat	Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat
10.	Wisata Alam Gunung Masurai	Kecamatan Lembah Masurai
11.	Wisata Alam Air Panas / Grow	Desa Renah Kemumu Kec. Jangkat
12.	Wisata Budaya Perkampungan Rumah Tuo	Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir
13.	Benda Cagar Budaya Batu Bertulis Karang Birahi	Desa Karang Birahi Kec. Pamenang Barat
14.	Benda Cagar Budaya Batu larung atau batu persembahan dusun tuo	Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai
15.	Benda Cagar Budaya Batu larung Nilo dingin	Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai
16.	Benda Cagar Budaya Batu larung Desa Gedang	Desa Gedang Kecamatan Sungai Tenang
17.	Benda Cagar Budaya Batu larung Lubuk Mentilin	Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang
18.	Wisata Alam Air Terjun Segirincing dan Air Terjun Tepian Dukun Bertuah	Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Sungai Tenang
19.	Agro Wisata	Kecamatan Sungai Manau
20.	Wisata Alam Telun Air Batu	Desa Bukit Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu
21.	Wisata Keunikan Geologi (Geopark)	Kawasan Batang Sungai Merangin antara Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap, Desa Biuku Tanjung (Teluk Wang Sakti) Sampai dengan Ujung Tanjung Kecamatan Bangko
22.	Taman Wisata Bunga Hesti Garden	Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
23.	Taman Wisata Bunga Merangin Garden	Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
24.	Wisata Alam Sungai Mangkaring	Kecamatan Renah Pembarap
25.	Wisata Alam Air Terjun 7 Bertingkat Bukit Batu	Air terjun ini merupakan salah satu air terjun terunik. Air terjun ini memiliki rangkaian batu yang membuatnya terlihat seperti bertingkat 7. Dengan ketinggian 40 meter, air terjun ini memiliki arus air yang tidak terlalu deras. Selain itu, air terjun ini memiliki permukaan deras air yang landai, sehingga Anda bisa melakukan seluncur mengikuti arus air, Lokasi Jalan Raya Bangko-Kerinci, Bukit Batu, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin
26.	Wisata Taman Batu	Jalan Lintas Sumatera Dusun Mudo Desa Langling Kecamatan Bangko (bersebelahan dengan Taman Wisata Arboretum Rio Alif)
27.	Objek Wisata Telaga Biru dan Air Terjun Lima Belas Tingkat	Kecamatan Jangkat Timur
28.	Wisata Buatan Taman Lubuk Pelayang	Perbatasan Desa Salam Buku dan Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai
29.	Objek Wisata Talang Tirta Asri	Desa Talang Sagegah Kecamatan Renah Pembarap
30.	Wisata Buatan Taman Tanjung Menanti	Lorong Tanjung Menanti Waskita Karya Pasar Atas Bangko

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



31.	Wisata Buatan Taman Bukit Impian	Jalan ring road jalur 2 SMA 6, Sungai Ulak, Bangko, Kabupaten Merangin
32.	Wisata Pemandian Wadas Genjleng	Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin
33.	Wisata Embung Pinang Merah	Desa Pinang Merah (Trans Pamenang B1), Kecamatan Pamenang Barat
34.	Wisata Buatan Trans Garden C2	jalang Talang Kawo - Trans C2 Kabupaten Merangin
35.	Wisata Sikumbang Waterpark	Jl. Kebun Kelapa, Pasar Bangko, Bangko, Kabupaten Merangin
36.	Tugu Pedang	Sebuah monumen senjata tradisional nenek moyang masyarakat Merangin pada zaman dahulu. Senjata pedang tegak terhunus ini juga menjadi bagian dari lambang daerah Merangin. Tugu ini terletak di kelurahan Dusun Bangko, Merangin, di pinggir Jalan lintas sumatera atau didepan rumah dinas Bupati Merangin.

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Merangin Tahun 2023



Gambar II-5. Peta Sebaran Objek Wisata Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

D. Kawasan Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Merangin terdiri atas WUP Mineral Logam yang termasuk di dalamnya bijih besi dan emas, WUP Batubara, WUP Minyak Bumi dan WUP Panas Bumi.

WUP Minyak Bumi hanya terdapat di Kecamatan Pamenang, sementara WUP Panas Bumi hanya terdapat di Kecamatan Jangkat, Lembah Masurai dan



sedikit di wilayah Kecamatan Sungai Tenang. Wilayah Kabupaten Merangin bagian tengah merupakan kawasan pertambangan batu bara memanjang dari timur ke arah barat mulai dari Kecamatan Pamenang sampai ke bagian timur wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu.

2.1.1.11. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Merangin memiliki beberapa kawasan memiliki potensi rawan bencana yang terdiri dari rawan bencana gempa, longsor dan banjir. Definisi bencana menurut International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR-2002) adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumbernya. Kerugian suatu bencana itu sendiri meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, lingkungan, dan utilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

A. Wilayah Rawan Banjir

Potensi yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Merangin adalah banjir. Banjir mengandung pengertian aliran air yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Adapun rawan bencana banjir terdapat di sepanjang bantaran sungai dan wilayah dataran rendah terutama di Kecamatan Tabir, Tabir Ilir, Nalo Tantan dan Pamenang dan sekitarnya. Berikut adalah data wilayah rawan banjir di Kabupaten Merangin.



Tabel II-16. Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan dan Desa

No	Kecamatan	Desa Rawan Banjir
1	Tabir Barat	Desa Ngaol; Ngaol Ilir; Telentam; Muara Kibul; dan Tanjung Putus
2	Tabir Ulu	Desa Muara Jernih; Kapuk; Muara Seketuk; Pulau Terbakar; dan Rantau Ngarau
3	Tabir Ilir	Desa Ulak Makam dan Rantau Limau Manis
4	Tabir Timur	Desa Sungai Limau; Sungai Bulian; Sri Sembilan; dan Bukit Subur
5	Margo Tabir	Desa Lubuk Bumbun
6	Tabir	Kelurahan Dusun Baru; Desa Koto Rayo; Lubuk Napal; Tanjung Ilir; Kelurahan Mampun; Kelurahan Kampung Baru dan Buluran Panjang
7	Pangkalan Jambu	Desa Birun; Baru Pangkalan Jambu; Bukit Perentak; Tiga Alur; Bungo Tanjung; Sungai Jering; Kampung Limo; dan Tanjung Mudo
8	Sungai Manau	Desa Tiangko; Palipan; Seringat; Sungai Nilau; dan Sungai Manau
9	Bangko Barat	Desa Sungai Putih
10	Batang Masumai	Desa Rantau Alai dan Kederasan Panjang
11	Jangkat	Desa Tanjung Kasri; Lubuk Mentilin; Rantau Kermas; Pulau Tengah; Lubuk Pungguk; dan Muara Madras
12	Lembah Masurai	Desa Rantau Jering dan Muaro Pangi
13	Muara Siau	Desa Lubuk Beringin; Air Lago; Rantau Bedaro dan Rantau Bayur
14	Pamenang	Desa Tanjung Padang; Empang Benao; Keroya dan Muaro Belengo
15	Nalo Tantan	Desa Sungai Ulak dan Telun

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Merangin Tahun 2018

Pada tahun 2019 telah tercatat ada 350 kali total kejadian bencana di Kabupaten Merangin. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir 24 kali, bencana tanah longsor terjadi 20 kali, bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 1 kali, dan hotspot area yang berada di 305 titik. Adapun selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel II-17. Rekapitulasi Laporan Bencana di Kab. Merangin Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Bencana				Total Kejadian
		Hotspot	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung	
1	Bangko	6 titik	1 kali	4 kali	-	11 kali
2	Tabir	12 titik	1 kali	-	-	13 kali
3	Sungai Manau	13 titik	1 kali	1 kali	-	15 kali
4	Pamenang	9 titik	2 kali	-	-	11 kali
5	Muara Siau	37 titik	-	-	-	37 kali
6	Jangkat	26 titik	3 kali	3 kali	-	32 kali
7	Tabir Ulu	4 titik	2 kali	-	-	6 kali
8	Tabir Selatan	2 titik	1 kali	-	1 kali	4 kali
9	Lembah Masurai	37 titik	-	3 kali	-	40 kali
10	Bangko Barat	9 titik	-	-	-	9 kali
11	Batang Masumai	5 titik	-	2 kali	-	7 kali
12	Nalo Tantan	13 titik	2 kali	1 kali	-	16 kali
13	Tabir Ilir	7 titik	2 kali	-	-	9 kali
14	Tabir Timur	-	1 kali	-	-	1 kali
15	Renah Pembarap	16 titik	-	-	-	16 kali
16	Pangkalan Jambu	17 titik	1 kali	2 kali	-	20 kali
17	Jangkat Timur	32 titik	-	2 kali	-	34 kali
18	Pamenang Barat	3 titik	-	-	-	3 kali
19	Renah Pamenang	-	1 kali	-	-	1 kali
20	Tabir Lintas	-	-	-	-	-
21	Tabir Barat	37 titik	2 kali	2 kali	-	41 kali
22	Pamenang Selatan	1 titik	1 kali	-	-	2 kali
23	Margo Tabir	8 titik	3 kali	-	-	11 kali
24	Tiang Pumpung	11 titik	-	-	-	11 kali
Jumlah/Bulan		305 titik	24 kali	20 kali	1 kali	350 kali

Sumber: BPBD Kabupaten Merangin Tahun 2020

B. Wilayah Rawan Longsor

Potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Merangin terdapat di wilayah dengan kelerengan tinggi dan wilayah yang sudah mengalami degradasi dan deforestasi lahan. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten merangin tahun 2018, bencana tanah longsor rawan terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Merangin seperti di Kecamatan Tabir Barat, Tabir Timur, Tabir, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Bangko Barat, Batang Masumai, Jangkat, Lembah Masurai, dan Muara Siau. Adapun selengkapnya



data wilayah rawan longsor di Kabupaten Merangin disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II-18. Sebaran Wilayah Rawan Longsor di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Desa Rawan Longsor
1	Tabir Barat	Desa Ngaol; Ngaol Ilir; Telentam; Sungai Tabir dan Tanjung Putus
2	Tabir Timur	Desa Bukit Subur
3	Tabir	Desa Kandang
4	Pangkalan Jambu	Desa Birun; Tiga Alur dan Tanjung Mudo
5	Sungai Manau	Desa Sungai Pinang; Tiangko; Pelipan; Seringat dan Sungai Nilau
6	Bangko Barat	Desa Sungai Putih
7	Batang Masumai	Desa Rantau Alai
8	Jangkat	Desa Tanjung Kasri; Lubuk Mentilin; Rantau Kermas; Pulau Tengah dan Lubuk Pungguk
9	Lembah Masurai	Desa Rantau Jering dan Muaro Pangi
10	Muara Siau	Desa Lubuk Beringin; Air Lago; Rantau Bedaro dan Dusun Tuo Siau

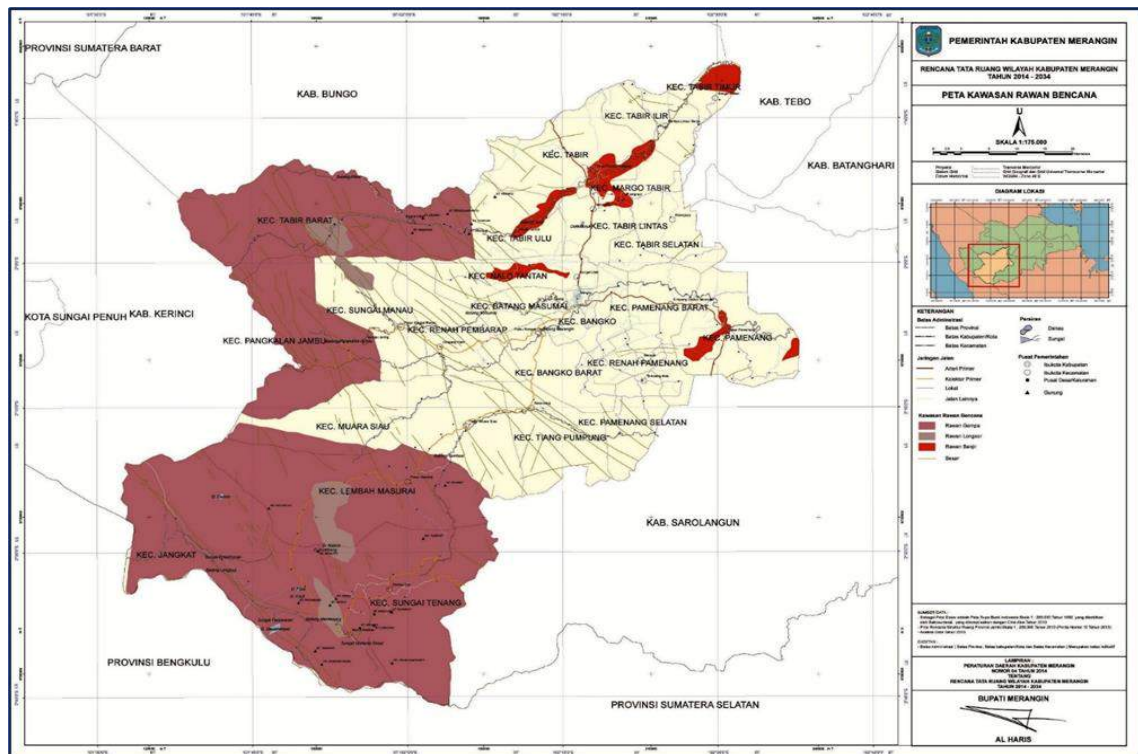
Sumber: BPBD Kabupaten Merangin Tahun 2018

C. Wilayah Rawan Gempa Bumi

Lokasi rawan gempa dan longsor terutama di sekitar jalur sesar dan lahan dengan kemiringan >40%, terutama di sekitar kawasan pegunungan Taman Nasional Kerinci Seblat yang termasuk dalam jalur sesar gempa. Pada wilayah sekitar Kecamatan Lembah Masurai Jangkat dan Sungai Tenang sebelumnya pernah terjadi gempa bumi.

Potensi gempa di wilayah Merangin pada wilayah dimana titik sesar gempa berada terutama disekitar Kecamatan Tabir Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Renah Pembarap, Muara Siau, Tiang Punggung, Lembah Masurai, Jangkat dan Sungai Tenang dan disekitar punggung bukit dan tebing.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Gambar II- 6. Peta Kawasan Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

2.1.1.12. Kawasan Hutan Negara, Hutan Desa, dan Hutan Adat

A. Kawasan Hutan Negara

Sebesar 54,73% wilayah Kabupaten Merangin berstatus Areal Penggunaan Lain, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan yang terbagi menjadi 4 fungsi kawasan yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. Luas berserta persentase kawasan hutan di Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-19. Luas dan Persentase Kawasan Hutan di Kabupaten Merangin

No	Fungsi Kawasan	Kode	Luas Area (ha)	Persentase (%)
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	TNKS	158.239	20,61
2	Hutan Lindung	HL	38.675	5,04
3	Hutan Produksi Terbatas	HPT	37.121	4,83
4	Hutan Produksi Tetap	HP	113.567	14,79
5	Areal Penggunaan Lain	APL	420.288	54,73

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka 2017



Posisi Taman Nasional di wilayah Kabupaten Merangin terletak di sebelah barat, membujur mulai dari Kecamatan Tabir Barat, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Lembah Masurai, sedikit wilayah Kecamatan Sungai Tenang, yang mana terdapat Danau Mabuk, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Jangkat sebelah barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi, Kawasan Hutan Lindung di wilayah Kabupaten Merangin terbagi di tiga kawasan, yaitu

- 1) Hutan Lindung Gunung Tungkak seluas 2.469,69 ha yang terletak di Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Sungai Tenang;
- 2) Hutan Lindung Bukit Hulu Landai-Bukit Pale seluas 23.204,98 ha yang terletak di Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sei Tenang dan Kecamatan Muara Siau; serta
- 3) Hutan Lindung Bukit Mancung-Gamut seluas 10.217,85 ha yang terletak di Kecamatan Sungai Tenang dan Kecamatan Jangkat yang dialiri Sungai Maderas Besar.

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terbagi di lima kawasan yaitu Hutan Produksi Batang Ule, Hutan Produksi Batang Asai, Hutan Produksi Batang Nilo-Nilo Dingin, Hutan Produksi Sungai Manau dan Hutan Produksi Sungai Aur.

Sementara kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) terbagi menjadi tiga kawasan yaitu Hutan Produksi Terbatas Bukit Lubuk Pekak, Hutan Produksi Terbatas Gunung Tungkak dan Hutan Produksi Terbatas Gunung Sedingin. Data mengenai luasan kawasan hutan beserta lokasinya disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-20. Sebaran Lokasi Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Merangin

No	Fungsi	Nama Kawasan	Luas Nama Kawasan (ha)	Luas Kawasan (ha)	Lokasi Kecamatan
1	Hutan Lindung (HL)	HL Gunung Tungkat	2.469,69		Lembah. Masurai, Sungai Tenang
2		HL Bukit Hulu Landai - Bukit Pale	23.204,98		Tiang Pumpung, Lembah. Masurai. Sungai Tenang, Muara.Siau
3		HL Bukit Mancung - Gamut	10.217,85		SungaiTenang, Jangkat
Jumlah Kawasan Hutan Lindung (HL)				35.892,52	
4	Hutan Produksi (HP)	HP Batang Ule	10.426,06		Tabir Barat
5		HP Batang Asai	9.325,53		Pamenang Selatan, Tiang Pumpung
6		HP Batang Nilo-Nilo Dingin	6.322,63		Lembah Masurai, Jangkat
7		HP Batang Nilo - Nilo Dingin	33.661,18		Muara Siau, Renah Pembarap, Sei. Manau, Pangkalan Jambu, Lembah Masurai
8		HP Sungai Manau	35.455,11		Sungai Manau, Tabir Ulu, Tabir Barat, Pangkalan Jambu, Nalo Tantan, Renah Pembarap
9		HP Sungai Aur	15.520,45		Tabir, Tabir Ulu, Tabir Barat
Jumlah Kawasan Hutan Produksi (HP)				110.710,96	
10	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	HPT Bukit Lubuk Pekak	25.027,06		Lembah Masurai, Sungai Tenang
11		HPT Gunung Tungkat	271,14		Sungai Tenang
12		HPT Gunung Sedingin	8.408,04		Sungai Tenang, Lembah Masurai, Jangkat
Jumlah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)				33.706,24	
13	Taman Nasional	TN Kerinci Seblat	166.297,34		Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Pangkalan Jambu, Tabir Barat
Jumlah Kawasan Taman Nasional (TN)				166.297,34	
Luas Total			346.607,06	346.607,06	

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, 2016

B. Hutan Desa

Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin khususnya untuk Hutan Desa telah diwujudkan dengan keberadaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sejak tahun 2011 yang memberikan izin kepada sebanyak 17 Desa di 5 wilayah kecamatan seluas 44.128 ha. Luas wilayah Hutan Desa yang paling luas terletak di Desa Muara Madras Kecamatan Jangka seluas 5.330 ha berdasarkan SK Menteri No SK.440/Menhut-II/2011 tanggal 01 Agustus 2011. Sebaran Hutan Desa di Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-21. SK Menteri Beserta Luas Hutan Desa di Wilayah Kabupaten Merangin

No	Desa	Kecamatan	No. SK	Tanggal	Luas (ha)
1	Talang Tembago	Sungai Tenang	SK.126/Menhut-II/2011	21-03-2011	2.707
2	Pematang Pauh		SK.440/Menhut-II/2011	01-08-2011	2.957
3	Koto Baru		SK.443/Menhut-II/2011		762
4	Gedang		SK.442/Menhut-II/2011		1.766
5	Jangkat		SK.125/Menhut-II/2011	21-03-2011	4.467
6	Beringin Tinggi		SK.445/Menhut-II/2011		2.038
7	Tanjung Mudo	Jangkat	SK.444/Menhut-II/2011	01-08-2011	1.058
8	Tanjung Alam		SK.42/Menhut-II/2011	17-02-2011	912
9	Tanjung Benuang		SK.442/Menhut-II/2011	01-08-2011	1.254
10	Muara Madras		SK.440/Menhut-II/2011		5.330
11	Tanjung Dalam	Lembah Masurai	SK.437/Menhut-II/2011		2.160
12	Dusun Tuo		SK.438/Menhut-II/2011		2.235
13	Koto Rami		SK.436/Menhut-II/2011	01-08-2011	1.855
14	Lubuk Beringin	Muara Siau	SK.436/Menhut-II/2011	21-03-2011	2.717
15	Lubuk Birah		SK.359/Menhut-II/2011	07-07-2011	4.638
16	Durian Rambun		SK.361/Menhut-II/2011		4.484
17	Birun	Pangkalan Jambu	SK.127/Menhut-II/2011	21-03-2011	2.788
	Jumlah				44.128

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2017

Hasil hutan mengalami penurunan dari tahun ke tahun di Kabupaten Merangin. Data hasil hutan berupa kayu bulat atau log terakhir tercatat pada tahun 2014 sebesar 5.877,21 m³ dan kayu olahan sebanyak 1.918,36 m³. Data produksi hasil hutan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-22. Produksi Hasil Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2006-2014

No	Tahun	Kayu Bulat (m ³)	Kayu Olahan (m ³)	Rotan (ton)	Damar (ton)	Veneer (m ³)
1	2006	31.085,63	21 654,08	19.524	20	0
2	2007	24.716,27	1 973,12	9.500	0	13.414,64
3	2008	10.385,97	1.190,08	20.000	0	4.946,11
4	2009	8.675,25	6.072,68	0	0	845,75
5	2010	10.972,40	786,88	0	0	1.358,33
6	2011	44.020,47	10.455,99	1.000	0	4.097,43
7	2012	1.017.568,30	7.716,00	0	0	0
8	2013	3.030,99	3.913,02	6.000	0	923,63
9	2014	5.877,21	1.918,36	0	0	0

Sumber: BPS, Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2014



C. Hutan Tanaman Rakyat

Sedangkan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Merangin telah melalui proses usulan dan verifikasi untuk 7 (tujuh) lokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatan yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-23. Sebaran Lokasi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Merangin

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Baru Kibul	Tabir Barat	-
2	Muara Kibul		-
3	Batang Kibul		-
4	Nalo Gedang	Nalo Tantan	-
5	Baru Nalo		-
6			Dusun Petekun
7	Hutan Produksi Batang Nilo-Nilo Dingin	Lembah Masurai	baru sebatas usulan pada tahun 2013, tapi belum menemui kesepakatan antara stakeholder terkait; lokasi perambahan/kebun kopi

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, 2016

D. Hutan Adat

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin tahun 2014, jumlah hutan adat di wilayah Kabupaten Merangin terdapat di 8 (delapan) lokasi di delapan wilayah kecamatan. Luas hutan adat yang paling sempit seluas 39,5 ha dan hutan adat yang paling luas terletak di Kecamatan Pangkalan Jambu seluas 750 ha.

D.1. Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu

Sesuai namanya, hutan adat ini terletak di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu dengan luas 750 ha yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 225 Tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Status kawasan dari Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Beberapa dokumen pendukung antara lain:



- SK. Kades Baru Pangkalan Jambu Nomor 01/SKD/LAD-BPJ/02/1994 tanggal 25 Februari 1999; dan
- Berita Acara Tata Batas Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu tanggal 17 Mei 1994.

D.2. Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo

Hutan adat ini terletak di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat dengan luas 525 ha yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat. Status kawasan dari Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

D.3. Hutan Adat Desa Guguk

Hutan adat ini terletak di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap dengan luas 690 ha yang ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2003 berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Status kawasan dari Hutan Adat Desa Guguk adalah Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 602 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 88 ha. Beberapa dokumen pendukung antara lain:

- Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: 518/VII-PW/2003 tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan Persetujuan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk;
- Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Nomor 01/KB/VIII/2003 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat;
- Keputusan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Desa Guguk; dan



- Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Desa Guguk.

D.4. Hutan Adat Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo

Hutan adat ini terletak di Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu dengan luas 528 ha yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Hutan Adat Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Status kawasan dari Hutan Adat Desa Guguk adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Beberapa dokumen pendukung antara lain:

- Undang Adat Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelestarian Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Masyarakat Hukum Adat Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
- Nota kesepakatan tentang batas wilayah dan batas Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Masyarakat Desa Rantau Kerbau dan Batang Kibul;
- Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Nomor 01/SKB/2004 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo;
- Keputusan Lembaga Adat Desa Batang Kibul Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengakuan Kawasan Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam Masyarakat Hukum Adat Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin; dan
- Keputusan Kepala Desa Batang Kibul Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Kawasan Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam Masyarakat Hukum Adat Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin.

D.5. Hutan Adat Bukit Pintu Koto

Hutan adat ini terletak di Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat dengan luas 278 ha yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan



Keputusan Bupati Merangin Nomor 230/DISBUNHUT/2010 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Pintu Koto Sebagai Hutan Adat Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Status kawasan dari Hutan Adat Bukit Pintu Koto adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Beberapa dokumen pendukung antara lain:

- Kesepakatan Masyarakat Desa Ngaol tanggal 29 Januari 2009 tentang Penetapan Hutan Adat Bukit Pintu Koto Serta Pembentukan Badan Pelestarian dan Pengelolaan Hutan Adat (BPPHA) Bukit Pintu Koto, Kec. Tabir Barat, Kab. Merangin, Prop. Jambi.
- Keputusan Lembaga Adat Desa Ngaol Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengakuan Kawasan Bukit Pintu Koto Desa Ngaol Sebagai Hutan Adat Bukit Pintu Koto.
- Keputusan Kepala Desa Ngaol Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Penetapan Hutan Adat Bukit Pintu Koto.
- Berita Acara Pengukuran Batas Hutan Adat Bukit Pintu Koto Ds. Ngaol, Kec. Tb. Barat, Kab. Merangin (Disbunhut, KPN, Perangkat Desa).

D.6. Hutan Adat Bukit Mujo

Hutan adat ini terletak di Desa Tiaro Kecamatan Muara Siau dengan luas 39,5 ha berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 14/DISBUNHUT/2012 tentang Penetapan Sebagian Areal Hutan Di Bukit Mujo, Desa Tiaro, Kecamatan Muara Siau Seluas $\pm 39,5$ (tiga puluh Sembilan koma lima) Hektar Sebagai Hutan Adat Desa Tiaro, Kecamatan Muara Siau. Status kawasan dari Hutan Adat Bukit Mujo adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Beberapa dokumen pendukung antara lain:

- Keputusan LA Ds. Tiaro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengakuan Kawasan Bukit Mujo sbg HA Ds. Tiaro
- Keputusan Kades Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan HA Bkt Mujo Ds. Tiaro
- Keputusan bersama LA, BPD dan Kades Tiaro Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Kelompok Pengelola HA Bkt Mujo, Ds. Tiaro
- Pagam Kesepakatan Penetapan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan HA Ds. Tiaro tanggal 1 Juli 2010.



D.7. Hutan Adat Bukit Temanang

Hutan adat ini terletak di Desa Sekancing dan Pulau Raman Kecamatan Tiang Pumpung dengan luas 93,75 ha. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin tahun 2016, proses pengukuhan Hutan Adat Bukit Temanang ini masih ditunda. Hal ini disebabkan karena masih terdapat masalah perselisihan dalam batas desa. Sementara pengukuhan dan pemetaan awal telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Status kawasan Hutan Adat Bukit Temanang adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

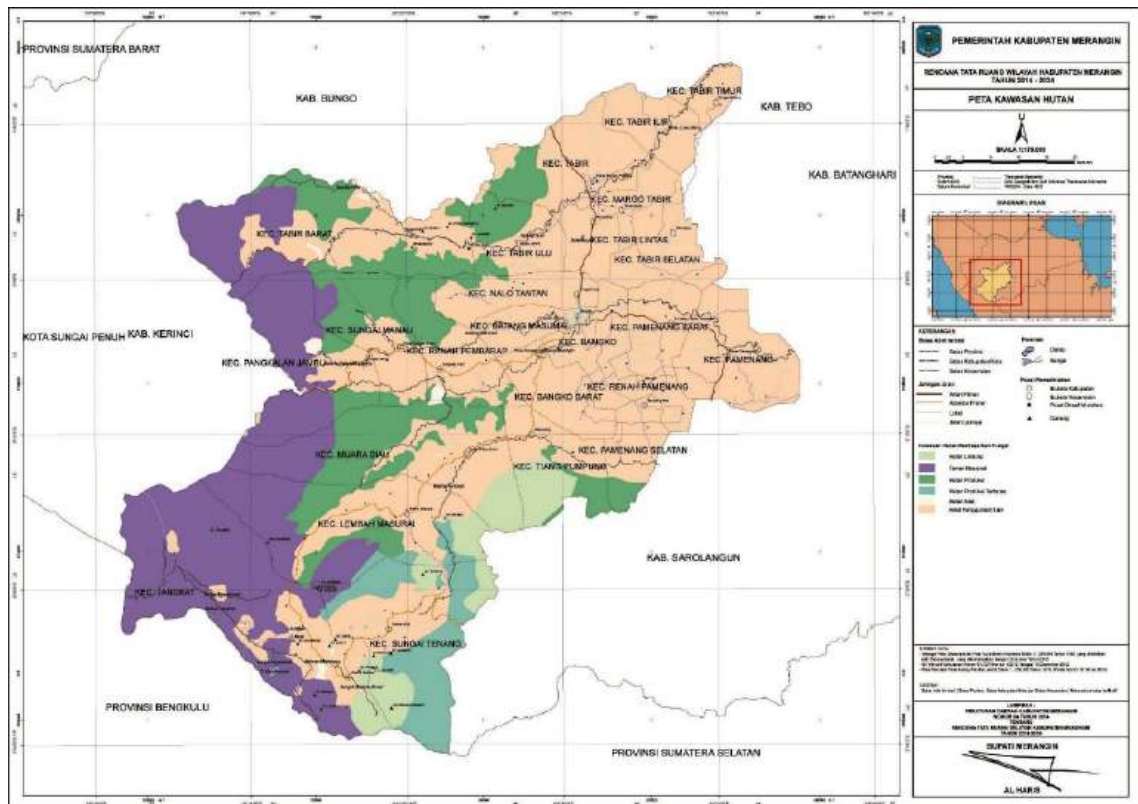
D.8. Hutan Adat Payo Gelanggang – Ujo dan Rimbo Dendang

Hutan adat ini terletak di Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat dengan luas masing-masing 226 ha dan 212 ha. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin tahun 2016, proses pengukuhan Hutan Adat Payo Gelanggang – Ujo dan Rimbo Dendang ini masih ditunda. Hal ini disebabkan karena masih terdapat masalah pro dan kontra dari masyarakat terutama terkait kerjasama dengan PT. BMS. Sementara pengukuhan dan pemetaan awal telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Status kawasan Hutan Adat Bukit Temanang adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Selain itu, hutan adat ini telah dibuka dan dijadikan kebun dan dikerjasamakan dengan PT. BMS.

D.9. Hutan Adat Marga Serampas

Wilayah MHA Marga Serampas sebagian besar adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan 50.000 ha berdasarkan pada Perda No 8 tahun 2016. Selain kawasan pemukiman, perladangan dan persawahan yang berupa kawasan APL (Area Penggunaan Lain), MHA Marga Serampas juga memiliki hutan adat yang berada di Desa Rantau Kermas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Penetapan Pencantuman Hutan Adat Marga Serampas di Desa Rantau Kermas nomor SK. 6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dan SK Penetapan Hutan Adat Marga Serampas di Desa Rantau Kermas nomor SK 6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016. Keseriusan

MHA Marga Serampas dalam mempertahankan kelestarian hutan yang dituangkan dalam aturan adat membuat perlu dilakukan kolaborasi konservasi dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan yang dalam hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE.



Gambar II-7. Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Merangin, sampai dengan Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Merangin 357.577 jiwa. Dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Merangin bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Merangin mengalami peningkatan sebesar 0,52 Persen, dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Merangin Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Merangin adalah 355.719 jiwa. Bertambahnya penduduk ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan alami maupun pengaruh



migrasi. Sebagai muaranya dari penambahan itu, maka jumlah penduduk terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Adapun gambaran perkembangan distribusi penduduk di Kabupaten Merangin berdasarkan Kecamatan pada tahun 2019 s/d 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.24 : Banyaknya Penduduk Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun				Ket
		2019	2020	2021	2022	
1	Jangkat	9.409	9.420	9.436	9.457	
2	Jangkat Timur	9.235	9.409	9.417	9.429	
3	Muara Siau	9.913	10.063	10.103	10.147	
4	Lembah Masurai	13.206	13.875	13.828	13.787	
5	Tiang Pumpung	4.731	4.684	4.678	4.673	
6	Pamenang	33.600	33.476	33.679	33.899	
7	Pamenang Barat	17.466	17.294	17.393	17.501	
8	Renah Pamenang	14.676	14.416	14.465	14.521	
9	Pamenang Selatan	10.418	10.430	10.477	10.529	
10	Bangko	48.518	48.857	49.023	49.211	
11	Bangko Barat	11.059	10.985	10.985	10.990	
12	Nalo Tantan	16.393	16.988	17.556	18.152	
13	Batang Masumai	10.734	10.702	10.782	10.869	
14	Sungai Manau	9.901	10.216	10.245	10.279	
15	Renah Pembarap	12.791	12.987	13.083	13.185	
16	Pangkalan Jambu	6.216	6.409	6.414	6.421	
17	Tabir	27.812	28.594	28.594	28.608	
18	Tabir Ulu	8.080	8.144	8.116	8.093	
19	Tabir Selatan	29.425	29.313	29.511	29.724	
20	Tabir Ilir	8.949	8.861	8.831	8.805	
21	Tabir Timur	7.976	7.908	7.934	7.964	
22	Tabir Lintas	7.856	8.112	8.159	8.211	
23	Margo Tabir	13.219	13.604	13.624	13.649	
24	Tabir Barat	9.060	9.305	9.386	9.473	
MERANGIN		350.643	354.052	355.719	357.577	

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2023 (BPS Kab. Merangin)

2.1.2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II.25 Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km)
1	2019	350.643	7.554,24	46,42
2	2020	354.052	7.554,24	46,87
3	2021	355.719	7.554,24	47,09
4	2022	357.577	7.554,24	47,03

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dengan bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Merangin mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin sebesar 46,42 Jiwa/Km, kemudian pada tahun 2022 sebesar 47,03 Jiwa/Km. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Merangin yang mencapai 7.554,24 Km², penduduk Kabupaten Merangin masih terasa luas untuk lahan pertanian dan pemukiman. Namun apabila hal ini tidak mendapat perhatian akan dapat menyebabkan dampak-dampak lain akan muncul dari meningkatnya tingkat kepadatan penduduk seperti berkurangnya ketersediaan lahan, menurunnya udara bersih, Kerusakan Lingkungan, berkurangnya air bersih, kekurangan makanan dan lain sebagainya.

2.1.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Proyeksi perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.26 : Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	0-4	16.173	15.574	31.747
2	05-09	16.269	15.794	32.063
3	10-14	16.395	15.566	31.961
4	15-19	15.872	15.240	31.112
5	20-24	15.484	14.561	30.045
6	25-29	14.473	14.956	29.429
7	30-34	14.276	15.387	29.663
8	35-39	14.244	14.175	28.419
9	40-44	13.524	12.692	26.216
10	45-49	11.835	11.500	23.335
11	50-54	10.081	9.288	19.369
12	55-59	8.306	7.777	16.083
13	60-64	6.505	5.960	12.465
14	65-69	4.313	3.693	8.006
15	70-74	2.361	2.100	4.461
16	75+	1.739	1.464	3.203
TOTAL		181.850	175.727	357.577

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2023 (BPS Kab. Merangin)

Dari tabel diatas Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2022 yang mendominasi pada umur 5-9 Tahun dengan komposisi 32.063 jiwa, sedangkan yang terendah jumlah penduduk pada kelompok umur 75 Tahun Keatas dengan komposisi 3.203 penduduk.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai infikiasi dari pendapatan indivitu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil



mengonsumsi pendapatan tersebut. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Ekonomi Makro dan Pemerataan Pembangunan

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Setelah konfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia, yang secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. seluruh Indonesia bahkan dunia mengalami tekanan ekonomi yang dirasakan akibat krisis kesehatan dampak dari pandemi covid-19, dampak ini jelas akan mempengaruhi capaian pembangunan daerah.

Berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Merangin, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 5,24 persen. Berikut ini digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2017 – 2022 pada tabel di bawah ini:



**Tabel II.27 : Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Merangin Tahun 2017 – 2022**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,77	5	3,14	1,74	4,85	6,63
Pertambangan dan Penggalan	4,68	2,93	3,31	2,43	11,24	10,14
Industri Pengolahan	5,28	3,6	6,23	-0,88	5,88	4,39
Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	5,5	5,41	5,16	5,2	6,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	4,04	1,8	4,67	5,95	3,6
Konstruksi	5,41	4,78	4,77	0,65	7,11	-0,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,53	7,39	6,32	-3,16	5,63	7,53
Transportasi dan Pergudangan	6,22	5,24	4,6	-2,45	8,45	11,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,79	5,95	5,68	-5,47	5,6	5,92
Informasi dan Komunikasi	8,7	5,97	6,1	7,73	2,68	7,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	1,78	2,41	4,84	5,77	-0,5
Real Estate	3,25	3,85	6,91	-0,57	4,84	6,56
Jasa Perusahaan	5,93	5,33	3,96	-4,72	2,88	10,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,19	2,64	-3,77	0,76	-0,22
Jasa Pendidikan	1,95	2,09	4,04	2,92	2,98	4,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,85	5,83	7,47	6,37	14,78	-0,28
Jasa lainnya	7,95	5,34	5,54	-3,28	3,68	7,72
Produk Domestik Regional Bruto	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72

Sumber Data : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2023

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2.2.1.2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Angka inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan harga-harga barang/jasa di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik.

Tingkat Inflasi di Kabupaten Merangin pada Tahun 2017 - 2022 mengacu kepada tingkat inflasi Kabupaten Bungo selaku Kabupaten Tetangga yang melakukan perhitungan tingkat inflasi karena hanya Kabupaten Bungo dan Kota Jambi yang melakukan perhitungan tersebut. Inflasi daerah Kabupaten Merangin cukup fluktuatif.



Tabel II-24. Tingkat Inflasi Kabupaten Bungo *Bulanan Tahun 2017-2022

Bulan	Inflasi Bulanan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,82	0,25	0,29	0,74	0,50	1,39
Februari	-0,02	-0,13	-0,2	0,36	0,38	0,38
Maret	0,71	0,32	0,35	0,56	0,35	1,10
April	0,36	0,18	0,45	0,29	0,26	1,25
Mei	0,16	0,15	1,6	0,49	0,21	0,91
Juni	0,86	0,31	1,03	0,24	0,24	1,43
Juli	0,47	0,12	0,15	0,34	0,2	1,05
Agustus	-0,19	0,03	-0,13	0,06	0,2	1,44
September	-0,28	0,01	-0,44	0,02	0,12	1,10
Oktober	0,55	0,51	-0,18	0,59	0,78	1,14
November	0,42	0,53	-0,51	0,44	0,6	0,02
Desember	0,32	0,16	0,21	0,56	0,45	0,68

**diadopsi dari tingkat inflasi Kabupaten Bungo selaku Kabupaten tetangga dari Kabupaten Merangin*

2.2.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Merangin pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Merangin mencapai 17.886,76 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 20.284,06 miliar rupiah.

Adapun gambaran nilai PDRB Perkapita Kabupaten Merangin Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II-29. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Merangin, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB	14 452,75	15.288,07	15.670,88	17.837,62	20.284,06
ADHK	9.388,24	9.787,46	9.863,65	10.380,46	10.973,80

Sumber Data : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2023

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin. secara umum dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar antara lain masih tingginya jumlah pengangguran dan peluang kesempatan kerja pada sektor formal, belum tercapainya elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dan siap kerja, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial. Data pelaksanaan kegiatan di bidang ketenaga kerjaan. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-30. Data Pelaksanaan Indikator Kinerja Pada Bidang Ketenaga Kerjaan Sampai dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	176 Orang	
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	
4	Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta aktif jamsostek	8.840 Orang	

Sumber: Dinas PMPTSP dan tenaga Kerja tahun 2022

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya jumlah pencari kerja. Sampai dengan tahun 2022, jumlah Pencari Kerja yang



sebanyak 563 orang. Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2022, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Merangin mengalami Penurunan menjadi sebesar 69,50 persen dibanding tahun 2021 yakni 69,85 persen. Untuk lebih jelasnya data statistik ketenaga kerjaan Kabupaten Merangin dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-31. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Bekerja	187.523	190.731	192.138	193.723
2	Pengangguran	7.413	9.747	9.752	9.533
3	Angkatan Kerja	194.936	200.478	201.890	203.256
4	bukan angkatan kerja	87.002	85.228	87.142	89.210
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) TPT	3,8	4,86	4,83	4,69
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69,14	70,17	69,85	69,50

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

2.2.1.5. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 8,80 triliun rupiah atau sebesar 49,21%. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah yaitu mencapai 96,91%. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi, dan Perkebunan memberikan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 84,69%, disusul Tanaman



Hortikultura sebesar 8,14% dan Tanaman Pangan sebesar 4,53% dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain yaitu subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Perikanan terhadap kategori ini masing-masing kurang dari 10%.

Pada tahun 2021, kategori ini tumbuh positif sebesar 4,87%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 1,74%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan yang dialami subsektor Perkebunan Tahunan yang menjadi subsektor andalan Kabupaten Merangin sebesar 6,82%.

Tabel II-32. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Merangin, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	6.557.541,28	6.854.638,51	7.142.125,07	7.376.022,92	8.802.711,59
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	4.389.510,24	4.609.023,70	4.753.789,25	4.836.483,59	5.071.858,69
Kontribusi terhadap total PDRB	48,51	47,43	46,72	46,98	49,21
Laju Pertumbuhan	4,77	5,00	3,14	1,74	4,87

Sumber: PDRB Kabupaten Merangin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, 2022

2.2.1.6. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Pada kategori ini, penyumbang terbesar di tahun 2021 adalah Industri Makanan dan Minuman mencapai 1,20 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, kategori ini berkembang dari 759 miliar (2020) menjadi 804 miliar (2021). Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Pada tahun 2021 merupakan kontribusi terbesar ketiga yaitu mencapai 7,62%.

Pada tahun 2021, pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 5,95% lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu -0,80. Kenaikan pertumbuhan tersebut terjadi karena membaiknya kondisi perekonomian yang sempat berkontraksi akibat adanya pandemi COVID-19. Hampir terdapat peningkatan seluruh subkategori kecuali Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya.



Tabel II-3325. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Merangin, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	964.843,18	1.007.569,23	1.072.367,22	1.159.856,01	1.363.230,71
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	695.163,86	720.196,75	765.097,02	759.010,29	804.177,78
Kontribusi terhadap total PDRB	7,14	6,97	7,01	7,39	7,62
Laju Pertumbuhan	5,28	3,60	6,23	-0,80	5,95

Sumber: PDRB Kabupaten Merangin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, 2022

2.2.1.7. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 10%. Pada tahun 2021, kontribusi kategori ini mencapai 2,20 triliun rupiah atau sekitar 12,31%. Secara umum, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung fluktuatif selama periode 2017-2021. Laju pertumbuhannya pada tahun 2021 meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar -3,16% (2020) menjadi 5,63% (2021). Pertumbuhan ini disebabkan oleh berangsur pulihnya daya beli masyarakat. Sejalan dengan hal itu, nilai produksi pertanian, industri dan sebagainya juga meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya margin perdagangan komoditas tersebut.



Tabel II-26. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Merangin, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	1.707.804,74	1.923.612,93	2.062.593,89	2.040.653,91	2.202.031,28
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	986.259,51	1.059.125,65	1.126.065,51	1.090.447,73	1.151.818,43
Kontribusi terhadap total PDRB	12,63	13,31	13,49	13,00	12,31
Laju Pertumbuhan	8,53	7,39	6,32	-3,16	5,63

Sumber: PDRB Kabupaten Merangin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, 2022

2.2.1.8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi



kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

Tabel II-35. Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Nilai Tukar Petani (NTP)	96,83	100,78	98,58	107,60	126,88

Sumber : Evaluasi RPJMD Kab. Merangin Tahun 2022

2.2.1.9. Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat



pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini dapat memicu peningkatan kesenjangan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi umumnya. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Nilai indeks gini Kabupaten Merangin dari tahun 2016 hingga 2021 fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2020 tercatat indeks gini Kabupaten Merangin sebesar 0,32. Angka tersebut turun tahun 2021 dengan indeks gini sebesar 0,29. Dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi sebesar 0,35. Deskripsi data indeks gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel II-36 : Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Gini rasio Kabupaten /Kota				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kerinci	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28
2	Merangin	0,35	0,29	0,32	0,29	0,35
3	Sarolangun	0,29	0,29	0,31	0,32	0,30
4	Batang Hari	0,3	0,31	0,32	0,31	0,29
5	Muaro Jambi	0,31	0,27	0,28	0,32	0,27
6	Tanjab Timur	0,29	0,29	0,25	0,25	0,27
7	Tanjab Barat	0,36	0,29	0,28	0,25	0,26
8	Tebo	0,31	0,28	0,30	0,30	0,30
9	Bungo	0,32	0,26	0,31	0,3	0,32
10	Kota Jambi	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36
11	Sungai Penuh	0,3	0,34	0,31	0,31	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2023

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin terhitung selama 7,91 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 1,38% per tahun

Tabel II-37. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Merangin
Tahun 2013-2022

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,00	7,04	7,08	7,44	7,62	7,67	7,68	7,76	7,90	7,91
Pertumbuhan (%)	-	0,57	0,57	5,08	2,42	0,66	0,13	1,04	1,80	0,13

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022



Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Merangin terhitung selama 12,05 tahun, dan ini merupakan angka paling rendah se-Provinsi Jambi. Meskipun demikian, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 0,88% per tahun.

Tabel II-27. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Merangin
Tahun 2013-2022

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,14	11,38	11,83	11,87	11,95	11,97	11,98	11,99	12,04	12,05
Pertumbuhan (%)	-	2,15	3,95	0,34	0,67	0,17	0,08	0,08	0,42	0,08

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski pertumbuhannya relatif lambat, mulai dari 65,82 di tahun 2013 sampai pada 69,98 di tahun 2022. IPM di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 0,68% per tahun.



Tabel. II-28. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	65,82	66,21	67,40	67,86	68,30	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Pertumbuhan (%)	-	0,59	1,80	0,68	0,65	0,75	0,38	0,17	0,49	0,65

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022

2.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya *tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 10.000 kelahiran hidup. Dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah angka kematian bayi mengindikasikan keberhasilan pembangunan kesehatan keluarga.

Perkembangan jumlah Angka kematian Ibu dan Bayi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi sebanyak 46 orang kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 55 orang. Angka kematian bayi umur 0-28 hari di Kabupaten Merangin terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah kematian bayi berumur 0-28 hari (kematian *neonatal*) sebanyak 20 kasus sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 23 kasus. Kemudian kasus kematian bayi berumur 29 hari – 12 bulan juga terus mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2017 kasus kematian bayi berumur 29 hari – 12 bulan mencapai 4 kasus kemudian angka ini meningkat menjadi 26 kasus pada tahun 2022. Adapun informasi jumlah dan perkembangan kematian ibu melahirkan dan bayi di Kabupaten Merangin pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.



Tabel. II-40. Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022

No	Uraian	Jumlah Kematian (kasus)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kematian Ibu	5	5	9	5	8	6
2.	Kematian Neonatal (bayi umur 0-28 hari)	20	32	27	36	43	23
3.	Kematian Bayi (umur 29 hari-12 bulan)	4	3	4	4	45	26
Jumlah		46	29	40	45	96	55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, 2023

2.2.2.4. Angka Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Umur harapan hidup di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski pertumbuhannya relatif lambat, mulai dari 70,91 di tahun 2013 sampai pada 71,53 di tahun 2022. Umur harapan hidup di Kabupaten Merangin rata-rata meningkat sebesar 0,10% per tahun atau 8,37 jam per tahun.

Tabel. II-41. Angka Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Merangin Tahun 2013-2022

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	70,91	70,92	70,92	70,93	70,94	71,04	71,18	71,26	71,29	71,53
Pertumbuhan (%)	-	0,01	0,00	0,01	0,01	0,14	0,20	0,11	0,04	0,34

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada



kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100%. Tahun 2017-2021 capaian IPG Kabupaten Merangin mengalami kenaikan dari 87,64 menjadi 88,24 pada tahun 2021 dan 88,35 pada tahun 2022.

Tabel II-42. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021

No	Provinsi/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Merangin	87,64	88,01	88	88,14	88,24	88,35
2	Provinsi Jambi	88,13	88,44	88,4	88,41	88,62	88,95
3	Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.2.6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan sedang yang termasuk bukan angkatan kerja sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merangin berjumlah 203.256 jiwa dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 292 466 jiwa. Dari jumlah tersebut diperoleh indikator TPAK Kabupaten Merangin 2022 sebesar 69,50%, yang berarti 69,50% dari total penduduk 15 tahun ke atas memiliki kegiatan utama seminggu yang lalu bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan sisanya sebesar 30,50% dari total penduduk 15 tahun



ke atas adalah bukan angkatan kerja (kegiatan seminggu terakhir sekolah, mengurus tangga, dan lainnya).

Tabel II-29. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu Kabupaten Merangin 2017-2022

Parameter Kegiatan Penduduk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja [jiwa]	188.580	188.580	194.936	200.478	201.890	203.256
Bekerja [%]	95,90	95,90	96,20	95,14	95,17	95,31
Pengangguran [%]	4,10	4,10	3,80	4,86	4,83	4,69
Bukan Angkatan Kerja [jiwa]	81.496	81.496	87.002	85.228	87.142	89.210
Sekolah [jiwa]	19.327	19.327	21.487	17.713	17.710	19.412
Mengurus Rumah Tangga [jiwa]	55.327	55.327	54.623	53.858	53.578	56.469
Lainnya [jiwa]	6.842	6.842	10.892	13.657	15.854	13.329
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas [jiwa]	270.076	270.076	281.938	257.224	259.464	292 466
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) [jiwa]	7.738	7.738	7.413	9.747	9.752	9.533
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) [%]	66,96	66,96	69,14	70,17	69,85	69,50

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, Tahun 2023

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan tentang kedudukan pekerja adalah status pada pekerjaan utama. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan statusnya pada pekerjaan utama dapat dilihat pada Tabel. **II-30.** Status pada pekerjaan utama di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sebagian besar adalah pekerja yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri sebanyak 44.327 jiwa, pekerja yang dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah sebanyak 56.984 jiwa, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar sebanyak 35.050 jiwa, dimana mereka adalah anggota keluarga yang ikut bekerja dengan anggota keluarganya yang lain misalnya istri/suami, anak, orangtua ataupun saudara yang bekerja tanpa mendapat bayaran apapun. Pekerja yang berusaha dibantu Buruh Tidak



Tetap/Buruh tidak dibayar yaitu sebanyak 35.238 jiwa. Sedangkan yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 11.206 jiwa. Sementara itu, sisanya pekerja bebas sebanyak 10.918 jiwa.

Tabel. II-30. Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas yang Berstatus Bekerja Menurut Status Pada Pekerjaan Utama, 2021-2022

Status pada Pekerjaan Utama	2021 (jiwa)	2022 (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha Sendiri	41.004	31.050	13.277	44.327
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	33.970	25.657	9.581	35.238
Berusaha dibantu Buruh Tetap	12.495	9.371	1.835	11.206
Buruh/Karyawan/Pegawai	52.245	41.998	14.986	56.984
Pekerja Bebas	19.343	9.560	1.358	10.918
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	33.081	7.099	27.951	35.050
Total	192.138	124.735	68.988	193.723

Sumber: Sakernas, 2021-2022; Kabupaten Merangin Dalam Angka 2023

2.5.2.7. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan dari 9,11% pada tahun 2021 menjadi 8,70% pada tahun 2022. Jika diakumulasikan terjadi penurunan capaian sebesar 0,41%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. II-31. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Merangin, 2017-2022

Indikator Tingkat Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	347.523	374.250	406.466	440.156	453.696	489.880
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	35,48	33,95	32,88	33,92	35,44	34,14
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,43	8,88	8,48	8,63	9,11	8,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,69	1,86	1,39	0,94	1,25	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,52	0,57	0,38	0,21	0,25	0,25



Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Pemerintah dan unsur masyarakat agar melakukan berbagai upaya seperti mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya yang mampu menjadi daya tarik masyarakat luas maupun wisatawan untuk lebih ingin mengetahui tentang Kabupaten Merangin. mengikuti event-event kesenian dan kebudayaan serta mampu membuat publikasi dalam bentuk dokumentasi visual yang akan diberikan sebagai cendera mata terhadap tamu-tamu pemerintahan sebagai bentuk publikasi kebudayaan daerah.

Melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Sanggar seni secara berkesinambungan. Sampai dengan tahun 2022 jumlah sanggar seni tari dan musik yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebanyak 5 Sanggar yang terdiri dari sanggar tari sebanyak 3 sanggar dan sanggar musik sebanyak 2 sanggar paguyuban.

Ada beberapa upaya melestarikan dan memperkenalkan secara luas kebudayaan di Kabupaten Merangin telah dilaksanakan beberapa kegiatan budaya oleh masyarakat merangin diantaranya yaitu :

- a) Bakar Jaudah pada Festival Jangkat Tahun 2022 kegiatan ini memperoleh Rekor Muri dalam hal rekor bakar Jaudah terbanyak dunia 2022 yang di terima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani yang diserahkan oleh perwakilan Muri Indonesia Andre Purwandono.
- b) Festival Makan Jantung tentunya unik didengar, dan ini ada di kabupaten Merangin, provinsi Jambi. Festival acara ritual makan jantung kerbau, yang



dipusatkan pelaksanaannya di Lapangan Bola Desa Guguk Kecamatan Renahpemarap Kabupaten Merangin

- c) Kegiatan Budaya Bantai adat Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan nasional (Gernas) Bangga produk Buatan Indonesia (BBI) 2022 di Provinsi Jambi itu, juga dimeriahkan dengan gelar pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), atraksi seni budaya, kearifan lokal serta bazar kuliner tradisional di Rantau Panjang Kecamatan Tabir

2.2.3.2. Olahraga

Pemerintah Kabupaten Merangin secara konsisten terus melakukan rangsangan dan memberikan dorongan kepada organisasi kepemudaan untuk dapat memberdayakan diri dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah tidak terjun secara langsung dalam pengelolaan organisasi kepemudaan, akan tetapi memberikan arahan dan bimbingan dalam mendukung kegiatan organisasi kepemudaan tersebut. Selain itu Pemerintah kabupaten merangin juga intens membina generasi muda melalui kegiatan keolahragaan dengan mendukung even atau kegiatan yaitu Sepak Bola, Bola Volly, Road Race dan Adventure Touring mobil dan motor dan kegiatan lainnya.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Merangin. Aspek ini menyangkut pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menjadi wewenang dari beberapa Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diembannya,

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 17 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel. II-46. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	7,62	7,68	7,76	-	7,91
2	Rata-Rata Harapan lama Sekolah	Tahun	11,95	12,1	12,02	-	12,04
3	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional	Nilai	30,67	54,25	54,25	-	
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	N/A	N/A
5	APK PAUD	%	65,35	67,13	33,01	65,79	65,90
6	Angka Melek Huruf	%	97,97	99,55	99,75	97,32	98,95
7	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,36	0,34	0,25	7:40	
8	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	5,64	1,12	2,1	5,58	
9	Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA	%	8,12	N/A	1,3	-	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	106,49	107,35	107,36	110,92	110,58
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.	%	92,61	93,21	97,54	87,16	91,03
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,75	107,35	92,41	99,43	98,51
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	78,42	78,72	68,29	76,04	76,25
14	Persentase SD/MI yang Terakreditasi	%	92,85	98,85	95,53	96,12	92,42
15	Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi	%	83	97,85	83,5	84,32	87,23
16	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang berkulaitas	Dokumen	-	-	-		
17	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	%	49,35	71,69	59,98	27,12	106,63

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 20 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-47. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kepesertaan JKN	%	85	52	63,39		
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	%	12	20	17,66		
3	Persentase Pelayanan dengan IKM Kategori Baik	%	70	50	65		
4	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100	92	100		
5	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	59	67	77,12		
6	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	64,65	76,74	92		
7	Persentase Stunting	%	20	35	5,02		
8	Persentase Penurunan Kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu	%	40	45	25		
9	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	40	11	3,7		
10	Persentase Puskesmas dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	%	50	50	35		
11	Persentase Pengobatan Tradisional yang memenuhi syarat STPT dan SIPT	%	12	11	0		
12	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	78	80	82		
13	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%				96	98
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	%	-	-	-	74	9
15	Penurunan stunting	%	-	-	-	43,69	80
16	Persentase NAKES yang memiliki Standar Kompetensi (Sertifikat)	%	52	45	62	-	
17	Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Puskesmas	%	55	60	65	-	
18	Persentase Sumberdaya manusia Kesehatan yang kompeten dan produktif	%	20	-	-	49	
19	Persentase Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan industri rumah tangga sesuai dengan standar	%	53	68	100	-	
20	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	55	-	-	59	61

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



Dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat di Kabupaten Merangin, telah disusun Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah. Adapun capaian indikator kinerja berdasarkan SPM Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-48. Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan SPM Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator SPM	Angka Absolut				Capaian		Target (%)	
		Pembilang		Penyebut					
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	% Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	6.634	6.215	7.781	7.440	85.3%	83,5%	100%	100%
2	% Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.411	5.860	7.354	7.025	73.6%	83,4%	100%	100%
3	% Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.644	5.854	7.316	7.009	90.8%	83,5%	100%	100%
4	% Cakupan pelayanan kesehatan balita	23.626	21.364	26.055	27.944	90.7%	76,5%	100%	100%
5	%Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	10.593	10.593	11.520	11.520	92%	91,96%	100%	100%
6	%Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	143.527	28.309	214.457	29.002	66.9%	97,6%	100%	100%
7	%Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	49.868	160.876	54.448	217.365	91.6%	74,4%	100%	100%
8	%Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	46.980	51.974	72.318	51.974	65%	74,8%	100%	100%
9	%Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus (DM)	2.883	2.766	2.994	2.812	96.3%	98,3%	100%	100%
10	%Cakupan pelayanan kesehatan dengan ganguan jiwa berat	457	501	507	511	90.1%	98%	100%	100%
11	%Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	1.928	3.595	2.922	3.595	66%	100%	100%	100%



No	Indikator SPM		Angka Absolut				Capaian		Target (%)	
			Pembilang		Penyebut		2021	2022	2021	2022
			2021	2022	2021	2022				
12	%Cakupan pelayanan kesehatan yang terinfeksi HIV		5.331	4.040	7.918	7.926	67.3%	50%	100%	100%
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN			303.882	301.94	415.590	374.123	81,3	84,3%	100%	100%
			7							

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2023

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 17 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-32. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	94	98
2	Persentase Luas Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	45,45	65,33	67,76	65,51	72,38
3	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan infrastruktur permukiman yang aman dan layak	%	55,16	55,53	56,66	57,23	45,51
4	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang aman	%	-	-	-	57,23	60,20
5	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	%	-	-	-	57,23	26
6	Persentase Luas Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	45,45	65,33	67,76		72,38
7	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	%	-	-	-	57,23	80
8	Persentase sistem drainase dalam kondisi	%	-	-	-	57,23	45,00



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	baik						
9	Persentase pengembangan permukiman dalam kondisi baik	%	-	-	-	57,23	50,00
10	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	-	-	-	57,23	55,00
11	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	-	-	-	57,23	60,00
12	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	71,95	64,39	71,11	71,11	71,90
13	Persentase Rasio Alat Berat Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	74	N/A	77		
14	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	-	-	-	71,01	70,96
15	Persentase Sertifikat Terampil Konstruksi yang diterbitkan	%	100	N/A	100	100	100
16	Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikasi	%	-	-	-	67,00	73,68
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	%	86,66	86,93	87,2	87,47	87,74

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 8 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-33. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	75	N/A	77,5		
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	98	98
3	Persentase RTLH yang tertangani	%	-	-	-	80	78



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase Penanganan kawasan kumuh	%	15	15	25		
5	Penanganan kawasan kumuh	hektar	-	-	-		266,55
6	Persentase Pengembangan Penerangan jalan umum	%	0	100	87		
7	Jumlah Taman kota dan areal Pemakaman umum yang Dikelola	lokasi		100	85		
8	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	%	-	-	-	80	78

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-34. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan kapasitas Sat pol PP dan Linmas	%	82	78	25		
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	90	75	60		
3	Persentase Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi	%	68,42	N/A	N/A		
4	Berkurangnya dampak bencana alam akibat dari kelalaian dan ulah masyarakat	%	100	100	100		
5	Meningkatnya kewaspadaan, pengetahuan serta koordinasi dalam menghadapi bencana	%	100	100	100		
6	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	100	100	100		
7	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		
8	Persentase Penanggulangan Bencana yang	%	-	-	-	100	100



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
9	dilaksanakan						
	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana Kebakaran	Desa/Kelurahan	14	N/A	N/A		
10	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan	%	-	-	-	77,03	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.1.6. Urusan Sosial

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 11 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-35. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	50	58,33	66,67	75	100
2	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	0	0
3	Persentase Penurunan PMKS	%	4,31	9	7,6	45,89	23,04
4	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	10,47	31,46	43,53	55,79	56,47
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		
6	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	75	91,67
7	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya	%	-	-	-		62,50
8	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungsiannya	%	-	-	-	47,72	31,81
9	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	%	-	-	-	11	17,99
10	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	%	-	-	-	20	55
11	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	lokasi	-	-	-	1	1

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 5 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-36. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,05	3,8	4,86		
1	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi	%	-	-	-	68	
2	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	5	316	48,86		39,4
3	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	%	12	42	6,37		
3	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial pada Perusahaan	%	-	-	-		100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-37. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,64	88,01	88,14	88,24	88,35
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	53,34	54,25	54,60	58,51	
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan PPRG	%	-	-	-	29,62	29,62
4	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani	%	76	78	100	100	100
5	Jumlah Dokumen Data Terpilah gender dan Anak Yang disediakan	Dok	-	-	-	1	1
6	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Persia	Persia	-	-	prata
		-	pan	pan			ma

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.3. Urusan Pangan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 8 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-55. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	%	102,1	N/A	93,8	-	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		
3	Menurunnya Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	-	-	-	93,8	103,8
4	Nilai Coefisien Variasi (CV)	%	10	N/A	10	-	
5	Persentase kemandirian pangan	%	-	-	-	72,4	106,11



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase Cadangan Pangan daerah	%	4,51	4,51	4,51	0	10,85
7	Persentase sampel Pangan yang aman	%	76	100	100	100	
8	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi dalam penanganan mutu, gizi dan keamanan pangan	unit	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanahan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-38. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan yang masuk	%	100	99,34	100		
2	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	%	-	-	-		
3	Persentase pengelolaan tanah kosong	%	-	-	-		
4	Persentase Penatagunaan Tanah	%	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 15 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-57. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ketersediaan informasi SDA dan LH	%	90	60	60		
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		
3	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai Standar	dokumen	-	-	-		
4	Persentase pelaku usaha taat terhadap baku mutu lingkungan	%	95	95	96		
5	Terkendalnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu	nilai	-	-	-		
6	Persentase pelaku usaha yang limbah B3 nya terkendali	%	-	-	-		90
7	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah	dokumen	-	-	-		
8	Persentase masyarakat yang memahami lingkungan hidup pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	-		
9	Persentase Penghargaan yang diterima dari event yang diikuti	%	-	-	-		
10	Luas kawasan SDA yang dikonservasi	%	65	21,36	65		
11	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup	%	-	-	-		
12	Luasan lahan RTH yang dikelola	%	-	-	-		
13	Persentase pengaduan yang tertangani	%	-	-	-		
14	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	18	10,42	29,78		
15	Persentase Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	24	26

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 5 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-39. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	56,06	87,99	91,31		
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		
3	meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	%	-	-	-		105,6
4	meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	-	-	-		102,19
5	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 12 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-40. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase desa yang tertib administrasi keuangan dan aset desa	%	24,39	4,87	52		
2	Jumlah RPKP yang dibentuk	kawasan	1	1	0		
3	Jumlah kerja sama antar desa	kerjasama	2	1	0		
4	Persentase pembinaan lembaga ekonomi pedesaan	%	25	45	51		
5	Persentase kelompok TTG aktif	%	10	20	26		
6	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	45	50	66		
7	Jumlah lembaga adat aktif	lembaga	0	0	35		
8	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		
9	Persentase penataan desa	%	-	-	-		
10	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	10	-	-	25	
11	Persentase penataan administrasi pemerintahan desa	%	-	-	-	40	
12	Persentase pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	5	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-60. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun				
	Pembangunan Daerah			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penunjang pemerintahan	pemenuhan urusan	%	-	-	-		
2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)		%	66	77,81	79,86	72	79,86
3	Jumlah akseptor KB aktif		orang	64.983	62	63.040	3.001	63.040
4	Rata-rata ASFR / Usia Kawin Pertama		tahun	17	18	19	18,5	19

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-41. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan			Satuan	Tahun				
	Daerah				2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan			%	86	86	86		
2	Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat			%	86	86	86		
3	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			%	-	-	-		
4	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik			%	-	-	-		47,2
	Persentase tertib berlalulintas								

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 3 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-62. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		
2	Persentase layanan komunikasi publik	%	60	0	65	75	
3	Persentase pengelolaan aplikasi informatika	%	0	0	10	40	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 9 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-42. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi sehat	%	25,26	25,68	15,35		
2	Rata-rata pertumbuhan modal koperasi	%	1,16	1,97	0,01		
3	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase koperasi bersertifikat NIK	%	-	-	-		33,55
5	Persentase KSP/USP-Koperasi Berpredikat Sehat	%	-	-	-		3,29
6	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang sudah mengikuti pelatihan koperasi	%	-	-	-		
7	Persentase UMKM yang sehat	%	6	6,4	6,89		
8	Persentase UMKM yang dibina	%		7,87	5,29		
9	Pertumbuhan unit usaha UMKM	%	-	-	-		1,97

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 9 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-43. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	%	100	43,38	98,37		100
2	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		
3	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan	%	-	-	-		
4	Persentase pemanfaatan data informasi penanaman modal	%	-	-	-		
5	Persentase permohonan izin penanaman modal yang direalisasikan	%	100	N/A	100	100	100
6	Persentase penanaman modal	%	-	-	-	100	100



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	yang mendapat fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal						
7	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	10,16	0,82	-68,83		
8	Nilai rencana investasi	Milyar Rupiah	-	-	-		
9	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	%	-	-	-		75

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahragadi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-65. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	organisasi	14	14	0		
2	Jumlah gelanggang olahraga standar nasional	gelanggang	2	2	0		
3	Jumlah atlet berprestasi tingkat kabupaten/provinsi/nasional	orang	95	89	24		
4	Cakupan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	%	-	-	-	50	3,3
5	Persentase atlet berprestasi	%	-	-	-	3,03	9,75
6	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	-	-	-	0	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.2.14. Urusan Statistik

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 2 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-44. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Data Sektoral Tersedia	%	0	0	24		
2	Persentase Data Sektoral Tersedia	%	-	-	-		65

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.15. Urusan Persandian

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang persandi di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 2 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-67. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0	10		
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	OPD	-	-	-	14	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-45. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1,53	1,49	1,85	-	
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	12	
3	Persentase Kesenian Tradisional Yang dikembangkan	%	-	-	-		
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-46. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Memenuhi standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota	kategori	Belum Memenuhi Standar	Belum Memenuhi Standar	Belum Memenuhi Standar	-	
2	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		
3	Persentase perpustakaan sesuai standar	%	-	-	-	40	45
4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	-	-	-	30	40

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Pembangunan daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 3 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-47. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokumen/Arsip yang disematkan	unit		500	730	231		
2	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	%		-	-	-	50	77
3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%		-	-	-	15	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 9 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-48. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Tangkap di PUD (ton)			ton	872,97	826	882,03		718,54
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			%	-	-	-		
3	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola			%	-	-	-	11	
4	Persentase usaha perikanan yang terawasi			%	-	-	-		
5	Produksi perikanan Budidaya (ton)			ton	1327,23	1355	1.429,00		
6	Produksi Ikan di kawasan budidaya perikanan (ton)			ton	9	7,8	19		
7	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola			%	-	-	-		
8	Peningkatan Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)			kg/kapita/tahun	30,89	29,89	30,17		
9	Persentase peningkatan dan pemasaran hasil perikanan			%	-	-	-		110

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang pariwisata di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 10 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-72. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	ODTW	24	5	6		
2	Persentase daya tarik destinasi yang layak	%	-	-	-	27,04	63,4
3	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-		98
4	Peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	pelaku	-	-	-	0	
5	Peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi	%	-	-	-	0	
6	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	48.661	208.041	90.949		
7	Jumlah event/promosi pariwisata yang diikuti	event	3	2	1		
8	Jumlah event/promosi pariwisata yang dilaksanakan	event	2	1	0		
9	Jumlah mitra usaha yang dibina	mitra usaha	40	29	0		
10	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan	orang	-	-	-	971	1806

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang pertaniandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 32 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-73. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Pertanian di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Tani menerapkan Pengolahan Hasil TPH	kelompok	10	14	14		
2	Presentase Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pertanian TPH	%	36,5	39,12	41,51		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
3	Peningkatan Produktivitas Padi	kw/ha			53,28	51,41	53,78		
	Sawah								
4	Peningkatan Produktivitas Jagung	kw/ha			61,36	61,59	62,87		
5	Peningkatan Produktivitas Kedelai	kw/ha			16,43	12,54	10,46		
6	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	kw/ha			214,53	349,04	325,71		
7	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	kw/ha			13,1	111,11	15,18		
8	Peningkatan Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS)	kw/ha			82,32	189,61	97,5		
9	Peningkatan Produktivitas Buah - buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST)	kw/ha			150,67	N/A	183,66		
10	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	kg/ha/th			4.253	4.254	4.254		4.270
11	Peningkatan Produktivitas Kopi	kg/ha/th			1.223	1.321	1.348		1.330
12	Peningkatan Produktivitas Karet	kg/ha/th			941	941	940		945
13	Peningkatan Jumlah Tanaman Tembakau	Ton			16	14	12		
14	Persentase kelahiran sapi hasil IB	%			7,50%	9,1	17,70%		(0,03)
15	Populasi Sapi	ekor/ tahun			17136	18.610	18.246		15,744
16	Populasi Kerbau	ekor/ tahun			4.449	4.412	4.195		
17	Populasi Ternak Kambing	ekor/ tahun			34.148	43.917	40.456		40,496
18	Populasi Ternak Unggas	ekor/ tahun			1.741.377	2.181.576	2.134.27		3,840,04
							1		4
19	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%			-	-	-		
20	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%			-	-	-	45	
21	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	%			-	-	-		20
22	Persentase Penyediaan Sarana Perkebunan	%			-	-	-		57,94
23	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%			-	-	-	67	
24	Persentase Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	%			-	-	-		66,67
25	Persentase Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	%			-	-	-		81,82
26	Persentase TPH yang Terkendali dari Bencana Pertanian (%)	%			-	-	-	43	
27	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%			-	-	-		1,56
28	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%			9,20%	N/A	N/A		6,06
29	Jumlah Peningkatan Kelas	Unit			-	-	-	6	1



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
30	Kelembagaan Penyuluhan (Unit)						
	Jumlah Penyuluh yang menerima STTPL (orang)	Orang	15	28	16		
31	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Peternakan dan Perkebunan (Kelompok)	Kelompok	-	-	-	89	1
32	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	%	-	-	-		25

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang perdagangandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 7 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-74. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengawasan perdagangan	%	12,24	13,11	6,67		
2	Rata-rata Kenaikan Harga Barang Pokok	%	-	-	-		
3	Persentase Wajib Tera Tertib Ukur	%	-	-	-		
4	Nilai Perdagangan (Rp)	Rupiah	1.707.840,70	1.923.612,93	1.923.612,93	1.923.612,93	1.923.612,93
5	Cakupan Bina PKL	%	31,46	32,17	28,37		
6	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	-	-	-		41,5
7	Persentase Pertumbuhan Omzet Pelaku Usaha Komoditi/Produk Yang Dipromosikan	%	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang perindustriandi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-49. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan unit usaha IKM	%	1,54	1,61	2,76		
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	-	-	-		
3	Persentase IKM Pangan Yang Memiliki Sertifikasi (HKI/BPOM/PPIRT/HALAL)	%	-	-	-		
4	Persentasi Usaha Industri Yang Masuk Kedalam SIINas	%	-	-	-		1,3

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.3.6. Urusan Transmigrasi

Pembangunan daerah pada layanan urusan pilihan bidang transmigrasidi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 2 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-76. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Layanan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan wilayah transmigrasi	wilayah	2	2			
2	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	kawasan	-	-	-	3	3

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.4. Urusan Pendukung

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Pembangunan daerah pada urusan pendukung bidang sekretariat daerahdi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 10 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-77. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PD yang nilai AKIP baik	Nilai	> 65-75	N/A	> 65-75		
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/Inspektorat	%	100	N/A	99,96		
3	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	%	95	95	95		
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	98	98
5	Persentase OPD yang menyampaikan LKJ yang sesuai standar dan Tepat Waktu	%		-	87		
6	Persentase OPD yang menyampaikan Data LPPD yang akurat dan Tepat Waktu	%		-	87		
7	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	-	-	-	97	97
8	Persentase Pengadaan barang dan Jasa Tepat Waktu	%	100	90	95		
9	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	%	-	-	-	98	98

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Pembangunan daerah pada urusan pendukung bidang sekretariat DPRDdi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 5 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-78. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pendukung Sekretariat DPRD di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	99,04	97,75		
2	Persentase Bimtek Penyusunan Perundang-undangan yang berkualitas	%	100	76,74	97,75		
3	Persentase Rapat dan Risalah persidangan yang berkualitas	%	85	100	97,75		
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	98	98
5	Persentase terlaksannya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	-		91,50

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.5. Unsur Penunjang

2.3.5.1. Perencanaan

Pembangunan daerah pada unsur penunjang bidang perencanaan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-50. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Perencanaan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD	%	95	100	100		
2	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	95	100	100		
3	Rata-rata Keselarasan Renja Terhadap Renstra	%	90	100	100		
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	98	98
5	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	%	-	-	-	80	80
6	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	-	-	-	95	95

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.5.2. Keuangan

Pembangunan daerah pada unsur penunjang bidang keuangan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 7 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-80. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Keuangan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan				Satuan	Tahun				
	Daerah					2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase	Laporan	Keuangan	%	95	100	100			
	Daerah yang disusun									
2	Persentase	Perencanaan	Keuangan	%	95	100	100			
	yang disusun									
3	Persentase	Laporan	Keuangan BUD	%	95	100	100			
	yang disusun									
4	Persentase	Pemenuhan	Penunjang	%	-	-	-	98	98	
	Urusan Pemerintahan									
5	Indeks	pengelolaan	keuangan	%	-	-	-	100	100	
	daerah									
6	Persentase	Laporan	Barang Milik	%	95	100	100	100	100	
	Daerah yang disusun									
7	Persentase peningkatan PAD			%	-12,01	18,9	99,96		-1,89	

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.5.3. Kepegawaian

Pembangunan daerah pada unsur penunjang bidang kepegawaian di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 5 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-81. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Kepegawaian di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Prestasi Kinerja Profesional			%	94	85,5	87,2		
2	Cakupan layanan administrasi kepegawaian			%	95	87,77	80,17		
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			%	-	-	-	98	98
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan, Kesenjangan Kompetensi ASN sesuai Formasi			%	-	-	-		
5	Persentase peningkatan Kompetensi ASN			%	97,5	94,58	57,75		89

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan daerah pada unsur penunjang bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 4 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-51. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah			%	3,7	3,7	16,07		
2	Persentase pemanfaatan hasil kajian			%	-	-	100		
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			%	-	-	-		98
4	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Daerah			%	-	-	-		18,80

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023



2.3.6. Unsur Pengawasan

Pembangunan daerah pada unsur pengawasan inspektorat di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-83. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP	%	100	100	41		
2	Persentase Aparatur Internal Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi	%	80	80	6,24		
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	90	90	99,96		
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-		100
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	-	-	-		
6	Peningkatan Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	-	-	-		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.7. Unsur Kewilayahan

Pembangunan daerah pada unsur kewilayahan kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-84. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan				Satuan	Tahun				
	Daerah			2018		2019	2020	2021	2022	
1	Persentase yang Tepat Waktu	Pelayanan Kecamatan		%	79,66	N/A	N/A			
2	Persentase Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Penunjang		%	-	-	-			
3	Persentase Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan		%	-	-	-			
4	Persentase Pemberdayaan dan Kelurahan	Terlaksananya Masyarakat Desa		%	-	-	-			
5	Persentase Penyelesaian Ketertiban Umum	Pembinaan dan Ketenteraman dan		%	-	-	-	95	100	
6	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan		%	-	-	-			

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

Pembangunan daerah pada unsur pemerintahan umum di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022 terdiri dari 10 indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-85. Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Merangin 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Satuan	Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah	Fasilitasi	Administrasi	dan	Jumlah	3 kali	4 kali	-		
	Pengawasan Ormas dan Yayasan									
2	Persentase	Pemenuhan	Penunjang	%	-	-	-			
	Urusan Pemerintahan									
3	Persentase	Pendidikan	Wawasan	%	75	100	-	62	99	
	Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa dalam Kabupaten Merangin									



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	70	60	67,75		
5	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	70	-	-		98
6	Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan	%	80	-	-		
7	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	kasus	-	4	5		
8	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas dalam Kabupaten Merangin	%	-	-	-		98
9	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	70	-	-		99
10	Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas penanganan konflik sosial	%	95	-	-		99

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Pola pengeluaran per kapita dapat mencerminkan tingkat kehidupan masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga.

Sedangkan negara-negara maju, pengeluaran non makanan merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Dalam sub-bab ini akan membahas berbagai gambaran tingkat kehidupan masyarakat di Kabupaten Merangin dengan melihat pola konsumsi penduduk (pengeluaran per kapita).



Tabel II-86. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Merangin, 2017-2022

Tahun	Makanan		Non Makanan		Total	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
2017	564.337	58,69	397.231	41,31	961.568	100,00
2018	551.870	52,54	498.514	47,46	1.050.384	100,00
2019	541.835	54,40	454.214	45,60	996.049	100,00
2020	540.796	53,06	478.415	46,94	1.019.211	100,00
2021	526.354	56,08	412.238	43,92	938.592	100,00
2022	601.337	52,23	549.903	47,77	1.151.240	100,00

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2017-2022

Pengeluaran rata-rata per kapita terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan seluruh pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Arti lainnya adalah merupakan pengeluaran rata-rata seseorang tiap bulannya, baik itu untuk kebutuhan makanan maupun non makanan.

Pada tahun 2022, sebesar 52,23% dari total pengeluaran digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya 47,77% digunakan untuk kebutuhan non makanan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pada tahun 2021, pola pengeluaran untuk makanan sebesar 56,08%. Akan tetapi pengeluaran non makanan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Adapun pengeluaran non-makanan tahun 2021 adalah sebesar 43,92%. Pengeluaran per kapita secara keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 3,85%. makanan maupun non makanan.



2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketersediaan Jalan

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ke tempat lain. Ketersediaan jalan di kabupaten Merangin menurut jenis permukaan dan status pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.82 berikut:

Tabel II-87. Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022

No	Jenis Permukaan	Status Jalan		
		Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten (Km)
1	Aspal/Paved	186.01	262.12	535.02
2	Kerikil/Gravel	-	-	502.37
3	Tanah/Soil	-	-	93.55
4	Lainnya/Others	-	-	53.47
	Jumlah	186.01	262.12	1,184.41

Sumber: Merangin Dalam Angka Kabupaten Merangin Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan kondisi jalan Negara dan Provinsi di kabupaten Merangin semua telah diaspal. sedangkan jalan kabupaten dengan jenis permukaan diaspal 535,02 Km atau 45,17% dari 1.184,41 Km.

Untuk melihat perkembangan kondisi jalan Kabupaten Merangin dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II-88. Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Merangin Tahun 2017-2022

No	Tahun	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2017	714.748	112.560	282.219	74.880	1.184.407
2	2018	703.204	148.931	212.351	119.921	1.184.407
3	2019	562.811	199.771	186.629	236.206	1.184.407
4	2020	286.017	556.253	227.967	114.170	1.184.407
5	2021	383,351	489,412	214,994	96,650	1.184.407
6	2022	377,550	473,990	237,470	95,397	1 184,407

Sumber: Merangin Dalam Angka Kabupaten Merangin Tahun 2023

2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif

Kabupaten Merangin memiliki potensi lahan sawah untuk tanaman pangan terutama padi sawah yang cukup luas untuk dapat dimanfaatkan. Sebagai gambaran, potensi lahan sawah kondisi tahun 2021 sebagai berikut:

- Penggunaan lahan sawah irigasi seluas 4.425 Ha
- Tadah Hujan seluas 2.374 Ha. Rawa Lebak seluas 236 Ha
- Lahan sawah yang dapat ditanami 3 kali setahun seluas 520,72Ha
- Lahan sawah yang dapat ditanami 2 kali setahun seluas 3.869,18 Ha
- Lahan sawah yang dapat ditanami 1 kali setahun seluas 2.555,20 Ha
- Lahan Sementara tidak diusahakan setahun seluas 89,56 Ha

Dapat dilihat perkembangan tanaman padi selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2021, berdasarkan data yang dikeluarkan badan pusat statistik (BPS) untuk angka sementara (ASEM) terjadi peningkatan produksi padi, perkembangan luas panen dan produksi padi dapat dilihat tabel berikut:



Tabel II-89. Perkembangan Luas Panen, Produksi Padi Tahun 2018-2021

No.	Komoditas/Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah				
	Luas Tanaman (Ha)	17.723	16.143	14.165	12.762
	Luas Panen (Ha)	16.594	14.774	13.907	11.627
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	53,28	51,29	52,78	56,78
	Produksi (Ton GKG)	88.406	75.783	73.39	66.016
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	558	1.248	258	1.014
2	Padi Ladang				
	Luas Tanaman (Ha)	19.012	19.551	16.258	15.792
	Luas Panen (Ha)	14.332	17.468	13.209	11.614
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	38,10	35,87	34,21	36,56
	Produksi (Ton GKG)	54.609	62.661	45.185	42.455
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	4.526	3.107	3.049	4.024
3	Total Padi				
	Luas Tanaman (Ha)	36.285	35.694	30.423	28.554
	Luas Panen (Ha)	30.926	32.242	27.116	23.241
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	46,24	42,94	44,24	46,67
	Produksi (Ton GKG)	143.015	138.443	119.974	108.471
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	5.084	3.177	3.307	5.038

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2022

Kemudian untuk melihat Realisasi perkembangan luas panen Jagung. Kacang-kacangan dan Umbi-umbian pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-90. Perkembangan Luas Panen Dan Produksi Tanaman Jagung.

Kacang-Kacang Dan Umbi-Umbian Di Kabupaten Merangin Tahun
2018 Dan Tahun 2021

No.	Komoditas/Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020*	2021**
1	Jagung				
	Luas Tanaman (Ha)	4.362	2.534	3.706	2.494
	Luas Panen (Ha)	3.712	2.124	3.148	1.980
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	62,69	61,59	62,87	63,48
	Produksi (Ton GKG)	23.720	13.081	19.791	12.570
2	Kedelai				
	Luas Tanaman (Ha)	1.894	698	254	92



No.	Komoditas/Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020*	2021**
3	Luas Panen (Ha)	1.541	612	212	87
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	12,51	12,54	11,98	12,01
	Produksi (Ton GKG)	1.928	767	254	104
	Kacang Tanah				
	Luas Tanaman (Ha)	286	265	283	257
	Luas Panen (Ha)	279	260	284	257
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	13,17	13,19	15,18	13,29
	Produksi (Ton GKG)	367	343	431	342
4	Kacang Hijau				
	Luas Tanaman (Ha)	58	51	25	13
	Luas Panen (Ha)	53	46	25	14
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	10,50	10,47	8,47	10,74
	Produksi (Ton GKG)	56	48	21	15
5	Ubi Kayu				
	Luas Tanaman (Ha)	540	371	439	312
	Luas Panen (Ha)	586	409	430	327
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	224,77	224,53	224,47	331,32
	Produksi (Ton GKG)	13.171	9.183	9.652	10.834
6	Ubi Jalar				
	Luas Tanaman (Ha)	306	481	443	262
	Luas Panen (Ha)	282	381	472	310
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	213,63	349,04	325,71	320,88
	Produksi (Ton GKG)	6.024	13.299	15.374	9.947

Ket : **) Angka sementara Kabupaten

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2022

Gambaran Luas Tanaman, Produksi, Produktivitas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-91. Luas Tanaman Produksi Produktivitas Dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Merangin tahun 2020 Dan 2021

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)		Jumlah Petani (KK)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karet	138.458	138.110	77.666	77.847	940	945	52104	52209
2	Kelapa Sawit	59.997	60.395	203.980	205.805	4.267	4.270	36.734	36.785
3	Kelapa Hibrida	119	112	38	35	339	333	479	475



No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)		Jumlah Petani (KK)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kelapa Dalam	1.356	1.339	756	750	707	703	9357	9299
5	Casiavera	4.122	4.143	3.546	3.516	1.671	1.668	2.315	2.331
6	Kopi robusta	11.357	11.492	10.598	10.697	1.327	1.331	9.354	9.368
7	Kopi arabika	70	64	4	20	1.000	800	21	21
8	Kemiri	11	11	7	7	636	636	111	111
9	Pinang	291	289	50	47	299	290	1990	1498
11	Kakao	271	288	58	66	667	667	2197	2201
12	Aren	23	18	12	8	706	667	206	67
13	Nilam	1.253	1.232	174	159	195	188	2839	2711
14	Kapuk	3	3	3	3	1.000	1.000	76	76
15	Tembakau	11	9	5	4	833	800	8	5
Jumlah		217.342	217.505	296.897	298.964	14.587	14.298	117.791	117.157

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022

Terkait dengan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan lanjutan bibit kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2019 telah melaksanakan pembibitan kelapa sawit sebanyak 21.000 kecambah yang berlokasi di Jalur Dua Kodim Dusun Bangko

Selain perkebunan sawit, pemerintah Kabupaten merangin juga melaksanakan kegiatan Pengembangan Karet Rakyat dan Pengembangan Kopi Arabika. Untuk kegiatan Pengembangan Karet Rakyat, pemerintah Kabupaten Merangin menerima bantuan dalam bentuk kegiatan dari APBD Provinsi dan APBN berupa Alat Pengupas Kopi dan Alat Pembuatan Kopi Jadi (Bubuk), dan Bangunan UPPB bangunan lengkap baru Lantai Jemur

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalisasi

Pada tahun 2022, peristiwa kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, pembakaran, penipuan dan sebagainya yang dilaporkan sebanyak 218 kasus dimana sebanyak 205 kasus telah diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2021, peristiwa kejahatan yang dilaporkan sebanyak 221 kasus dimana sebanyak 215 kasus telah diselesaikan.



Tabel II-52. Jumlah Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan di Kejaksaan Negeri Bangko dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat, di Kabupaten Merangin Menurut Jenis Perkara, 2021-2022

Tindak Pidana	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
Narkoba	62	-	57	57	56	56	45	39	72	72	50	50
Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Perampokan	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	4	4
Pencurian	45	-	45	45	38	30	45	30	36	32	32	30
Kehutanan	3	-	2	2	3	3	2	2	2	-	3	3
KDRT	-	-	3	3	2	3	4	4	-	-		
Perjudian	4	-	3	3	8	3	1	1	4	4	4	4
Perlindungan Anak	15	-	15	15	14	14	12	9	7	7	19	15
Senjata Api/Tajam	9	-	3	3	8	8	6	5	7	7	4	4
Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Laka Lintas	2	-	5	5	3	3	-	-	-	-	3	3
Pembunuhan	0	-	2	2	-	-	1	1	1	1	4	4
Pertambangan	10	-	15	15	5	2	19	14	16	16	14	13
Perkara Lainnya	56	-	64	64	-	-	-	-	76	76	81	75
Total	207	-	220	220	137	122	135	110	221	215	218	205

Keterangan: M: Perkara Masuk S: Perkara Diselesaikan

Sumber: Kejaksaan Negeri Bangko dalam Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2018-2022

2.4.3.2. Perizinan dan Pelayanan untuk Investasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peluang Investasi Daerah sebagai bentuk upaya terlaksananya promosi dan tersedianya data tentang perkembangan investasi di Kabupaten Merangin. Dengan kegiatan tersebut dilaksanakan pengawasan dan mengkaji setiap investor yang merencanakan penanaman modal di Kabupaten Merangin dan mengevaluasi setiap perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan agar pembangunan perkebunan melalui pola kemitraan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan tidak merugikan masyarakat maupun pihak lainnya.

Selain memonitor dan mengevaluasi perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Merangin. melalui kegiatan tersebut juga dilaksanakan promosi dalam rangka meningkatkan investasi di kabupaten Merangin. Hasil



akhir produk ini adalah terlaksananya promosi dan tersedianya data tentang perkembangan investasi di Kabupaten Merangin.

Melalui pelaksanaan Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal telah dilaksanakan pelayanan perizinan sebanyak 1.271 izin. Untuk melihat lebih jelas kegiatan pelayanan perizinan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-93 . Rekapitulasi Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2022

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	NIB	2
2	PBG	21
3	REKLAME	3
4	SIP DOKTER	135
5	SIP DOKTER HEWAN	15
6	SIP INSEMINATOR	13
7	SIP KESWAN	4
8	SIP BIDAN	483
9	SIP PERAWAT	310
10	SIP ANALIS	32
11	SIP RADIOGRAFER	12
12	SIP ANASTESI	3
13	SIP GIGI DAN MULUT	15
14	SIP APOTEKER	52
15	SIPTTK	63
16	SIP REFLAKSI OPTISAN	2
17	SIP FISIOTERAPI	9
18	SIP SANITARIAN	17
19	SIP REKAM MEDIS	4
20	SIP PSIKOLOGI KLINIS	1
21	SIP ELEKTROMEDIS	2
22	SIP GIZI	5
23	SIP AKUPUNTUR	0
24	SIP DOKTER INTERSHIP	32
25	IZIN TOKO OBAT	6
26	IZIN APOTIK	21
27	IZIN KLINIK	3
28	TDG	6
	TOTAL	1.271

Sumber : Dinas PMPTSP-TK Tahun 2023



2.4.3.3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

A. Pajak Daerah

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Merangin, tercatat sebanyak 11 jenis penerimaan pajak daerah yang realisasinya selama 5 tahun terakhir berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Penerimaan pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2017-2022 dengan rentang sebesar Rp 14-18 M per tahun. Sedangkan penerimaan terendah berasal dari Pajak Hiburan/Tontonan yang cenderung mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2021 hanya menerima sebesar Rp4.181.700,- dan meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp11.558.850,- sementara pada tahun 2017 menerima Rp10.977.575,-. Jumlah ini berbanding terbalik dengan Pajak Sarang Burung Walet yang mengalami peningkatan signifikan, mulai dari tahun 2017 yang membukukan sebesar Rp3.480.000,- dan tahun 2021 berhasil membukukan sebesar Rp8.300.000,- per tahun dan terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,-. Data realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-53. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Merangin, 2022

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hotel	99.802.146	100.032.146	339.554.285	103.851.436	120.961.101	149.321.980,90
2.	Restoran	1.937.065.102	1.936.835.102	2.519.982.232	2.034.971.252	2.309.886.213	2.291.220.707,40
3.	Hiburan/Tontonan	10.977.575	10.977.575	2.318.750	2.170.000	4.181.700	11.558.850,00
4.	Reklame	604.837.770	604.837.770	883.623.913	980.934.927	1.278.636.463	899.232.308,24
5.	Penerangan Jalan	14.429.029.529	14.429.029.529	16.420.632.913	15.327.368.005	18.796.850.303	19.194.992.464,50
6.	Pajak Parkir	130.043.315	130.043.315	141.204.479	117.652.599	126.555.600	133.992.800,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.537.792.257	1.537.792.257	1.220.116.758	857.958.800	2.544.548.977	795.502.656,34
8.	Pajak Air Tanah	23.585.573	23.585.573	31.565.809,88	23.190.376	43.474.532	795.502.656,34
9.	Pajak Sarang Burung Walet	3.480.000	3.480.000	4.851.500	4.000.000	8.300.000	5.000.000,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan/ PBB P2	1.698.396.659	1.698.396.659	1.551.165.102	2.060.797.444	2.508.109.307	2.784.191.102,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	574.109.663	574.109.663	1.063.705.730	1.693.011.243	1.329.691.153	2.195.035.233,00
Jumlah		21.049.119.588	21.049.119.588	24.178.720.588	23.205.906.082	29.071.195.349	28.572.619.327,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin; Kabupaten Merangin Dalam Angka 2018-2022



B. Retribusi Daerah

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Merangin, tercatat sebanyak 47 jenis penerimaan retribusi daerah. Namun, dari 47 jenis, hanya teridentifikasi sebanyak 14 jenis retribusi yang memberikan kontribusi kepada daerah di tahun 2022. Secara tren, jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 terhitung sebanyak Rp4,7 milyar, sedangkan pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp4,2 milyar. Penerimaan retribusi daerah paling tinggi berasal dari Pelayanan Kesehatan (DINKES dan RSUD) yang berhasil membukukan sebesar Rp2,0 milyar di tahun 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berhasil membukukan sebesar Rp1,7 milyar di tahun 2021. Data realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-54. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Merangin, 2017-2022

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan Kesehatan (DINKES dan RSUD)	1.346.973.500	1.346.973.500	2.560.539.941	2.159.863.815	1.787.327.757	2 075 642 790.65
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.095.536.243	1.095.036.243	1.196.339.400	679.618.000	432.606.200	307 136 000.00
3.	KTP & AKTA CAPIL	-	-	-	-	-	-
4.	Parkir di Tepi Jalan Umum	64.840.000	64.840.000	58.072.000	22.105.000	32.161.000	46 723 000.00
5.	Pelayanan Pasar	46.747.000	47.247.000	-	-	-	-
6.	Pengujian Kendaraan Motor (PKB)	226.141.000	226.141.000	155.965.000	44.574.500	17.850.000	33 681 000.00
7.	Pelayanan Cetak Peta & Pendaftaran Tanah	-	-	-	-	-	-
8.	Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
9.	Pelayanan Tera/Tera Ulang (Koperindag)	4.035.500	4.035.500	32.195.500	16.857.500	24.437.500	29 592 000.00
10.	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.463.891.174	1.463.891.724	1.263.414.711	1.021.052.615	877.102.670	934 551 166.00
11.	Retribusi Tempat Pelelangan (Koperindag)	-	-	-	-	-	-
12.	Terminal	34.634.000	34.634.000	126.089.000	119.635.000	147.899.000	139 440 000.00
13.	Tempat Khusus Parkir	231.383.000	231.383.000	188.329.370	125.495.000	84.950.000	81 720 000.00
14.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.940.000	8.940.000	8.040.000	7.500.000	15.800.000	9 350 000.00
15.	Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
16.	Tempat Rekreasi & Olahraga	129.747.000	129.747.000	114 257 000	9.668.000	28.830.000	58 140 000.00
17.	Pengelolaan Ternak Bibit	-	-	-	-	-	-
18.	Pengelolaan Pangkalan Hasil Bumi	-	-	-	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
19.	Pembinaan Pengembangan Koperasi & UKM	-	-	-	-	-	-
20.	Sempadan/IMB	-	100.101.621	178 325 327	-	-	-
21.	Izin Gangguan/Keramaian	34.778.000	34.778.000	-	-	-	-
22.	Izin Trayek	-	-	-	-	-	-
23.	Pengambilan Hasil Hutan	-	-	-	-	-	-
24.	Izin Usaha Angkutan Jalan	-	-	-	-	-	-
25.	Gambar Bangunan	-	-	-	-	-	-
26.	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
27.	Izin Pengeluaran Ternak	-	-	-	-	-	-
28.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-
29.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	-
30.	Pertambangan Rakyat Galian Emas (Gol. B)	-	-	-	-	-	-
31.	Uang Leges	-	-	-	-	-	-
32.	Izin Mendirikan Bangunan	100.101.621	-	-	216.641.876	86.560.214	59 698 990.00
33.	Pengujian Kendaraan Bermotor	226.141.000	-	-	-	-	-
34.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.897.000	1.897.000	5.635.000	5.965.000	7.043.000	3 437 000.00
35.	Izin Penimbunan BBM dan Gas	-	-	-	-	-	-
36.	Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-
37.	Usaha Pertambangan Galian Gol. C	-	-	-	-	-	-
38.	Izin Pendirian Bengkel Kend. Bermotor	-	-	-	-	-	-
39.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-
40.	Izin Usaha Dibidang Industri & Perdagangan	-	-	-	-	-	-
41.	Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang	-	-	-	-	-	-
42.	Jasa pemeriksaan dan pengukuran hasil Hutan	-	-	-	-	-	-
43.	Izin Praktek Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker, Asisten Apoteker dan Paramedis	-	-	-	-	-	-
44.	Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Labor dan Tukang Gigi	-	-	-	-	-	-
45.	Retribusi Izin Usaha Perkebunan	-	-	-	-	-	-
46.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	289.808.000	326.648.000	375.768.000	363 488 000.00
47.	Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan	-	-	39.765.000	76.897.000	79.079.000	88 600 000.00
	Jumlah	4.789.645.588	4.789.645.588	6.216.775.249	4.832.521.306	3.997.414.341	4.231.199.946,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin; Kabupaten Merangin Dalam Angka 2018-2022



2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merangin yang bekerja di tahun 2021 didominasi oleh lulusan SD sebanyak 88.076 jiwa atau sebesar 97,44% dari angkatan kerja pada lulusan SD. Namun, jumlah pengangguran pada angkatan kerja dari lulusan SMA lebih banyak daripada lulusan SD. Artinya, angkatan kerja pada lulusan SMA lebih banyak yang menganggur daripada angkatan kerja pada lulusan SD. Sedangkan angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi menunjukkan jumlah pengangguran yang lebih sedikit meskipun tingkat serapannya tidak lebih dari tinggi dari angkatan kerja pada lulusan SD. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-55. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Merangin, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
≤ Sekolah Dasar (SD)	88 076	2.314	90.390	97,44
Sekolah Menengah Pertama	31 804	1.984	33.788	94,13
Sekolah Menengah Atas	51 958	4.539	56.497	91,97
Perguruan Tinggi	20 300	915	21.215	95,69
Jumlah	192 138	9.752	201.890	95,17

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka 2022

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan di antaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) serta semakin tingginya jumlah penduduk usia produktif (penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun). Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terlihat bahwa rasio



ketergantungan di Kabupaten Merangin cenderung menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk umur 0-14 tahun berjumlah 96.255 jiwa, penduduk umur 15-64 tahun berjumlah 244.752 jiwa, dan penduduk umur 65 ke atas berjumlah 14.712 jiwa.

Tabel II-56. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Merangin 2017-2021

Tahun	Kelompok Umur (tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
2017	107.865	256.152	13.708	47,46
2018	107.843	260.953	14.684	46,95
2019	95.529	241.118	13.996	45,42
2020	96.828	243.446	13.778	45,43
2021	96.255	244.752	14.712	45,34

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2017-2018; Hasil Registrasi Penduduk Tahun 2019; Hasil Pengolahan SP 2020; Hasil Proyeksi Interim 2021

Rasio ketergantungan Kabupaten Merangin tahun 2021 sebesar 45,34. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif 15-64 tahun menanggung 46 hingga 47 orang usia non produktif. Rasio ketergantungan laki-laki lebih tinggi dari rasio ketergantungan perempuan. Dari 100 perempuan produktif menanggung 44 sampai 45 orang perempuan usia non produktif. Sementara itu dari 100 orang laki-laki usia produktif menanggung 46 hingga 47 orang laki-laki usia non produktif.

Tabel II-578. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Merangin Tahun 2021

Tahun	Kelompok Umur (tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
Laki-laki	49.129	124.009	7.918	46,00
Perempuan	47.126	120.743	6.794	44,70
Jumlah	96.255	244.752	14.712	45,34

Sumber: Hasil Proyeksi Interim 2021



2.5. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Evaluasi capaian kinerja untuk RPD ini menggunakan model evaluasi Form E.58 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena kita perlu menampilkan evaluasi tahunan mulai dari target, realisasi dan tingkat capaian. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD).

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel II-58. Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Merangin Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2019-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
EKONOMI MAKRO DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN														
I.1	EKONOMI MAKRO													
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.55	5.71	4.82	5.87	0.83	5.09	5.24	5.25	5.72	6.02	6.02	
2	Laju Inflasi	%	4.25	4.1	2.61	3.96	2.32	3.93	-	3.89		3.84	3.84	
3	Nilai PDRB berdasarkan ADHB	Milyar Rupiah	13,564.31	14,920.74	15,288.07	16,412.82	15,698.89	16,577.73	17,837.62	17,467.37	20,284.06	17,860.60	17,860.60	
4	Nilai PDRB berdasarkan ADHK	Milyar Rupiah	8,961.14	9,505.08	9,787.46	10,082.04	9,869.18	10,209.51	10,380.46	10,553.47	10,973.80	10,897.44	10,897.44	
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	35,893.44	38,145.39	39,330.00	41,691.96	39,800.00	41.6	50.28	43.41		45.21	45.21	
6	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	23,712.68	24,670.67	25,170.00	25,628.66	25,030.00	25.59	29.16	26.14		26.7	26.7	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.1	5.37	3.8	5.4	4.86	4.4	4.83	3.84	4.69	3.38	3.38	
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Petanian dan Perikanan	%	5.15	5.3	3.14	5.46	1.74	2.75	4.85	2.8	6.63	3	3	
9	Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	5.43	5.58	6.23	5.73	-0.8	2	5.88	2.5	4.39	3	3	
10	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	8.68	8.84	6.32	9	-3.16	5.88	5.63	6.03	7.53	6.18	6.18	
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100.78	101.8	98.58	102.3	107.6	103.54	126.88	105.3	135.14	107.05	107.05	
I.2	PEMERATAAN PEMBANGUNAN													
1	Indeks Gini Ratio	%	0.3	0.3	0.31	0.28	0.32	0.28	0.29	0.27	0.35	0.26	0.26	
II	KESEJAHTERAAN SOSIAL													
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70.94	70.96	71.18	70.98	71.26	71.34	71.29	71.42	71.53	71.5	71.5	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	68.3	68.69	69.07	69.88	69.19	69.3	69.53	69.5	69.98	69.67	69.67	
3	Persentase Penduduk Miskin	%	9.39	9.35	8.48	9.33	8.63	8.53	9.11	8.43	8.70	8.33	8.33	
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribuan Rupiah	9,753.00	9,968.06	10,312.00	10,183.13	10,279.00	10,364	10,380.00	10,484	10,714	10,634	10,634	
ASPEK PELAYANAN UMUM														
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	7.62	7.81	7.68	8	7.76	-	-	-	-	-	-	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Rata-Rata Harapan lama Sekolah	Tahun	11.95	12.09	12.1	12.23	12.02	-	-	-		-	-
3	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional	Nilai	30.67	30.81	54.25	30.93	54.25	-	-	-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94	N/A	98		98	98
5	APK PAUD	%	65.35	65.5	67.13	65.7	33.01	65.83	65.79	65.9	65.79	66.1	66.1
6	Angka Melek Huruf	%	97,97	98.5	99.55	98,55	99.75	98.65	97.32	98.95	97.32	98.97	98.97
7	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,36	0.36	0.34	0.35	0.25						
8	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	5.64	5.64	1.12	5.63	2.1	0.25	5.58	0.25		5:59	5:59
9	Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA	%	8.12	8.12	N/A	8.11	1.3	-	-	-	-	-	-
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	106.49	106.52	107.35	106.56	107.36	106.59	110.92	106.63	110.58	106.78	106.78
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.	%	92.61	92.64	93.21	92.66	97.54	92.68	87.16	98.7	91.03	98.83	98.83
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99.75	99.77	107.35	99.79	92.41	99.8	99.43	99.82	98.51	99.93	99.93
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	78.42	78.45	78.72	78.48	68.29	78.5	76.04	78.53	76.25	78.73	78.73
14	Persentase SD/MI yang Terakreditasi	%	92.85	93.02	98.85	94.89	95.53	95.32	90.83	96.2	92.42	97.22	97.22
15	Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi	%	83	83	97.85	84.56	83.5	85.45	67.69	86.34	87.23	89.34	89.34
16	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang berkualitas	Dokumen	-	-	-	-	-	1		1		2	4
17	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	%	49.35	22.65	71.69	22.68	59.98	22.73	27.12	22.80		22.80	22.8
1:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	Persentase Kepesertaan JKN	%	85	86	52	88	63.39	-		-		-	-
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	%	12	12.2	20	12.5	17.66	-		-		-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Persentase Pelayanan dengan IKM Kategori Baik	%	70	75	50	85	65	-		-		-	-
4	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100	100	92	100	100	-		-		-	-
5	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	59	59	67	63	77.12	-		-		-	-
6	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	64.65	64.65	76.74	79.06	92	-		-		-	-
7	Persentase Stunting	%	20	-	35	19.5	5.02	-		-		-	-
8	Persentase Penurunan Kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu	%	40	40	45	50	25	-		-		-	-
9	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	40	40	11	50	3.7	-		-		-	-
10	Persentase Puskesmas dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	%	50	50	50	55	35	-		-		-	-
11	Persentase Pengobatan Tradisional yang memenuhi syarat STPT dan SIPT	%	12	12	11	22	0	-		-		-	-
12	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	78	78	80	82	82	-		-		-	-
13	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%						94	97	96		98	98
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	%	-	-	-	-	-	15.38	74	11		9	9
15	Penurunan stunting	%	-	-	-	-	-	70	43.69	75		80	80
16	Persentase NAKES yang memiliki Standar Kompetensi (Sertifikat)	%	52	52	45	62	62	-	-	-		-	-
17	Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Puskesmas	%	55	55	60	65	65	-	-	-		-	-
18	Persentase Sumberdaya manusia Kesehatan yang	%	20	-	-	-	-	21	49	25		28	28

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	kompeten dan produktif												
19	Persentase Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan industri rumah tangga sesuai dengan standar	%	53	53	68	70	100	-	-	-		-	-
20	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	55	-	-	-	-	57	78	59		61	61
1:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94	94	98	98	98	98
2	Persentase Luas Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	45.45	45.45	65.33	47.45	67.76	70.11	65.51	72.38	72.38	74.48	74.48
3	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan infrastruktur permukiman yang aman dan layak	%	55.16	55.16	55.53	64.87	56.66	64.72	57.23	66.22	45.51	62.18	67.72
4	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang aman	%	-	-	-	-	-	64.72	57.23	66.22	60.2	62.18	67.72
5	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	%	-	-	-	-	-	56.8	57.23	57.29	26	58.23	58.23
6	Persentase Luas Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	45.45	45.45	65.33	47.45	67.76	-		-		-	-
7	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	%	-	-	-	-	-	72.2	57.23	73.27	80	74.14	74.14
8	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	51.98	57.23	52.36	45	53.11	53.11
9	Persentase pengembangan permukiman dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	52.27	57.23	53.41		54.3	54.3
10	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	51.1	57.23	52.23	55	53.42	53.42

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	52.18	57.23	53.21		54.37	54.37
12	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	71.95	71.95	64.39	75.17	71.11	71.06	71.11	71.01	71.90	-	-
13	Persentase Rasio Alat Berat Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	74	74	N/A	76	77	-		-		-	-
14	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	-	-	-	-	-	76.3	71.11	77.98		79.74	79.74
15	Persentase Sertifikat Terampil Konstruksi yang diterbitkan	%	100	100	N/A	100	100	-	-	-		-	-
16	Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikasi	%	-	-	-	-	-	52	52	67		73	73
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	%	86.66	86.66	86.93	87.2	87.2	87.47	87.47	87.74	87.74	88.01	88.01
1:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	75	76.5	N/A	77	77.5	-		-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase RTLH yang tertangani	%	-	-	-	-	-	77.5	80	78		78.8	78.8
4	Persentase Penanganan kawasan kumuh	%	15	15	15	20	25	-		-		-	-
5	Penanganan kawasan kumuh	Hektar	-	-	-	-	-	296.77		266.55		236.33	236.33
6	Persentase Pengembangan Penerangan jalan umum	%	0	0	100	83	87	-		-		-	-
7	Jumlah Taman kota dan areal Pemakaman umum yang Dikelola	Lokasi			100	21	85	-		-		-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	%	-	-	-	-	-	75	80	78		85	85
1:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	Persentase Peningkatan kapasitas Sat pol PP dan Linmas	%	82	85	78	85	25	-		-		-	-
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	90	92	75	93	60	100		100		100	100
3	Persentase Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi	%	68.42	69.42	N/A	70.42	N/A	-		-		-	-
4	Berkurangnya dampak bencana alam akibat dari kelalaian dan ulah masyarakat	%	100	100	100	100	100	-		-		-	-
5	Meningkatnya kewaspadaan, pengetahuan serta koordinasi dalam menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	-		-		-	-
6	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	100	100	100	100	100	-		-		-	-
7	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
8	Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	100	100	100		100	100
9	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana Kebakaran	Desa/ Kelurahan	14	8	N/A	8	N/A	-		-		-	-
10	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan	%	-	-	-	-	-	82	77.03	83		84	84
1:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	50	58.33	58.33	66.67	66.67	-	75	83.33	100	-	-
2	Persentase Sumber Dana	%	-	-	-	-	-	20	0	60	0	80	80

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial												
3	Persentase Penurunan PMKS	%	4.31	5.12	9	5.3	7.6	-	45.89	5.65	23.04	-	-
4	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	10.47	19.99	31.46	42.27	43.53	35.87	55.79	42.62	56.47	-	-
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
6	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	-	75	75	83.33	100	91.67	91.67
7	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya	%	-	-	-	-	-	75		83.33	62,50	91.67	91.67
8	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungsiannya	%	-	-	-	-	-	35.87	47.72	39.75	31,81	43.68	43.68
9	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	%	-	-	-	-	-	6.08	11	6.28	17,99	6.48	6.48
10	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	%	-	-	-	-	-	20	20	20	55	20	100
11	JUmlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Lokasi	-	-	-	-	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.05	4.05	3.8	4.02	4.86	-		-		-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi	%	-	-	-	-	-	100	68	100		100	100
2	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	5	5	316	7	48.86	5		7	39.4	10	10
2	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	%	12		42	10	6.37	-		-		-	-
3	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial pada Perusahaan	%	-	-	-	-	-	8		7	100	5	5
2:08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.64	87.98	88.01	88.15	88,14	-	88.24	87.68	88,35	-	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	53.34	54.31	54.25	54.41	54,60	-	58,51	-		-	-
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan PPRG	%	-	-	-	-	-	64.81	29.62	74.07	29.62	100	100
4	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani	%	76	78	78	80	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Dokumen Data Terpilah gender dan Anak Yang disediakan	Dok	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
6	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat-	Persiapan	Pratama	Persiapan	Madya	-	Pratama	-	Madya	Pratama	Nindya	Nindya
2:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
1	Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	%	102.1	102	N/A	101.8	93.8	-	-	-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Menurunnya Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	-	-	-	-	-	101.6	93,8	101.3	103.8	101	101
4	Nilai Coefisien Variasi (CV)	%	10	10	N/A	10	10		-				
5	Persentase kemandirian pangan	%	-	-	-	-	-	50	72.4	52	106.11	53	53
6	Persentase Cadangan Pangan daerah	%	4, 51	4, 51	4.51	15	4.51	22	N/A	26	10.85	30	30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Persentase sampel Pangan yang aman	%	76	76	100	82	100	84	100				
8	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi dalam penanganan mutu, gizi dan keamanan pangan	Unit	-	-	-	-	-	84		86		88	88
2:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan yang masuk	%	100	100	99.34	100	100	-		-		-	-
1	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
2	Persentase pengelolaan tanah kosong	%	-	-	-	-	-	70		78		85	85
3	Persentase Penatagunaan Tanah	%	-	-	-	-	-	70		78		85	85
2:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
1	Jumlah ketersediaan informasi SDA dan LH	%	90	90	60	90	60	-		-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai Standar	Dokumen	-	-	-	-	-	3 Dokumen KLHS RDTR		2 Dokumen KLHS RDTR		2 RPLH dan Dokumen KLHS RPJMD	7 Dokumen
4	Persentase pelaku usaha taat terhadap baku mutu lingkungan	%	95	95	95	95	96	-		-		-	-
5	Terkendalnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu	Nilai	-	-	-	-	-	Baku mutu kelas IV		Baku mutu kelas IV		Baku mutu kelas IV	Baku mutu kelas IV
6	Persentase pelaku usaha yang limbah B3 nya terkendali	%	-	-	-	-	-	80		90	90	100	100
7	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisionl dan	Dokumen	irigasi	-	-	-	-	1 SK MHA dan 1 SK HD		1 SK MHA dan 1 SK HD		1 SK MHA dan 1 SK HD	3 SK MHA dan 3 SK HD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah												
8	Persentase masyrakat yang memahami lingkungan hidup pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	-	-	-	60		65		70	70
9	Persentase Penghargaan yang diterima dari event yang diikuti	%	-	-	-	-	-	70		80		90	90
10	Luas kawasan SDA yang dikonservasi	%	65	65	21.36	65	65	-		-		-	-
11	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup	%	-	-	-	-	-	70		80		90	90
12	Luasan lahan RTH yang dikelola	%	-	-	-	-	-	15		20		25	25
13	Persentase pengaduan yang tertangani	%	-	-	-	-	-	70		80		90	90
14	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	18	20	10.42	22	29.78	-		-		-	-
15	Persentase Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	-	-	24	24	26	26	27	27
2:12	UURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
1	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	56.06	60	87.99	60.03	91.31	-		-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	%	-	-	-	-	-	60.05		60.08	105.6	61	61
4	meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	-	-	-	-	-	60.05		60.08	102.19	61	61

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Cakupan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	%	-	-	-	-	-	60.05		60.08		61	61
2:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
1	Persentase Desa yang Tertib Admnistrasi Keuangan dan Aset Desa	%	24.39	24.39	4.87	50	52	-		-		-	-
2	Jumlah RPKP yang dibentuk	Kawasan	1	1	1	2	0	-		-		-	-
3	Jumlah Kerja sama Antar Desa	Kerjasama	2	1	1	3	0	-		-		-	-
4	Persentase Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	25	45	45	50	51	-		-		-	-
5	Persentase Kelompok TTG Aktif	%	10	10	20	25	26	-		-		-	-
6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	45	50	50	55	66	-		-		-	-
7	Jumlah Lembaga Adat Aktif	Lembaga	0	0	0	30	35	-		-		-	-
8	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
9	Persentase Penataan Desa	%	-	-	-	-	-					15	15
10	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	10	-	-	-	-	25	25	30		35	35
11	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-	-	40	40	45		50	50
12	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	-	-	-	-	-	5	5	10		15	15
2:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	%	66	68	77.81	70	79.86	72	72	74		75	76
3	Jumlah Akseptor KB Aktif	Orang	64.983	2.309	62	2.710	63.040	4.001	3.001	2.752		2.802	78.557

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Rata-rata ASFR / Usia Kawin Pertama	Tahun	17	17.5	18	18.25	19	18.5	18.5	18.75		19	19
2:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
1	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	%	86	86	86	86	86	-		-		-	-
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	%	86	86	86	86	86	-		-		-	-
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	80		80		85	85
4	Prosentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik Prosentase tertib berlalulintas	%	-	-	-	-	-	75		80	47.2	85	85
2:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
2	Persentase Layanan Komunikasi Publik	%	60	60	0	70	65	75	75	85	85	95	95
3	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	%	0	0	0	10	10	40	40	75		90	90
2:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
1	Persentase koperasi sehat	%	25.26	25.5	25.68	25.7	15.35	-		-		-	-
2	Rata-rata pertumbuhan modal Koperasi	%	1.16	1.5	1.97	1.5	0.01	-		-		-	-
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
4	Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	%	-	-	-	-	-	9		10	33.55	15	15
5	Persentase KSP/USP-Koperasi Berpredikat Sehat	%	-	-	-	-	-	11		15	3.29	20	20
6	Persentase Pengurus Dan Pengawas Koperasi Yang	%	-	-	-	-	-	10		12		15	15

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Sudah Mengikuti Pelatihan Koperasi												
7	Persentase UMKM yang sehat	%	6	6.3	6.4	7.2	6.89	-		-		-	-
8	Persentase UMKM yang dibina	%		7.95	7.87	8.62	5.29	-		-		-	-
9	Pertumbuhan Unit Usaha UMKM	%	-	-	-	-	-	0.3		1.5	1.97	1.5	1.5
2:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
1	Persentase Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	%	100	100	43.38	100	98.37	-		100	100	-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Dokumen Perizinan	%	-	-	-	-	-	95		100		100	100
4	Persentase Pemanfaatan Data Informasi Penanaman Modal	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
5	Persentase Permohonan Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan	%	100	100	N/A	100	100	-		-		-	-
6	Persentase Penanaman Modal Yang Mendapat Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	%	-	-	-	-	-	60	100	70		80	80
7	Persentase Peningkatan Realiasasi Investasi	%	10.16	10.21	0.82	11.96	-68.83	-		-		-	-
8	Nilai Rencana Inevstasi	Milyar Rupiah	-	-	-	-	-	18,1 -		23.5		30.6	30.6
9	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	%	-	-	-	-	-	65		80	75	90	90
2:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina	Organisasi	14	14	14	15	0	-		-		-	-
2	Jumlah Gelanggang Olahraga Standar Nasional	Gelanggan g	2	2	2	3	0	-		-		-	-
3	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	Orang	95	95	89	97	24	-		-		-	-
4	Cakupan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	-	-	-	-	-	100	50	100	3.3	100	100
5	Persentase Atlit Berprestasi	%	-	-	-	-	-	100	3.03	100	9.75	100	100
6	Persentase Pengembangan Kapasitas Ke Pramukaan	%	-	-	-	-	-	100	0	100		100	100
2:20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
1	Persentase Data Sektoral Tersedia	%	0	0	0	25	24	-		-		-	-
2	Persentase Data Sektoral Tersedia	%	-	-	-	-	-	35		45	65	65	50
2:21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0	0	10	10	-		-		-	-
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	OPD	-	-	-	-	-	3 OPD	14	3 OPD		3 OPD	3 OPD
2:22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1.53	1.49	1.49	1.85	1.85	-	-	-		-	-
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	-	-	2.94	12	4.38		5.07	5.07
2	Persentase Kesenian Tradisional Yang dikembangkan	%	-	-	-	-	-	20		25		30	30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	-	-	-		25		30	30
2:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
1	Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	Katagori	Belum Memenuhi Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota	Belum Memenuhi Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota	Belum Memenuhi Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota	Belum Memenuhi Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota	Belum Memenuhi Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase Perpustakaan sesuai Standar	%	-	-	-	-	-	50	40	55	45	60	60
4	Persentase koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan	%	-	-	-	-	-	100	30	100	40	100	100
2:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
1	Jumlah Dokumen/Arsip yang disematkan	Unit	500	500	730	520	231	-		-		-	-
2	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	%	-	-	-	-	-	100	50	100	77	100	100
3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	-	-	-	-	-	18.52	15	19.64		20.69	20.69
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
1	Produksi Perikanan Tangkap di PUD (ton)	Ton	872.97	872.97	826	881.88	882.03	-		-	718.54	-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola	%	-	-	-	-	-	25	11	28		30	30
4	persentase usaha perikanan yang terawasi	%	-	-	-	-	-	75		80		85	85

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Produksi perikanan Budidaya (ton)	Ton	1327.23	1327.23	1355	1,373.68	1,429.00	-		-		-	-
6	Produksi Ikan di kawasan budidaya perikanan (ton)	Ton	9	9	7.8	16	19	-		-		-	-
7	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	%	-	-	-	-	-	33		35		40	40
8	Peningkatan Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Kg/kpt/th	30.89	30.89	29.89	31.81	30.17	-		-		-	-
9	persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	-	-	-	-	-	12		15	110	18	18
3:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
1	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	ODTW	24	5	5	2	6	-		-		-	-
2	Persentase Daya Tarik Destinasi Yang Layak	%	-	-	-	-	-	45	27.04	55	63.4	65	65
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98	98	98	98
4	Peningkatan Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	Pelaku	-	-	-	-	-	100	0	115		130	130
5	Peningkatan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompetensi	%	-	-	-	-	-	60	0	70		80	80
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	48,661	51,094	208,041	53,649	90,949	-		-		-	-
7	Jumlah Event/Promosi Pariwisata yang diikuti	Event	3	4	2	4	1	-		-		-	-
8	Jumlah Event/Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	Event	2	2	1	4	0	-		-		-	-
9	Jumlah Mitra Usaha yang dibina	Mitra Usaha	40	40	29	44	0	-		-		-	-
10	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan	Orang	-	-	-	-	-	1200	971	1800	1806	2700	2700

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
1	Jumlah Kelompok Tani menerapkan Pengolahan Hasil TPH	Kelompok	10	10	14	15	14	-		-		-	-
2	Presentase Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pertanian TPH	%	36.5	38.69	39.12	41.01	41.51	-		-		-	-
3	Peningkatan Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)	Kw/Ha	53.28	54.52	51.41	58.63	53.78	-		-		-	-
4	Peningkatan Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	Kw/Ha	61.36	61.97	61.59	62.59	62.87	-		-		-	-
5	Peningkatan Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)	Kw/Ha	16.43	12.79	12.54	12.92	10.46	-		-		-	-
6	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar (Kw/Ha)	Kw/Ha	214.53	248.86	349.04	288.68	325.71	-		-		-	-
7	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah (Kw/Ha)	Kw/Ha	13.1	13.23	111.11	13.36	15.18	-		-		-	-
8	Peningkatan Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS) (Kw/Ha)	Kw/Ha	82.32	82.74	189.61	83.15	97.5	-		-		-	-
9	Peningkatan Produktivitas Buah - buahan dan Sayuran Tahunan (BST) (Kw/Ha)	Kw/Ha	150.67	151.43	N/A	152.18	183.66	-		-		-	-
10	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit(Kg /Ha/Th)t	Kg /Ha/Th	4,253	4,678	4,254	5,263	4,254	-		5,921	4,270	-	-
11	Peningkatan Produktivitas Kopi (Kg /Ha/Th)	Kg /Ha/Th	1,223	1,370	1,321	1,534	1,348	-		1,718	1,330	-	-
12	Peningkatan Produktivitas Karet (Kg /Ha/Th)	Kg /Ha/Th	941	1,035	941	1,139	940	-		1,253	945	-	-
13	Peningkatan Jumlah Tanaman Tembakau	Ton	16	16	14	17	12	-		-		-	-
14	Persentase kelahiran sapi hasil IB	%	7.50%	7.50%	9.1	7.50%	17.70%	-		7.5	(0,03)	-	-
15	Populasi Sapi (Ekor/ Tahun)	Ekor/Tahun	17136	19,192	18,610	21,495	18,246	-		24.075	15.744	-	-
16	Populasi Kerbau (Ekor/ Tahun)	Ekor/Tahun	4,449	4,605	4,412	4,651	4,195	-		-		-	-
17	Populasi Ternak Kambing (Ekor/Tahun)	Ekor/Tahun	34,148	35,855	43,917	37,648	40,456	-		39.531	40.496	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
18	Populasi Ternak Unggas (Ekor/Tahun)	Ekor/Tahun	1,741,377	1,915,515	2,181,576	2,107,066	2,134,271	-		2,317,773	3,840,044	-	-	
19	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98	
20	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	-	-	-	-	-	46.8	45	50.45		53.8	53.8	
21	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	%	-	-	-	-	-	35		35	20	35	35	
22	Persentase Penyediaan Sarana Perkebunan	%	-	-	-	-	-	41		41	57.94	40	40	
23	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	-	-	-	-	-	70.5	67	82.5		84.5	84.5	
24	Persentase Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	%	-	-	-	-	-	85		85	66.67	85	85	
25	Persentase Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	%	-	-	-	-	-	90		90	81.82	90	90	
26	Persentase TPH yang Terkendali dari Bencana Pertanian (%)	%	-	-	-	-	-	43	43	46		49	49	
27	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%	-	-	-	-	-	5		5	1.56	5	5	
28	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%	9.20%	9.20%	N/A	9.20%	N/A	9.2		9.5	6.06	9.75	9.2	
29	Jumlah Peningkatan Kelas Kelembagaan Penyuluhan (Unit)	Unit	-	-	-	-	-	6	6	6	1	7	7	
30	Jumlah Penyuluh yang menerima STTPL (orang)	Orang	15	15	28	18	16	-		-		-	-	
31	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Peternakan dan Perkebunan (Kelompok)	Kelompok	-	-	-	-	-	1	89	1	1	-	1	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
32	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	%	-	-	-	-	-	35		40	25	45	45
3:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	cakupan pengawasan perdagangan	%	12.24	12.36	13.11	13.48	6.67	-		-		-	-
2	Rata-rata Kenaikan Harga Barang Pokok	%	-	-	-	-	-	≤ 7		≤ 5	10.1	≤ 5	≤ 5
3	Persentase Wajib Tera Tertib Ukur	%	-	-	-	-	-	4		8		12	12
4	Nilai Perdagangan (Rp)	Rupiah	1,707,840.70	2,100,000	1.923.612.93	2,300,000	1,923,612.93	-		-		-	-
5	Cakupan Bina PKL	%	31.46	32	32.17	33	28.37	-		-		-	-
6	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	-	-	-	-	-	40		67	41.5	70	70
7	Persentase Pertumbuhan Omzet Pelaku Usaha Komoditi/Produk Yang Dipromosikan	%	-	-	-	-	-	-		10		10	20
3:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
1	Pertumbuhan unit usaha IKM	%	1.54	1.5	1.61	1.5	2.76	-		-		-	-
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	-	-	-	-	-	1.5		1.5		1.5	1.5
3	Persentase IKM Pangan Yang Memiliki Sertifikasi (HKI/BPOM/PPIRT/HALAL)	%	-	-	-	-	-	20.17		30		33	33
4	Persentasi Usaha Industri Yang Masuk Kedalam SIINas	%	-	-	-	-	-	5		1.5	1.3	-	-
3:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
1	Pengembangan wilayah transmigrasi	Wilayah	2	2	2	3		-		-		-	-
2	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	Kawasan	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4:01	SEKRETARIAT DAERAH												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase PD yang nilai akip baik	Nilai	> 65-75	> 65-75	N/A	> 65-75	> 65-75	-		-		-	-
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/Inspektorat	%	100	100	N/A	100	99.96	-		-		-	-
3	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	%	95	95	95	95:50:00	95	-		-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
5	Persentase OPD yang menyampaikan LKJ yang sesuai standar dan Tepat Waktu	%			-	87	87	-		-		-	-
6	Persentase OPD yang menyampaikan Data LPPD yang akurat dan Tepat Waktu	%			-	87	87	-		-		-	-
7	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	-	-	-	-	-	97		97		98	98
8	Persentase Pengadaan barang dan Jasa Tepat Waktu	%	100	100	90	100	95	-		-		-	-
9	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	%	-	-	-	-	-	98		98		98	98
4:02	SEKRETARIAT DPRD												
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	100	99.04	100	97.75	-		-		-	-
2	Persentase Bimtek Penyusunan Perundang- undangan yang berkualitas	%	100	100	76.74	100	97.75	-		-		-	-
3	Persentase Rapat dan Risalah persidangan yang berkualitas	%	85	85	100	86	97.75	-		-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Persentase terlaksannya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5:01	PERENCANAAN												
1	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD	%	95	95	100	96	100	-		-		-	-
2	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	95	95	100	96	100	-		-		-	-
3	Rata-rata Keselarasan Renja Terhadap Renstra	%	90	92	100	93	100	-		-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
5	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	86		88		90	90
6	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	86		88		90	90
5:02	KEUANGAN												
1	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disusun	%	95	95	100	96	100	-		-		-	-
2	Persentase Perencanaan Keuangan yang disusun	%	95	95	100	96	100	-		-		-	-
3	Persentase Laporan Keuangan BUD yang disusun	%	95	95	100	96	100	-		-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
5	Indeks pengelolaan keuangan daerah	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	%	95	96	100	97	100	95		96		97	97
7	Persentase peningkatan PAD	%	-12.01	-12.01	18.9	8.77	99.96	6.02		5.68		5.37	5.37
5:03	KEPEGAWAIAN												
1	Rata-rata Prestasi Kinerja Profesional	%	94	94	85.5	94	87.2	-		-		-	-
2	cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	95	95	87.77	96	80.17	-		-		-	-
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
4	Persentase Pemehuhan Kebutuhan, Kesenjangan Kompetensi ASN sesuai Formasi	%	-	-	-	-	-	92		93		93	96
5	Persentase peningkatan Kompetensi ASN	%	97.5	97.5	94.58	98	57.75	98:50:00		99		99:50:00	99:50:00
5:04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
1	Persentase OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah	%	3.7	3.7	3.7	9.5	16.07	-		-		-	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kajian	%	-	-	-	100	100	-		-		-	-
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
4	Persentase Perangkat Derah yang Melaksanakan Inovasi Daerah	%	-	-	-	-	-	26.79		35.71		44.64	44.64
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6:01	INSPEKTORAT												
1	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP	%	100	100	100	100	41	-		-		-	-
2	Persentase Aparatur Internal Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat	%	80	80	80	85	6.24	-		-		-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi												
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	90	90	90	100	99.96	-		-		-	-
4	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
6	Peningkatan Perumusan Kebijakan , pendampingan dan asistensi	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7:01	KECAMATAN												
1	Persentase Pelayanan Kecamatan yang Tepat Waktu	%	79.66	79.66	N/A	80.08	N/A	-		-		-	-
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
4	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
5	Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	-	-	-	-	-	100	95	100	95	100	100
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-	-	100		100		100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
1	Jumlah Fasilitas Administrasi dan	Jumlah	3 Kali	4 Kali	4 Kali	-	-	-		-		-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Dan Realisasi Sebelum Perubahan RPJMD				Target dan Realisasi Capaian Tahun setelah Perubahan RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Pengawasan Ormas dan Yayasan												
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	94		98		98	98
3	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa dalam Kabupaten Merangin	%	75	100	100	-	-	100	62	100	99	100	100
4	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	70	70	60	85	67.75	-		-		-	-
5	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	70	100	-	-	-	100		100	98	100	100
6	Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan	%	80	80	-	-	-	-		-		-	-
7	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	-	5	4	5	5	-		-		-	-
8	Persentase Pemberdayaan dan Pengawsan Ormas dalam Kabupaten Merangin	%	-	-	-	-	-	100		100	98	100	100
9	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	70	100	-	-	-	100		100	99	100	100
10	Persentase Peningktan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas penanganan konflik sosial	%	95	100	-	-	-	100		100	99	100	100



2.6. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan ini dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penerapan SPM pasca diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel II-59. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Minimum	Mutu Pelayanan
1	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini untuk pendidikan anak usia dini ini pelayanan diberikan pada warga Negara usia 5 - 6 tahun b. Pendidikan dasar untuk warga Negara usia 7-15 Tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan c. Pendidikan kesetaraan untuk warga Negara usia 7–18 tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.	• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; • Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; untuk ibu hamil b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; untuk ibu melahirkan c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; untuk bayi baru lahir d. Pelayanan kesehatan balita; untuk balita e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; untuk usia pendidikan dasar f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; untuk usia produktif g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; untuk usia lanjut h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; untuk penderita hipertensi i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; untuk penderita diabetes melitus j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; untuk orang dengan gangguan jiwa berat k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; untuk orang terduga tuberkulosis l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus); untuk orang	• Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; • Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan; dan • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.



No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Minimum	Mutu Pelayanan
		beresiko HIV.	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; untuk seluruh warga negara b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat; untuk seluruh warga Negara	• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; untuk Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana. b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah; untuk Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. Pelayanan informasi rawan bencana; c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; • Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
6	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.	• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; • Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan • Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018



Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

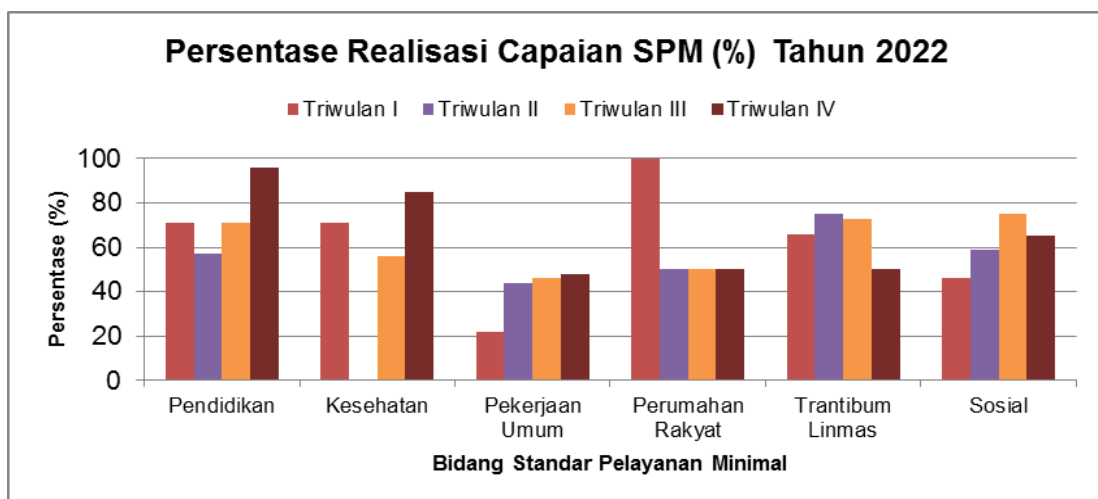
SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

Tabel II-60. Persentase Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2022 di Kabupaten Merangin

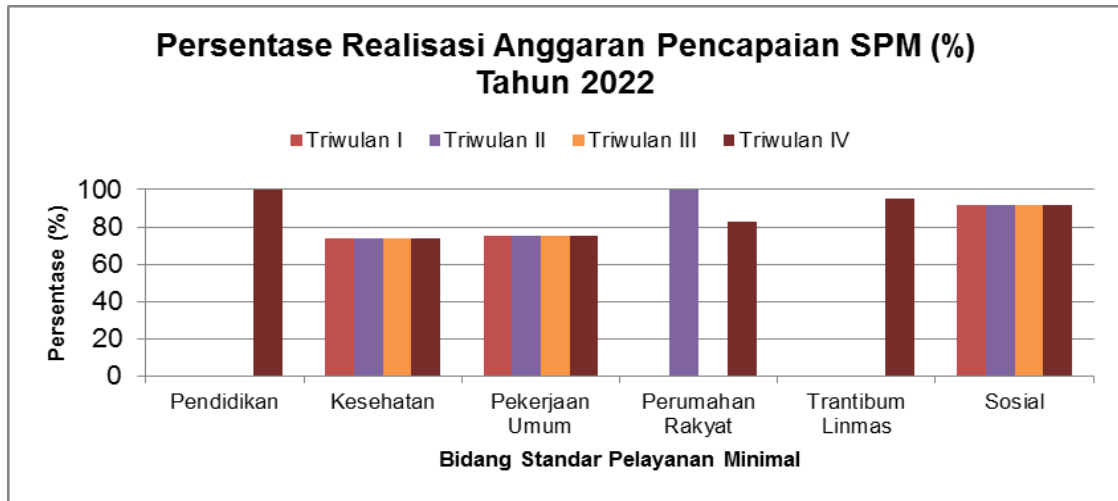
Bidang	Persentase (%)							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	C	A	C	A	C	A	C	A
Pendidikan	71	0	57	0	71	0	96	100
Kesehatan	71	74	0	74	56	74	85	74
Pekerjaan Umum	22	75	44	75	46	75	48	75
Perumahan Rakyat	100	0	50	100	50	0	50	83
Trantibum Linmas	66	0	75	0	73	0	50	95
Sosial	46	92	59	92	75	92	65	92

Keterangan: C: Persentase Realisasi Capaian, A: Persentase Realisasi Anggaran

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2023



Gambar II-8. Grafik Capaian SPM Kabupaten Merangin per Triwulan Tahun 2022



Gambar II-9. Grafik Realisasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Kabupaten Merangin per Triwulan Tahun 2022

SPM merupakan salah satu yang turut dievaluasi, karena ini merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2019-2022, karena SPM ini baru diterapkan mulai tahun 2019. Evaluasi capaian pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Realisasi Tahun 2019-2022 sebagai berikut:



**Tabel II-102. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2019-2022**

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
A.	Pendidikan						
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 6 buah Buku Gambar per peserta didik per semester	%	100	100	100	100
		Jumlah Peserta Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 set paling sedikit 12 warna peserta didik per semester	%	100	100	100	100
		Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 Bidang PAUD, Kependidikan lain atau Psikologi	%	35.54	35.46	35.46	35.46
		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD	%	5.89	5.89	5.89	5.89
		Persentase Kepala Satuan PAUD yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	50	50	50	50
		Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	22.06	22.06	22.06	22.06
		Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non Formal dari Lembaga Pemerintah yang berwenang	%	22.06	22.06	22.06	22.06
	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per tahun	%	70	70	70	70
		Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	%	70	70	70	70
		Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	91	91	91	91
		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	58	58	58	58
		Persentase Kepala SD paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	78	78	78	78
		Persentase Kepala SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	58	58	58	58
		Persentase Kepala SD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	%	30	30	30	30
		Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	%	50	50	50	50

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
	Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik perTahun	%	60	60	60	60
		Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	%	60	60%	60	60
		Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	97	97	97	97
		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	62	62	62	62
		Persentase Kepala SMP paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	90	90	90	90
		Persentase Kepala SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	62	62	62	62
		Persentase Kepala SMP yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	%	53	53	53	53
		Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	%	58.12	58.12	58.12	58.12
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 Paket Modul Belajar per peserta didik per tahun	%	0	100	100	100
		Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	%	0	100	100	100
		Persentase Tutor yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	0	60	60	60
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	%	0	50	50	50
		Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	%	0	80	80	80
B.	Kesehatan						
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	42	42	85.88	83.5
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	67	67	71.26	83.4
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99.80	99.80	90.85	83.5
		Pelayanan kesehatan balita	%	91	91%	82.59	76.5
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100%	75.17	91.95
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	34.70	34.70%	79.38	74.01
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	99.30	99.30%	66.87	97.62
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	15.50	15.50%	65.30	79.3

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	21.41	21.41	90.37	98.3
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	84.30	84.30	82.11	98
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	60.20	60.20	69.93	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	59.00	59.00	57.23	50.97
C.	Pekerjaan Umum						
	Bidang Air Minum	Rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air minum	%	56.66	56.66	56.66	65.82
	Bidang Air Limbah	rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	56.66	56.66	56.66	32.77
D.	Perumahan						
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	%	0	0	0	0
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	%	0	0	0	0
		Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	%	0	0	0	0
		Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	%	0	0	0	0
	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas PenguasaanTanah dan/atau Bangunan	%	0	0	0	0
		Subsidi uang sewa	%	0	0	0	0
		Penyediaan rumah layak huni	%	0	0	0	0
E.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	POL PP						
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Merangin	%	60	60	60	60
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	kali/hari	1	1	1	1
		Cakupan Rasio perlindungan Masyarakat (linmas)	orang/ desa	7	7	7	7
2	Pemadam Kebakaran						
	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%				6.90
		Target waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%				75
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%				85
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	%				90
3	BPBD						
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0%				100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0%				100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%				100
F.	Sosial						
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti :	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	45.00	19.23	80	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti :	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100.00	20.00	15	75
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti :	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	89.30	20.00	42	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti :	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0.00	20.00	0	100
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota :	Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	%	7.40	20.00	8.60	55



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa pasal Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dicabut, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-



masing daerah. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi dan potensi keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu, perlu dilakukan analisis rasio keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai



bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 3 (Tiga) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Merangin secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 3 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Perkiraan proyeksi selama 3 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan



Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 3 tahun ke depan (dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan



lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas. Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel III-1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	2018	1,334,262,666,035.62	1,314,901,386,617.92	19,879,801,475.85
2	2019	1,508,597,828,736.42	1,448,966,662,740.68	35,241,080,893.56
3	2020	1,370,699,036,324.31	1,422,399,193,766.25	116,185,426,640.27
4	2021	1,362,729,216,071.34	1,495,146,655,793.28	181,331,530,570.46
5	2022	1,327,970,016,609.70	1,223,915,516,554.40	(21,406,050,295.01)

Sumber: BPKAD, Realisasi APBD Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas, anggaran untuk pendapatan turun tahun 2018 karena pengurangan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, naik kembali tahun 2019 namun turunnya Transfer Ke Daerah Dan Desa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan hingga di tahun 2022 sampai dengan tahun 2022. Untuk belanja daerah tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan.



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Berikut table berikut ini rasio keuangan daerah Kabupatemn Merangin dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah selama 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-2. Neraca Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	23,680,370,719.47	39,357,345,452.82	94,982,286,250.39	64,614,527,305.10	62,183,587,330.58	42.95%
Kas di Kasda	21,387,655,214.45	38,495,495,134.96	89,752,031,596.25	61,074,271,695.24	48,998,340,987.49	40.35%
Kas di Bendahara Penerimaan	1,174,000.00	18,298,500.00	2,965,500.00	10,112,484.70	7,737,958.43	398.09%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	655,061.00	100.00%
Kas di BLUD	171,144,802.00	59,733,073.00	2,886,949,391.00	1,606,495,328.00	11,649,001,627.00	1312.19%
Kas di FKTP	-	-	1,221,973,510.25	1,115,270,054.49	493,060,466.84	-16.13%
Kas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kas JKN Kapitasi						-
Kas Dana BOS	1,776,625,565.00	667,554,185.60	1,008,326,891.80	704,242,141.60	665,294,747.76	10.45%
Kas TPG						-
Kas Lainnya	343,771,138.02	116,264,559.26	110,039,361.09	104,135,601.07	369,496,482.06	-5.36%
Piutang	26,716,976,620.28	52,853,218,489.95	70,536,948,813.92	32,770,201,247.26	44,356,133,887.43	28.27%
Piutang Pajak	15,714,721,447.74	15,259,231,469.95	15,999,933,663.06	19,782,394,084.84	21,161,748,637.54	8.14%
Piutang Retribusi	2,476,825,464.00	3,126,235,227.00	2,690,329,427.00	3,481,510,735.00	3,442,088,435.00	10.14%
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5,817,975,308.00	9,721,329,071.00	9,716,488,826.00	3,283,003,071.00	25,234,088,886.08	167.36%
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	25,694,537,088.51	25,660,744,638.00	1,936,741,122.00	-	-48.15%

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Piutang Transfer Bantuan Keuangan	4,346,500,000.00	-	16,767,485,689.04	10,821,295,423.00	14,610,312,511.00	-25.11%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	20,840,125.00	18,121,375.00	128,084,170.00	86,909,244.00	50,919,000.00	130.05%
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	52,592,652.00	51,000,000.00	11,137,375.00	7,009,375.00	4,009,375.00	-40.26%
Piutang Lainnya	53,700,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00	0.00%
Penyisihan Piutang	(11,880,807,621.56)	(11,365,326,555.61)	(11,947,764,386.05)	(13,191,420,150.42)	(28,166,439,328.08)	31.18%
Beban Dibayar Dimuka	423,956,379.17	217,262,867.50	280,017,100.83	845,322,935.02	1,492,387,296.92	64.64%
Persediaan	9,690,672,865.93	10,077,127,946.60	11,176,792,311.04	5,663,735,407.82	6,473,319,073.97	-5.03%
Jumlah Aset Lancar	50,397,347,339.75	92,210,563,942.77	165,519,235,064.31	97,384,728,552.36	106,539,721,218.01	32.68%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	138,188,041.75	139,288,041.75	139,588,041.75	139,588,041.75	139,588,041.75	0.25%
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	138,188,041.75	139,288,041.75	139,588,041.75	139,588,041.75	139,588,041.75	0.25%

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53,508,508,065.31	53,951,902,459.55	56,720,854,494.30	55,771,920,569.23	58,743,063,493.94	2.40%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	53,508,508,065.31	53,951,902,459.55	56,720,854,494.30	55,771,920,569.23	58,743,063,493.94	2.40%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	53,646,696,107.06	54,091,190,501.30	56,860,442,536.05	55,911,508,610.98	58,882,651,535.69	2.40%
ASET TETAP						
Tanah	81,045,425,720.00	81,840,690,050.00	81,917,987,713.00	81,484,483,285.00	183,839,623,660.00	31.54%
Peralatan dan Mesin	371,898,942,875.14	367,241,629,850.14	445,796,220,626.87	514,767,994,896.27	585,883,318,635.00	12.36%
Gedung dan Bangunan	762,144,639,208.80	805,887,335,582.09	862,909,010,823.10	892,908,194,978.84	1,004,744,796,900.63	7.20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,730,891,502,230.00	1,859,853,469,405.71	1,953,393,774,959.83	2,034,078,115,337.35	2,337,006,853,898.08	7.88%
Aset Tetap Lainnya	66,907,177,313.00	57,496,372,859.00	69,226,725,470.00	73,787,231,419.00	77,993,154,519.00	4.66%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,508,901,903.00	-	-	171,562,857,278.10	6,188,238,163.00	-49.10%
Akumulasi Penyusutan	(1,166,739,510,589.01)	(1,356,858,230,956.24)	(1,523,835,663,684.37)	(1,689,428,102,011.28)	(1,891,104,916,869.69)	12.85%
Jumlah Aset Tetap	1,850,657,078,660.93	1,815,461,266,790.70	1,889,408,055,908.43	2,079,160,775,183.28	2,304,551,068,906.02	5.76%
DANA CADANGAN						

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	1,007,039,601.40	528,757,558.20	519,242,778.80	498,147,930.00	499,302,048.00	-13.28%
Aset Lain - Lain	24,960,384,027.50	59,008,607,278.50	57,936,887,184.90	37,857,704,665.42	36,841,666,403.54	24.31%
Amortisasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	25,967,423,628.90	59,537,364,836.70	58,456,129,963.70	38,355,852,595.42	37,340,968,451.54	22.61%
JUMLAH ASET	1,980,668,545,736.64	2,021,300,386,071.47	2,170,243,863,472.49	2,270,812,864,942.04	2,507,314,410,111.26	6.12%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	343,442,912.82	116,264,559.26	110,039,361.09	100,875,925.00	313,192,525.00	32.66%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	81,193,065,721.00	100.00%
Pendapatan Diterima Dimuka	208,882,080.94	262,938,948.96	310,390,116.38	347,560,440.24	245,145,009.58	6.61%
Utang Beban	7,318,137,663.00	6,572,638,948.20	10,801,678,861.50	8,829,032,169.32	27,505,347,328.29	61.86%

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Utang Jangka Pendek Lainnya	9,695,860,845.28	2,979,131,845.00	441,075,170.53	76,631,134,418.22	-	4254.81%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	85,908,602,952.78	109,256,750,583.87	159.43%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	21,313,179,751.00	60,894,799,290.00	46.43%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	21,313,179,751.00	60,894,799,290.00	46.43%
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	107,221,782,703.78	170,151,549,873.87	213.00%
Ekuitas	1,963,102,222,234.60	2,011,369,411,770.05	2,158,580,679,962.99	2,163,591,082,238.26	2,337,162,860,237.39	4.51%
Jumlah Ekuitas	1,963,102,222,234.60	2,011,369,411,770.05	2,158,580,679,962.99	2,163,591,082,238.26	2,337,162,860,237.39	4.51%
JUMLAH EKUITAS	1,963,102,222,234.60	2,011,369,411,770.05	2,158,580,679,962.99	2,163,591,082,238.26	2,337,162,860,237.39	4.51%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,980,668,545,736.64	2,021,300,386,071.47	2,170,243,863,472.49	2,270,812,864,942.04	2,507,314,410,111.26	6.12%

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin beberapa tahun (diolah)



1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021 sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 6,12 persen, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen asset lainnya yaitu sebesar 22,61 persen, dan pada aset lancar sebesar 32,68 persen, pada investasi jangka panjang sebesar 2,40 persen dan yang paling kecil adalah rata-rata pertumbuhan pada aset tetap, hanya sebesar 5,76 persen. Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1,980,668,545,736.64 dan per 31 Desember tahun 2021 naik menjadi Rp. 2,507,314,410,111.26.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang



penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin rata-rata kenaikannya sebesar 213.00 persen per tahun. Jumlah kewajiban pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 17,566,323,502.04 dan pada tahun 2021 menjadi Rp. 170,151,549,873.87

3. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 2017, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Sejak tahun 2017, dengan diterapkannya basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi.

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin dari tahun 2017–2021 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 4.51 persen dengan saldo pada tahun 2017 sebesar Rp. 32,831,023,837.71 dan pada tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 2,717,029,365.86. maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel 3.7 berikut:

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin tinggi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-3. Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021

Ratio	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Lancar	50,397,347,339.75	92,210,563,942.77	165,519,235,064.31	97,384,728,552.36	106,539,721,218.01
	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	85,908,602,952.78	109,256,750,583.87
	2.87	9.29	14.19	1.13	0.98
Quick Rasio	9,690,672,865.93	10,077,127,946.60	11,176,792,311.04	5,663,735,407.82	6,473,319,073.97
	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	85,908,602,952.78	109,256,750,583.87
	0.55	1.01	0.96	0.07	0.06
Net Working Capital Ratio (NWCR)	32,831,023,837.71	82,279,589,641.35	153,856,051,554.81	11,476,125,599.58	(2,717,029,365.86)
	1,980,668,545,736.64	2,021,300,386,071.47	2,170,243,863,472.49	2,270,812,864,942.04	2,507,314,410,111.26
	0.02	0.04	0.07	0.01	(0.00)

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin beberapa tahun (diolah)



Rasio likuiditas Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021 di atas dapat pula diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2017 adalah sebesar 2.87 persen dan tahun 2021 sebesar 0.98 persen.

b. Rasio Quick

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2017 sebesar 0.55 persen serta periode tahun 2021 quick rasio sebesar 0,06 persen. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Merangin dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rsio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas dapat dilihat tabel berikut ini:

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-4. Rasio Solvabilitas Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021

Ratio	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio kewajiban terhadap aset	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	85,908,602,952.78	109,256,750,583.87
	1,980,668,545,736.64	2,021,300,386,071.47	2,170,243,863,472.49	2,270,812,864,942.04	2,507,314,410,111.26
	0.01	0.00	0.01	0.04	0.04
Rasio kewajiban terhadap ekuitas	17,566,323,502.04	9,930,974,301.42	11,663,183,509.50	85,908,602,952.78	109,256,750,583.87
	1,963,102,222,234.60	2,011,369,411,770.05	2,158,580,679,962.99	2,163,591,082,238.26	2,337,162,860,237.39
	0.01	0.00	0.01	0.04	0.05

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin beberapa tahun (diolah)



1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 0,01 persen dan pada tahun 2021 sebesar 0,04 persen. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2019 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Merangin sebesar 0,01 persen serta periode tahun 2021 sebesar 0,05 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Merangin, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil; dan
- 3) Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non- konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB yang akan menjadi Pajak Daerah.



- c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
 - d. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
 - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan.

Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018–2022 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel III-5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)

NO	URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN DAERAH	1,365,277,317,535.58	1,334,262,666,035.62	1,531,257,422,330.53	1,508,597,828,736.42	1,358,014,402,327.23	1,370,699,036,324.31
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,456,989,013.43	89,304,559,027.72	102,584,921,504.97	106,160,970,249.67	100,411,729,724.43	100,401,270,017.27
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	21,845,500,000.00	22,384,773,638.71	24,020,000,000.00	24,178,720,587.80	23,407,056,698.00	23,205,906,081.76
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,980,066,500.00	4,915,510,062.80	7,392,917,600.00	6,216,775,248.94	6,244,721,535.00	4,842,609,805.62
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,392,257,789.50	5,392,257,789.50	5,755,885,001.09	5,755,885,001.09	5,896,472,394.43	5,896,472,394.43
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64,239,164,723.93	56,612,017,536.71	65,416,118,903.88	70,009,589,411.84	64,863,479,097.00	66,456,281,735.46
1.2	DANA PERIMBANGAN	979,151,308,421.00	978,236,523,005.00	1,074,632,080,080.00	1,039,700,153,727.00	953,952,555,906.00	959,888,246,092.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46,030,984,421.00	63,774,750,863.00	75,395,646,000.00	63,689,605,147.00	57,725,588,451.00	68,485,966,368.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	718,849,295,000.00	718,849,295,000.00	742,330,885,000.00	742,330,942,000.00	669,437,069,000.00	666,860,141,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	214,271,029,000.00	195,612,477,142.00	256,905,549,080.00	233,679,606,580.00	226,789,898,455.00	224,542,138,724.00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



NO	URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	287,669,020,101.15	266,721,584,002.90	354,040,420,745.56	362,736,704,759.75	303,650,116,696.80	310,409,520,215.04
1.3.1	Pendapatan Hibah	47,927,680,000.00	48,430,320,000.00	68,266,711,000.00	67,151,591,000.00	59,045,999,999.80	57,351,730,000.00
1.3.2	Dana Darurat		-				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70,671,027,101.15	52,220,951,025.90	53,562,165,745.56	63,373,569,782.75	47,806,149,697.00	56,365,188,601.04
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	148,823,813,000.00	148,823,812,977.00	213,311,544,000.00	213,311,543,977.00	183,897,967,000.00	183,792,601,614.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20,246,500,000.00	17,246,500,000.00	18,900,000,000.00	18,900,000,000.00	12,900,000,000.00	12,900,000,000.00

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



**Tabel III-6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023
(PP Nomor 12 Tahun 2019)**

NO	URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2022*		Tahun Anggaran 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4	PENDAPATAN DAERAH	1,390,884,149,440.00	1,362,729,216,071.34	1,319,533,844,169.00	1,327,970,016,609.70	1,373,517,506,252.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111,262,174,504.00	107,879,827,143.34	140,670,249,862.00	116,712,550,950.70	123,643,137,365.00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	41,278,469,000.00	29,071,195,348.54	37,589,744,000.00	28,572,619,327.45	44,781,300,000.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,017,102,850.00	3,997,414,340.92	6,894,347,922.00	4,223,871,096.65	7,241,997,600.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,265,202,339.00	6,265,202,339.18	7,100,359,765.00	7,100,359,765.78	7,100,359,765.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57,701,400,315.00	68,546,015,114.70	89,085,798,175.00	76,815,700,760.82	64,519,480,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,225,952,919,108.00	1,202,523,156,196.00	1,176,863,594,307.00	1,209,257,465,659.00	1,246,774,368,887.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,147,931,149,000.00	1,138,073,160,957.00	1,089,876,209,520.00	1,118,725,234,640.00	1,159,084,829,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	78,021,770,108.00	64,449,995,239.00	86,987,384,787.00	90,532,231,019.00	87,689,539,887.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,669,055,828.00	52,326,232,732.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,100,000,000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	53,669,055,828.00	52,326,232,732.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,100,000,000.00
4.3.2	Dana Darurat		-		-	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



NO	URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2022*		Tahun Anggaran 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-		-	

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023



3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2018–2022 dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkair secara langsung dalam pelaksanaan program-program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan target perangkat daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Adapun belanja tidak langsung terdiri atas Belanja Pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Namun untuk tahun 2021, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja Tidak terduga dan belanja transfer.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2018–2022 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel III-7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)

NO	URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	BELANJA DAERAH	1,385,113,917,117.00	1,314,901,386,617.92	1,566,498,503,224.09	1,448,966,662,740.68	1,596,016,859,189.53	1,422,399,193,766.25
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	802,564,564,387.00	756,019,471,793.97	865,072,561,983.37	828,768,103,917.14	847,187,307,200.35	820,121,472,911.82
2.1.1	Belanja Pegawai	523,738,619,295.00	482,538,731,272.00	582,090,138,047.87	546,842,941,131.00	539,664,071,154.73	519,742,171,403.44
2.1.2	Belanja Bunga		-		-	2,488,171,889.76	1,288,171,889.76
2.1.3	Belanja Subsidi				-		
2.1.4	Belanja Hibah	34,561,717,500.00	29,297,326,119.01	11,394,600,000.00	11,283,759,100.00	11,133,300,000.00	10,375,415,919.82
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				-		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2,802,386,650.00	2,802,386,650.00	3,204,236,650.00	3,204,236,650.00	2,685,620,869.80	2,685,620,869.80
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	238,611,840,942.00	238,531,493,252.96	264,200,064,200.00	264,200,022,191.14	264,791,303,900.00	264,685,904,554.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,850,000,000.00	2,849,534,500.00	4,183,523,085.50	3,237,144,845.00	26,424,839,386.06	21,344,188,275.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	582,549,352,730.00	558,881,914,823.95	701,425,941,240.72	620,198,558,823.54	748,829,551,989.18	602,277,720,854.43
2.2.1	Belanja Pegawai	90,079,191,546.00	88,665,186,819.20	69,729,785,960.00	67,498,416,798.00	73,354,251,557.00	71,715,687,805.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278,144,059,196.00	262,975,342,136.75	350,685,753,324.72	325,971,480,182.85	272,984,584,275.02	255,804,012,050.60
2.2.3	Belanja Modal	214,326,101,988.00	207,241,385,868.00	281,010,401,956.00	226,728,661,842.69	402,490,716,157.16	274,758,020,998.83

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-8. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023
(PP Nomor 12 Tahun 2019)

No	URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2021		Tahun 2022*		Tahun Anggaran 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5	BELANJA	1,573,211,571,366.00	1,495,146,655,793.28	1,298,154,869,296.00	1,223,915,516,554.40	1,389,122,704,962.00
5.1	BELANJA OPERASI	933,459,872,992.00	878,733,677,513.42	952,285,942,832.00	888,224,976,697.40	918,789,130,146.00
5.1.1	Belanja Pegawai	579,260,643,676.00	554,502,039,676.00	554,705,191,528.00	526,735,638,444.00	564,763,655,684.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325,494,313,423.00	295,657,727,021.06	340,368,172,358.00	306,227,317,743.40	313,718,254,909.00
5.1.3	Belanja Bunga	6,135,542,213.00	6,135,542,212.36	6,209,544,300.00	6,209,544,210.00	1,714,900,126.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	22,569,373,680.00	22,438,368,604.00	51,003,034,646.00	49,052,476,300.00	38,592,319,427.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	357,483,964,166.00	342,885,337,718.86	78,682,602,837.00	73,706,411,814.00	189,278,978,308.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	99,079,100.00	51,252,775.00	254,214,066.00	249,810,800.00	167,841,500.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,321,386,934.00	40,659,324,362.00	25,282,652,042.00	23,692,032,524.00	38,271,144,084.00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	73,327,229,165.00	71,053,839,643.91	23,138,609,969.00	21,395,823,253.00	59,486,276,002.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	229,321,514,767.00	226,172,708,937.95	24,802,441,818.00	24,645,828,895.00	78,150,516,093.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,414,754,200.00	4,948,212,000.00	3,694,684,942.00	3,518,291,542.00	12,978,200,629.00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2021		Tahun 2022*		Tahun Anggaran 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	1,510,000,000.00	204,624,800.00	225,000,000.00
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	21,377,602,023.00	14,000,367,515.00	5,786,543,834.00	743,803,650.00	11,309,837,948.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	21,377,602,023.00	14,000,367,515.00	5,786,543,834.00	743,803,650.00	11,309,837,948.00
5.4	BELANJA TRANSFER	260,890,132,185.00	259,527,273,046.00	261,399,779,793.00	261,240,324,393.00	269,744,758,560.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4,729,557,185.00	4,729,557,185.00	4,455,909,193.00	4,455,909,193.00	5,202,329,760.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	256,160,575,000.00	254,797,715,861.00	256,943,870,600.00	256,784,415,200.00	264,542,428,800.00

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023



3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya: dianggarkan berdasarkan estimasi dan pada perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2). Pencairan dana cadangan: Pencairan dari dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: dapat berupa penjualan hasil penjualan daerah milik daerah/BUMD penjualan aset milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah; (4). Penerimaan pinjaman: Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan; dan (5). Penerimaan kembali pemberian pinjaman: Penerimaan pokok dari pemberian pinjaman termasuk penerimaan pokok dari pemberian dana bergulir.
2. Pengeluaran Pembiayaan: (1). Pembentukan dana cadangan: Pembentukan dana cadangan dianggarkan sejumlah dana cadangan yang harus disisihkan dalam tahun anggaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, pengelolaan dan pertanggung jawabannya; (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah:

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Penyertaan modal yang dianggarkan sejumlah penyertaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal termasuk investasi nirlaba Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran pokok hutang: Jumlah pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo yang dianggarkan sejumlah pokok pinjaman yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman; (4) Pemberian pinjaman: Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dalam bentuk dana bergulir.

3. Pembiayaan daerah dalam APBD Kabupaten Merangin meliputi: (1). Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari; sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). (2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri; penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok hutang.

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-9. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 (PP Nomor 58 Tahun 2005)

NO	URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	PEMBIAYAAN DAERAH	19,836,599,581.45	19,879,801,475.85	35,241,080,893.56	35,241,080,893.56	238,002,456,862.30	116,185,426,640.27
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23,336,599,581.45	23,379,801,475.85	39,241,080,893.56	39,241,080,893.56	238,002,456,862.30	116,185,426,640.27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	23,336,599,581.45	23,379,801,475.85	39,241,080,893.56	39,241,080,893.56	94,872,246,889.30	94,872,246,889.27
3.1.2	Pencairan dana Cadangan		-		-		-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		-		-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					143,130,209,973.00	21,313,179,751.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-		-		-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		-		-		-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



NO	URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-		-		
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		-		-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-		-		

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel III-10. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023
(PP Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	Tahun 2021		Tahun 2022*		Tahun Anggaran 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6	PENERIMAAN DAERAH	182,327,421,926.00	181,331,530,570.46	-21,378,974,873.00	-21,406,050,295.01	15,605,198,710
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	186,327,421,926.00	185,331,530,570.46	61,814,090,848.00	61,787,013,804.99	82,000,000,000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	64,510,391,704.00	64,556,845,310.46	61,814,090,848.00	61,787,013,804.99	82,000,000,000
6.1.2	Pencairan dana Cadangan		-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	121,817,030,222.00	120,774,685,260.00			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		-		-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	83,193,065,721.00	83,193,064,100.00	66,394,801,290
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,500,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		-	81,193,065,721.00	81,193,064,100.00	60,894,801,290
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-		-	

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022 dan Tahun Anggaran 2023



Kondisi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan daerah (*fiscal need*) di Kabupaten Merangin belum sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah (*fiscal capacity*), sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*Fiscal gap*). Untuk itu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengurangi kesenjangan fiskal dimaksud dengan meningkatkan kemandirian daerah melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja yang dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan upaya lain adalah memberikan peluang yang lebih besar pada tumbuh berkembangnya iklim usaha dan investasi di wilayah Kabupaten Merangin, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut di atas, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan *necessary condition* bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah.

Untuk itu *pertama*, struktur anggaran di daerah harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari hutang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula, penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SILPA) ataupun dana-dana yang sifatnya temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) tak bisa dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah karena berpotensi mengganggu perencanaan keuangan daerah. *Kedua*, struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Prioritas-prioritas



pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Merangin.

3.3. Kebijakan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah untuk sisa tahun periode RPJMD. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dibawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata-rata periode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan isu perubahan kebijakan fiskal, di samping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Merangin selain akan mempertahankan strategi yang telah dilaksanakan tahun lalu juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain:

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;



8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; dan
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 hingga 2026.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan



ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai Tahun 2021 struktur APBD harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga kedua jenis belanja tersebut menjadi belanja operasional.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen belanja untuk tahun 2021 mengalami perombakan yang signifikan. Dalam regulasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terdiri dari: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Seluruh belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan bersama-sama dengan belanja barang dan jasa berada pada belanja operasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD setiap tahunnya. Dalam menyusun kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin selalu



berpedoman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan belanja atau Mandatory Spending yang menjadi beban dan menjadi komitmen yang harus dipenuhi antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Merangin secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Disamping itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.
4. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pegawai 30% dari belanja daerah
5. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengawasan sebesar 1% dari belanja daerah
6. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengembangan SDM 0,16% dari belanja daerah
7. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM pasca diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan



pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan social.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja di atas, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Jambi dan PDAM Tirta Merangin serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi pembahasan dalam BAB ini, yaitu menuangkan permasalahan dan isu strategis tersebut, karena pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren).



Tabel IV-1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Merangin

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Inflasi dan Stabilitas harga	Laju Inflasi (%)	Laju inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Angka inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan harga-harga barang/jasa di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Laju inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik. dimana kabupaten merangin menurun pada tahun 2020 sebesar 2,32 persen tetapi tahun sebelumnya sebesar 2,61 persen. Bila dibanding dengan provinsi dan nasional kabupaten merangin masih tinggi.
		Masih rendahnya kesetaraan gender dan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100%. Tahun 2017-2021 capaian IPG Kabupaten Merangin mengalami kenaikan dari 87,64 menjadi 88,24 pada tahun 2021.
		Tingginya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sebesar 4,69% lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jambi sebesar 4,59% lebih rendah dari nasional sebesar 5,86%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
2	Aspek Daya Saing Daerah	Masih rendah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga	Pengeluaran rata-rata per kapita terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan seluruh pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Arti lainnya adalah merupakan pengeluaran rata-rata seseorang tiap bulannya, baik itu untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Pada tahun 2022, sebesar 52,23% dari total pengeluaran digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya 47,77% digunakan untuk kebutuhan non makanan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pada tahun 2021, pola pengeluaran untuk makanan sebesar 56,08%. Akan tetapi pengeluaran non makanan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Adapun pengeluaran non-makanan tahun 2021 adalah sebesar 43,92%. Pengeluaran per kapita secara keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 3,85%. makanan maupun non makanan
3	Aspek Pelayanan Umum	Urusan Pendidikan		
		Belum optimalnya Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah sekolah pendidikan kondisi bangunan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 jumlah sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Merangin adalah 660 Unit dengan jumlah ruang 3.572 unit ruang kelas terdiri dari 192 Unit Taman Kanak-kanak, 322 Unit Sekolah Dasar, 89 Unit Sekolah Menengah Pertama, 23 Unit Sekolah Menengah Atas dan 20 Unit Sekolah Menengah Kejuruan.
			Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid	Rasio ketersediaan sekolah terhadap murid di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 untuk pendidikan jenjang SD Negeri sebesar 130 yang artinya bahwa satu sekolah dapat menampung 130 siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP Negeri memiliki rasio ketersediaan sebesar 114 dimana satu sekolah dapat menampung 114 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMU Negeri, memiliki rasio ketersediaan 354 dan jenjang pendidikan SMK memiliki rasio ketersediaan 338
		Masih Lemahnya Kompetensi Guru	Jumlah guru berijasah kualifikasi	Berdasarkan Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2021, Kualifikasi guru di Kabupaten

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		Mata Pelajaran	S1/D-IV	Merangin menunjukkan bahwa kulaifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 rata-rata sebesar 68,88% dan yang belum memenuhi kualifikasi guru rata-rata sebesar 30,88%, dan untuk Guru tersertifikasi menunjukkan bahwa persentase perbandingan guru yang sudah tersertifikasi adalah 28,16% dan belum tersertifikasi 71,83% Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru.
		Distribusi dan jumlah guru yang Tidak Merata	Jumlah distribusi guru yang tidak merata	Permasalahan lain dalam pendidikan di Kabupaten Merangin adalah distribusi guru yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada rasio murid-guru di setiap kecamatan. Pada tahu 2020 Pada jenjang SD, rasio terendah terdapat di Kecamatan Jangkat (7,3) dimana satu orang guru hanya menangani 7 orang murid. Sedangkan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Tabir Selatan (19,32) dimana satu orang guru menangani 19 orang murid. Sedangkan pada jenjang SMP, rasio terendah terdapat di Kecamatan Tiang Pumpung (2,86) dimana satu orang guru hanya menangani 2 orang murid. Sedangkan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Margo Tabir (17,41) dimana satu orang guru menangani 17 orang murid. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6.059 orang terdiri dari adalah PNS sebanyak 2.578 orang, sementara status non-ASN sebanyak 3.481 orang.
		Urusan Kesehatan		
		Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Neonatal dan Bayi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard	Masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan dan belum optimalnya penguatan kemitraan bidan dan P4K di wilayah puskesmas menyebabkan tingginya kasus kematian ibu, neonatal dan bayi di Kabupaten Merangin. Secara tren, kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Merangin selalu mengalami penurunan. Akan tetapi, kasusnya selalu terjadi dan ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Angka kematian ibu sampai akhir tahun 2021 sebanyak

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				5 orang dengan faktor penyebab sesak napas, Komplikasi operasi sectio caesarea (Post SC), jantung dan hipertensi. Untuk total kematian bayi sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 88 bayi dengan rincian antara lain Kematian neonatal (0-6 hari) adalah 43, Kematian neonatal (7-28 hari) adalah 45 dan Kematian post Neo adalah 4 dengan faktor penyebab Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Asfiksia neonatorum, masalah laktasi, tetanus, Kelainan Kongenital, respirasi pulmonalis, infeksi selaput, kelainan bawaan, hernia dan suspect meningitis dan lain-lain.
		Masih rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standard	Keberhasilan penurunan persentase ini erat kaitannya dengan semakin membaiknya pelaksanaan indikator-indikator pendukung, diantaranya cakupan K4 sebesar 69,1 %, fe 3 sebesar 68,74 %, pelaksanaan kelas ibu hamil sebesar 73,9%, pemberian makanan tambahan ibu hamil 87,9%, pelayanan kunjungan nifas 73,8 %, rasio kunjungan balita di posyandu 70,4 %, pemberian vitamin A umur 6 – 59 bulan 35,7 %, pemberian makanan tambahan balita 71,8 % dan pemberian tablet tambah darah pada remaja 35,7 %. Selain itu keberhasilan ini dipengaruhi peran serta aktif dan peningkatan dukungan lintas program serta lintas sektoral.
		Masih Kurangnya Mutu Pelayanan Kesehatan Baik Sarana, Prasarana Maupun SDM Sesuai Standar yang Berlaku	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Sarana kesehatan yang memadai di suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Disamping jumlah sarana dan prasarana kesehatan, program kesehatan yang dijalankan daerah merupakan upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai yang salah satunya adalah dengan penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2021 Kabupaten Merangin memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah, 27 unit Puskesmas terdiri dari 15 rawat inap, 12 non rawat inap, 93 unit Puskesmas Pembantu, 25 Unit Puskesmas keliling dan 458 unit posyandu.
		Perdagangan		
		Kurangnya sarana dan prasarana	Persentase Ketersediaan Sarana	Permasalahan pembangunan terkait perdagangan di Kabupaten Merangin adalah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		pendukung perdagangan	Distribusi Perdagangan (%)	kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin telah mengeluarkan sebanyak 291 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 164 SIUP. Informasi jumlah SIUP yang diterbitkan dari tahun 2017 sampai dengan dengan 2020. Dengan Jumlah Pasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2021 Sebanyak 70 Pasar.
		Perindustrian		
		Masih rendahnya daya saing produk industri lokal	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	Permasalahan pembangunan terkait perindustrian di Kabupaten Merangin adalah masih rendahnya daya saing produk industri lokal. Kontribusi sektor industri terhadap PRDB Daerah menjadi indikator utama dari perkembangan sektor industri. Selain itu, industri di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan sebesar 5,15% di tahun 2021. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Daerah berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha adalah sebesar 5,95% dan berdasarkan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebesar 6,39%
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Rendahnya Daya Saing UMKM	Jumlah UMKM	Untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah Kabupaten telah mengupayakan agar koperasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan pendapatan anggota atau masyarakat sampai dengan tahun 2021 UMKM sebanyak 11.628
		Masih Rendahnya Koperasi Aktif	Persentase koperasi akti	Persentase koperasi sehat pada tahun 2021 berkurang sebesar 40,00% dengan rata-rata pertumbuhan modal koperasi sebesar 1,05%. Jumlah koperasi di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 sebanyak 290 unit dengan total anggota koperasi sebanyak 38.594 orang dan mempekerjakan sebanyak 646 orang tenaga

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				kerja.
		Kelautan dan Perikanan		
		Masih Terbatasnya Kapasitas Produksi Perikanan Budidaya dan Benih Ikan	Persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	Pengembangan budidaya keramba dan pengembangan budidaya kolam. Sampai dengan tahun 2021 luas areal budidaya Kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 358,20 Ha
		Masih Rendahnya Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	Jumlah Produksi Ikan	Kapasitas produksi perikanan budidaya dari jenis perairan umum, budidaya kolam, dan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Pengembangan budidaya keramba dan pengembangan budidaya kolam. Sampai dengan tahun 2021 luas areal budidaya Kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 358,20 Ha dengan produksi ikan sebesar 2.486,90 Ton
		Nilai Tukar Petani (NTP)		
		Masih Rendahnya Produksi Hasil Ternak	Persentase penyediaan prasarana pertanian Sektor Peternakan	Produksi hasil ternak masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017-2021. Meskipun secara tren relatif meningkat, namun peningkatannya masih belum signifikan.
		Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian	Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Merangin adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2021, baru terpenuhi sebesar 65,51%nya.
		Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021), data produksi hasil pertanian yang terdiri dari produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, buah-buahan dan perkebunan belum menunjukkan peningkatan yang optimal. Peningkatan produksi dari salah satu komoditi diikuti oleh penurunan dari komoditi yang lain. Peningkatan produksi yang signifikan diikuti oleh penambahan luasan areal tanam. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lahan belum dapat ditingkatkan secara maksimal.
		Urusan Pariwisata		
		Masih Rendahnya	Persentase daya	Pengembangan lokasi obyek daya tarik wisata

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		Daya Saing Destinasi Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisata	tarik destinasi yang layak (%)	mengalami perlambatan, Hal ini disebabkan karena infrastruktur sarana jalan menuju ke beberapa objek daya tarik wisata (ODTW) belum baik dan sarana pendukung ODTW belum tersedia. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan (masyarakat) dalam pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata dipandang masih kurang, terutama partisipasi masyarakat yang sadar wisata untuk mewujudkan lingkungan/suasana kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan.
			Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Pada tahun 2021 sebanyak 246.939 orsng yang mengunjungi objek wisata yang ada di kabupaten merangin
		Masih Rendahnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	Faktor pendukung pariwisata adalah ketersediaan beberapa fasilitas, diantaranya hotel/penginapan, rumah makan/restoran serta biro dan agen perjalanan. Pada tahun 2021, hotel di Kabupaten Merangin berjumlah 66 unit, sementara sarana penunjang kepariwisataan lainnya, restoran/rumah makan berjumlah 129 unit, jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan berjumlah 6 lokasi dan biro perjalanan hanya berjumlah 6 biro perjalanan/travel
		Belum Optimalnya Pengelolaan Geopark Merangin Jambi	Pengembangan Geopark Merangin Jambi	Geopark Merangin Jambi resmi menjadi anggota geopark nasional pada tanggal 23 september 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global pada tahun 2023 setelah dilakukan penilaian oleh UNESCO pada tahun 2022. Konsep pengembangan pariwisata berbasis Geopark dilandasi tiga pilar, yang pertama adalah pilar konservasi guna perlindungan terhadap lingkungan, pilar yang kedua adalah pilar edukasi bahwa kawasan Geopark Merangin Jambi memiliki nilai signifikansi ilmu pengetahuan tingkat internasional yang layak menjadi obyek penelitian dan tempat tujuan kunjungan studi lapangan khususnya pada bidang geologi terutama sub bidang paleontologi, serta pilar ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat yang meliputi sosial budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pariwisata berupa geowisata.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				Sebagai destinasi pariwisata, Geopark Merangin Jambi memiliki 21 lokasi situs geologi dan 10 situs non geologi (3 lokasi situs biologi, 5 lokasi situs budaya dan 2 lokasi situs nirbenda). Namun demikian, upaya dalam pengembangan Geopark Merangin Jambi masih dihadapkan beberapa kendala dalam pengembangannya antara lain: 1) Infrastruktur dan sarana penunjang kawasan; 2) Perlindungan kawasan; 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Peningkatan jejaring dan promosi; 5) Optimalisasi penggunaan website; dan 6) Kelembagaan dan pembiayaan.
		Pemerintahan		
		Penerapan e-Government system dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum berjalan maksimal	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan capaian indikator reformasi birokrasi, selama 4 tahun terakhir Kabupaten Merangin berada pada kategori CC atau mendapatkan peringkat Cukup dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut bermakna bahwa penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Merangin secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
		masih banyaknya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik.	Indeks Pelayanan Publik yang Baik	Pada Kabupaten Merangin pengukuran tersebut belum terselenggara secara optimal. Pada sisi lain, terdapat penilaian yang diselenggarakan oleh Ombudsman berupa Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik). Pada tahun 2022, diantara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin mendapatkan nilai terendah dengan nilai 73,88 dengan zona kuning dan opini kualitas sedang.
		Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Belum Memadai	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	Kondisi jalan yang mulus dan baik dapat memberikan efek signifikan bagi pertumbuhan ekonomi karena transportasi dari frekuensi perpindahan barang dan jasa mendorong pada tinggi rendahnya tingkat efisiensi dalam perekonomian masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 1.184,407 km. Jalan kabupaten terdiri dari jalan baik sepanjang 383,51 Km; jalan sedang sepanjang 489,412 Km; dan jalan rusak sepanjang 214,994 Km;



No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				serta jalan rusak berat sepanjang 96,650 Km km. Dengan kondisi Jalan Mantap pada tahun 2022 sebesar 71.90%
		Belum optimalnya penanganan sampah	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional (%)	pada tahun 2021 telah dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan yang salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yaitu yang merupakan kegiatan operasional pengelolaan persampahan di TPA Lanling. Dengan ketersediaan prasarana persampahan regional sebesar 57,23%
		Belum Optimalnya Cakupan Pelayanan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang aman (%)	Cakupan pelayanan air bersih sampai dengan tahun 2021 jumlah SPAM IKK telah mencapai 12 unit yang melayani 17 kecamatan yaitu Kecamatan Bangko, Batang Masumai, Nalo Tantan, Tabir, Tabir Lintas, Margo Tabir, Pangkalan Jambu, Jangkat, Lembah Masurai, Bangko Barat, Sungai Manau, Renah Pembarap, Tabir Selatan, Pamenang Selatan, Renah Pamenang, Tabir Timur, Muara Siau.
		Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Tahun 2020, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Merangin sebesar 77,5%.
		Masih adanya daerah yang berpotensi terjadinya rawan pangan.	Persentase kemandirian pangan (%)	Persentase kemandirian pangan Kabupatn Merarngn Tahun 2021 adalah sebesar 72,4%.

Sumber: Analisa Bappeda, 2023

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2008-2028

Berdasarkan kondisi dan analisis Kabupaten Merangin maka visi pembangunan daerah untuk Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 adalah: **“Merangin yang Maju, Mandiri, Lestari, Adil dan Berbudaya”**.



Untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2008- 2028 maka ditetapkan pula misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Merangin yang punya daya saing dan maju dalam perekonomian daerah;
2. Mewujudkan Merangin yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri;
3. Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan;
4. Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance);
5. Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tentram dan tertib di tengah masyarakat.

Mengacu kepada paparan misi pembangunan Kabupaten Merangin yang termuat pada bagian sebelumnya maka arah pembangunan daerah akan menjabarkan lebih rinci lagi dari misi pembangunan daerah tersebut. Adapun jabaran tersebut yang berupa arah pembangunan daerah di deskripsi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Merangin yang mempunyai daya saing dan maju dalam perekonomian untuk mewujudkan Merangin yang mempunyai daya saing dan maju dalam perekonomian diprioritaskan kepada:
 - a) Peningkatan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing berdasarkan mekanisme pasar;
 - b) Pengembangan perekonomian yang berlandaskan keunggulan kompetitif;
 - c) Pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan berbasis pada kemitraan usaha; dan
 - d) Pengembangan infrastruktur yang mendorong kegiatan ekonomi yang punya daya saing.



2. Mewujudkan Kabupaten Merangin yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) memiliki indikator berupa terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif dan berakhlak mulia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
3. Mewujudkan Kabupaten Merangin menjaga pelestarian dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan;
4. Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), Untuk mewujudkan Merangin yang demokratis dengan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berbudaya hukum maka Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merangin diarahkan kepada Pemantapan iklim politik yang kondusif, pemantapan kelembagaan dan aparatur.
5. Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan Merangin yang berbudaya dengan suasana aman, tentram dan tertib maka Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merangin diarahkan kepada Pengembangan budaya hukum dan peningkatan suasana Tramtibmas.

4.2.2. Kebijakan dalam RPJMD Periode Sebelumnya;

Berdasarkan pada kebutuhan daerah, potensi, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, maka visi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju ***“Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023”***. Dengan misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Kabupaten Merangin 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.



2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.

Untuk mewujudkan misi dengan tujuan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian dan pariwisata;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Mewujudkan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani.

4.2.3. Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Secara jumlah terjadi pengurangan terhadap jumlah misi yang disampaikan pada saat kampanye, namun secara substansi ketiga misi yang ditetapkan selaras dengan misi saat kampanye. Berdasarkan hasil cascading yang dilakukan, dua diantara lima misi yang dilaksanakan pada saat kampanye lebih tepat sebagai sasaran pada misi



memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.**

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Sementara pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi titik strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata



kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi berkontraksi pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun sebelumnya perlu dipulihkan segera agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Komoditas unggulan Provinsi Jambi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang hampir seluruhnya berbasis lahan perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menerapkan praktekpraktek baik, serta perlu ditingkatkan nilai tambahnya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung guna meningkatkan produktivitas serta menarik investasi industri pengolahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau menjadi pilihan karena menjadi salah satu jalan tengah agar ekonomi Provinsi Jambi bertumbuh namun lingkungan tetap terjaga, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB hijau.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan sehat ini ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Agama dan kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan yang dilakukan karena memuat 7 dimensi yang holistik yaitu (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan



budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

4.2.4. Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020-2024

Amanah pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk Kabupaten Merangin tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Lampiran terkait Arah Pembangunan Wilayah tersebut menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada masing-masing wilayah.

Tabel IV- 2. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Merangin Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

PP/ KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024				
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	1.846,14	83,64	Provinsi Jambi, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-rata Indeks Desa	65,39	222,74	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kemendesa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	65	27,79	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air	Jumlah provinsi yang		0,27	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin,	Pembangunan dan Pemberdayaan	Kemendesa PDTT

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



PP/ KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024				
Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)			Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Masyarakat Desa	
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	65	57,33	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	459	128,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

Sumber: Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Arah Pembangunan Wilayah



Secara eksplisit dijabarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang mencakup 1 (satu) kegiatan prioritas beserta proyek prioritas nasional yang berada di Kabupaten Merangin sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV-3. Kabupaten Merangin dalam Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP. MILIAR)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (Unit)	-	-	-	-	6,0	24.000,0	Bendungan Merangin, Bendungan Muara Julai, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan		KPBU
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (Unit)	0	0	0	0	5	20.000,0	Bendungan Merangin, Bendungan Muara Julai, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan	10 Waduk Multiguna	KPBU

Sumber: Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024

Tabel IV-4. Kabupaten Merangin dalam Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. MILIAR)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendampingan desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	694 orang	584 orang	542 orang	501 orang	459 orang	128,2	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengendalian Penggunaan Dana	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi		Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi,		02

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON- OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. MILIAR)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa	penggunaan Dana Desa							Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	639 desa	290 desa	205 desa	509 desa	65 desa	30,8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin , Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin , Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin , Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin , Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02

Sumber: Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024

4.2.5. Hasil evaluasi capaian SDGs

Selain analisis berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, gap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB SDGs) yang dianalisis dari Laporan Evaluasi Capaian TPB Kabupaten Merangin Tahun 2022 juga menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis.

Berdasarkan analisis awal pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD 2018-2023, kondisi pencapaian TPB di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2019, terdapat sebanyak 35 indikator atau



sebesar 25,17% dari total indikator yang sudah dilaksanakan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merangin namun belum dapat mencapai target. Berdasarkan pilar pembangunannya, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum dapat mencapai target terdiri dari 21 indikator (60,00%) pada pilar sosial, sebanyak 5 indikator (14,29%) pada pilar ekonomi, sebanyak 5 indikator (14,29%) pada pilar lingkungan dan sebanyak 4 indikator (11,43%) pada pilar kelembagaan. Seluruh indikator yang belum mencapai target tersebut, terdapat beberapa indikator yang dalam pencapaiannya berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistemnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merangin. Dengan demikian, daftar isu strategis pada dasarnya dapat diidentifikasi dari prioritas 35 indikator TPB yang diperkirakan memerlukan perhatian percepatan pencapaian target untuk memastikan prinsip “*no one left behind*” telah diimplementasikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara utuh. Tantangan Pencapaian indikator TPB tersebut dalam masing-masing TPB dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel IV-5. Identifikasi Awal Isu Strategis Berdasarkan Tantangan Capaian TPB yang Perlu Perhatian

Tujuan TPB	Tantangan
	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 1 di Kabupaten Merangin adalah persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah banyaknya sektor ekonomi yang kolaps akibat Pandemi COVID-19, merosotnya harga komoditi pertanian, adanya kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan persoalan munculnya penyakit saluran pernafasan akut sehingga menyita pengeluaran rumah tangga dalam porsi besar, terjadinya bencana tanah longsor dan banjir pada beberapa lokasi yang juga menyebabkan banyak penduduk yang terdampak dan kehilangan sumber pencaharian, masih tingginya tingkat pengangguran dan masih rendahnya tingkat pendidikan kebanyakan masyarakat.
	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 2 di Kabupaten Merangin adalah persentase stunting pada anak baduta dan peningkatan konsumsi ikan. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator persentase stunting pada anak baduta adalah masih tingginya pencemaran lingkungan, rendahnya kualitas air minum, masih buruknya pemenuhan gizi, masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua, belum meratanya jangkauan pasokan air bersih ke seluruh lapisan masyarakat, belum terbangun dan meratanya IPAL komunal di seluruh kawasan, dan belum meratanya



Tujuan TPB	Tantangan
	pemahaman masyarakat dalam pemenuhan gizi dan pangan yang berkualitas. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator peningkatan konsumsi ikan adalah masih rendahnya produktivitas sektor perikanan, masih fluktuatifnya harga dan pasokan ikan terutama ikan laut, belum efektifnya program pemberdayaan petani budidaya ikan air tawar dan belum terjangkaunya harga jual ikan di pasar oleh seluruh lapisan masyarakat.
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 3 di Kabupaten Merangin adalah angka kematian neonatal dan persentase Tuberculosis. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator angka kematian neonatal adalah masih buruknya pemenuhan gizi, masih rendahnya tingkat pendidikan ibu, sanitasi yang belum layak dan masih tingginya pencemaran lingkungan. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator persentase Tuberculosis adalah banyaknya sanitasi yang belum layak dan masih tingginya pencemaran lingkungan.
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 4 di Kabupaten Merangin adalah angka partisipasi kasar SMP/MTs. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah masih tingginya kemiskinan di beberapa wilayah kecamatan dan aksesibilitas sekolah cukup jauh dan sulit dijangkau bagi sebagian masyarakat.
5 KESETARAAN GENDER	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 5 di Kabupaten Merangin adalah jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dari kebanyakan perempuan dan masih tingginya budaya atau norma dimana perempuan harus lebih banyak dirumah.
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 6 di Kabupaten Merangin adalah rumah tangga dengan air minum layak, kapasitas prasarana air baku untuk melayani kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri; dan jumlah internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator rumah tangga dengan air minum layak adalah area pelayanan PDAM yang belum menyentuh ke seluruh kawasan permukiman, masih cukup besarnya pembiayaan untuk peningkatan jaringan air layak minum dan belum optimalnya cakupan layanan dari PDAM karena keterbatasan kemampuan PDAM meluaskan jaringan bisnis. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator kapasitas prasarana air baku untuk melayani kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri adalah masih terbatasnya jumlah sumber air baku dan belum optimalnya kemampuan operasional IPA di semua titik. Sementara tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator jumlah internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah belum banyaknya jumlah program yang dialokasikan untuk DAS yang melewati Kabupaten Merangin dan masih



Tujuan TPB	Tantangan
	sangat lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mewujudkan program. Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 7 di Kabupaten Merangin adalah persentase rumah tangga berlistrik PLN. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah jumlah pasokan listrik yang masih belum mencukupi kebutuhan, jumlah jaringan listrik yang belum mampu untuk melayani seluruh wilayah di Kabupaten Merangin, terdapat beberapa desa di Kabupaten Merangin yang berada di lokasi yang terisolir sehingga belum dapat dialiri listrik dan belum adanya alternatif pembangkit listrik yang murah dan terjangkau serta berkelanjutan, seperti PLTS atau PLTMHA dengan kapasitas yang mumpuni.
	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 8 di Kabupaten Merangin adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah masih rendahnya jumlah kunjungan wisata masih rendah, masih belum memadainya infrastruktur pendukung di kawasan wisata, masih rendahnya aksesibilitas menuju kawasan wisata, masih kurangnya promosi wisata, masih kurangnya peran lembaga pemerintah dalam pemberdayaan pokdarwis dan masih belum ditentukannya skala prioritas untuk pengembangan objek daya tarik wisata alam. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah masih kurangnya promosi wisata masih kurang, belum memadainya infrastruktur pendukung di kawasan wisata, masih rendahnya aksesibilitas menuju kawasan wisata, masih rendahnya profesionalitas lembaga pengelola, belum tersedianya aksesibilitas dan sarana prasarana pada ODTWA dan masih sulitnya wisatawan untuk mengakses berbagai objek wisata yang ada.
	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 9 di Kabupaten Merangin adalah kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah masih cukup jauhnya aksesibilitas dengan pelabuhan dan bandara dan belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan industri.
	Indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan TPB 10 di Kabupaten Merangin adalah jumlah desa tertinggal. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target dari indikator ini adalah masih rendahnya aksesibilitas, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan masih terbatasnya sarana kesehatan dan pendidikan.
   	Indikator pada TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 15, TPB 16 dan TPB 17 sudah mencapai target.



Tujuan TPB		Tantangan
 		Tujuan ini tidak digunakan karena Kabupaten Merangin tidak memiliki lautan.
		

Sumber: Revisi KLHS RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023, 2021

4.2.6. Hasil evaluasi asesmen Geopark Merangin Jambi oleh UNESCO tahun 2022.

Geopark Merangin Jambi resmi menjadi anggota geopark nasional pada tanggal 23 september 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global pada tahun 2023 setelah dilakukan penilaian oleh UNESCO pada tahun 2022. Konsep pengembangan pariwisata berbasis Geopark dilandasi tiga pilar, yang pertama adalah pilar konservasi guna perlindungan terhadap lingkungan, pilar yang kedua adalah pilar edukasi bahwa kawasan Geopark Merangin Jambi memiliki nilai signifikansi ilmu pengetahuan tingkat internasional yang layak menjadi obyek penelitian dan tempat tujuan kunjungan studi lapangan khususnya pada bidang geologi terutama sub bidang paleontologi, serta pilar ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat yang meliputi sosial budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pariwisata berupa geowisata.

Potensi ini menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilihat lebih jauh lagi, agar kelebihan dan potensi yang ada dapat dikembangkan dengan maksimal. Tentu semua itu tidak terlepas dari peran semua pihak yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi suatu daerah dan kepariwisataan merupakan dua hal yang memiliki kaitan erat, keduanya bergerak maju untuk melakukan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di Kabupaten Merangin, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang menghambat adalah



kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Kabupaten Merangin, sehingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

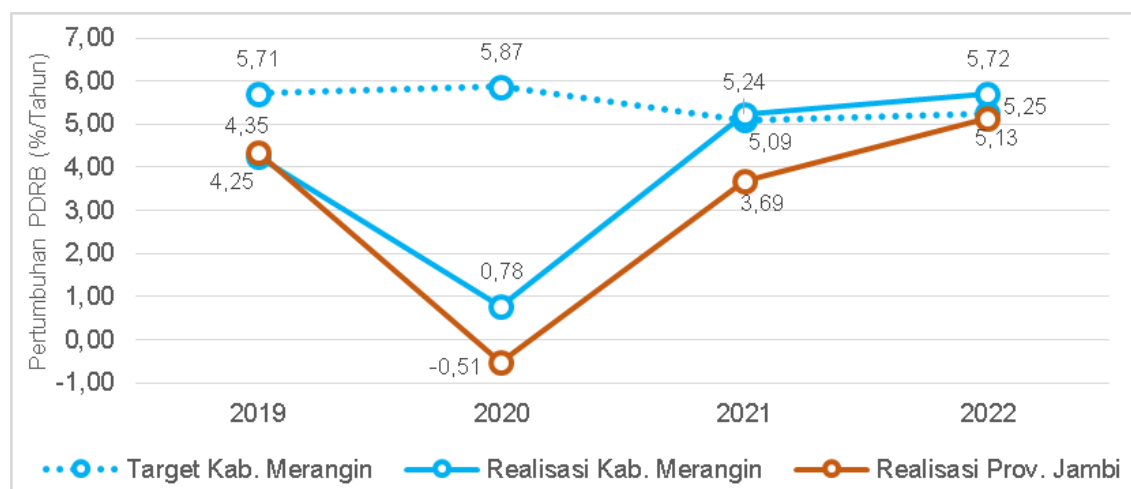
Berdasarkan pertimbangan beberapa hal diatas, telah terumuskan sejumlah 4 (empat) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026 yang terdiri dari:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Manusia
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Penjabaran dari 4 (empat) isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 secara lengkap dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembangunan Ekonomi

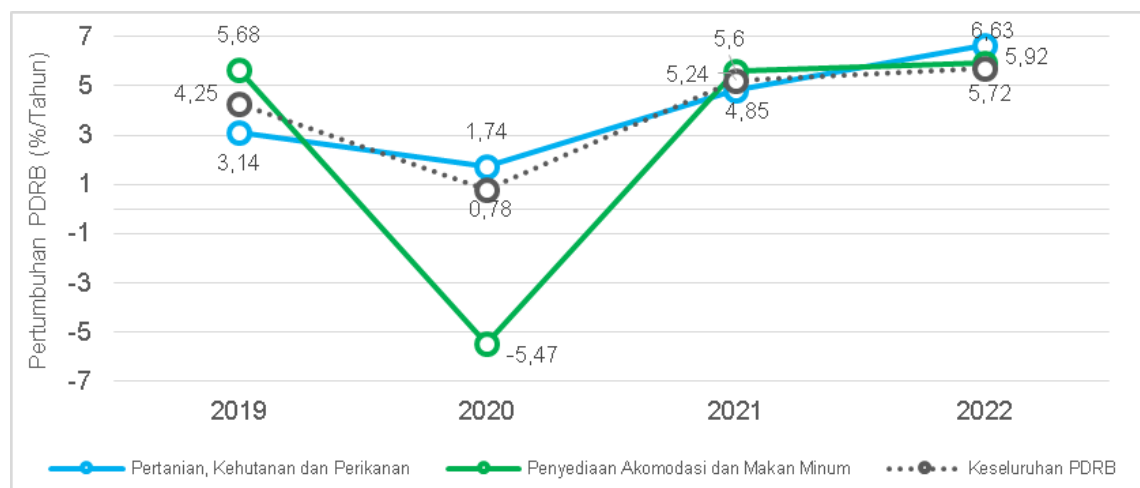
Isu strategis pembangunan ekonomi mencakup 4 isu, yakni tingkat kemiskinan, pengembangan sektor ekonomi strategis, pengembangan sektor pariwisata, dan tingkat investasi. Berdasarkan indikator terkait pertumbuhan ekonomi daerah, diketahui perkembangan perbandingan tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin sebagai berikut.



Gambar IV-1. Perkembangan Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa capaian tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020, namun mampu melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 2022, pada tingkat kabupaten. Adapun pada tingkat provinsi, tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin cenderung lebih tinggi daripada Provinsi Jambi. Secara keseluruhan peringkat tingkat pertumbuhan Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 berada pada peringkat 8, pada tahun 2020 dan 2021 berada pada peringkat 2 dan pada tahun 2022 berada pada peringkat 5 diantara 11 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Merangin termasuk wilayah yang mampu bertahan terhadap dampak pandemi covid-19. Akan tetapi jika mengabaikan faktor pandemi, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin adalah 5,07%/tahun dan berada pada peringkat 5 di Provinsi Jambi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian yang menjadi unggulan daerah mampu menjaga ketahanan perekonomian daerah secara umum.

Khususnya pada sektor yang menjadi prioritas daerah, yaitu pertanian dan pariwisata, tingkat pertumbuhannya dapat dilihat pada gambar berikut.



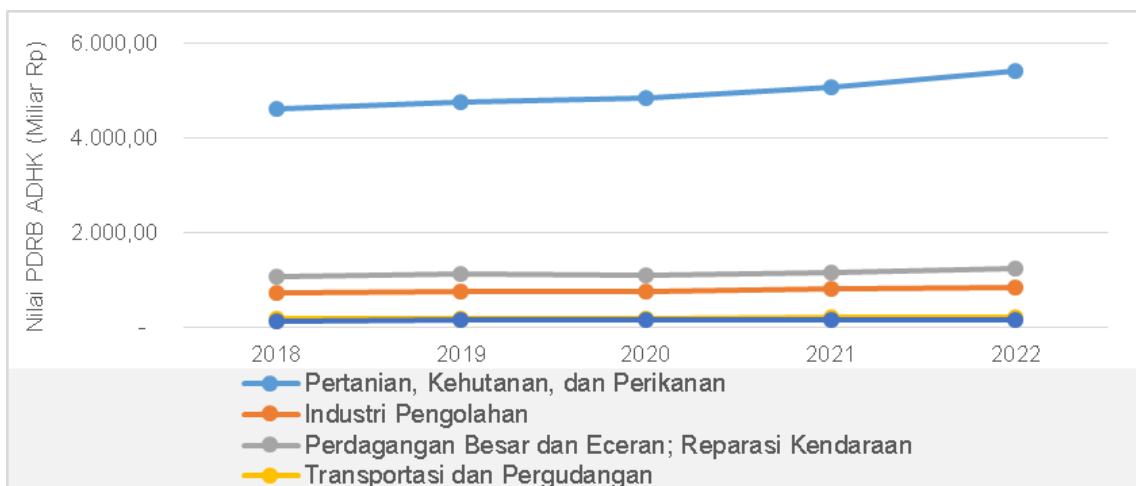
Gambar IV-2. Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar tersebut, tingkat pertumbuhan sektor prioritas daerah cukup fluktuatif. Pada akhir tahun 2022, kedua sektor prioritas tersebut mengalami tingkat pertumbuhan diatas rata-rata tingkat pertumbuhan wilayah.



Sektor pariwisata khususnya memiliki tingkat pertumbuhan yang cenderung diatas rata-rata kabupaten, kecuali pada tahun 2020 karena faktor pandemi covid-19. Sebaliknya pada sektor pertanian, justru mampu tumbuh diatas rata-rata tingkat pertumbuhan kabupaten pada masa pandemi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut cukup layak ditetapkan sebagai sektor prioritas pembangunan daerah Kabupaten Merangin untuk periode pembangunan 2024-2026 mendatang. Pada sektor pertanian, karena telah menjadi sektor unggulan daerah dengan kontribusi mencapai 50% dari keseluruhan PDRB kabupaten, maka pada masa mendatang perlu terus dijaga tingkat produksinya. Adapun pada sektor pariwisata, selain memiliki tingkat pertumbuhan yang positif dan diatas rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten pada tahun diluar masa pandemi, juga didukung dengan potensi peningkatan kunjungan wisatawan dan peneliti luar negeri sebagai dampak dari penetapan status Geopark Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2023.



Gambar IV-3. Perkembangan Nilai Pada 5 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui pola pertambahan nilai pada 5 sektor, dan rincian pertambahannya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel IV-6. Pertambahan Nilai Pada 5 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha	Tahun Awal (2018) (Miliar Rp)	Pertambahan Nilai Per Tahun (Miliar Rp)			
		2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.609,02	+144,77	+82,69	+234,69	+336,43
Industri Pengolahan	720,20	+44,90	-6,72	+44,57	+35,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Kendaraan	1.059,13	+66,94	-35,62	+61,37	+86,74
Transportasi dan Pergudangan	181,63	+8,36	-4,65	+15,66	+23,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	140,37	+3,38	6,96	+8,70	-0,80

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023.

Berdasarkan gambar dan tabel tersebut, diketahui bahwa jika dilihat dari sudut pandang proses produksi, maka dapat ditentukan bahwa kelima sektor tersebut memiliki hubungan sebagai berikut:

- Sektor Industri Pengolahan adalah simpul proses produksi sebagai sektor sekunder.
- Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah unsur dalam mendukung simpul proses produksi dalam bentuk suplai bahan baku (backward linkage) sebagai sektor primer.
- Sektor Perdagangan, Transportasi-Pergudangan dan Jasa Keuangan-Asuransi sebagai unsur dalam mendukung proses pasca produksi pada jalur distribusi (forward linkage) sebagai sektor tersier.

Pertumbuhan nilai pada sektor primer terus meningkat, sedangkan pada sektor sekunder dan tersier terjadi fluktuasi yaitu pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai. Penurunan pada sektor tersier dapat dipengaruhi oleh penurunan pada sektor sekunder.

Dilihat dari distribusinya, hubungan tersebut semakin jelas, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel IV-7. Perubahan Distribusi Kontribusi Pada 5 Sektor Terhadap Total
PDRBKabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha	Distribusi (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	↑ 49,09%	↓ 48,57%	↑ 49,03%	↓ 48,85%	↑ 49,28%
Industri Pengolahan	↓ 7,67%	↑ 7,82%	↓ 7,69%	↑ 7,74%	↓ 7,64%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Kendaraan	↓ 11,28%	↑ 11,51%	↓ 11,06%	↑ 11,10%	↑ 11,29%
Transportasi dan Pergudangan	↓ 1,93%	↑ 1,94%	↓ 1,88%	↑ 1,94%	↑ 2,05%
Jasa Keuangan dan Asuransi	↑ 1,50%	↓ 1,47%	↑ 1,53%	↑ 1,54%	↓ 1,45%

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan juga akan meningkatkan kontribusi sektor tersier lainnya serta secara simultan menurunkan kontribusi sektor pertanian. Oleh sebab itu, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perlu kebijakan daerah untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian khususnya pada komoditi unggulan, karena *multiplier effect* industri pengolahan lebih mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, Kabupaten Merangin masih menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi dalam hal tingkat kemiskinan yang cenderung mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019-2021 mencapai 9,11%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8,7%.

Adapun tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dan indeks gini cenderung berada pada kategori moderat. Kedua variabel terakhir tersebut menjadi indikasi positif mendorong upaya untuk terus menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan potensi peningkatan lapangan usaha dan kesempatan bekerja pada sektor prioritas khususnya pertanian dan juga pariwisata.

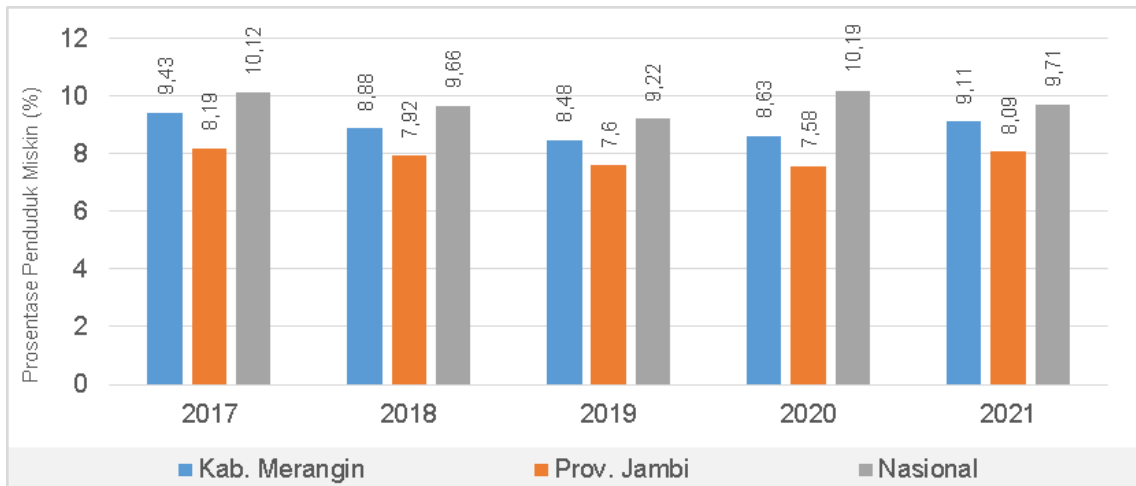


2. Tingkat kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi seharusnya dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Merangin. Namun, pada kenyataannya masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan rendahnya elastisitas perekonomian terhadap angka kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, Pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data, perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV-4. Perkembangan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin lebih tinggi daripada provinsi namun lebih rendah daripada nasional. Selisih tersebut semakin mendekati nasional. Berdasarkan tren pertumbuhan, tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin terus menurun hingga tahun 2020, bahkan ketika pada tingkat kemiskinan provinsi dan nasional mengalami peningkatan karena faktor Pandemi Covid-19. Namun, khusus pada tahun 2021 secara keseluruhan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang selama ini diandalkan dalam menekan angka kemiskinan tidak lagi efektif. Oleh sebab itu pihak Pemerintah Kabupaten Merangin perlu melakukann inovasi kebijakan agar dapat menekan angka kemiskinan pada masa mendatang, baik itu dengan memperkuat sistem pertanian maupun dengan menemukan sektor-sektor alternatif lainnya. Selain itu PMKS menjadi isu tersendiri yang perlu menjadi perhatian. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.



3. Pengembangan sektor ekonomi strategis

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diukur dari pertumbuhan nilai PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin mengalami kontraksi tercatat sebesar 0,86% dan mulai mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 5,09% sebagai akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemic sangat memukul sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya sektor UMKM yang selama ini menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Meredanya pandemi Covid-19 pada tahun-tahun mendatang menjadi harapan tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi strategis. Namun, ada persoalan mendasar terhadap potensi sektor strategis selama ini, yaitu belum terpetakannya sektor ekonomi strategis secara tepat. Jika ini dapat diwujudkan, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat ditingkatkan. Pada kenyataannya masih banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan potensi sumber daya lokal yang belum termanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta belum terintegrasinya pengembangan masing-masing sektor tersebut.

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRB, sektor perdagangan, industri, pertanian dan pariwisata adalah sektor pengungkit perekonomian Kabupaten Merangin yang masih belum optimal dikembangkan. Rendahnya daya saing produk, lemahnya pemasaran, kurangnya inovasi dan permodalan adalah fenomena yang hampir ditemukan pada pengembangan setiap sektor strategis. Perlu terobosan baru untuk menggerakkan keempat sektor di atas secara terintegrasi sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lahan-lahan pertanian pangan yang produktif dan berskala ekonomi, sehingga hasilnya akan mendukung peningkatan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dengan kualitas yang terjaga dan harga yang semakin terjangkau. Meningkatnya produksi pertanian pangan dapat menjadi salah satu sektor yang juga mendorong meningkatnya tingkat pendapatan kelompok masyarakat petani dan daya beli yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian masyarakat.



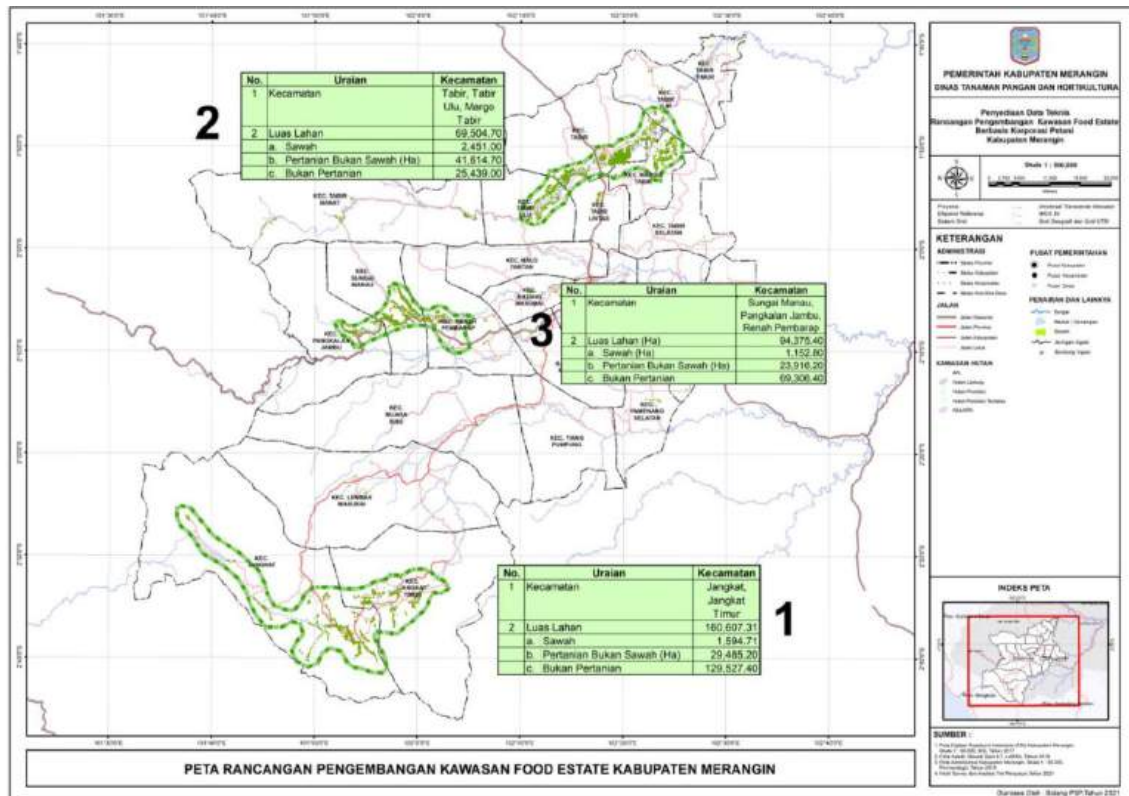
Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya adalah kelompok masyarakat yang sumber penghidupannya adalah pada sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, berbagai upaya peningkatan produktivitas lahan dan akses kepada pembiayaan usaha termasuk investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dapat lebih diwujudkan. Disamping itu dengan menguatnya kelembagaan koperasi ini akan menguatkan posisi tawar petani terhadap harga jual hasil produksi perkebunannya. Sisa hasil usaha yang dikelola oleh koperasi juga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan modal usaha maupun investasi pada sektor industri pengolahan yang dibutuhkan bersama dan menciptakan nilai tambah.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan koperasi yang bergerak pada sektor pertanian perkebunan difokuskan agar para anggotanya dapat berdaya untuk menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan adalah meningkatnya produktivitas lahan dan keuntungan pelaku usaha disamping mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup akibat perluasan lahan perkebunan yang dapat memicu terjadinya peningkatan gas emisi rumah kaca.

Penguatan sistem ekonomi rakyat selaras dan karenanya harus dibarengi dengan kebijakan pembangunan yang fokus pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau. Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi hijau mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan, serta memperhitungkan penurunan emisi gas rumah kaca.

Sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah selama ini dibangun secara menyeluruh dan belum terfokus. Pada sisi lain, kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan juga masih terbatas. Oleh sebab itu, pada masa perencanaan selanjutnya dibutuhkan fokus perencanaan baik secara sektoral maupun spasial. Khususnya pada sektor pertanian, terdapat

lokus potensial yang dapat dikembangkan, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar IV- 5. Lokus Pembangunan Sektor Pertanian

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 lokus, dimana pada kawasan 1 potensial sebagai prioritas lokasi agribisnis, adapun kawasan 2 dan 3 dapat difungsikan sebagai kawasan pendukung kawasan 1.

4. Pengembangan sektor pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Merangin memiliki potensi yang cukup besar, terutama jenis wisata alam dan budaya, serta didukung dengan wisata buatan. Potensi pengembangan pada tahun-tahun mendatang adalah dengan ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark, maka semakin memperkuat citra pariwisata Kabupaten Merangin sebagai destinasi pariwisata berbasis edukasi.

Namun, pada kondisi eksisting keberadaan Geopark Merangin Jambi belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Kabupaten



Merangin. Oleh karena itu tema tersebut perlu didorong lebih baik karena berpotensi dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan aktivitas perekonomian daerah, khususnya dalam hal membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama pada masa pasca pandemi Covid-19.

Geopark Merangin Jambi resmi menjadi anggota geopark nasional pada tanggal 23 september 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global pada tahun 2023 setelah dilakukan penilaian oleh UNESCO pada tahun 2022. Konsep pengembangan pariwisata berbasis Geopark dilandasi tiga pilar, yang pertama adalah pilar konservasi guna perlindungan terhadap lingkungan, pilar yang kedua adalah pilar edukasi bahwa kawasan Geopark Merangin Jambi memiliki nilai signifikansi ilmu pengetahuan tingkat internasional yang layak menjadi obyek penelitian dan tempat tujuan kunjungan studi lapangan khususnya pada bidang geologi terutama sub bidang paleontologi, serta pilar ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat yang meliputi sosial budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pariwisata berupa geowisata.

Geopark Merangin Jambi memiliki tiga tipe atau tema dilihat dari sudut pandang ilmu geologi. Tema utama adalah Fosil Flora Jambi berumur lebih dari 300 juta tahun seperti fosil daun, fosil kayu, fosil akar, fosil hewan, dan fosil kerang-kerangan yang tersebar di Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Selanjutnya tema pendukung dengan keberadaan kawasan kars berupa bentang alam gugusan goa-goa yang juga berfungsi sebagai jalur aliran air sungai bawah tanah dan memiliki ornamen stalaktit dan stalagmit yang menarik. Selanjutnya terdapat tema pendukung lain berupa kawasan Kaldera Masurai yang dimulai dari kecamatan Lembah Masurai Jangkat dan Jangkat Timur, berupa berbagai karakteristik bentang alam sebagai manifestasi dari aktivitas vulkanik pasca letusan Gunung Masurai pada 33.000 tahun yang lalu. Namun demikian, upaya dalam pengembangan Geopark Merangin jambi masih dihadapkan beberapa kendala dalam pengembangannya antara lain: 1) Infrastruktur dan sarana penunjang kawasan; 2) Perlindungan kawasan; 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Peningkatan jejaring dan promosi; 5) Optimalisasi penggunaan website; dan 6) Kelembagaan dan

[illegible]

Pengembangan pariwisata adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik, sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV. Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah | 35



perekonomian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di Kabupaten Merangin, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang menghambat adalah kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Kabupaten Merangin, sehingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep pariwisata berbasis Geopark tergolong dalam jenis wisata edukasi bertujuan konservasi yang digagas oleh UNESCO sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan tingkat internasional. Dengan masuknya Geopark Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark, maka peluang kunjungan mancanegara semakin terbuka, khususnya pengunjung peneliti pada bidang ilmu geologi.

5. Tingkat Investasi

Investasi dalam teori ekonomi makro lebih cenderung berorientasi kepada investasi fisik, misalnya dalam bentuk barang modal, bangunan dan persediaan barang. Investasi berarti pembelian dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal.

Tingkat investasi di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yakni sebagai berikut.



Tabel IV-8. Perkembangan Investasi Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Merangin 2019-2020

No	Indikator	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
1	Jumlah Perusahaan (Unit)	1.646	2.058	25,0%
2	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	2.853	3.751	31,5%
3	Nilai Produksi (Milyar Rp)	114,77	203,21	77,1%

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan potensi investasi di Kabupaten Merangin untuk jenis industri mikro dan kecil. Hal tersebut terutama disebabkan karena faktor pandemi covid-19. Kebijakan nasional yang mengharuskan pergerakan masyarakat dibatasi dan banyak terjadi PHK, menyebabkan masyarakat memiliki lebih banyak waktu di rumah dan sebagian diantaranya membangun usaha secara mandiri sehingga menumbuhkan aktivitas usaha kecil dan mikro secara signifikan.

Selain itu, pada tingkat industri yang lebih tinggi, berdasarkan buku Investasi Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang terbit pada tahun 2023, diketahui bahwa daerah dengan PMDN tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten dengan PMDN terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan, daerah dengan PMA tertinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten/Kota dengan PMA terendah terjadi di Kabupaten Merangin. Investasi yang ditujukan untuk infrastruktur fisik tertinggi terjadi di Kabupaten Bungo, dan Kabupaten/Kota dengan investasi terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Merangin memiliki tingkat investasi PMA terendah diantara seluruh daerah di Provinsi Jambi. Hal tersebut mengindikasikan iklim investasi di Kabupaten Merangin belum cukup menunjang untuk industri berskala internasional.

Terkait dengan sektor prioritas pertanian dan pariwisata, keduanya memiliki potensi untuk membuka peluang investasi pada skala yang lebih tinggi. Sektor pertanian yang terlalu mendominasi PDRB Kabupaten Merangin perlu diberikan inovasi dalam hal industri pengolahan untuk menghasilkan produk-



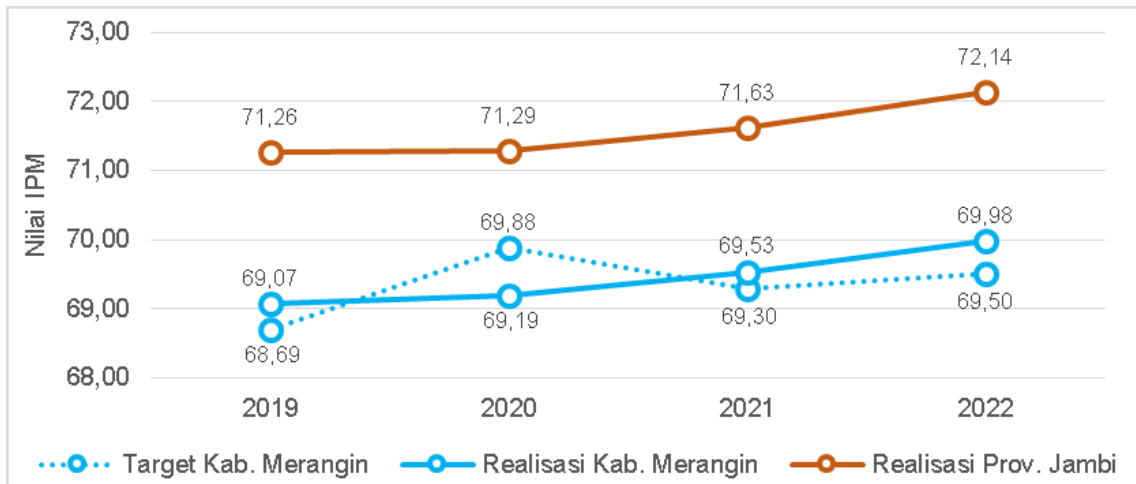
produk turunan, sehingga dapat memberikan nilai tambah komoditi pada tingkat lokal agar jenis barang yang dikirim keluar sudah bukan barang mentah. Selain itu pada sektor pariwisata yang memiliki potensi kunjungan dari luar negeri, dapat dikembangkan usaha-usaha bidang pariwisata dengan kualitas berskala internasional agar pengunjung yang datang dapat terlayani dengan baik. Hal tersebut juga dapat menjadi potensi investasi bagi pengusaha-pengusaha bidang pariwisata yang lebih profesional, seperti usaha akomodasi, transportasi dan jasa hiburan.

Sektor industri pengolahan dan pariwisata adalah sektor yang memiliki *multiplier effect*, sehingga dalam jangka panjang dapat mengungkit sektor lain. Potensi produksi sektor pertanian dapat diarahkan untuk menunjang sektor industri pengolahan. Adapun aktivitas pariwisata beririsan dengan banyak sektor dalam PDRB. Dengan membuka peluang pada kedua sektor tersebut, maka secara simultan juga dapat menumbuhkan sektor-sektor lain yang terkait, dan pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Pembangunan Manusia

Isu strategis pembangunan manusia mencakup 3 isu, yakni peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta gender.

Berdasarkan indikator terkait pembangunan manusia, diketahui perkembangan perbandingan nilai IPM Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut.

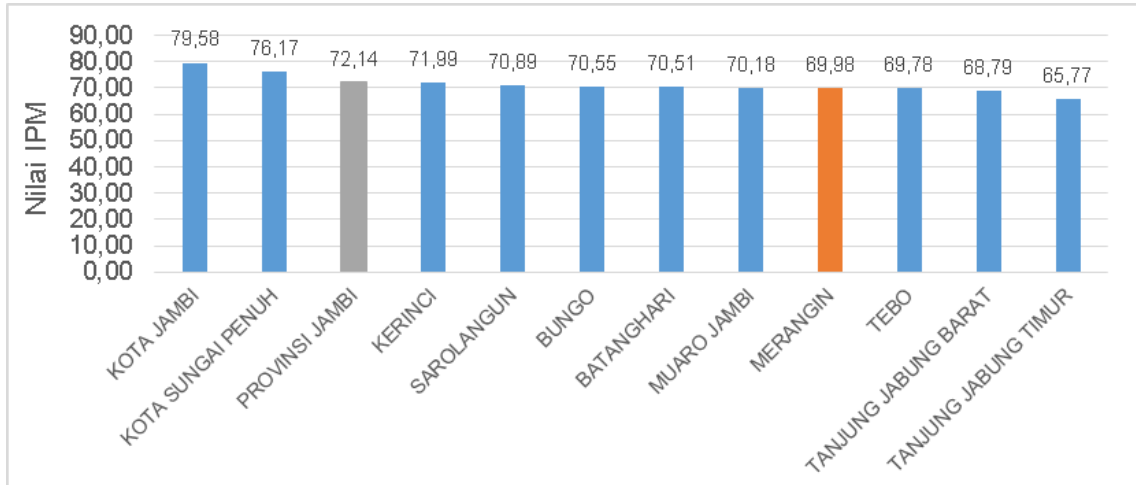


Gambar IV-7. Perkembangan Perbandingan IPM Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa capaian nilai IPM Kabupaten Merangin cenderung melampaui target yang ditetapkan pada tingkat kabupaten. Adapun pada tingkat provinsi, nilai IPM Kabupaten Merangin selalu berada di bawah nilai IPM Provinsi Jambi.

Peringkat nilai IPM Kabupaten Merangin mengalami penurunan dari peringkat 7 pada tahun 2017 hingga 2020 menjadi peringkat 8 pada tahun 2021 dan 2022, diantara 11 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada 2 tahun terakhir tersebut, nilai IPM Kabupaten Merangin berada dibawah nilai IPM Kabupaten Muaro Jambi.

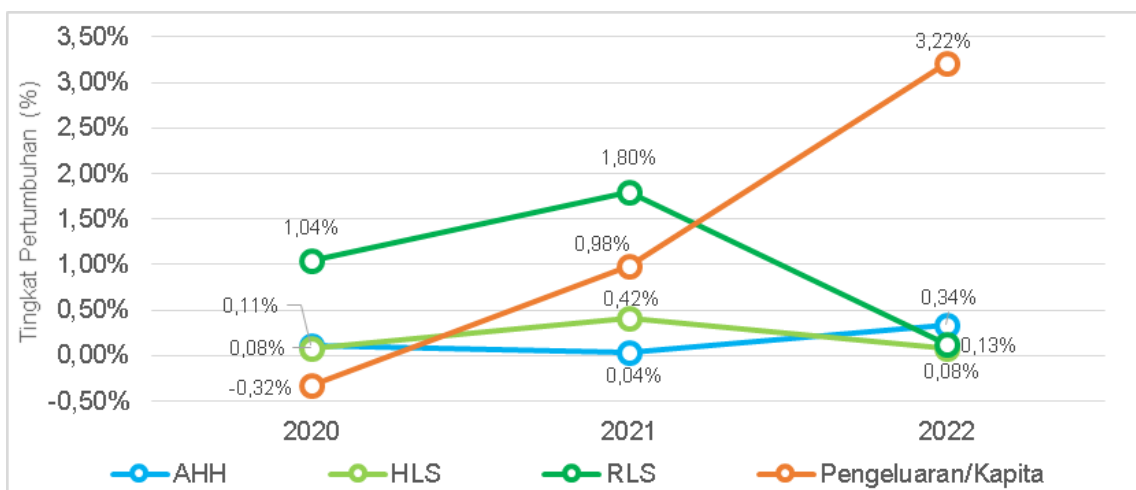
Adapun jika dibandingkan dengan nilai IPM Kota Jambi sebagai yang tertinggi di Provinsi Jambi, selisih nilainya terus meningkat. Akan tetapi dilihat dari selisih tingkat pertumbuhannya, pada tahun 2020 dan 2022 tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Merangin lebih tinggi daripada Kota Jambi. Lebih jelas terkait posisi nilai IPM daerah di Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV-8. Perbandingan IPM Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2022

Akan tetapi, ditinjau dari tingkat pertumbuhan selama 4 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan nilai IPM Kabupaten Merangin (0,44%/tahun) lebih tinggi daripada Provinsi Jambi (0,41%/tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pembangunan manusia memiliki kecenderungan positif namun masih kalah bersaing pada tingkat regional.

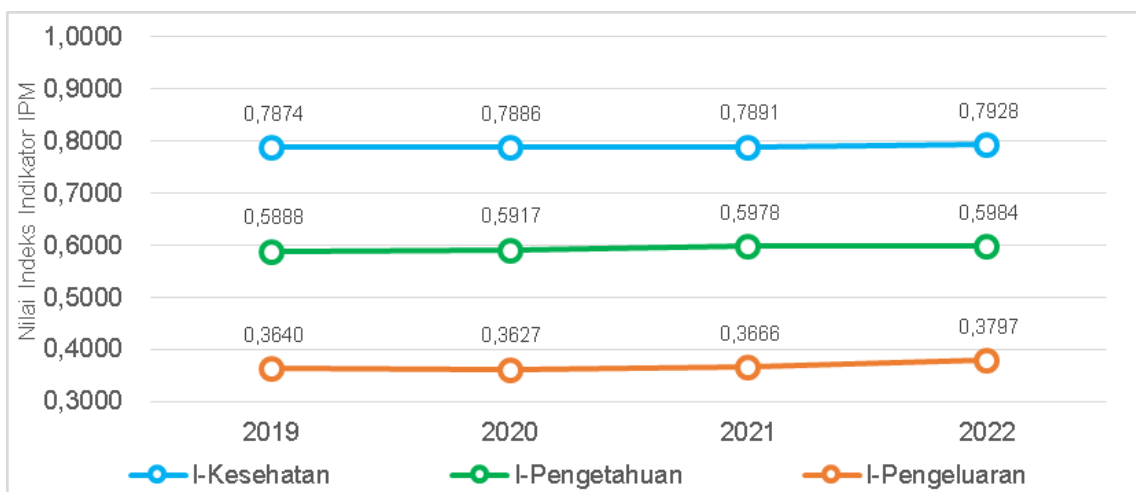
Ditinjau dari indikatornya, diketahui tren pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita, yakni sebagai berikut.



Gambar IV-9. Tingkat Pertumbuhan Indikator IPM Kabupaten Merangin Tahun 2020-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diantara seluruh indikator pembentuk IPM diketahui bahwa indikator pengeluaran perkapita mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, indikator AHH sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 namun meningkat kembali pada tahun 2022, sebaliknya pada indikator HLS dan RLS cenderung menurun pada tahun 2022 dengan penurunan terbesar pada indikator RLS.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan nilai indeks masing-masing dimensi IPM, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV-10. Perkembangan Nilai Indeks Dimensi IPM Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa secara nasional nilai indeks pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan berada pada kategori nilai yang relatif tinggi ($>0,5$).

Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa realisasi peningkatan nilai IPM Kabupaten Merangin pada tahun 2022 dipengaruhi paling besar oleh dimensi pengeluaran meskipun indeksnya masih berada dibawah nilai tengah standar nasional. Adapun dimensi kesehatan dan pengetahuan cenderung mengalami stagnasi dan penurunan meskipun indeksnya berada diatas nilai tengah standar nasional. Oleh sebab itu, maka upaya pembangunan pada dimensi kesehatan dan pendidikan perlu lebih ditingkatkan lagi.

Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan pada indikator pengeluaran perkapita dapat merepresentasikan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun pada sisi lain penurunan pertumbuhan indikator pada dimensi



pengetahuan dapat merepresentasikan penurunan kesadaran masyarakat terhadap nilai penting pendidikan. Secara umum hal tersebut dipengaruhi oleh pola pikir dan pola hidup masyarakat Kabupaten Merangin yang dominan bergerak pada sektor agraris, sehingga preferensi untuk bekerja dan mencari nafkah cenderung lebih utama daripada preferensi untuk belajar dan bersekolah. Pada jangka panjang, pola tersebut dapat berpotensi menurunkan tingkat SDM masyarakat Kabupaten Merangin secara umum.

Pada sisi lain, Kabupaten Merangin memiliki kebutuhan strategis untuk mendorong peningkatan kualitas sektor prioritas seperti pertanian dan pariwisata, sehingga dibutuhkan SDM yang kompetitif khususnya pada kedua sektor tersebut pada masa mendatang. Keunggulan pada sektor pertanian ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap PDRB yang mencapai 50% pada tahun 2022. Keunggulan pada sektor pariwisata ditunjukkan dengan penetapan status Geopark Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 karena memiliki unsur penting dalam dunia pendidikan pada tingkat internasional, yakni keberadaan Fosil Flora Jambi yang tersebar di sepanjang Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Fosil tersebut masih terjaga secara alami dan telah menjadi tujuan penelitian para peneliti dari luar negeri khususnya pada bidang ilmu geologi terutama paleontologi. Oleh sebab itu, Kabupaten Merangin perlu mempersiapkan SDM yang berkompeten dalam rangka menjaga sektor pertanian tetap berkontribusi besar terhadap PDRB dan untuk menangkap peluang baru pada sektor pariwisata berupa potensi peningkatan kunjungan wisatawan dan peneliti luar negeri pada tahun-tahun mendatang.

Kedua sektor unggulan tersebut telah mencapai skala global, maka menjadi suatu tantangan kedepan bahwa masyarakat Kabupaten Merangin perlu mempersiapkan diri dengan persaingan SDM pada tingkat global, seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam konteks sektor perdagangan khususnya pada jenis komoditi pertanian, dan Geopark Global Network (GGN) pada sektor pariwisata berbasis geopark. Beberapa hal yang perlu didorong untuk mempersiapkan SDM dalam era globalisasi meliputi peningkatan program-program pelatihan atau workshop, melakukan perubahan sistem secara berkala untuk mengakomodir perkembangan iklim usaha, serta



perubahan metode kepemimpinan yang lebih egaliter dan lebih mendorong upaya kerjasama (kemitraan). Oleh sebab itu, baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah, perlu lebih banyak tergabung dan berpartisipasi dalam jejaring pada tingkat nasional, regional maupun global, agar mendapatkan perluasan wawasan dan pengetahuan dan lebih jauh dapat meningkatkan kapasitas SDM daerah.

7. Peningkatan kualitas pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Merangin dengan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kabupaten Merangin telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terutama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

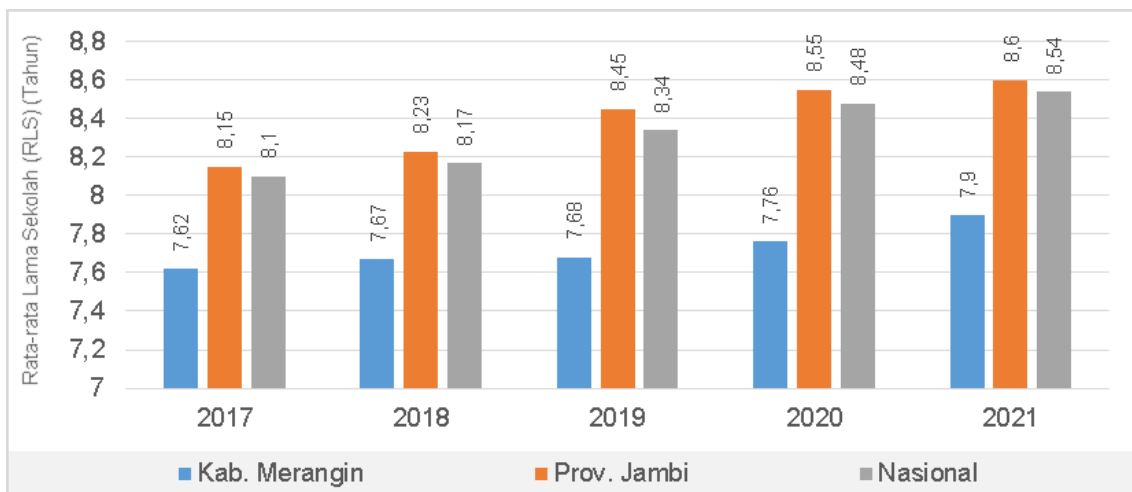
Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Kemudian proses penyelenggaraan pendidikan semenjak adanya pandemi Covid-19 tidak bisa terlaksana seperti biasa dalam kondisi normal. Siswa belajar dari rumah dengan sistem online, akan tetapi tidak bisa berjalan

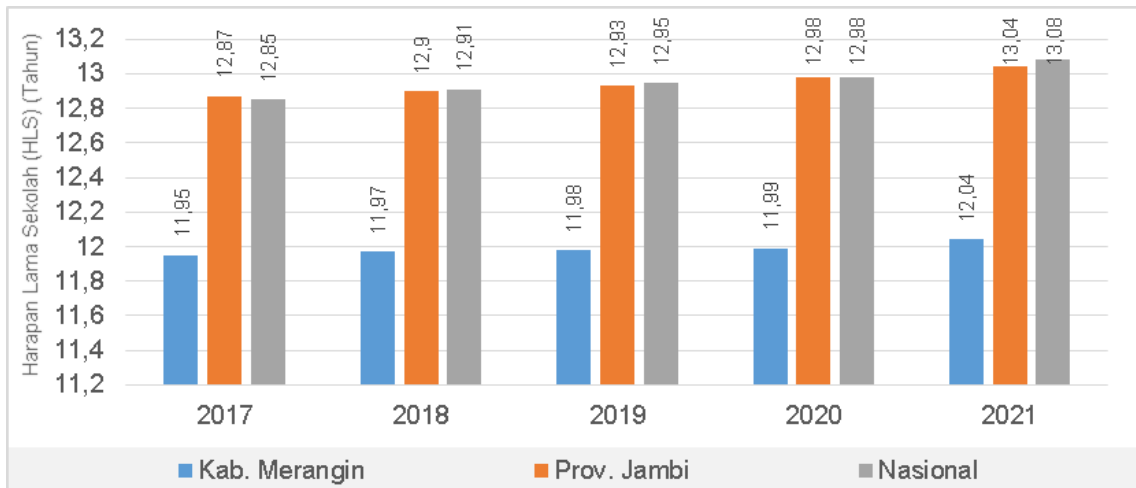


optimal karena keterbatasan jaringan dan alat komunikasi serta tenaga pendidik yang belum siap memberikan bahan ajar melalui media online. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sangat mempengaruhi pelaksanaan dunia pendidikan karena terjadi perubahan mendasar dalam proses pendidikan, jadi diperlukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, percepatan digitalisasi pendidikan dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di fasilitas pendidikan.

Berdasarkan indikatornya, pengukuran pembangunan manusia pada dimensi pendidikan mencakup 2 indikator, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perbandingan RLS dan HLS masyarakat Kabupaten Merangin dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV-11. Perkembangan Perbandingan Indikator RLS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021



Gambar IV-12. Perkembangan Perbandingan Indikator HLS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa RLS dan HLS Kabupaten Merangin cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi maupun Nasional. Selain itu, selisih antara RLS dan HLS Kabupaten Merangin juga lebih rendah (4,26 tahun) dibandingkan Provinsi (4,55 tahun) dan Nasional (4,63 tahun). Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, Kabupaten Merangin juga cenderung lebih rendah, sedangkan Provinsi dan Nasional cenderung berimbang, yaitu RLS (Kabupaten: 0,91%/tahun; Provinsi: 1,36%/tahun; Nasional: 1,33%/tahun), dan HLS (Kabupaten: 0,19%/tahun; Provinsi: 0,33%/tahun, Nasional: 0,44%/tahun).

Oleh sebab itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendorong kesadaran bersekolah bagi masyarakat lokal seiring dengan terus meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan daerah.

Isu peningkatan kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi Jambi terkait dengan pembangunan manusia yang menjabarkan bahwa perlunya peningkatan partisipasi pendidikan pada setiap jenjang yang juga menjadi jawaban atas isu nasional berupa pembangunan manusia Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mencanangkan konsep pendidikan “Merdeka Belajar” merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas siswa yang lebih



baik dan tidak lagi hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Konsep ini menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan pendidikan yang diarahkan tidak hanya terkait pelayanan dan infrastuktur fisik, perlu juga diperhatikan peningkatan kualitas pendidikan non infrastruktur. Kebijakan terkait bagaimana pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata saat ini menjadi salah satu permasalahan di RPJMN, dan ini perlu kita perhatikan di daerah. Terutama adaptasi terhadap situasi pembelajaran pasca pandemi COVID-19, seperti peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kapasitas pedagogi guru yang sesuai keberagaman anak, pola-pola inovasi pembelajaran pasca pandemi, dan lainnya seperti sangat perlu dirumuskan.

Selanjutnya penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kiranya dipertimbangkan dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai zona. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Sistem zonasi dalam PPDB diharapkan mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

Selain itu, kurikulum pendidikan yang terselenggara di Kabupaten Merangin masih berorientasi pada kurikulum nasional dan belum mengembangkan inovasi kurikulum yang berorientasi pemenuhan kebutuhan SDM untuk menunjang sektor prioritas daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada sekolah-sekolah kejuruan (vokasi) pada sektor prioritas pertanian dan pariwisata. Sekolah vokasi pada bidang ilmu pertanian dibutuhkan untuk menciptakan SDM yang mampu menjaga kualitas dan kuantitas produksi komoditi pertanian daerah dan juga untuk mengembangkan industri pertanian dengan menciptakan beragam produk turunan dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditi. Adapun sekolah vokasi pada bidang ilmu pariwisata dibutuhkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan dan peneliti dari luar negeri yang akan meningkat pada tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari penetapan status Geopark Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark. Sehingga kedepan akan dibutuhkan SDM pariwisata yang mampu berbahasa asing,



memiliki dasar hospitaliti dan memiliki pengetahuan pada bidang geologi khususnya dan untuk mengakomodir aktivitas geowisata pada umumnya.

Dengan inovasi penguatan kurikulum berbasis vokasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan pada akhirnya dapat meningkatkan pencapaian HLS dan RLS, karena ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat secara langsung terhubung dengan kebutuhan dunia kerja khususnya pada sektor prioritas daerah.

8. Peningkatan kualitas kesehatan

Pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan merupakan salah satu layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah melalui : (a) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang optimal (Puskesmas dan Rumah Sakit), (b) tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, dan (c) ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, Kabupaten Merangin memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup jumlah penduduk. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan pelayanan kesehatan sedikit terganggu dengan adanya pandemi covid-19, layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta sempat terhenti karena adanya beberapa pegawai rumah sakit dan tenaga



kesehatan yang terpapar covid-19, untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Klinik swasta atau tempat praktek pribadi beberapa dokter ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan yang diterima masyarakat menjadi tidak optimal sebagaimana mestinya.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

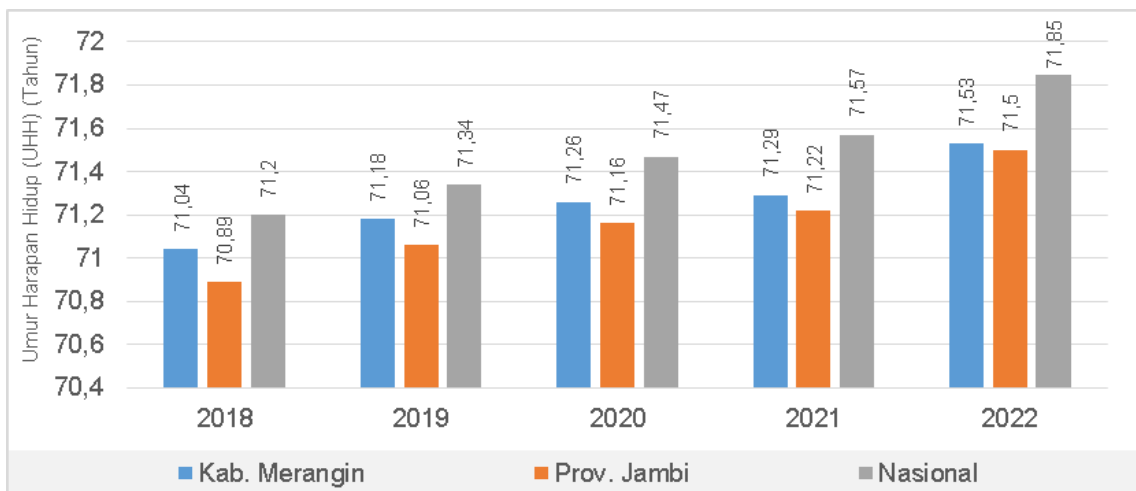
Kondisi-kondisi tersebut tentu menjadi penghambat terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Merangin. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

Isu optimalisasi kualitas dan layanan kesehatan masyarakat ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi terkait dengan peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan yang juga merupakan jawaban atas isu nasional berupa peningkatan akses pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas di semua lini pelayanan kesehatan. Sejalan dengan isu tersebut, permasalahan yang mendapatkan perhatian meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat dari sektor hulu akan memperkuat capaian kualitas SDM. Kemudian upaya preventif melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat, sehingga perlu semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah ditetapkannya Kabupaten Merangin sebagai daerah Intervensi Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Indonesia. Stunting merupakan kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, mengalami

gangguan pertumbuhan, dan mempengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Indikasi lainnya pada anak stunting adalah daya tahan tubuhnya lemah, berat badan cenderung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Stunting ini bisa terjadi sejak dari usia dalam kandungan. Kemudian rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak dengan kelahiran sehat lainnya.

Berdasarkan data AHH Kabupaten Merangin berkisar diantara 71 tahun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,16%/tahun selama 4 tahun terakhir, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,34% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,04%. Indeks pada dimensi kesehatan berkontribusi paling besar dalam pembentukan nilai IPM Kabupaten Merangin. Oleh sebab itu, intervensi program-program Pemerintah Daerah terkait pelayanan kesehatan akan lebih mudah mendorong peningkatan nilai IPM Kabupaten Merangin.



Gambar IV-13. Perkembangan Perbandingan Indikator AHH Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat UHH Kabupaten Merangin lebih tinggi daripada provinsi namun lebih rendah daripada nasional. Selisih tersebut semakin mendekati provinsi dan semakin jauh dari nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sementara standar



kesehatan provinsi dan nasional terus meningkat, namun pada tingkat kabupaten terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan. Oleh sebab itu, faktor indikator UHH menjadi isu strategis karena perlu direncanakan program-program untuk mendorong kembali peningkatan nilai UHH kabupaten.

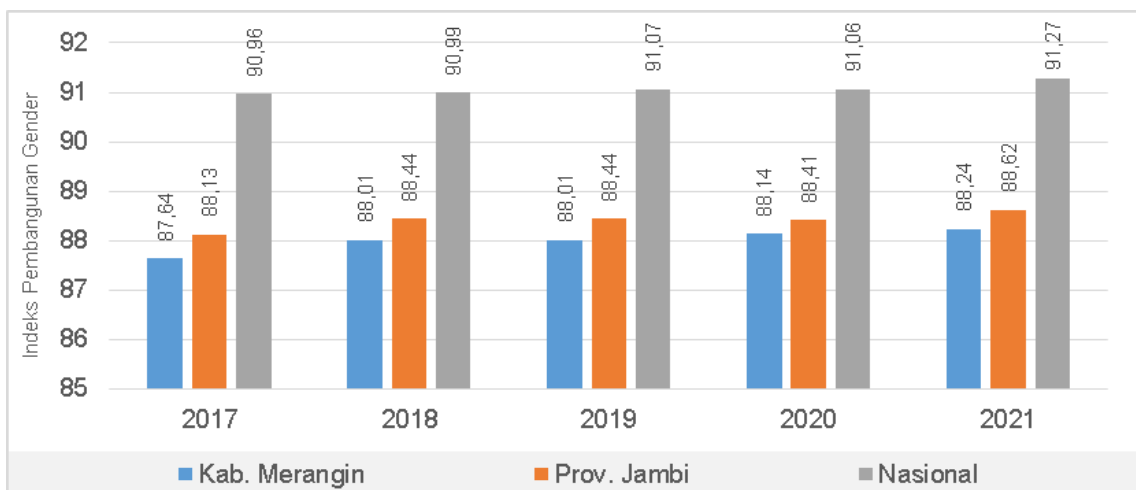
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta gender

Isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kabupaten Merangin masih perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data yang ada, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan dibandingkan dengan daerah lain. Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender juga merupakan isu nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Terlebih lagi dengan adanya pandemic covid-19 timbul permasalahan baru dalam pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender. Dalam masa pandemi ini anak-anak harus dirumah saja untuk menghindari terpapar covid-19, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak karena ruang gerak yang terbatas sehingga anak-anak tidak bebas untuk menyalurkan potensinya. Keterbatasan dalam beraktifitas berdampak kepada aktifitas ekonomi yang terganggu, berkurangnya pendapatan rumah tangga sedangkan pengeluaran rumah tangga tidak bisa dikurangi yang menyebabkan permasalahan di dalam keluarga terkadang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender harus terus diupayakan dan dijaga agar tetap berkelanjutan. Di samping itu peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak harus terus diupayakan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah ke depan. Sebetulnya prestasi Kabupaten Merangin dalam anugerah Kota Layak Anak (KLA) sangat baik. Pada tahun 2021 Kabupaten Merangin meraih penghargaan KLA kategori Madya, ini merupakan anugerah kelima sejak tahun 2013. Prestasi ini terwujud atas capaian pembangunan dalam memenuhi 31 Hak Anak melalui 5 klaster Hak Anak dan 24 indikator Kota Layak Anak yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ke depannya diharapkan konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak-

hak anak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh serta berkelanjutan.

Dalam bidang kesetaraan dan keadilan gender juga diraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama pada tahun 2021. Ini menunjukkan program-program pembangunan sudah mengakomodir kesetaraan dan keadilan gender, inipun perlu ditingkatkan dan dipertahankan melalui perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Merangin dan perbandingannya terhadap IPG tingkat provinsi dan IPG tingkat nasional, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV-14.Perkembangan Perbandingan Indikator IPG Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa tingkat IPG Kabupaten Merangin sedikit lebih rendah daripada provinsi, dan lebih rendah secara signifikan daripada nasional. Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, IPG Kabupaten Merangin (0,17%/tahun) tumbuh lebih tinggi daripada provinsi maupun nasional, yaitu provinsi sebesar 0,14%/tahun dan nasional sebesar 0,09%/tahun. Hal tersebut menunjukkan indikasi positif bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Merangin cukup tinggi. Kondisi tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena secara angka masih berada jauh dari rerata IPG nasional.



10. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan mencakup 2 isu, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik yang prima.

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan capaian indikator reformasi birokrasi, selama 4 tahun terakhir Kabupaten Merangin berada pada kategori CC atau mendapatkan peringkat Cukup dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut bermakna bahwa penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Merangin secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.

Penetapan target capaian selama 4 tahun yang tidak ditingkatkan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki komitmen dalam upaya perubahan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, pada masa mendatang dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan target capaian Indeks Reformasi Birokrasi, agar pembangunan daerah dapat terselenggara dengan lebih baik.

Selain itu, pada indikator penilaian AKIP Kabupaten Merangin masih berada pada kategori B atau Baik dan belum mampu mencapai target predikat pada kategori BB atau Sangat Baik selama 4 tahun terakhir. Hal tersebut bermakna bahwa pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum mengalami peningkatan.



Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, Kabupaten Merangin mendapatkan nilai 61 dan merupakan yang terendah diantara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Penilaian MCP meliputi 8 area dan Kabupaten Merangin mendapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel IV-9. Hasil Penilaian MCP oleh KPK Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Kriteria	Nilai	Skala Nilai
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	73	1-100
2	Pengadaan Barang dan Jasa	58	1-100
3	Perizinan /Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82	1-100
4	Pengawasan/ Kapabilitas APIP	51	1-100
5	Managemen ASN	44	1-100
6	Optimalisasi Pendapatan Daerah /Pajak Daerah	44	1-100
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Manajemen Aset Daerah	60	1-100
8	Tata Kelola Dana Desa	83	1-100

Sumber: Pemerintah Provinsi Jambi, 2023.

Berdasarkan rincian tersebut, diketahui bahwa area yang telah terselenggara dengan baik adalah Tata Kelola Dana Desa, Perizinan /Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perencanaan dan Penganggaran APBD. Adapun area yang belum terselenggara dengan baik adalah Managemen ASN dan Optimalisasi Pendapatan Daerah /Pajak Daerah.

Akan tetapi, terdapat indikasi positif berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Merangin mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut pada tahun 2016-2021.

2) Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima

Dalam suatu teritori wilayah, terdapat hubungan yang sangat penting antara pemerintah dan masyarakat. Tata hubungan diantara keduanya dapat meliputi berbagai konsep, dan hukum pelayanan publik adalah salah satunya. Hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara



pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah Good Governance dan Clean Government. Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengukur keberhasilan pelayanan publik pada suatu wilayah pemerintahan, terdapat perangkat pengukuran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk setiap jenis pelayanan publik yang tersedia bagi masyarakat. Pada Kabupaten Merangin pengukuran tersebut belum terselenggara secara optimal. Pada sisi lain, terdapat penilaian yang diselenggarakan oleh Ombudsman berupa Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik). Pada tahun 2022, diantara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin mendapatkan nilai terendah dengan nilai 73,88 dengan zona kuning dan opini kualitas sedang.

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa Provinsi Jambi mendapatkan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 50,45 pada tahun 2022 dengan predikat inovatif, namun mengalami penurunan peringkat dari peringkat 8 menjadi peringkat 17 secara nasional.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk lebih dapat berinovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh jenis pelayanan publik yang tersedia secara berkala setiap tahun. Survey tersebut dibutuhkan sebagai data pembandingan dari penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.



11. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Isu strategis pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan mencakup 2 isu, yakni pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur daerah yang diselenggarakan selama ini cenderung menggunakan paradigma pemerataan pembangunan. Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan juga masih terbatas, akibatnya pembangunan yang dilakukan pada lokasi tertentu cenderung tidak tuntas karena harus berbagi sumberdaya dengan lokasi-lokasi lain yang juga dianggap memiliki tingkat kebutuhan yang sama. Oleh sebab itu, pada masa perencanaan selanjutnya dibutuhkan fokus perencanaan baik secara sektoral maupun spasial. Fokus perencanaan secara sektoral artinya pembangunan infrastruktur sebaiknya diprioritaskan pada infrastruktur penunjang sektor-sektor unggulan daerah. Adapun fokus perencanaan secara spasial artinya harus melakukan pemilihan lokasi yang akan diprioritaskan.

1) Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Berdasarkan capaian pemenuhan penyediaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Merangin selama 3 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-10. Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Publik Kabupaten Merangin Tahun 2019-2021

Tahun	Indeks Jalan Mantap		Indeks Irigasi		Indeks Infrastruktur Permukiman	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	73,56	64,39	46,45	65,33	65,51	55,53
2020	75,15	71,11	47,45	67,74	66	56,66
2021	71,06	71,11	70,11	65,51	67	57,23

Sumber: Capaian IKU Kabupaten Merangin tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pemenuhan infrastruktur irigasi mengalami tingkat capaian yang paling baik. Akan tetapi prosentase tertinggi adalah pada pemenuhan kebutuhan jaringan jalan. Adapun



infrastruktur pendukung permukiman masih berada pada kisaran angka 50%-60%, yang dapat dimaknai bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman belum dioptimalkan. Hal tersebut berarti bahwa sebaran pelayanan jaringan listrik, pemenuhan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah serta jaringan telekomunikasi belum mencapai 60% penduduk.

Oleh sebab itu, pada perencanaan pembangunan mendatang perlu dioptimalkan khususnya peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memiliki relevansi kuat terhadap sektor prioritas daerah, yaitu infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata. Beberapa antaranya seperti infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, jalan menuju dan dalam kawasan prioritas pertanian, infrastruktur dan sistem pengembangan agribisnis di lokus prioritas pertanian, infrastruktur informasi dan transportasi menuju situs-situs Geopark Merangin Jambi, dan infrastruktur pendukung amenities di setiap situs, dalam rangka menciptakan peningkatan tingkat kepuasan wisatawan.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah yang baik harus berkelanjutan, dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga pengendalian pemanfaatan lingkungan. Setiap manusia yang hidup dan beraktivitas di Kabupaten Merangin akan menimbulkan beban terhadap lingkungan, dan setiap tahun jumlah manusia terus tumbuh sedangkan daya dukung lingkungan tetap. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, membebani lingkungan/ekosistem, berpotensi pada jangka panjang menurunkan kualitas lingkungan hidup. Beberapa fenomena yang telah terjadi dan menjadi isu di masyarakat adalah terkait pertambangan ilegal, pembukaan lahan secara liar dan kebakaran hutan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang akan datang harus mencantumkan aspek lingkungan hidup dalam indikator perencanaannya, agar dampak negatif pembangunan dapat diketahui dan dikendalikan sehingga pemanfaatan sumber daya lingkungan dapat tersenggara secara berkelanjutan.



BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2024-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 yaitu **"MERANGIN YANG MAJU, MANDIRI, LESTARI , ADIL DAN BERBUDAYA"**.

MERANGIN MAJU	: Merangin dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang secara berkualitas dengan keterlibatan seluruh pelaku ekonomi pada seluruh sektor secara berkelanjutan. Kemajuan dalam perekonomian Merangin tersebut harus tercermin melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan pada setiap lapisan masyarakat di semua wilayah.
MERANGIN MANDIRI	: Merangin dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa sehingga memiliki daya saing dan



	nilai tambah bagi baik dirinya sendiri maupun bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Merangin dengan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif sehingga mampu mengelola potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa tergantung dari pihak luar.
MERANGIN LESTARI	: Merangin dengan sumber daya alam yang kaya dan penuh khazanah yang tetap terjaga kelestariannya tanpa mengurangi kemanfaatannya bagi manusia sehingga menjadi cadangan sumberdaya alam yang terbarukan yang dimanfaatkan secara rasional, optimal dan efisien sehingga tercapai keseimbangan antara benefit dengan daya dukung dan kemampuan pulih alamnya
MERANGIN ADIL DAN BERBUDAYA	: Merangin dengan kondisi politik yang kondusif, spasi yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya sikap dan budaya politik khususnya peningkatan partisipasi politik rakyat membaiknya kualitas dan pemerataan pelayanan publik oleh pemerintah daerah tumbuh dan berkembangnya mental sikap dan budaya hukum yang mengarah pada suasana Merangin yang aman tentram dan tertib.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2008- 2028, maka ditetapkan pula Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

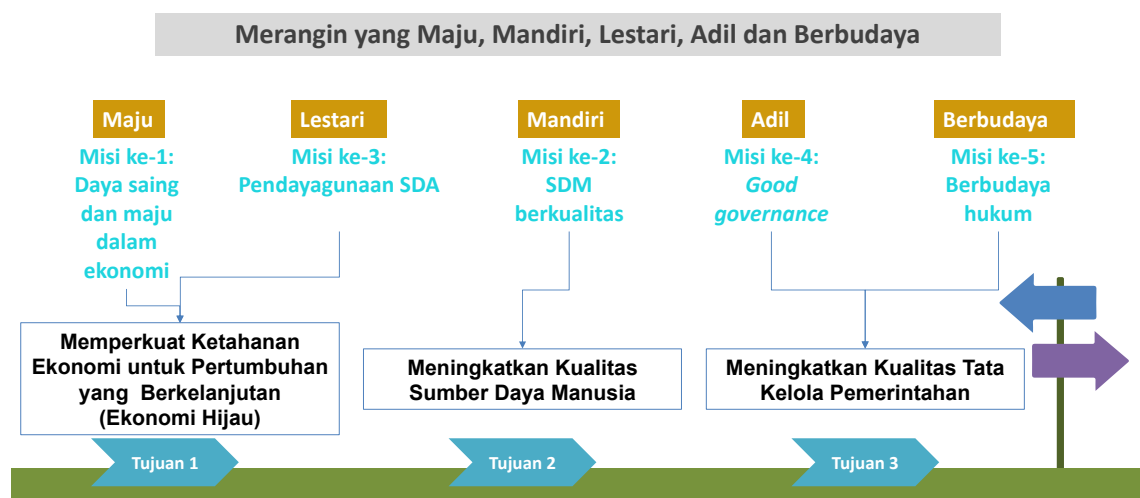
1. Mewujudkan Merangin yang punya daya saing dan maju dalam perekonomian daerah;
2. Mewujudkan Merangin yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri;
3. Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan;



4. Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance);dan
5. Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman tentang dan tertib dikenal masyarakat.

5.1. TUJUAN

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti yang dituangkan pada BAB IV. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

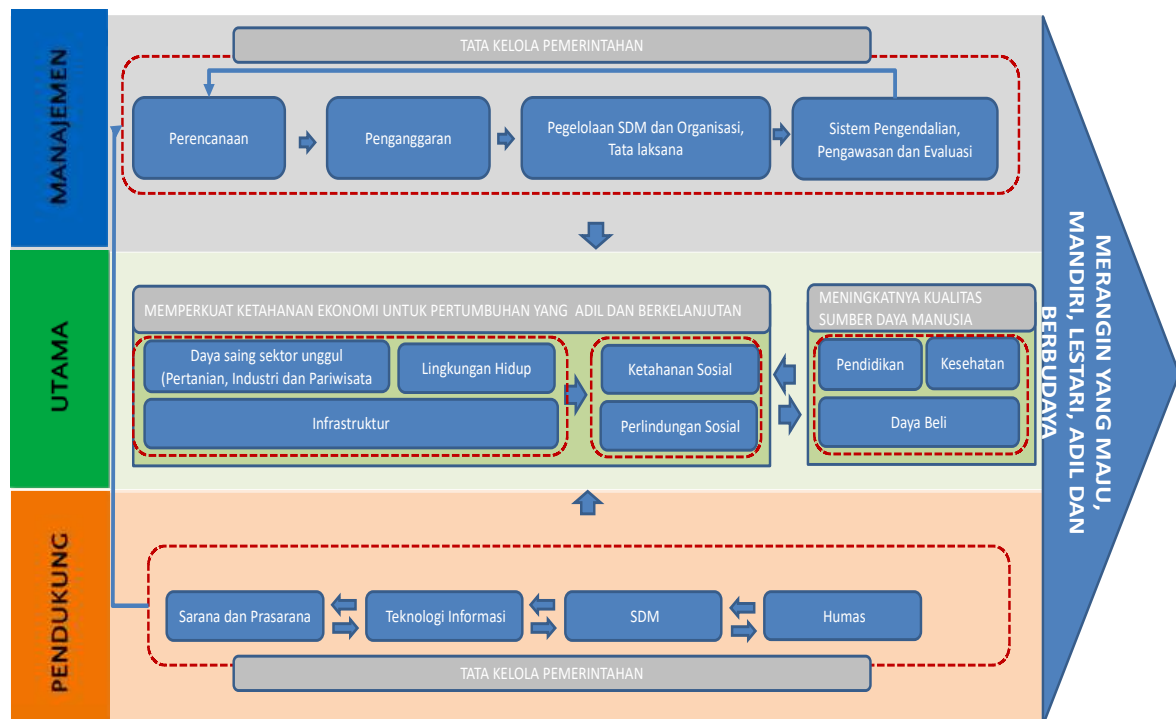


Gambar V-1. Keselarasan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, diusung 3 tujuan yang merupakan ekstraksi dari kebutuhan yang akan datang dan telah mengakomodir seluruh misi yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (ekonomi hijau).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan strukturnya, ketiga tujuan tersebut berikut unsur turunannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar V-2. Struktur Tujuan Pembangunan dan Unsurnya Pada RPD Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dimaknai bahwa tujuan 1 dan 2 adalah tujuan utama dari pembangunan daerah, namun untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sistem yang berjalan baik sehingga dibutuhkan tujuan 3 yang berfungsi sebagai manajemen dan pendukung. Selanjutnya untuk



dapat mengukur tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka terdapat unsur-unsur tertentu yang selanjutnya dirumuskan sebagai sasaran pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan 1:

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (ekonomi hijau), mencakup sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan.

Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga.

Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencakup sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas akses pendidikan.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas akses kesehatan.

Sasaran 3: Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Tujuan 3:

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mencakup sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima.

Sasaran 2: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel.

Keselarasan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin 2024-2026 dengan Misi Rencana Pembangunan Provinsi Jambi dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024



Tabel V-1. Keselarasan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin 2024-2026 dengan Misi Rencana Pembangunan Provinsi Jambi dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Misi RPJPD Kabupaten Merangin 2008-2028	Provinsi Jambi		Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	Isu Strategis 2024-2026	Tujuan RPD Kabupaten Merangin 2024-2026
	Misi RPJPD Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Tahun 2021-2026				
Misi ke-1: Mewujudkan Merangin yang punya daya saing dan maju dalam perekonomian daerah.	Misi ke-1: Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif.	Misi ke-2: Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Misi ke-1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Pembangunan Ekonomi	Tujuan ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)
Misi ke-2: Mewujudkan Merangin yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri.	Misi ke-1: Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif. Misi ke-2: Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya	Misi ke-3: Memantapkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi ke-3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Pembangunan Manusia	Tujuan ke-2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi ke-3: Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan.	Misi ke-5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan Misi ke-6: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Misi ke-2: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)
Misi ke-4: Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik	Misi ke-3: Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum	Misi ke 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi ke-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju <i>world class government</i> .	Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan ke-3: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

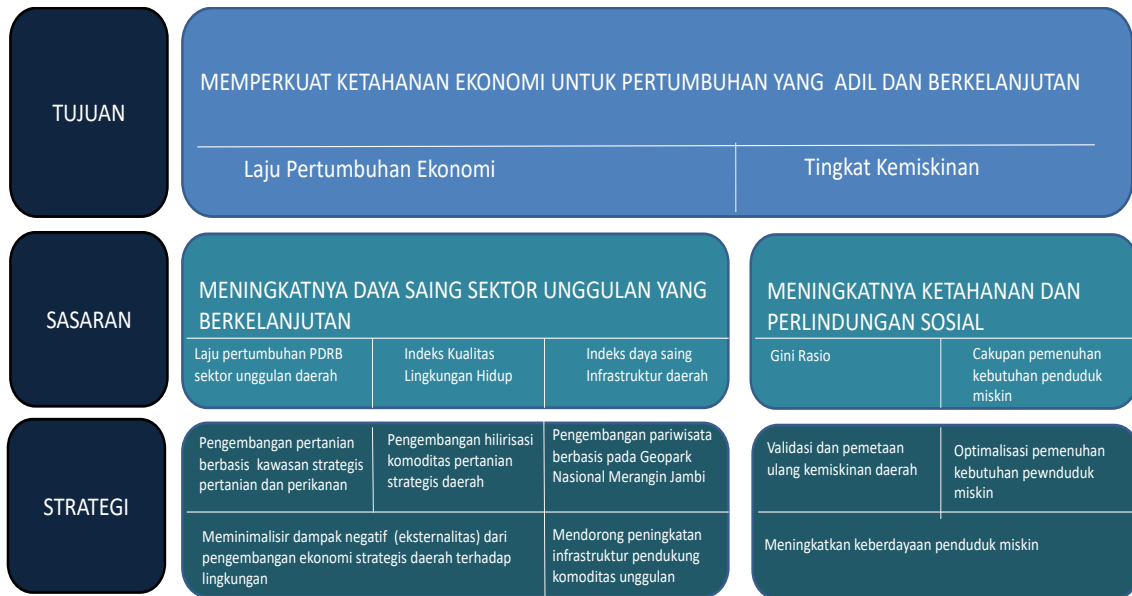


Misi RPJPD Kabupaten Merangin 2008-2028	Provinsi Jambi		Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	Isu Strategis 2024-2026	Tujuan RPD Kabupaten Merangin 2024-2026
	Misi RPJPD Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Tahun 2021-2026				
(good governance).						
Misi ke-5: Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tertam dan tertib di tengah masyarakat.	Misi ke-3: Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum Misi ke-4: Mewujudkan kondisi yang aman, tertam dan tertib.					Tujuan ke-3: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

5.2. SASARAN

Perumusan sasaran-sasaran tersebut ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada tahap pembangunan sebelumnya dan untuk mengakomodir potensi dan tantangan masa mendatang yang mulai dihadapi dan dirasakan saat ini. Maka dapat dimaknai bahwa perumusan sasaran-sasaran tersebut adalah nilai-nilai yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam perencanaan pembangunan mendatang.

Selanjutnya untuk dapat mengukur capaian sasaran tersebut maka diturunkan dalam bentuk indikator-indikator sasaran dan kemudian dirumuskan pula beragam strategi untuk mencapai sasaran maupun indikatornya tersebut. Keselarasan antara tujuan pembangunan, sasaran dan indikator sasaran pembangunan, serta strategi pembangunan dapat dilihat pada gambar dan uraian berikut ini.

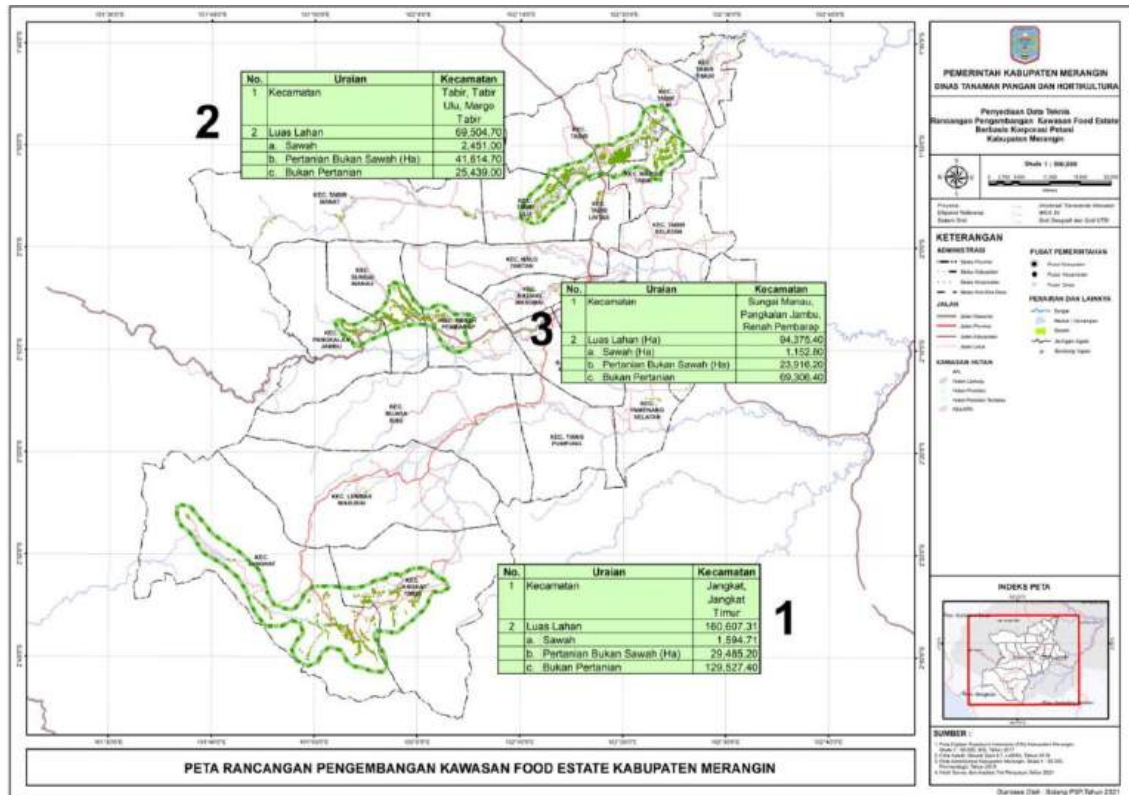


Gambar V-3. Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa **Tujuan 1 mencakup 2 sasaran** yang harus terselenggara secara simultan karena saling mempengaruhi, yaitu sasaran terkait ekonomi dan sasaran terkait ketahanan sosial. Untuk meningkatkan perekonomian daerah hanya dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan jika masyarakat sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan aktivitas perekonomian tersebut memiliki ketahanan sosial yang baik. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan memiliki ketahanan sosial yang baik jika kesempatan untuk meningkatkan perekonomian terbuka lebar secara merata untuk setiap individu masyarakat dan setiap keluarga.

Pada **Sasaran 1** terkait perekonomian, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan adalah daya saing sektor unggulan, dan untuk mencapai hal tersebut dirumuskan 5 strategi yang perlu diprioritaskan, yaitu 3 strategi utama meliputi pengembangan pertanian yang berbasis kawasan strategis, pengembangan hilirisasi komoditas pertanian dan pengembangan pariwisata berbasis geopark. Ketiga hal tersebut membutuhkan strategi optimalisasi sekaligus juga pengendalian, sehingga dibutuhkan 2 strategi pendukung yaitu mendorong pembangunan infrastruktur dan meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Dari ketiga strategi utama tersebut, diketahui bahwa sektor yang diprioritaskan ada sektor pertanian dan pariwisata. Strategi yang dirumuskan tersebut selain memprioritaskan jenis sektor juga perlu diprioritaskan terkait lokus pengembangannya agar perencanaan pembangunan dapat lebih terfokus. Pada sektor pertanian, lokus yang diprioritaskan dapat dilihat pada gambar berikut.



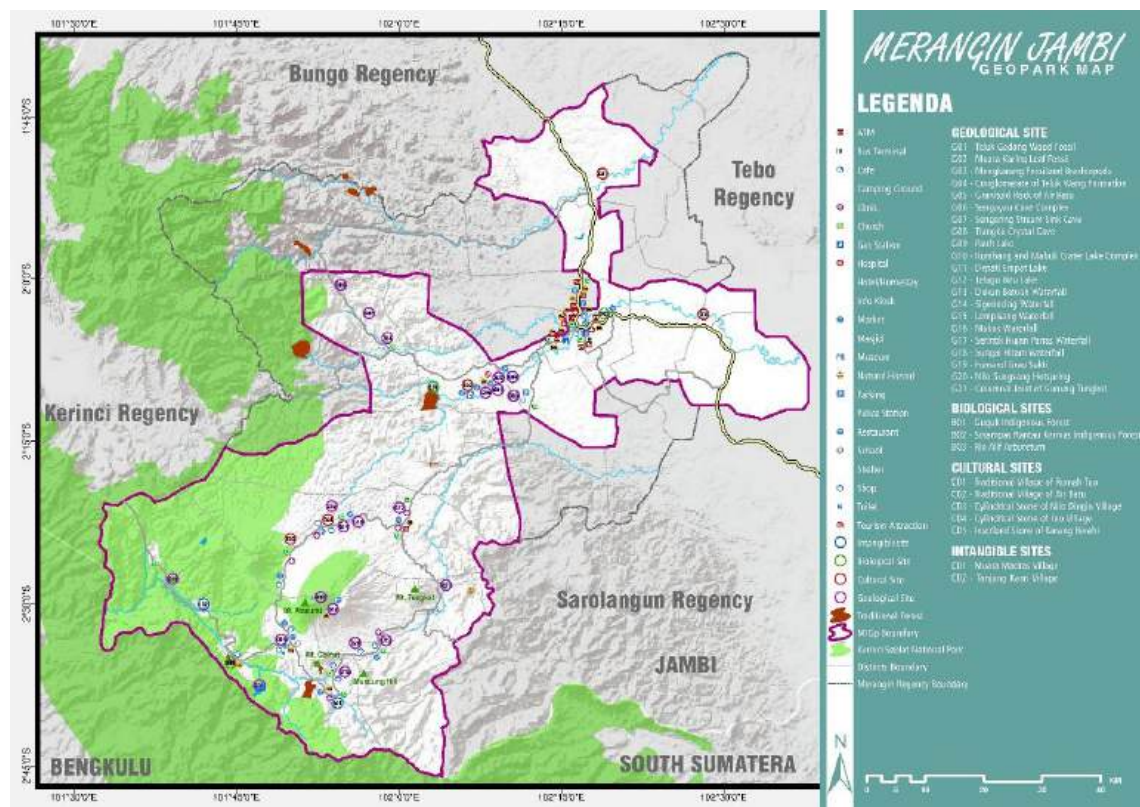
Gambar V-4. Lokus Pembangunan Sektor Pertanian pada Tujuan 1 Sasaran 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa lokus rencana yang menjadi prioritas pengembangan sektor pertanian adalah pengembangan sistem agribisnis di 3 kawasan yang tersebar di bagian timur, tengah dan barat wilayah Kabupaten Merangin. Konsep pengembangan pertanian yang dikembangkan adalah berbasis kawasan dengan sistem terintegrasi. Integrasi yang dimaksud adalah integrasi hulu hilir dan integrasi antar komoditas. Kawasan 1 fokus pada pengembangan sub sistem agribisnis mulai dari hulu hingga hilir, pengembangan industri pertanian difokuskan di kawasan ini. Kawasan 2 dan 3 fokus pada

pengembangan *downstream agribusiness* yaitu fokus pada penyediaan bahan baku (*raw material*) untuk mendukung Kawasan 1.

Dengan konsep tersebut, diharapkan pengembangan pertanian di Kabupaten Merangin di masa mendatang tidak hanya mengandalkan aktivitas ekstraksi, namun juga mulai mengarah pada hilirisasi atau industrialisasi komoditi pertanian. Sehingga pada masa mendatang nilai ekonomi komoditi unggulan tersebut dapat lebih tinggi karena telah melalui proses produksi di tingkat lokal kabupaten.

Selanjutnya terkait fokus kawasan pengembangan pariwisata, diprioritaskan pariwisata berbasis Geopark dengan penguatan konsep pada aktivitas wisata edukasi khususnya terkait wisata alam geologi (*edugeowisata*), dengan tetap turut mempromosikan wisata budaya. Berdasarkan perwilayahannya, Geopark Merangin Jambi mencakup 12 kecamatan dan terdapat 21 situs geologi dan 10 situs non geologi (alam dan budaya). Sebarannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar V-5. Lokus Pembangunan Sektor Pariwisata Berbasis Geopark pada Tujuan 1 Sasaran 1 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026



Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa jenis pariwisata yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan tersebut adalah berbasis alam dan budaya. Adapun jenis wisata buatan diposisikan sebagai elemen pendukung (kemitraan) yang juga dibutuhkan untuk tetap menjaga kunjungan wisatawan konvensional. Dan klasterisasi lokasi, 21 situs geologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster Fosil Flora Jambi, klaster Bentang Alam Karst dan klaster Gunung Masurai. Pada klaster Fosil Flora Jambi terdapat 5 lokasi, klaster Bentang Alam Karst terdapat 3 lokasi, dan klaster Gunung Masurai terdapat 13 lokasi.

Selain situs geologi, Geopark Merangin Jambi juga mengusung integrasi geologi terhadap unsur lain meliputi unsur biologi, unsur sejarah-budaya dan unsur pola hidup masyarakat. Sehingga juga turut dipromosikan 10 situs non geologi yang meliputi 2 situs alam/biologi, 5 situs cagar budaya dan 2 situs budaya tak benda berbasis peninggalan pola hidup masyarakat asli/adat/lokal.

Selanjutnya, pada **Sasaran 2** yang terkait dengan faktor ketahanan sosial, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan adalah penduduk miskin, yang dapat ditekan dengan mengusung 2 strategi utama berupa validasi dan pemetaan ulang kemiskinan daerah serta upaya pemenuhan kebutuhan penduduk miskin. Kedua hal tersebut jika dapat terselenggara dengan baik maka dapat dilanjutkan dengan strategi meningkatkan keberdayaan penduduk miskin. Dalam hal ini, pemberdayaan tersebut dapat diarahkan pada kedua sektor unggulan daerah yang telah dibahas sebelumnya.

Pada **Tujuan 2** RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, dirumuskan sasaran dan strategi pembangunan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar V-6. Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 2 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa **Tujuan 2** mencakup **3 sasaran** yang merepresentasikan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu sasaran terkait aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi masyarakat dalam bentuk daya beli masyarakat. Secara umum pembangunan manusia dapat diukur dengan ketiga aspek tersebut, yang mana fungsi pemerintah adalah untuk mendorong peningkatan kualitas manusia atau masyarakat yang tinggal di daerahnya pada ketiga aspek tersebut.

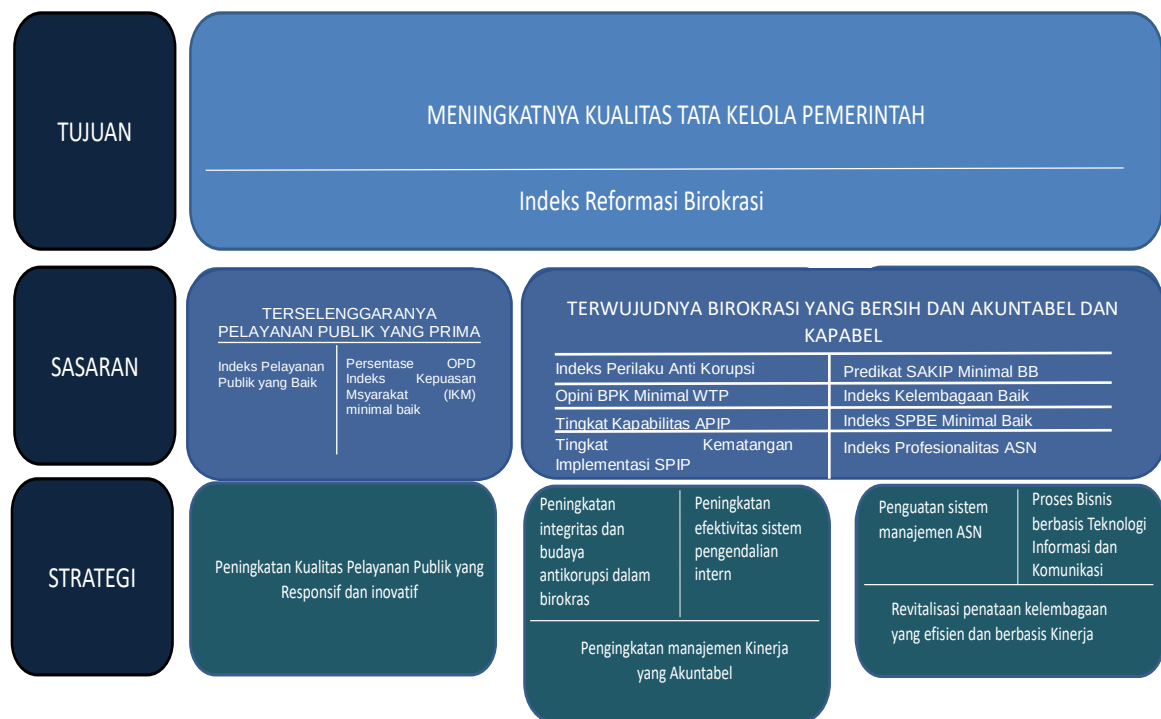
Pada **Sasaran 1** terkait aspek pendidikan, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan dibatasi pada faktor pendidikan formal dalam arti aktivitas sekolah, yang dapat ditingkatkan dengan mengusung 2 strategi berupa pemerataan standar pendidikan setingkat nasional dan peningkatan partisipasi sekolah dengan pemerataan akses terhadap pendidikan.

Pada **Sasaran 2** terkait aspek kesehatan, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan adalah faktor kesehatan individu dan keluarga, yang dapat ditingkatkan dengan mengusung 2 strategi berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan ketahanan keluarga sejahtera.



Pada **Sasaran 3** terkait aspek daya beli masyarakat, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan adalah dengan mengusung 2 strategi utama berupa menjaga stabilitas harga dan pada sisi lain menekan tingkat pengangguran. Kedua hal tersebut jika dapat terselenggara dengan baik maka dapat berdampak positif pada strategi ketiga yaitu peningkatan ketahanan pangan daerah.

Selanjutnya, pada **Tujuan 3** RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, dirumuskan sasaran dan strategi pembangunan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar V-7. Struktur Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah pada Tujuan 3 RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa Tujuan 3 mencakup 3 sasaran yang merepresentasikan konsep Reformasi Birokrasi, yaitu sasaran terkait aspek pelayanan publik, aspek akuntabilitas dan kapabilitas birokrasi. Secara umum terkait tata kelola pemerintahan telah terdapat standarisasi nasional, sehingga pada prinsipnya perumusan sasaran dan strategi pada **Tujuan 3** adalah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.



Pada Sasaran 1 terkait aspek pelayanan publik, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan dibatasi pada faktor pentingnya pelayanan publik yang responsif dan inovatif. Hal tersebut dirasa masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Merangin, berdasarkan penilaian oleh Ombudsman.

Pada Sasaran 2 terkait aspek birokrasi, dirumuskan bahwa unsur yang diprioritaskan adalah faktor akuntabilitas dan kapabilitas birokrasi. Akuntabilitas birokrasi mencakup penyelenggaraan fungsi organisasi pemerintah daerah, dan kapabilitas birokrasi mencakup SDM. Kedua hal tersebut masih dan harus terus ditingkatkan di Kabupaten Merangin, mengingat beberapa indikator mengindikasikan tata kelola pemerintah Kabupaten Merangin masih relatif rendah, terutama indikator pada opini KPK. Tujuan dan sasaran beserta indikatornya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel V-2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
				Capaian	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN (EKONOMI HIJAU)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Persentase	5,72	6,02	6,11	6,21	6,35	6,35
1.1.	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Laju PDRB sektor unggulan daerah:							
		1. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	4,95	5,22	5,36	5,42	5,61	5,61
		2. Pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase	2,5	3	3,18	3,25	3,34	3,34
		3. Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	6,03	6,18	6,21	6,29	6,37	6,37
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase	67.48	67.49	67.87	68.63	68.81	68.81
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	Persentase	70,76	71,81	62.49	63.54	65.03	65.03
1.2	Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga	Angka Kemiskinan	Persentase	8.70	8.33	8.15	8.01	7.86	7.86
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,83	4,60	4,50	4,40	4,30	4,30
		Rasio Gini	Nilai	0,35	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	58,51	59,56	60,61	60,71	62,53	62,53
2	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase	69,98	70,28	70,57	70,87	71,17	71,17
2.1.	Meningkatnya kualitas akses pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	12,05	12,07	12,09	12,11	12,13	12,13
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,97	8,03	8,10	8,16	8,16
2.2.	Meningkatnya akses dan kualitas	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,53	71,65	71,78	71,90	72,02	72,02

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
				Capaian	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	kesehatan								
2.3.	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah	10,714,000	10,908,000	11,117,667	11,363,556	11,580,074	11,580,074
3	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Indeks	B	B	B	B	BB	BB
3.1.	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik yang Baik	Indeks	C	B	B	B	B	BB
		Persentase OPD dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Minimal Baik	Persentase	50%	60%	70%	85%	95%	95%
3.2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi Minimal Baik	Nilai	68,57	70	70,65	75,46	80,55	80,55
		Opini BPK Minimal WTP	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tingkat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 5	Level 5
		Predikat SAKIP Minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Indeks Kelembagaan Baik	Nilai	19,03 (Rendah)	22 (sedang)	25 (sedang)	30 (sedang)	35 (sedang)	37 (sedang)
		Indeks SPBE Minimal Baik	Nilai	Kurang (1,75)	Cukup (2)	Cukup (2,25)	Baik (2,75)	Baik (3,00)	3,00 (baik)
		Indeks Profesionalitas ASN	Persentase	88%	90%	91%	93%	93%	93%





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi Rencana Pembangunan Daerah ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Merangin yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan.

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah selama 3 (tiga) Tahun 2024-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari



pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Tabel VI-1. Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang adil dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)		
Indikator 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi		
Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	IK-1 Laju pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah	
	IK-1.a. 1.Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian berbasis kawasan strategis pertanian Peningkatan Produksi komoditas strategis Perikanan
	IK-1.b. 2.Pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Pengembangan hilirisasi komoditas pertanian strategis daerah
	IK-1.c. 3.Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Pengembangan pariwisata berbasis pada Geopark Nasional Merangin Jambi (Geowisata)
	IK-2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meminimalisir dampak negatif dari pengembangan ekonomi strategis daerah terhadap lingkungan Peningkatkan kelestarian kawasan hutan
	IK-3 Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Mendorong peningkatan infrastruktur pendukung komoditas unggulan
Tujuan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang adil dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)		
Indikator 1.2: Angka Kemiskinan		
Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	IK-1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Penurunan tingkat pengangguran penduduk
	IK-2 Rasio Gini	
	IK-3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		Peningkatan ketahanan pangan daerah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		
Indikator: Indeks Pembangunan Manusia		
Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	IK-1 Rata-Rata lama sekolah	Peningkatan pemerataan standar pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP)
	IK-2 Rata-rata harapan lama sekolah	
		Peningkatan partisipasi sekolah berfokus dengan pemberian akses pendidikan yang merata
Meningkatnya Kualitas dan akses Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Peningkatan ketahanan keluarga sejahtera
		Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi		
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima	IK-1 Indeks Pelayanan Publik yang Baik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan inovatif
	IK-2 Persentase OPD dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Minimal Baik	
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akutabel dan Kapabel	IK-1 Indeks Perilaku Anti Korupsi Minimal Baik	Peningkatan integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi
	IK-2 Opini BPK Minimal WTP	
	IK-3 Tingkat Kapabilitas APIP	
	IK-4 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern
	IK-5 Predikat SAKIP Minimal BB	Peningkatan manajemen Kinerja yang Akutabel
	IK-6 Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Revitalisasi penataan kelembagaan yang efisien dan berbasis Kinerja
	IK-7 Indeks SPBE Minimal Baik	Mewujudkan proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	IK-8 Indeks Profesionalitas ASN	
		Penguatan sistem manajemen ASN



6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ada pada BAB V. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Merangin serta mendukung pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPD 2024-2026 sesuai dengan RPJPD Tahun 2008-2028 adalah Merangin yang Maju, Mandiri, Lestari, Adil dan Berbudaya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin per tahun selama periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel VI-2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Merangin 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian berbasis kawasan strategis pertanian	Menguatnya produksi komoditas strategis prioritas pertanian daerah antara melalui:			
	1 Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di kawasan pertanian	√	√	√
	2 Penyusunan masterplan dan rencana detail pengembangan kawasan pertanian	√	√	√
	3 Peningkatan kapasitas SDM petani melalui pelatihan dan pendampingan dalam penerapan good agricultural practices (GAP), good handling practices (GHP, manajemen usaha, dan manajemen pola tanam,	√	√	√
	4 Peningkatan akses petani terhadap benih yang unggul dan sesuai dengan agroklimat kawasan,	√	√	√

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan		Tahun		
			2024	2025	2026
	5	Peningkatan pemenuhan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan kawasan,	√	√	√
	6	Peningkatan akses petani terhadap pupuk dan obat pertanian melalui peningkatan penyediaan pupuk dan obat pertanian dan	√	√	√
	7	Meningkatkan penyediaan alsintan	√	√	√
	Peningkatan akses petani terhadap modal usaha pertanian melalui:				
	1	Fasilitasi permodalan usaha petani dengan perbankan dan non perbankan,		√	√
	2	Fasilitasi permodalan yang bersumber pemerintah pusat melalui program korporasi petani;		√	√
	Perluasan pemasaran produk pertanian strategis dengan menciptakan dan meningkatkan jangkauan serta jaringan pasar melalui:				
	1	Event-event promosi produk daerah; dan		√	√
	2	Pemanfaatan media-media online		√	√
Peningkatan Produksi komoditas strategis Perikanan	Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha perikanan budidaya terhadap sarana dan prasarana		√	√	√
	Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan budidaya terkini dengan menyelenggarakan pelatihan		√		
	Fasilitasi permodalan usaha budidaya perikanan			√	√
	Peningkatan pemenuhan pakan dan bibit unggul dengan cara:				
	1	Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal,		√	√
	2	Penguasaan dan inovasi teknologi pembenihan dan induk unggul komoditas strategis;		√	√
	3	Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi		√	√
Pengembangan hilirisasi komoditas pertanian strategis daerah	Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan mulai				
	1	Fasilitasi pengembangan korporasi petani komoditas strategis di kawasan pertanian,	√	√	√
	2	Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan penerapan produk inovasi dan diversifikasi produk olahan pertanian dan perikanan,	√	√	√
	3	Fasilitasi sertifikasi produk-produk unggul kawasan,	√	√	√
	4	Pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan produk pertanian, dan	√	√	√
	5	Fasilitasi penyertaan modal industri	√	√	√

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
	pengolahan hasil pertanian dan perikanan			
	Peningkatan peran kelembagaan dalam pembanguna kawasan pertanian melalui			
	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, koperasi dan bumdes kawasan pertanian, dan		√	√
	2 Fasilitasi pembuat kesepakatan off taker produk pertanian oleh Bumdesma		√	√
Pengembangan pariwisata berbasis pada Geopark Merangin Jambi (Geowisata)	Peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata mencakup			
	1 Perencanaan, penegakan regulasi dan pengendalian perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;	√	√	√
	2 Pembangunan Daya Tarik Wisata berbasis geopark yang berstandar global sesuai standarisasi UNESCO;	√	√	√
	3 Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;	√	√	√
	4 Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan	√	√	√
	5 Peningkatan iklim investasi bidang pariwisata	√	√	√
	Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab mencakup			
	1 Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar berbasis geopark seperti penyelenggaraan event-event berskala nasional dan internasional dan mempromosikan kearifan lokal;	√	√	
	2 Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata berbasis geopark yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan iii) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;	√	√	
	Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui:			
	1 Penguatan struktur Industri dan pengembangan kemitraan pentahelix Pariwisata;		√	√
	2 Pengembangan kualitas, kapasitas dan keragaman produk pariwisata;		√	√
	3 Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;		√	√
	4 Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau"		√	√

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
	Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien melalui			
	1 Penguatan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan yang menangani bidang kepariwisataan dengan melibatkan akademisi, NGO dan swasta;		√	√
	2 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat pemerintah serta kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat;		√	√
	3 Peningkatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata berbasis geopark		√	√
Meminimalisir dampak negatif dari pengembangan ekonomi strategis daerah terhadap lingkungan	Penerapan good agriculture practices (GAP) dalam pengembangan sektor pertanian	√		
	Penerapan good industry practices	√		
	Penerapan sustainable and responsible tourism practises		√	
	Pengendalian dan pengawasan illegal mining			√
Peningkatan kelestarian kawasan hutan	Mendorong program kemitraan dan perhutatan sosial	√		
	Penguatan ekonomi masyarakat di kawasan bufer zona melalui program agroforestry		√	
	Penguatan dan peningkatan keterlibatan adat dalam menjaga lingkungan			√
Mendorong peningkatan infrastruktur pendukung komoditas unggulan	Mendorong peningkatan infrastruktur pendukung komoditas unggulan pertanian dan perikanan berupa			
	1 Penyediaan sumber air baku untuk mendukung pertanian di kawasan,	√		
	2 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di kawasan pertanian dan	√		
	3 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terutama di kawasan pertanian	√		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pariwisata berupa			
	1 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terutama di kawasan pariwisata,		√	√
	2 Pembangunan prasarana pendukung pariwisata mencakup air bersih, jaringan telekomunikasi, listrik, RTH dan sanitasi persampahan, dan		√	√
	3 Pembangunan sarana pendukung pariwisata mencakup sarana akomodasi, kesehatan, keselamatan dan keamanan, perbankan dan fasilitas khusus		√	√

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
	penyanggah disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, sarana infokom			
Mendorong investasi di sektor pertanian dan pariwisata	Meningkatnya iklim investasi dengan cara			
	1 Memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi,		√	√
	2 Memfasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi,		√	√
	3 Mendatangkan investasi baru		√	√
	4 Memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi.		√	√
	Meningkatnya daya saing investasi khususnya dibidang pertanian dan pariwisata melalui pemenuhan kriteria daya saing berdasarkan World Economic Forum (WEF) yaitu pilar persyaratan dasar, peningkatan efisiensi, dan faktor inovasi dan kecanggihan.		√	√
	Meningkatnya promosi investasi khususnya dibidang pertanian dan pariwisata melalui pengembangan strategi promosi, penargetan, dan fasilitasi investasi tingkat nasional dan global dengan lembaga promosi profesional		√	√
Peningkatan pemerataan standar pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP)	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan melalui			
	1 Pendistribusian sarana prasana pendidikan terutama disekolah yang belum memenuhi SNP; dan	√		
	2 Peningkatan kerjasama dengan filantropi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√		
	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui			
	1 Bimbingan teknis kompetensi guru belum bersertifikasi dan		√	
	2 Mendorong kerjasama pendidikan bagi guru dengan perguruan tinggi		√	
	Peningkatan pemerataan distribusi guru melalui			
	1 Menyusun regulasi tentang distribusi dan penempatan guru,			√
	2 Identifikasi dan pendataan ulang tentang kebutuhan guru sesuai dengan jumlah siswa dan mapel, dan			√
	3 Penyusunan Masterplan pendidikan			√
Peningkatan partisipasi sekolah berfokus dengan pemberian akses pendidikan yang merata	Pendataan ulang angka putus sekolah dan jumlah siswa kurang mampu dan penyediaan pendidikan non formal bagi masyarakat putus sekolah	√		
	Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan peningkatan kerjasama dengan filantropi dalam penyediaan bantuan pendidikan dengan konsep bapak asuh dan/atau memanfaatkan dana desa		√	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan			√
	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum melalui			
	1 Pemetaan kelas fasilitas kesehatan	√		
	2 Peningkatkan jumlah puskesmas dengan kelas utama,	√		
	3 Peningkatan jumlah puskesmas rawat inap,	√		
	4 Peningkatan standar manajemen pelayanan	√		
	Peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan melalui peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan		√	√
	Peningkatan promosi kesehatan		√	√
	Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya adalah inovasi home care	√	√	√
	Peningkatan pengendalian penduduk dengan			
Peningkatan ketahanan keluarga sejahtera	1 Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, risiko kematian ibu melahirkan	√		
	2 Pengaturan jarak kelahiran	√		
	3 Pemenuhan Logistik Kontrasepsi Mantap	√		
	Peningkatan pembangunan keluarga demi meningkatkan ketentraman, kemandirian, Pengembangan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan kebahagiaan keluarga sesuai dengan standar iBangga		√	√
	Meningkatkan pengendalian harga melalui penyediaan informasi harga komoditas dan operasi pasar)	√	√	√
Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja	√		
	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui			
	1 Penyaluran angkatan kerja,		√	√
	2 Peningkatan ketersediaan lapangan kerja		√	√
Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan Pangan melalui			
	1 Meningkatkan pemanfaatan produksi pangan pokok yang bersumber dari produksi dalam daerah,	√		
	2 Peningkatan kerjasama pemenuhan bahan pokok dengan daerah tetangga	√		
	Peningkatan kelancaran distribusi pangan khususnya pada desa-desa rawan pangan		√	
	Meningkatkan keamanan Pangan			√
	Penelaahan dan Pemenuhan Payung Hukum dalam Pengembangan Inovasi dibidang pelayanan publik	√		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan inovatif	Membangun Kultur Inovasi yang kondusif dan			

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
	berkesinambungan melalui			
	1 Pengembangan Fasilitas Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah		√	√
	2 Pengembangan Mekanisme Insentif untuk Mendorong Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah		√	√
	3 Peningkatan Upaya Dokumentasi, dan Pengembangan Lanjutan terhadap Produk-produk Inovasi dalam pelayanan publik yang telah dihasilkan		√	√
	4 Penyusunan perencanaan dan Perda inovasi daerah		√	√
	5 Peningkatan Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan terhadap Perkembangan Penerapan Inovasi dibidang pelayanan publik		√	√
	Penelaahan dan perumusan kebijakan standar pelayanan minimal berbagai pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima	√		
	Mendorong Ketersediaan SDM penunjang Inovasi pelayanan publik yang Berkelanjutan melalui Pembinaan dan Pelibatan berbagai Pihak		√	√
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang inovasi dalam peningkatan pelayanan publik	√	√	√
	Pengembangan jejaring kerja sama kelembagaan komunikasi di lingkungan lembaga pemerintahan daerah	√		
Peningkatan integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi	Peningkatan kesadaran integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui pembangunan zona integritas dilingkungan lembaga pemerintahan daerah		√	
	Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan membuat sistem pengaduan dan pengawasan melalui			
	1 penyuluhan anti korupsi,			√
	2 memberikan afirmasi desa anti korupsi dan			√
	3 pengembangan regulasi juga sarana pengaduan anti korupsi			√
	Koordinasi dalam percepatan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP dilingkungan daerah	√	√	√
Peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern	Kebijakan penempatan APIP (Mutasi APIP)	√	√	√
	Peningkatan Pengawasan Independen yang Profesional melalui i) pemenuhan anggaran mandatori pengawasan, ii) pengembangan sistem pengawasan independen yang efektif	√	√	√
	Penguatan perencanaan melalui			
Peningkatan manajemen Kinerja yang Akuntabel	1 Penguatan data data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dan	√	√	



Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
	2 Mendorong aktivitas Penelitian dan Pengelolaan Data sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan	√	√	
	Pengintegrasian sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi	√	√	√
	Peningkatan kinerja melalui asistensi dan pendampingan SAKIP, pembentukan tim implementasi RB, review laporan keuangan, dan meningkatkan pemenuhan dimensi IPKD sesuai ketentuan dan tepat waktu	√	√	√
Revitalisasi penataan kelembagaan yang efisien dan berbasis Kinerja	Restrukturisasi organisasi yang adaptif, berbasis isu, bersifat lintas sektor, dan responsif terhadap isu lokal dan global	√		
	Pengembangan tata kelola yang bersifat inklusif dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		√	
	Peningkatan budaya dan manajemen SDM yang kreatif, sistemik, dan proaktif			√
Penguatan sistem manajemen ASN	Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah	√		
	Pencanangan penguatan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem Merit		√	
	Penguatan sistem kearsipan			√
	Penerapan sistem manajemen ASN yang terintegrasi	√	√	√

6.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan yang Berkelanjutan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel VI-3. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan (ekonomi hijau)				
Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi				
1.1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah		
		- Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan
				Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana TPH
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana TPH
			Program penyuluhan pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas kemampuan kelompok tani
			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa tahan pangan
			Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan daerah
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase usaha perikanan yang terawasi
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sawah teraliri irigasi
		- Pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan Nilai Produksi Produk Unggulan Daerah
			Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang Sudah Sertifikasi (HKI/Hala/PIRT/TKDN/SNI)
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Produk yang Dipromosikan
			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku UMKM Unggulan Yang Memiliki Kemampuan Ekspor
				Jumlah Produk Unggulan Yang Memenuhi Syarat Mutu Ekspor
		- Pertumbuhan	Program peningkatan daya tarik	Persentase Daya Tarik Destinasi Yang

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
	Sektor Pariwisata terhadap PDRB		destinasi pariwisata	Layak
			Program pemasaran pariwisata	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompetensi
	Pertumbuhan investasi daerah		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			Program promosi penanaman modal	Nilai Rencana Investasi
			Program pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan
	IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
			Program pengembangan perumahan	Persentase RTLH yang tertangani
			Program kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh
			program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (KK renstra)
			Program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Status baku mutu
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) sesuai dengan ambang batas melalui Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup
			Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah
	IK : Indeks daya saing Infrastruktur daerah		Program penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap
				Persentase jalan di kawasan pertanian dengan kondisi baik
				Persentase jalan di kawasan wisata dengan kondisi baik
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023

Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Meningkatkan Ketahanan Perlindungan Sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI-4. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Perlindungan Sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan (ekonomi hijau)				
Indikator : Angka Kemiskinan				
1.2	Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
			Program hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha-pekerja
		Rasio Gini	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai SPM dan meningkatkan keberfungsian sosialnya
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif
			Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Kota Layak Anak

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023



Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI-5. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia				
2.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Rata-Rata lama sekolah Rata-rata harapan lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS
				Angka Melek Huruf
				Angka Putus Sekolah
				Persentase SD/MI yang Terakreditasi
				Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi
			Program Pengembangan Kurikulum	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang berkualitas
2.2	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa tahan pangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Menurunnya Konsumsi Bera
				Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi
			Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan daerah
			program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023

Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel VI-6. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia				
2.2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian indikator nasional mutu Puskesmas terakreditasi minimal madya
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan
			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Jumlah Akseptor KB Aktif
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rata-rata ASFR / Usia Kawin Pertama
			Program pengendalian penduduk	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023

Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI-7. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi				
3.1	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik yang Baik Persentase OPD dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Minimal Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Daerah

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023

Program prioritas 2024-2026 yang mendukung Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI-8. Program Prioritas RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 pada Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi				
3.2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi Minimal Baik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditindaklanjuti
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa
		Tingkat Kapabilitas APIP	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang Menerapkan ZI WBK WBBM
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan
		Predikat SAKIP Minimal BB	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Opini BPK Minimal WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Indeks SPBE Minimal Baik	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan PAD
		Indeks	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi Publik
		Indeks	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Unsur-unsur SPBE
		Indeks	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Sektor Tersedia
		Indeks	Program kepegawaian daerah	Persentase Penempatan ASN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
		Profesionalitas ASN		dalam Jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah

Sumber: Analisis OPD Kabupaten Merangin, 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Merangin menetapkan beberapa program prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode tahun 2024-2026, sebagaimana terlihat pada tabel 6.10 berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel VI-9. Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN (EKONOMI HIJAU)		LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	5,72%	6,02%	6,11%		6,21%		6,35%		6,35%		
Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan		Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	4,95%	5,22%	5,36%		5,42%		5,61%		5,61%		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana TPH	50,45%	53,80%	56%	5,910,61 6,625	59%	6,665,55 3,288	62%	7,520,56 4,866	62%	20,096,7 34,779	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	35%	35%	26.82%	1,465,48 0,513	33,97%	1,612,02 8,564	39,22%	1,773,23 1,421	39,22%	4,850,74 0,498	
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	41%	40%	26,26%	1,700,00 0,000	33,47%	1,870,00 0,000	40,00%	2,057,00 0,000	40,00%	5,627,00 0,000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana TPH	82,50%	84,50%	86%	12,899,0 36,205	87%	14,188,9 00,000	88%	15,607,8 00,000	88%	42,695,7 36,205	
		Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan	85%	85%	73.13%	1,465,48 0,513	78.13%	1,612,02 8,564	84,38%	1,773,23 1,421	84,38%	4,850,74 0,498	
		Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan	90%	90%	48,89%	1,700,00 0,000	54,17%	1,870,00 0,000	59,44%	2,057,00 0,000	59,44%	5,627,00 0,000	
	Program penyuluhan pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas kemampuan	6 Unit	7 Unit	95 Kelompok	1,364,05 5,900	95 Kelomp	1,500,46 1,490	95 Kelomp	1,650,50 7,639	285 Kelomp	4,515,02 5,029	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kelompok tani					ok		ok		ok		
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola	28%	30%	25%	435,000,000	27%	435,000,000	30%	435,000,000	30%	1,305,000,000	Dinas Perikanan
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	35%	40%	42%	3,935,000,000	43%	4,185,000,000	45%	3,935,000,000	45%	12,055,000,000	
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase usaha perikanan yang terawasi	80%	85%	86%	85,000,000	87%	85,000,000	88%	95,000,000	88%	265,000,000	
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	15%	18%	20%	320,000,000	23%	320,000,000	24%	320,000,000	24%	960,000,000	
		Pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB	2,5%	3%	3,18%		3,25%		3,34%		3,34%		
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan Nilai Produksi Produk Unggulan Daerah	12.74%	10.00%	10%	3,350,000,000	10.00%	3,500,000,000	10.00%	3,700,000,000	10.00%	10,550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Produk Yang Dipromosikan	6%	10%	10%	475,000,000	10%	500,000,000	10%	550,000,000	10%	1,525,000,000	
	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku UMKM Unggulan Yang Memiliki Kemampuan Ekspor	N/A	N/A	3 UMKM	120,000,000	3 UMKM	130,000,000	3 UMKM	140,000,000	3 UMKM	390,000,000	
		Jumlah Produk Unggulan Yang Memenuhi Syarat Mutu Ekspor	N/A	N/A	3 Produk		3 Produk		3 Produk		3 Produk		
		Pertumbuhan Sektor	6.03%	6.18%	6.21%		6.29%		6.37%		6.37%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pariwisata terhadap PDRB											
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Yang Layak	55%	65%	30%	6,321,137,320	30%	6,853,251,052	40%	7,438,576,157	40%	20,612,964,529	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	Program pemasaran pariwisata	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan	1800 orang	2700 orang	2000 orang	3,744,560,718	2400 orang	4,219,016,790	2800 orang	4,740,918,469	7200 orang	12,704,495,977	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	115 pelaku	130 pelaku	135 pelaku	276,412,500	145 pelaku	304,053,750	155 pelaku	334,459,125	155 pelaku	914,925,375	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompetensi	70%	80%	60%	353,062,501	70%	388,368,751	80%	427,205,626	80%	1,168,636,878	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,49%	67,87%			68,63%		68,81%		68,81%		
	Program perencanaan lingkungan hidup	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai Standar	2 Dokumen KLHS RDTR	2 RPLH dan Dokumen KLHS RPJMD	KLHS RPJMD, KLHS RPJPD, KLHS RDTR (Kawasan Geopark)	1,620,190,000	2 RDTR	920,190,000	2 RDTR	1,020,190,000	2 RDTR	3,560,570,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sesuai	Baku mutu kelas IV	Baku mutu kelas IV	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,026,405,500	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,136,405,500	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,216,405,500	Baku Mutu Air Sungai	3,379,216,500	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/ program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		dengan baku mutu									Kelas IV		
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) sesuai dengan ambang batas melalui Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20%	5 kawasan	5 kawasan	2,979,886,900	6 kawasa n	3,129,886,900	7 kawasa n	3,279,886,900	7 kawasa n	9,389,660,700	
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup	80%	90%	90%	773,803,000	90%	790,803,000	90%	803,803,000	90%	2,368,409,000	
	Program pengakuan keberadaan kelembagaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisionl dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah	1 SK MHA dan 1 SK HD	1 SK MHA dan 1 SK HD	2 dok	37,440,874	2 dok	45,440,874	2 dok	52,440,874	2 dok	135,322,622	
		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	70,76%	71,81%	62,49%		63,54%		65,03%		65,03%		
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sawah teraliri irigasi	72,38%	74,48%	73,92%	9,900,000,000	74,45%	10,200,000,000	75,95%	10,900,000,000	75.95%	31,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan
	Program pengelolaan	Persentase rumah	66,22%	66.70%	67.04%	6,900.00	67.55%	8,450.00	68.25%	10.000.0	68.25%	25,350.0	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan pengembangan sistem penyediaan air minum	tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak				0,000		0,000		00,000		00,000	Penataan Ruang
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	57,29%	58,23%	59.23%	500,000,000	59.50%	500,000,000	60.04%	500,000,000	60.04%	1,500,000,000	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	73,27%	74,14%	74.48%	5,400,000,000	74.90%	6,450,000,000	75.15%	7,500,000,000	75.15%	19,350,000,000	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	52,36%	53,11%	53.80%	3,750,000,000	54.40%	4,300,000,000	55.05%	4,850,000,000	55.05%	12,900,000,000	
	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	71,01%	70.96%	42.05%	55,850,000,000	44.07%	63,200,000,000	46.15%	70,500,000,000	46.15%	189,550,000,000	
	Program pengembangan perumahan	Persentase RTLH yang tertangani	78,00%	78.80%	82%	1,241,501,796	82.50%	1,365,651,976	84%	1,233,641,796	84%	3,840,795,568	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	266,55 ha	236,33 ha	60%	8,801,596,610	65%	9,681,756,271	68%	11,134,019,712	68%	29,617,372,593	
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	78%	70,55%	80%	4,349,000,000	83%	4,783,900,000	85%	5,501,485,000	85%	14,634,385,000	
Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga		Angka Kemiskinan	8,7%	8,35%	8,15%		8,00%		7,85%		7,85%		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,83%	4,60%	4,50%		4,40%		4,30%		4,30%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	82,750,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	70%	75%	80%	590,430,000	85%	668,200,000	90%	818,930,000	90%	2,077,560,000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	15%	15%	16%	366,300,000	18%	411,900,000	20%	466,700,000	20%	1,244,900,000	
	Program hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	9,40%	9%	8,93%	63,000,000	8,48%	74,300,000	8,05%	87,960,000	8%	225,260,000	
		Rasio Gini	0,35	0,31	0,31		0,30		0,30		0,30		
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai SPM dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	39,75%	43,68%	85%	485,000,000	90%	533,500,000	100%	586,850,000	100%	1,605,350,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	17,99%	6,48%	3,69%	1,217,000,000	4,02%	1,338,700,000	4,36%	1,472,570,000	4,36%	4,028,270,000	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,51%	59,56%	60,61%		60,71%		62,53%		62,52%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	100%	340,000,000	100%	374,000,000	100%	411,400,000	100%	1,125,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Kota Layak Anak	N/A	Pratama	Pratama	450,000,000	Pratama	495,000,000	Madya	544,500,000	Madya	1,489,500,000	
2. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,98%	70,28 %	70,57%		70,87%		71,17%		71,17%		
Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan		Rata-Rata lama sekolah	7,91 Tahun	7,97 Tahun	8,03 Tahun		8,10 Tahun		8,16 Tahun		8,16 Tahun		
		Rata-rata Harapan lama Sekolah	12,05 Tahun	12,07 Tahun	12,09 Tahun		12,11 Tahun		12,13 Tahun		12,13 Tahun		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	65,90%	66,10%	69,50%	11,222,440,000	73%	13,044,312,000	77%	14,234,277,600	77%	38,501,029,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,63%	106,78%	107,52%	10,626,000,000	113%	11,322,000,000	119%	11,864,000,000	119%	33,812,000,000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.	98,70%	98,83%	100,34%	4,415,000,000	105%	6,265,000,000	111%	8,370,000,000	111%	19,050,000,000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,82%	99,93%	99,97%	11,507,000,000	105%	12,066,500,000	110%	12,601,475,000	110%	36,174,975,000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	78,53%	78,73%	99,45%	4,475,000,000	104%	4,625,000,000	110%	4,775,000,000	110%	13,875,000,000	
		Angka Melek Huruf	98,95%	99%	99%	3,442,495,000	99%	3,700,619,750	100%	3,966,650,738	100%	11,109,765,488	
		Angka Putus Sekolah	0,32%	0,31%	0,30%	1,300,000,000	0,29%	1,760,000,000	0,28%	2,200,000,000	0%	5,260,000,000	
		Persentase SD/MI yang Terakreditasi	96,20%	97,22%	100%	43,738,952,000	100%	45,937,399,600	100%	48,234,769,580	100%	137,911,121,180	
		Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi	86,34%	89,34%	92%	11,545,785,408	97%	12,150,574,678	100%	12,774,103,412	100%	36,470,463,498	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	23%	23%	25%	50,000,000	28%	65,000,000	30%	75,000,000	30%	190,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal	N/A	N/A	0%	256,000,000	100%	322,000,000	100%	404,000,000	100%	982,000,000	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang memenuhi standart	55%	60%	62%	4,649,999,800	64%	5,114,999,780	66%	4,685,157,285	66%	14,450,156,865	
Meningkatnya Kualitas dan akses Kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH)	71,53 Tahun	71,65 Tahun	71,78 Tahun		71,90 Tahun		72,02 Tahun		72,02 Tahun		
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian indikator nasional mutu	N/A	N/A	65%	236,398,000,000	67%	250,114,500,000	69%	269,122,000,000	69%	755,634,500,000	Dinas Kesehatan termasuk UPT RSUD Kol. Abunjani Bangko
		Puskesmas terakreditasi minimal madya	74%	77%	81%	1,500,000,000	85%	1,800,000,000	88%	2,000,000,000	88%	5,300,000,000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	21%	28%	30%	2,792,500,000	35%	2,801,500,000	40%	2,809,500,000	40%	8,403,500,000	
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	59%	61%	62%	223,000,000	63%	230,000,000	64%	236,000,000	64%	689,000,000	
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Jumlah Akseptor KB Aktif	2.752 Orang	2.802 Orang	63.045 Orang	1,020,670,000	69.349 Orang	1,071,703,500	76.283 Orang	1,125,288,675	76.283 Orang	3,217,662,175	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Total Fertility Rate (TFR)	2,18%	2,19%	2,20%		2,22%		2,23%		2,23%		
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rata-rata ASFR / Kelahiran Kelompok Umur tertentu	2,611	2,637	2,700	1,000,000,000	2,715	1,050,000,000	2,740	1,010,250,000	2,740	3,060,250,000	
		Persentase keaktifan kelompok kegiatan (poktan) KS	74%	74%	100%		100%		100%		100%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengendalian penduduk	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa	74%	75%	86,00%	925,000,000	88.00%	971,250,000	90.00%	1,019,812,500	90.00%	2,916,062,500	
Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Per Kapita	10.714 juta	10.865 juta	11.019 Juta		11.174 Juta		11.332 Juta		11.332 Juta		
	Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa tahan pangan	52,00%	53,00%	62%	2,150,000,000	65%	2,365,000,000	67%	2,375,500,000	67%	6,890,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Menurunnya Konsumsi Beras	101,3	101	100,7	635,000,000	100,5	689,000,000	100,2	760,900,000	100,2	2,084,900,000	
		Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %		CV < 10 %		CV < 10 %		CV < 10 %		
	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan daerah	26,00%	30,00%	35%	760,000,000	45%	831,000,000	50%	914,100,000	50%	2,505,100,000	
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman	86%	88%	90%	1,690,000,000	92%	1,750,000,000	94%	1,865,000,000	94%	5,305,000,000	
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	41,98%	43%	44%	3,150,000,000	45%	3,370,000,000	46%	3,680,000,000	46%	10,200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Program stabilisasi harga, barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-Rata Selisih Harga Barang Pokok Tingkat Pasar Rakyat Terhadap Harga Acuan	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	240,000,000	≤ 5%	265,000,000	≤ 5%	290,000,000	≤ 5%	795,000,000	
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pasar tertib ukur	8,33%	8,33%	8,33%	170,000,000	10%	680,000,000	10%	190,000,000	10%	1,040,000,000	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Produk Yang Dipromosikan	6%	10%	10%	475,000,000	10%	500,000,000	10%	550,000,000	10%	1,525,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN		INDEKS REFORMASI BIROKRASI	B	B	B		B		BB		BB		
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pelayanan Publik yang Baik	C	B	B		B		B		B		
		Persentase OPD dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Minimal Baik	50%	70%	70%		85%		95%		95%		
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki ktp-el	98%	98,00%	98,50%	1,000,000,000	99,00%	1,000,000,000	99,50%	1,000,000,000	99,50%	3,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	100%	100,00%	100,00%	1,000,000,000	100,00%	1,000,000,000	100,00%	1,000,000,000	100,00%	3,000,000,000	
		persentase anak usia 0-17 kurang sehari yang memiliki KIA	42,47%	50,00%	65,06%	550,000,000	72,59%	608,500,000	80,12%	668,735,000	80,12%	1,827,235,000	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,70	100,00%	100,00%	600,000,000	100,00%	600,000,000	100,00%	600,000,000	100,00%	1,800,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
		persentase penduduk mati yang memiliki akta kematian	100%	100,00%	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	100,00%	300,000,000	100,00%	900,000,000	
		persentase jumlah penduduk non muslim yang memiliki akta perkawinan non muslim	100%	100,00%	100,00%	50,000,000	100,00%	78,500,000	100,00%	107,855,000	100,00%	236,355,000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	59%	62%	65%	157,200,000	70%	177,600,000	75%	202,200,000	75%	537,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
		Persentase pengaduan	100%	100%	100%	59.500.0	100%	64.450.0	100%	79.800.0	100%	203.750,	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		yang ditindaklanjuti				00		00		00		000	Pintu dan Tenaga Kerja
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91,50%	95%	96%	10,627,206,953	96,75%	11,689,927,648	98%	12,858,920,413	98%	35,176,055,014	Sekretariat DPRD
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Derah yang Melaksanakan Inovasi Daerah	18,80%	35,5%	35,5%	1,700,000,000	35,5%	1,190,000,000	35,5%	2,360,000,000	35,5%	5,250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel		Indeks Perilaku Anti Korupsi Minimal Baik	68,57		70,65		75,46		80,55		80,55		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditindaklanjuti	99,93%	100%	100%	3,482,221,000	100%	3,482,221,000	100%	3,482,221,000	100%	10,446,663,000	Inspektorat
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa	45%	50%	53%	7,000,000,000	55%	10,000,000,000	58%	12,000,000,000	58%	29,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3		Level 3		Level 4		Level 5		Level 5		
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang Menerapkan ZI WBK WBBM	100%	100%	70%	1,113,597,500	80%	1,113,597,500	90%	1,113,597,500	90%	3,340,792,500	Inspektorat
		Predikat SAKIP Minimal BB	B		BB		BB		BB		BB		
		Opini BPK Minimal WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Indeks Kematangan	19,03		25		30(Seda		35		35		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Organisasi Perangkat Daerah	(Rendah)		(Sedang)		ng)		(Sedan g)		(Sedan g)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	99%	99%	43,693,066,000	99%	44,745,000,000	99%	45,265,000,000	99%	133,703,066,000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	95%	96%	2,045,000,000	97%	1,977,000,000	97%	1,820,000,000	97%	5,842,000,000	Bappeda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	306,320,152,072	100%	311,584,713,224	100%	319,116,774,855	100%	937,021,640,151	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	96%	97%	97%	2,570,000,000	97%	2,765,000,000	98%	2,950,000,000	98%	8,285,000,000	
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan PAD	-1,89%	5,12%	3,78%	4,389,560,000	2,78%	5,372,472,000	3,13%	6,426,966,400	3,13%	16,188,998,400	BPPRD
		Indeks SPBE Minimal Baik	Kurang (1,75)		Cukup (2,25)		Baik (2,75)		Baik (3,00)		Baik (3,00)		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi Publik	85%	85%	87%	3,103,834,700	90%	3,259,026,435	93%	6,421,977,757	93%	12,784,838,892	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan unsur-unsur SPBE	75%	90%	25%	3,991,573,250	30%	4,243,651,913	35%	6,513,334,508	35%	14,748,559,671	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Tersedia	45%	45%	50%	100,140,000	55%	155,147,000	60%	250,404,350	60%	505,691,350	
		Indeks Profesionalitas ASN	88%		91%		92,50%		93%		93%		
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai kompetensi dan	87%	90%	90%	4,069,609,170	92%	4,937,001,337	93%	6,089,734,037	93%	15,096,344,544	BKPSDMD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tujuan/Sasaran/Program		Indikator tujuan/sasaran/program	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kualifikasi											
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN	89%	92%	92%	1,957,784,000	93%	2,349,340,800	93%	2,819,208,960	93%	7,126,333,760	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah	100%	100%	100%	263,203,800	100%	289,524,180	100%	318,476,598	100%	871,204,578	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, mengingat kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah yang kebutuhannya dapat berubah. Kerangka pendanaan menganalisis tingkat relevansi antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026 secara rinci disajikan Tabel VII-1 dan Tabel VII-2.

Tabel VII-1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Kode	URAIAN	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	PENDAPATAN	1,814,379,833,377	1,882,114,001,454	1,993,605,641,385
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127,469,660,846	133,389,336,203	139,309,011,560
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	32,700,626,876	34,479,064,604	36,257,502,333
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,315,851,103	4,212,788,835	4,109,726,566
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,793,184,084	8,247,631,124	8,702,078,165
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82,659,998,783	86,449,851,640	90,239,704,496
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,683,810,172,531	1,748,624,665,251	1,854,196,629,825
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,580,698,406,375	1,664,964,456,574	1,766,234,442,381
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	103,111,766,156	83,660,208,677	87,962,187,444
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,100,000,000	100,000,000	100,000,000
4.3.1	Pendapatan Hibah	3,100,000,000	100,000,000	100,000,000
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	URAIAN	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
5	BELANJA	1,834,379,833,377	1,902,114,001,454	2,013,605,641,385
5.1	BELANJA OPERASI	1,170,443,832,925	1,197,931,345,853	1,263,403,841,572
5.1.1	Belanja Pegawai	728,778,322,029	747,497,622,816	802,258,017,444
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	414,307,942,359	420,307,942,359	425,475,145,587
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	27,357,568,537	30,125,780,678	35,670,678,541
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	390,002,920,465	428,199,134,368	472,448,498,293
5.2.1	Belanja Modal Tanah	158,741,500	134,670,800	252,675,800
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,395,722,226	44,052,051,980	44,949,711,534
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	110,952,943,760	132,807,835,927	163,054,166,347
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	225,693,726,415	237,058,406,771	249,522,364,583
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,689,786,564	13,789,456,890	14,323,879,529
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	112,000,000	356,712,000	345,700,500
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	8,000,000,000	9,000,000,000	10,000,000,000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000	9,000,000,000	10,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	265,933,079,987	266,983,521,233	267,753,301,520
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4,967,329,637	5,001,872,980	5,101,658,870
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	260,965,750,350	261,981,648,253	262,651,642,650
	SURPLUS/(DEFISIT)	-20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
6.1.2	Pencairan dana Cadangan	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	URAIAN	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2023 (diolah)

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, akan dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program selama 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) dalam Rancana Pembangunan (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel VII-2. Kapasitas Riil Kerangka Pendanaan Kabupaten Merangin

NO	URAIAN	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1,814,379,833,377.00	1,882,114,001,454.00	1,993,605,641,385.00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah			
	Total penerimaan	1,844,379,833,377.00	1,912,114,001,454.00	2,023,605,641,385.00
	Dikurangi:			
5	Belanja Operasi	1,170,443,832,925.00	1,197,931,345,853.00	1,263,403,841,572.00
6	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	663,936,000,452.00	704,182,655,601.00	750,201,799,813.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2023 (diolah)



Rincian kapasitas riil kerangka pendanaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan prioritas sesuai kebutuhan bukan merupakan urutan besarnya tetapi lebih untuk mengurutkan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel VII-3. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin

NO	URAIAN	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	663,936,000,452.00	704,182,655,601.00	750,201,799,813.00
2	Prioritas I (45%)	298,771,200,203.40	316,882,195,020.45	337,590,809,915.85
3	Prioritas II (35%)	232,377,600,158.20	246,463,929,460.35	262,570,629,934.55
4	Prioritas III (20%)	132,787,200,090.40	140,836,531,120.20	150,040,359,962.60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2023 (diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada Tabel VII-4.

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Tabel VII-4. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Merangin 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	2,944,000,000	99%	3,234,700,000	100%	3,562,935,000	100%	9,741,635,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	286,666,499,255	A	300,999,824,217	A	316,049,815,428	A	903,716,138,900	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	65,90%	66,10%	69,50%	11,222,440,000	73%	13,044,312,000	77%	14,234,277,600	77%	38,501,029,600	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,63%	106,78%	107,52 %	10,626,000,000	113%	11,322,000,000	119%	11,864,000,000	119%	33,812,000,000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.	98,70%	98,83%	100,34 %	4,415,000,000	105%	6,265,000,000	111%	8,370,000,000	111%	19,050,000,000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,82%	99,93%	99,97%	11,507,000,000	105%	12,066,500,000	110%	12,601,475,000	110%	36,174,975,000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	78,53%	78,73%	99,45%	4,475,000,000	104%	4,625,000,000	110%	4,775,000,000	110%	13,875,000,000	
		Angka Melek Huruf	98,95%	99%	99%	3,442,495,000	99%	3,700,619,750	100%	3,966,650,738	100%	11,109,765,488	
		Angka Putus Sekolah	0,32%	0,31%	0,30%	1,300,000,000	0,29%	1,760,000,000	0,28%	2,200,000,000	0%	5,260,000,000	
		Persentase SD/MI yang Terakreditasi	96,20%	97,22%	100%	43,738,952,000	100%	45,937,399,600	100%	48,234,769,580	100%	137,911,121,180	
	Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi	86,34%	89,34%	92%	11,545,785,408	97%	12,150,574,678	100%	12,774,103,412	100%	36,470,463,498		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan	N/A	N/A	0%	256,000,000	100%	322,000,000	100%	404,000,000	100%	982,000,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		lokal											
1.01.04	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	23%	23%	25%	50,000,000	28%	65,000,000	30%	75,000,000	30%	190,000,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	98%	98%	60,888,775,000	99%	58,537,475,000	99%	58,495,875,000	99%	177,922,125,000	Dinas Kesehatan termasuk UPT RSUD Kol. Abunjani Bangko
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	88,460,651,783	A	91,511,151,783	A	96,508,651,783	A	276,480,455,349	
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian indikator nasional mutu	N/A	N/A	65%	236,398,000,000	67%	250,114,500,000	69%	269,122,000,000	69%	755,634,500,000	
		Puskesmas terakreditasi minimal madya	74%	77%	81%	1,500,000,000	85%	1,800,000,000	88%	2,000,000,000	88%	5,300,000,000	
1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	21%	28%	30%	2,792,500,000	35%	2,801,500,000	40%	2,809,500,000	40%	8,403,500,000	
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	59%	61%	62%	223,000,000	63%	230,000,000	64%	236,000,000	64%	689,000,000	
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	N/A	N/A	67%	150,000,000	72%	175,000,000	77%	200,000,000	77%	525,000,000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	98%	98%	98%	7,155,500,000	98%	7,456,000,000	98%	7,795,500,000	98%	22,407,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan											Penataan Ruang
		Nilai AKIP OPD			A	11,752,991,236	A	12,155,000,000	A	13,245,000,000	A	37,152,991,236	
1.03.02	program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sawah teraliri irigasi	72,38%	74,48%	73,92%	9,900,000,000	74,45%	10,200,000,000	75,95%	10,900,000,000	75.95%	31,000,000,000	
1.03.03	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak	66,22%	66.70%	67.04%	6,900,000,000	67.55%	8,450,000,000	68.25%	10,000,000,000	68.25%	25,350,000,000	
1.03.04	program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	57,29%	58,23%	59.23%	500,000,000	59.50%	500,000,000	60.04%	500,000,000	60.04%	1,500,000,000	
1.03.05	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	73,27%	74,14%	74.48%	5,400,000,000	74.90%	6,450,000,000	75.15%	7,500,000,000	75.15%	19,350,000,000	
1.03.06	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	52,36%	53,11%	53.80%	3,750,000,000	54.40%	4,300,000,000	55.05%	4,850,000,000	55.05%	12,900,000,000	
1.03.07	program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan permukiman dalam kondisi baik	53,41%	54,30%	54.75%	12,500,000,000	55.35%	13,000,000,000	57.45%	13,500,000,000	57.45%	39,000,000,000	
1.03.08	program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	52,23%	53,42%	54%	8,700,000,000	54.40%	9,400,000,000	55%	9,400,000,000	55%	27,500,000,000	
1.03.09	program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	53,21%	54,37%	55%	10,000,000,000	56%	10,560,000,000	57%	2,100,000,000	57%	22,660,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.10	program penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	71,01%	70.96%	42.05%	55,850,000,000	44.07%	63,200,000,000	46.15%	70,500,000,000	46.15%	189,550,000,000	
1.03.11	program pengembangan jasa konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikasi	67,00%	73,68%	68.15%	1,110,000,000	68.30%	1,145,000,000	68.50%	1,145,000,000	68.50%	3,400,000,000	
1.03.12	program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	87,74%	88,01%	88,28%	2,340,000,000	88,55%	2,285,000,000	88,82%	2,677,500,000	88.82%	7,302,500,000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	5,296,426,272	98%	6,090,946,212	98%	7,004,523,744	98%	18,391,896,228	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Nilai AKIP OPD			BB	4,161,477,785	A	4,785,743,453	A	5,503,554,371	A	14,450,775,609	
1.04.02	program pengembangan perumahan	Persentase RTLH yang tertangani	78,00%	78.80%	82%	1,241,501,796	82.50%	1,365,651,976	84%	1,233,641,796	84%	3,840,795,568	
1.04.03	program kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	266,55 ha	236,33 ha	60%	8,801,596,610	65%	9,681,756,271	68%	11,134,019,712	68%	29,617,372,593	
1.04.05	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	78%	70,55%	80%	4,349,000,000	83%	4,783,900,000	85%	5,501,485,000	85%	14,634,385,000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	1,399,375,316	98%	1,099,312,848	98%	1,209,244,133	98%	3,707,932,297	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	2,998,125,949	BB	3,297,938,543	BB	3,627,732,398	BB	9,923,796,890	
1.05.04	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time)	83,00%	84,00%	15 menit	5,776,564,365	15 menit	6,354,220,801	15 menit	6,989,642,881	15 menit	19,120,428,047	
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	2,217,399,400	98%	2,373,132,000	98%	2,611,559,400	98%	7,202,090,800	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
		Nilai AKIP OPD			A	2,458,587,953	A	2,704,444,000	A	2,974,884,000	A	8,137,915,953	
1.05.03	program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1,752,909,600	100%	1,928,201,000	100%	2,023,866,500	100%	5,704,977,100	
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	97%	100%	98%	5,970,000,000	98%	6,620,000,000	98%	5,370,000,000	98%	17,960,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	6,146,000,000	A	6,146,000,000	A	6,146,000,000	A	18,438,000,000	
1.05.02	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	93,78%	100%	100%	8,915,311,450	100%	6,800,000,000	100%	6,850,000,000	100%	22,565,311,450	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	3,303,168,490	98%	3,633,485,339	99%	3,996,833,873	99%	10,933,487,702	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	4,031,805,000	A	4,434,985,500	A	4,878,484,050	A	13,345,274,550	
1.06.02	program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	83,33%	91,67%	93%	830,000,000	94%	913,000,000	95%	1,004,300,000	95%	2,747,300,000	
1.06.04	program rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai SPM dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	39,75%	43,68%	85%	485,000,000	90%	533,500,000	95%	586,850,000	95%	1,605,350,000	
1.06.05	program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	17,99%	6,48%	90%	1,217,000,000	92%	1,338,700,000	94%	1,472,570,000	94%	4,028,270,000	
1.06.06	program penanganan bencana	Persentase pemenuhan korban bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55%	20,00%	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	993,000,000	
1.06.07	program	Taman Makam	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	350,000,000	1 Lokasi	385,000,000	1 Lokasi	423,500,000	1 Lokasi	1,158,500,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pengelolaan taman makam pahlawan	Pahlawan yang dikelola										0	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	82,750,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.07.03	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	70%	75%	80%	590,430,000	85%	668,200,000	90%	818,930,000	90%	2,077,560,000	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	15%	15%	16%	366,300,000	18%	411,900,000	20%	466,700,000	20%	1,244,900,000	
2.07.05	program hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	9,40%	9%	8,93%	63,000,000	8,48%	74,300,000	8,05%	87,960,000	8%	225,260,000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2.08.02	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,35%	88,24%	88,40%	310,000,000	88,60%	341,000,000	88,75%	375,100,000	88,50%	1,026,100,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2.08.03	program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	100%	340,000,000	100%	374,000,000	100%	411,400,000	100%	1,125,400,000	
2.08.05	program	Persentase	N/A	1	66.67%	80,000,000	83.33%	88,000,000	100%	96,800,000	45%	264,800,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pengelolaan sistem data gender dan anak	pengelolaan data gender dan anak		Dokumen									
2.08.06	program pemenuhan hak anak (PHA)	Kabupaten Kota Layak Anak	-	Pratama	Pratama	450,000,000	Pratama	495,000,000	Madya	544,500,000	Madya	1,489,500,000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	937,344,000	98%	1,011,285,600	98%	1,117,408,800	98%	3,066,038,400	Dinas Ketahanan Pangan
		Nilai AKIP OPD	B	BB	BB	2,968,256,000	BB	3,202,404,400	A	3,538,461,200	A	9,709,121,600	
2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa tahan pangan	52,00%	53,00%	62%	2,150,000,000	65%	2,365,000,000	67%	2,375,500,000	67%	6,890,500,000	
2.09.03	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Menurunnya Konsumsi Beras	101,3	101	100,7	635,000,000	100,5	689,000,000	100,2	760,900,000	100,2	2,084,900,000	
		Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %		CV < 10 %		CV < 10 %		CV < 10 %		
2.09.04	program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan daerah	26,00%	30,00%	35%	760,000,000	45%	831,000,000	50%	914,100,000	50%	2,505,100,000	
2.09.05	program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman	86%	88%	90%	1,690,000,000	92%	1,750,000,000	94%	1,865,000,000	94%	5,305,000,000	
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.04	program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	100%	100%	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	442,750,000	100%	1,177,750,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.10.08	program pengelolaan tanah kosong	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	78%	87%	80%	550,000,000	83%	605,000,000	85%	695,750,000	85%	1,850,750,000	
2.10.10	program penatagunaan tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	78%	80%	100%	530,000,000	100%	583,000,000	100%	670,450,000	100%	1,783,450,000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	6,717,095,017	99%	7,929,095,017	99%	9,141,095,017	99%	23,787,285,051	Dinas Lingkungan Hidup
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	A	4,883,318,626	A	4,903,318,626	A	4,925,318,626	A	14,711,955,878	
2.11.02	program perencanaan lingkungan hidup	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai Standar	2 Dokumen KLHS RDTR	2 RPLH dan Dokumen KLHS RPJMD	KLHS RPJMD, KLHS RPJPD, KLHS RDTR (Kawasan Geopark)	1,620,190,000	2 RDTR	920,190,000	2 RDTR	1,020,190,000	2 RDTR	3,560,570,000	
2.11.03	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu	Baku mutu kelas IV	Baku mutu kelas IV	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,026,405,500	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,136,405,500	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	1,216,405,500	Baku Mutu Air Sungai Kelas IV	3,379,216,500	
2.11.04	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) sesuai dengan ambang batas melalui Pengelolaan Keanekaragaman	20%	5 kawasan	5 kawasan	2,979,886,900	6 kawasan	3,129,886,900	7 kawasan	3,279,886,900	7 kawasan	9,389,660,700	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Hayati											
2.11.05	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang limbah B3 nya terkendali	90%	90%	90%	66,000,000	90%	76,000,000	90%	86,000,000	90%	228,000,000	
2.11.06	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup	80%	90%	90%	773,803,000	90%	790,803,000	90%	803,803,000	90%	2,368,409,000	
2.11.07	program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisionl dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah	1 SK MHA dan 1 SK HD	1 SK MHA dan 1 SK HD	2 dok	37,440,874	2 dok	45,440,874	2 dok	52,440,874	2 dok	135,322,622	
2.11.08	program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Wilayah dalam Pelaksanaan Pendidikan,Pelatiha n dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	25%	25%	25%	41,847,679	25%	55,847,679	25%	58,847,679	25%	156,543,037	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.09	program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Penghargaan yang diterima dari event yang diikuti	80%	50%	50%	69,184,519	50%	79,184,519	50%	89,184,519	50%	237,553,557	
2.11.10	program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang tertangani	80%	100%	100%	53,987,409	100%	57,987,409	100%	63,987,409	100%	175,962,227	
2.11.11	program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	26%	27%	28%	10,476,985,237	30%	11,406,985,237	32%	12,926,723,000	32%	34,810,693,474	
2.12	UUURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	3,625,950,000	98%	4,198,830,000	99%	4,873,673,250	99%	12,698,453,250	
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	3,785,960,000	A	4,187,720,000	A	4,634,460,500	A	12,608,140,500	
2.12.02	program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki ktp-el	98%	98,00%	98,50%	1,000,000,000	99%	1,000,000,000	99,50%	1,000,000,000	99,50%	3,000,000,000	
		persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	100%	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	3,000,000,000	
		persentase anak usia 0-17 kurang sehari yang memiliki KIA	42,47%	50,00%	65,06%	550,000,000	72,59%	608,500,000	80,12%	668,735,000	80,12%	1,827,235,000	
2.12.03	program pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,70	100%	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	1,800,000,000	
		persentase penduduk mati yang memiliki akta	100%	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	900,000,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kematian											
		persentase jumlah penduduk non muslim yang memiliki akta perkawinan non muslim	100%	100%	100%	50,000,000	100%	78,500,000	100%	107,855,000	100%	236,355,000	
2.12.04	program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan	20%	30%	40%	577,500,000	60%	590,275,000	80%	603,387,000	80%	1,771,162,000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	25%	2,112,000,000	35%	2,298,000,000	30%	2,520,000,000	30%	6,930,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	4,288,000,000	A	4,402,000,000	A	4,580,000,000	A	13,270,000,000	
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa tertata dengan baik	N/A	15%	40%	1,100,000,000	35%	700,000,000	25%	600,000,000	25%	2,400,000,000	
2.13.03	program peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama antar desa aktif	N/A	35%	25%	1,600,000,000	30%	1,900,000,000	35%	2,500,000,000	35%	6,000,000,000	
2.13.04	program administrasi pemerintahan desa	Persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa	45%	50%	53%	7,000,000,000	55%	10,000,000,000	58%	12,000,000,000	58%	29,000,000,000	
2.13.05	program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	10%	15%	25%	2,700,000,000	30%	3,000,000,000	35%	3,200,000,000	35%	8,900,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	1,116,500,000	98%	761,450,000	98%	1,239,450,000	98%	3,117,400,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	6,070,108,537	A	6,784,488,963	A	6,683,785,911	A	19,538,383,411	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa	74%	75%	86,00%	925,000,000	88.00%	971,250,000	90.00%	1,019,812,500	90.00%	2,916,062,500	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Akseptor KB Aktif	2.752 Orang	2.802 Orang	63.045 Orang	1,020,670,000	69.349 Orang	1,071,703,500	76.283 Orang	1,125,288,675	76.283 Orang	3,217,662,175	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata-rata ASFR / Kelahiran Kelompok Umur tertentu	2,611	2,637	2,700	1,000,000,000	2,715	1,050,000,000	2,740	1,010,250,000	2,740	3,060,250,000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	80%	1,782,598,607	85%	1,835,946,207	95%	1,737,557,207	95%	5,356,102,021	Dinas Perhubungan
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	3,406,861,795	A	3,303,042,507	A	3,281,172,938	A	9,991,077,240	
2.15.02	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	80%	85%	80%	6,095,000,000	85%	12,125,000,000	90%	8,080,000,000	90%	26,300,000,000	
2.15.03	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Peningkatan kualitas layanan	N/A	N/A	75%	500,000,000	80%	1,000,000,000	85%	1,500,000,000	85%	3,000,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penerbangan											
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	94%	602,283,000	95%	766,128,000	96%	1,466,128,000	96%	2,834,539,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai AKIP	70%	70%(BB)	72% (BB)	3,090,000,003	75% (BB)	3,100,000,663	77% (BB)	3,300,000,663	77% (BB)	9,490,001,329	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi Publik	85%	85%	87%	3,103,834,700	90%	3,259,026,435	93%	6,421,977,757	93%	12,784,838,892	
2.16.03	program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan unsur-unsur SPBE	75%	90%	25%	3,991,573,250	30%	4,243,651,913	35%	6,513,334,508	35%	14,748,559,671	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	96%	96.50%	1,148,000,000	97%	2,596,500,000	97.50%	2,646,000,000	97.50%	6,390,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai AKIP OPD			BB	4,082,000,000	A	4,112,800,000	A	4,153,800,000	A	12,348,600,000	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	21.05%	21.50%	22%	100,000,000	25%	110,000,000	27%	120,000,000	27%	330,000,000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP-Koperasi Berpredikat Sehat	3.57%	4%	5%	70,000,000	6%	80,000,000	7%	90,000,000	7%	240,000,000	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Koperasi	16,45%	16,45%	17%	100,000,000	18%	120,000,000	19%	140,000,000	19,0%	360,000,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan	Pertumbuhan modal koperasi	-5,20%	0%	1,5%	100,000,000	1,5%	105,000,000	1,5%	110,000,000	4,5%	315,000,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perlindungan Koperasi												
2.17.07	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pertumbuhan modal UMKM	1,8%	1,8%	1,8%	200,000,000	1,8%	250,000,000	1,8%	300,000,000	5,4%	750,000,000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT	-	-	10%	500,000,000	10%	550,000,000	10%	600,000,000	30%	1,650,000,000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	7,760,040,000	98%	9,410,450,000	99%	11,153,262,000	99%	28,323,752,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Nilai AKIP AKPD	-		A	4,734,110,000	A	5,677,390,000	A	6,808,180,000	A	17,219,680,000	
2.18.02	program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	100%	100%	528,000,000	100%	580,500,000	100%	638,750,000	100%	1,747,250,000	
2.18.03	Program promosi penanaman modal	Nilai Rencana Investasi	146,23 Milyar	190 Milyar	228,11 Milyar	366,200,000	273,74 Milyar	361,700,000	328,49 Milyar	372,500,000	328,49 Milyar	1,100,400,000	
2.18.04	program pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	59%	62%	65%	157,200,000	70%	177,600,000	75%	202,200,000	75%	537,000,000	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	59,500,000	100%	64,450,000	100%	79,800,000	100%	203,750,000	
2.18.05	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	74%	78%	80%	624,500,000	83%	705,400,000	85%	787,400,000	85%	2,117,300,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.06	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara Elektronik	75%	87%	100%	16,500,000	100%	18,100,000	100%	19,960,000	100%	54,560,000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2.19.02	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	100%	100%	100%	271,793,096	100%	298,972,406	100%	328,869,646	100%	899,635,148	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah atlet Daerah yang berprestasi	68 Orang	161 Orang	24 Orang	6,961,500,000	26 Orang	7,657,650,000	28 Orang	8,423,415,000	58 orang	23,042,565,000	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka Berprestasi	100%	100%	146 Orang	551,250,000	152 Orang	606,375,000	158 Orang	667,012,500	456 orang	1,824,637,500	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2.20.02	program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data Sektoral Tersedia	45%	45%	50%	100,140,000	55%	155,147,000	60%	250,404,350	60%	505,691,350	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2.21.02	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3 OPD	3 OPD	3 OPD	97,150,000	3 OPD	102,007,500	3 OPD	107,107,875	3 OPD	306,265,375	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.03	Program pengembangan	Jumlah Kesenian Tradisional Yang	25%	30%	33%	800,000,000	32%	1,000,000,000	35%	1,100,000,000	35%	2,900,000,000	Dinas pendidikan dan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	kesenian tradisional	dikembangkan											Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diakui secara nasional	25%	30%	33%	1,000,000,000	32%	1,100,000,000	35%	1,200,000,000	35%	3,300,000,000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2.23.02	program pembinaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang memenuhi standart	55%	60%	62%	4,649,999,800	64%	5,114,999,780	66%	4,685,157,285	66%	14,450,156,865	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.23.03	program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100%	100%	100%	45,750,000	100%	50,325,000	100%	90,805,297	100%	186,880,297	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	1,195,000,000	98%	1,394,000,000	98%	1,625,000,000	98%	4,214,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Nilai AKIP AKPD	BB	BB	BB	2,677,030,814	BB	2,865,233,895	A	3,060,157,285	A	8,602,421,994	
2.24.02	program pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah	100%	100%	100%	263,203,800	100%	289,524,180	100%	318,476,598	100%	871,204,578	
2.24.03	program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	19,64%	20,69%	22,00%	75,045,700	24,00%	82,550,270	25%	90,805,297	25%	248,401,267	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan	98%	98%	98%	1,957,500,000	98%	1,557,500,000	98%	1,657,500,000	98%	5,172,500,000	Dinas Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan											
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	2,708,536,500	A	2,716,504,183	A	2,731,334,203	A	8,156,374,886	
3.25.03	program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola	28%	30%	25%	435,000,000	27%	435,000,000	30%	435,000,000	30%	1,305,000,000	
3.25.04	program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	35%	40%	42%	3,935,000,000	43%	4,185,000,000	45%	3,935,000,000	45%	12,055,000,000	
3.25.05	program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase usaha perikanan yang terawasi	80%	85%	86%	85,000,000	87%	85,000,000	88%	95,000,000	88%	265,000,000	
3.25.06	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	15%	18%	20%	320,000,000	23%	320,000,000	24%	320,000,000	24%	960,000,000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	1,820,086,371	98%	2,002,095,008	98%	2,202,304,509	98%	6,024,485,888	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	5,460,259,113	A	6,006,285,024	A	6,606,913,527	A	18,073,457,664	
3.26.02	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Yang Layak	55%	65%	30%	6,321,137,320	30%	6,853,251,052	40%	7,438,576,157	40%	20,612,964,529	
3.26.03	program pemasaran pariwisata	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan	1800 orang	2700 orang	2000 orang	3,744,560,718	2400 orang	4,219,016,790	2800 orang	4,740,918,469	7200 orang	12,704,495,977	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	115 pelaku	130 pelaku	135 pelaku	276,412,500	145 pelaku	304,053,750	155 pelaku	334,459,125	155 pelaku	914,925,375	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompetensi	70%	80%	60%	353,062,501	70%	388,368,751	80%	427,205,626	80%	1,168,636,878	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3.27	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	2,595,824,760	98%	2,539,511,082	98%	2,670,317,977	98%	7,805,653,819	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Nilai AKIP OPD		A	A	6,204,906,694	A	6,569,538,113	A	6,747,048,959	A	19,521,493,766	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	35%	35%	26.82%	1,465,480,513	33,97%	1,612,028,564	39,22%	1,773,231,421	39,22%	4,850,740,498	
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	41%	40%	26,26%	1,700,000,000	33,47%	1,870,000,000	40,00%	2,057,000,000	40,00%	5,627,000,000	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan	85%	85%	73.13%	1,465,480,513	78.13%	1,612,028,564	84,38%	1,773,231,421	84,38%	4,850,740,498	
		Persentase Terbangun dan	90%	90%	48,89%	1,700,000,000	54,17%	1,870,000,000	59,44%	2,057,000,000	59,44%	5,627,000,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		terehabnya Prasarana Perkebunan											
3.27.04	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit ternak yg tertangani	9,50%	9,75%	9,75%	631,391,500	9,75%	694,530,650	9,75%	763,983,715	10%	2,089,905,865	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	5,00%	5,00%	5%	54,415,676	5%	59,857,244	5%	65,842,968	5%	180,115,888	
3.27.06	program perizinan usaha pertanian	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	40%	45%	40%	21,025,000	40%	23,127,500	40%	25,440,250	40%	69,592,750	
3.27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	100%	2,226,904,935	100%	2,200,055,429	100%	2,692,370,972	100%	7,119,331,336	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Nilai AKIP OPD		BB	BB	15,903,495,065	BB	17,493,844,571	BB	19,243,229,028	BB	52,640,568,664	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana TPH	50,45%	53,80%	56%	5,910,616,625	59%	6,665,553,288	62%	7,520,564,866	62%	20,096,734,779	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana TPH	82,50%	84,50%	86%	12,899,036,205	87%	14,188,900,000	88%	15,607,800,000	88%	42,695,736,205	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase TPH yang Terkendali dari Bencana Pertanian	46%	49%	52%	72,918,806	55%	80,210,687	58%	88,231,756	58%	241,361,249	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.07	program penyuluhan pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas kemampuan kelompok tani	6 Unit	7 Unit	95 Kelomp ok	1,364,055,900	95 Kelompo k	1,500,461,490	95 Kelompo k	1,650,507,639	285 Kelompo k	4,515,025,029	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3.30.03	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	41,98%	43%	44%	3,150,000,000	45%	3,370,000,000	46%	3,680,000,000	46%	10,200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-Rata Selisih Harga Barang Pokok Tingkat Pasar Rakyat Terhadap Harga Acuan	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	240,000,000	≤ 5%	265,000,000	≤ 5%	290,000,000	≤ 5%	795,000,000	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku UMKM Unggulan Yang Memiliki Kemampuan Ekspor	N/A	N/A	3 UMKM	120,000,000	3 UMKM	130,000,000	3 UMKM	140,000,000	3 UMKM	390,000,000	
		Jumlah Produk Unggulan Yang Memenuhi Syarat Mutu Ekspor	N/A	N/A	3 Produk		3 Produk		3 Produk		3 Produk		
3.30.06	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pasar tertib ukur	8,33%	8,33%	8,33%	170,000,000	10%	680,000,000	10%	190,000,000	10%	1,040,000,000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Produk Yang Dipromosikan	6%	10%	10%	475,000,000	10%	500,000,000	10%	550,000,000	10%	1,525,000,000	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3.31.02	program perencanaan dan	Pertumbuhan Nilai Produksi Produk	12.74%	10.00%	10%	3,350,000,000	10.00%	3,500,000,000	10.00%	3,700,000,000	10.00%	10,550,000,000	Dinas Koperasi,

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pembangunan industri	Unggulan Daerah											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang Sudah Sertifikasi (HKI/Halal/PIRT/TK DN/SNI)	4,25%	10%	11%	100,000,000	12%	120,000,000	13%	140,000,000	13%	360,000,000	
3.31.04	program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentasi IKM Yang Masuk Kedalam SIINas	0,26%	0,26%	1%	50,000,000	1,5%	55,000,000	2%	60,000,000	2%	165,000,000	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
3.32.04	program pengembangan kawasan transmigrasi	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25,100,000	3 Laporan	28,000,000	3 Laporan	36,600,000	3 Laporan	89,700,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	26,773,066,000	98%	26,810,000,000	98%	26,700,000,000	98%	80,283,066,000	Sekretariat Daerah
		Nilai AKIP OPD	B	B	B	17,320,000,000	B	17,935,000,000	BB	18,565,000,000	BB	53,820,000,000	
4.01.02	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	97%	97%	97%	9,000,000,000	98%	10,240,000,000	98%	11,319,800,000	98%	30,559,800,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.03	program perekonomian dan pembangunan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	98%	98%	98%	2,600,000,000	98%	2,715,000,000	98%	2,965,000,000	98%	8,280,000,000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98,34%	27,299,102,730	98,5%	30,029,013,003	99%	33,031,914,303	98,85%	90,360,030,036	Sekretariat DPRD
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	6,742,639,592	A	7,416,903,551	A	8,158,593,906	A	22,318,137,049	
4.02.02	program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91,50%	95%	96%	10,627,206,953	96,75%	11,689,927,648	98%	12,858,920,413	98%	35,176,055,014	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	-Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	4,160,100,000	98%	4,032,600,000	98%	4,883,700,000	98%	13,076,400,000	Bappeda
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	5,100,100,000	A	5,323,700,000	A	5,595,300,000	A	16,019,100,000	
5.01.02	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	95%	96%	2,045,000,000	97%	1,977,000,000	97%	1,820,000,000	97%	5,842,000,000	
5.01.03	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	80%	80%	80%	3,295,000,000	82%	2,263,000,000	83%	2,295,050,000	84%	7,853,050,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02	KEUANGAN												
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	6,884,750,000	98%	7,169,000,000	98%	7,671,000,000	98%	21,724,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	6,945,200,000	A	7,294,020,000	A	7,656,222,000	A	21,895,442,000	
5.02.02	program pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	306,320,152,072	100%	311,584,713,224	100%	319,116,774,855	100%	937,021,640,151	
5.02.03	program pengelolaan barang milik daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	96%	97%	97%	2,570,000,000	97%	2,765,000,000	98%	2,950,000,000	98%	8,285,000,000	
5.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	4,899,174,944	98%	5,755,009,933	98%	6,688,011,919	98%	17,342,196,796	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	5,082,313,999	A	6,076,776,799	A	7,259,732,159	A	18,418,822,957	
5.02.04	program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan PAD	-1,89%	5,12%	3,78%	4,389,560,000	2,78%	5,372,472,000	3,13%	6,426,966,400	3,13%	16,188,998,400	
5.03	KEPEGAWAIAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	2,812,275,038	98%	3,093,502,539	98%	3,402,852,792	0%	9,308,630,369	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	15,609,340,375	A	18,721,475,102	A	22,455,063,437	A	56,785,878,914	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03.02	program kepegawaian daerah	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	87%	90%	90%	4,069,609,170	92%	4,937,001,337	93%	6,089,734,037	93%	15,096,344,544	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN	89%	92%	92%	1,957,784,000	93%	2,349,340,800	93%	2,819,208,960	93%	7,126,333,760	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	3,295,000,000	98%	1,599,000,000	98%	1,643,000,000	98%	6,537,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	2,185,958,000	A	2,290,000,000	A	2,340,000,000	A	6,815,958,000	
5.05.02	program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Perangkat Derah yang Melaksanakan Inovasi Daerah	18,80% (Kategori Kurang Inovatif)	35,5% (Kategori Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)	1,700,000,000	35,5 (Kategori Inovatif)	1,190,000,000	35,5 (Kategori Inovatif)	2,360,000,000	35,5 (Kategori Inovatif)	5,250,000,000	
6.01	INSPEKTORAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99,91%	100%	100%	4,652,682,522	100%	4,652,682,522	100%	4,652,682,522	100%	13,958,047,566	Inspektorat
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	6,979,023,783	A	6,979,023,783	A	6,979,023,783	A	20,937,071,349	
6.01.02	program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang	99,93%	100%	100%	3,482,221,000	100%	3,482,221,000	100%	3,482,221,000	100%	10,446,663,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		ditindaklanjuti											
6.01.03	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang Menerapkan ZI WBK WBBM	100%	100%	70%	1,113,597,500	80%	1,113,597,500	90%	1,113,597,500	90%	3,340,792,500	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN BANGKO												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	69,05%	74,14%	98%	940,300,000	98,25%	1,003,800,000	98,40%	998,100,000	98,40%	2,942,200,000	Kecamatan Bangko
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	A	6,754,019,273	A	6,755,589,237	A	6,757,159,237	A	20,266,767,747	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	90,62%	97%	97,25%	83,022,000	97,50%	88,572,000	97,75%	94,122,000	97,75%	265,716,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	83,33%	100%	100%	3,092,700,000	100%	3,094,225,000	100%	3,095,750,000	100%	9,282,675,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	79,31%	100%	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	25,000,000	100%	69,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan	75%	100%	100%	4,900,000	100%	4,970,000	100%	5,040,000	100%	14,910,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		keuangan yang tertib											
7.02	KECAMATAN TABIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	99%	615,500,000	99%	938,000,000	99%	1,150,000,000	99%	2,703,500,000	Kecamatan Tabir
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	3,934,500,000	BB	4,062,000,000	BB	4,350,000,000	BB	12,346,500,000	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	92%	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	331,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	72%	98%	95%	4,100,000,000	96%	4,510,000,000	96%	4,961,000,000	96%	13,571,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	N/A	60,000,000	100%	66,000,000	100%	72,600,000	100%	198,600,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	N/A	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	165,500,000	
7.03	KECAMATAN PAMENANG												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	100%	615,500,000	99%	938,000,000	99%	1,150,000,000	99%	2,703,500,000	Kecamatan Pamenang
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	2,649,000,000	BB	2,700,000,000	A	2,600,587,609	A	7,949,587,609	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik	99%	100%	100%	183,494,649	100%	201,844,114	100%	222,028,525	100%	607,367,288	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	1,230,974,800	100%	1,354,072,280	100%	1,489,479,508	100%	4,074,526,588	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	11,489,509	100%	12,638,460	100%	13,209,306	100%	37,337,275	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	7,364,748	100%	8,101,222	100%	8,911,344	100%	24,377,314	
7.04	KECAMATAN PAMENANG BARAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99,99%	98%	98%	385,755,008	98%	385,755,008	98%	405,042,758	98%	1,176,552,774	Kecamatan Pamenang Barat
		Nilai AKIP OPD	B	B	B	1,517,244,000	B	1,517,244,000	BB	1,536,341,000	BB	4,570,829,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik	100%	97%	100%	127,276,838	100%	127,276,838	100%	133,640,679	100%	388,194,355	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	N/A	100%	100%	143,979,905	100%	143,979,905	100%	151,178,900	100%	439,138,710	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	11,971,308	100%	11,971,308	100%	12,569,873	100%	36,512,489	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	7,364,747	100%	7,364,747	100%	7,732,984	100%	22,462,478	
7.05	KECAMATAN TABIR ULU												Kecamatan Tabir Ulu
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	535,445,000	98%	551,851,500	98%	567,656,000	98%	1,654,952,500	
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,661,328,095	BB	1,825,545,905	A	2,006,220,995	A	5,493,094,995	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	70,000,000	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	255,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	450,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	18,000,000	100%	43,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	25,000,000	100%	67,000,000	
7.06	KECAMATAN TABIR SELATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	100%	721,947,000	100%	966,139,100	100%	716,457,250	100%	2,404,543,350	Kecamatan Tabir Selatan
		Nilai AKIP OPD	CC	B	B	1,485,541,476	B	1,502,806,476	BB	1,517,425,476	BB	4,505,773,428	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	46,991,000	100%	53,500,000	100%	68,250,000	100%	168,741,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	110,000,000	100%	150,000,000	100%	172,000,000	100%	432,000,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	14,000,000	100%	36,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	N/A	100%	5,000,000	100%	5,350,000	100%	5,700,000	100%	16,050,000	
7.07	KECAMATAN TABIR TIMUR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	601,000,000	98%	603,000,000	98%	605,905,005	98%	1,809,905,005	Kecamatan Tabir Timur
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	1,661,328,095	A	1,825,545,905	A	2,006,220,995	A	5,493,094,995	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90%	100%	100%	17,000,000	100%	19,000,000	100%	22,000,000	100%	58,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	93,75%	100%	100%	132,000,000	100%	137,000,000	100%	142,000,000	100%	411,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	50%	100%	100%	11,000,000	100%	13,000,000	100%	15,000,000	100%	39,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	75%	100%	100%	16,000,000	100%	17,500,000	100%	19,000,000	100%	52,500,000	
7.08	KECAMATAN TABIR ILIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	378,872,976	98%	390,300,000	99%	430,200,000	99%	1,199,372,976	Kecamatan Tabir Ilir
		Nilai AKIP OPD	CC	CC	B	1,284,032,497	B	1,408,045,249	B	1,532,549,278	B	4,224,627,024	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	98%	100%	100%	98,000,000	100%	101,000,000	100%	99,000,000	100%	298,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	96,000,000	100%	102,000,000	100%	104,000,000	100%	302,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	30%	100%	100%	20,000,000	100%	24,000,000	100%	23,000,000	100%	67,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	64,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.09	KECAMATAN TABIR BARAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	310,000,000	98%	330,000,000	98%	410,548,353	98%	1,050,548,353	Kecamatan Tabir Barat
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,550,000,000	BB	1,725,545,905	BB	1,807,167,191	BB	5,082,713,096	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	90%	100%	100%	34,680,000	100%	38,148,000	100%	41,962,800	100%	114,790,800	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	N/A	100%	100%	120,000,000	100%	132,000,000	100%	145,200,000	100%	397,200,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	66,200,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	N/A	100%	6,695,225	100%	7,364,748	100%	8,101,222	100%	22,161,195	
7.10	KECAMATAN MARGO TABIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	880,600,000	98%	1,053,000,000	98%	1,120,000,000	98%	3,053,600,000	Kecamatan Margo Tabir

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	A	A	A	1,428,000,000	A	1,429,000,000	A	1,556,000,000	A	4,413,000,000	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	80,000,000	100%	97,000,000	100%	110,000,000	100%	287,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	95%	100%	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	150,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	95%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	60,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	95%	100%	20,000,000	100%	24,000,000	100%	28,000,000	100%	72,000,000	
7.11	KECAMATAN TABIR LINTAS												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	839,000,000	98%	967,000,000	99%	1,058,000,000	99%	2,864,000,000	Kecamatan Tabir Lintas
		Nilai AKIP OPD	B	B	BB	1,505,000,000	BB	1,586,000,000	BB	1,726,000,000	BB	4,817,000,000	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	70,000,000	100%	82,000,000	100%	93,000,000	100%	245,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	87%	83%	100%	210,000,000	100%	240,000,000	100%	280,000,000	100%	730,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	80%	80%	100%	21,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	56,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	20,000,000	100%	24,000,000	100%	30,000,000	100%	74,000,000	
7.12	KECAMATAN RENAH PAMENANG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	97%	426,300,000	98%	458,200,000	99%	514,200,000	99%	1,398,700,000	Kecamatan Renah Pamenang
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,284,032,497	BB	1,408,045,249	A	1,532,549,278	A	4,224,627,024	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	97%	112,000,000	98%	123,200,000	98%	135,520,000	99%	370,720,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	86%	90%	90%	102,000,000	90%	112,200,000	95%	123,420,000	95%	337,620,000	

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	80%	80%	83%	48,000,000	100%	52,800,000	100%	58,080,000	100%	158,880,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	94%	95%	96%	15,000,000	97%	16,500,000	98%	18,360,000	98%	49,860,000	
7.13	KECAMATAN PAMENANG SELATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	676,578,000	99%	676,578,000	99%	676,578,291	99%	2,029,734,291	Kecamatan Pamenang Selatan
		Nilai AKIP OPD	CC	CC	B	2,000,000,000	BB	2,400,000,000	A	2,400,000,000	A	6,800,000,000	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	64,000,000	100%	76,000,000	100%	94,000,000	100%	234,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	90%	100%	100%	75,000,000	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	260,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan	50%	100%	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	90,000,000	100%	210,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		ketertiban masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	80%	100%	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	26,000,000	100%	70,000,000	
7.14	KECAMATAN MUARA SIAU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	100%	100%	421,000,000	98%	421,000,000	98%	421,975,643	98%	1,263,975,643	Kecamatan Muara Siau
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	2,051,861,885	BB	2,067,422,885	A	2,082,263,885	A	6,201,548,655	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	99,4%	100%	100%	31,058,000	100%	34,163,800	100%	37,580,180	100%	102,801,980	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	98,8%	100%	100%	36,490,000	100%	40,139,000	100%	44,152,900	100%	120,781,900	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	2,000,000	100%	2,200,000	100%	2,420,000	100%	6,620,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang	93%	100%	100%	8,680,000	100%	9,548,000	100%	10,502,800	100%	28,730,800	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		tertib											
7.15	KECAMATAN TIANG PUMPUNG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	281,000,000	98%	281,000,000	99%	283,796,322	99%	845,796,322	Kecamatan Tiang Pumpung
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,761,660,342	BB	1,866,238,894	A	1,866,238,894	A	5,494,138,130	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	93%	100%	100%	2,700,000	100%	2,970,000	100%	3,267,000	100%	8,937,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	98%	100%	100%	65,000,000	100%	71,500,000	100%	78,650,000	100%	215,150,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	2,700,000	100%	2,970,000	100%	3,267,000	100%	8,937,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	N/A	100%	8,680,000	100%	9,548,000	100%	10,502,800	100%	28,730,800	
7.16	KECAMATAN JANGKAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan	98%	98%	98%	456,320,000	98%	473,489,500	98%	488,306,000	98%	1,418,115,500	Kecamatan Jangkat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan											
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	2,051,861,885	BB	2,067,422,885	A	2,082,263,885	A	6,201,548,655	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	64%	95%	100%	32,075,000	100%	34,245,000	100%	37,970,000	100%	104,290,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	95%	100%	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	140,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	33,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	11,000,000	100%	11,750,000	100%	11,600,000	100%	34,350,000	
7.17	KECAMATAN JANGKAT TIMUR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	204,000,000	98%	213,500,000	99%	213,000,000	100%	630,500,000	Kecamatan Jangkat Timur
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	1,284,500,000	A	1,288,000,000	A	1,289,202,172	A	3,861,702,172	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	547,650,000	100%	52,700,000	100%	57,750,000	100%	658,100,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	90%	98%	90%	44,050,000	95%	49,100,000	97%	54,150,000	97%	147,300,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	98%	100%	100%	15,494,000	98%	20,544,000	100%	25,594,000	100%	61,632,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	89%	100%	9,150,000	97%	14,200,000	90%	19,250,000	90%	42,600,000	
7.18	KECAMATAN SUNGAI MANAU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99,55%	100%	100%	297,500,000	100%	321,500,000	100%	340,500,000	100%	959,500,000	Kecamatan Sungai Manau
		Nilai AKIP OPD	CC	B	BB	1,380,662,862	BB	1,408,399,200	BB	1,420,488,000	BB	4,209,550,062	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	50,800,000	100%	55,900,000	100%	60,800,000	100%	167,500,000	
7.01.03	program	Persentase	100%	100%	100%	1,000,000	100%	12,000,000	100%	14,500,000	100%	27,500,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan											
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	15,000,000	100%	18,000,000	100%	23,000,000	100%	56,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	13,600,000	100%	16,000,000	100%	20,000,000	100%	49,600,000	
7.19	KECAMATAN RENAH PEMBARAP												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	148,572,719	98%	308,684,978	98%	489,308,464	98%	946,566,161	Kecamatan Renah Pembarap
		Nilai AKIP OPD	B	B	B	1,502,549,875	B	1,507,549,875	BB	1,508,549,875	BB	4,518,649,625	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	125,540,225	100%	138,094,248	100%	151,903,672	100%	415,538,145	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	90%	100%	100%	130,890,823	100%	143,979,905	100%	158,377,896	100%	433,248,624	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	40%	100%	100%	10,445,008	100%	11,489,509	100%	12,638,460	100%	34,572,977	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	6,695,225	100%	7,364,748	100%	8,101,222	100%	22,161,195	
7.2	KECAMATAN PANGKALAN JAMBU												Kecamatan Pangkalan Jambu
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99,55%	98%	100%	290,000,000	100%	290,000,000	100%	291,933,492	100%	871,933,492	
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,761,660,342	BB	1,866,238,894	A	1,866,238,894	A	5,494,138,130	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	46,000,000	100%	49,000,000	100%	52,000,000	100%	147,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	42,000,000	100%	72,000,000	100%	80,000,000	100%	194,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan	100%	100%	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	14,000,000	100%	36,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		ketertiban masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	5,000,000	100%	16,000,000	100%	20,000,000	100%	41,000,000	
7.21	KECAMATAN BATANG MASUMAI												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	96%	97%	343,250,000	98%	344,650,000	99%	349,650,000	99%	1,037,550,000	Kecamatan Batang Masumai
		Nilai AKIP OPD	B	B	BB	1,761,660,342	BB	1,866,238,894	A	1,866,238,894	A	5,494,138,130	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	99,70%	95%	96%	136,700,000	97%	138,700,000	98%	139,800,000	98%	415,200,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	98,30%	100%	100%	115,000,000	100%	116,500,000	100%	116,800,000	100%	348,300,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	10,400,000	100%	10,940,000	100%	11,524,000	100%	32,864,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang	100%	100%	100%	11,000,000	100%	11,200,000	100%	11,300,000	100%	33,500,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		tertib											
7.22	KECAMATAN BANGKO BARAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	475,800,000	98%	547,800,000	98%	547,800,000	98%	1,571,400,00	Kecamatan Bangko Barat
		Niilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,808,298,774	BB	1,964,708,651	A	1,987,549,639	A	5,760,557,064	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	87%	97%	100%	126,000,000	100%	138,600,000	100%	139,860,000	100%	404,460,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	133,000,000	100%	146,300,000	100%	147,630,000	100%	426,930,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	29,900,000	100%	32,890,000	100%	33,189,000	100%	95,979,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	27,750,000	100%	80,250,000	
7.23	KECAMATAN LEMBAH MASURAI												
0.00.00	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan	96%	98%	98%	460,450,000	98%	515,900,000	98%	592,000,000	98%	1,568,350,00	Kecamatan Lembah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan											Masurai
		Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	1,644,500,000	BB	1,679,800,000	A	1,727,400,000	A	5,051,700,000	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	98%	100%	100%	106,000,000	100%	112,000,000	100%	122,000,000	100%	340,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	130,000,000	100%	147,000,000	100%	165,000,000	100%	442,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	10,000,000	100%	13,000,000	100%	18,000,000	100%	41,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	28,000,000	100%	73,000,000	
7.24	KECAMATAN NALO TANTAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	97%	98%	98%	460,450,000	98%	515,900,000	98%	592,000,000	98%	1,568,350,000	Kecamatan Nalo Tantan
		Nilai AKIP OPD	B	B	B	1,644,500,000	BB	1,679,800,000	BB	1,727,400,000	BB	5,051,700,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	106,000,000	100%	112,000,000	100%	122,000,000	100%	340,000,000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	N/A	100%	100%	68,000,000	100%	90,000,000	100%	92,000,000	100%	250,000,000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	100%	100%	11,000,000	100%	13,000,000	100%	18,000,000	100%	42,000,000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	N/A	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	28,000,000	100%	73,000,000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	98%	98%	1,393,713,950	98%	2,053,915,000	98%	2,466,000,000	99%	5,913,628,950	Badan Kesbangpol
		Nilai AKIP OPD	A	A	A	2,722,541,050	A	2,959,585,000	A	3,280,000,000	A	8,962,126,050	
8.01.02	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Peningkatan Cakupan Pendidikan	99%	100%	100%	1,700,000,000	100%	1,800,000,000	100%	1,900,000,000	100%	5,400,000,000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Wawasan Kebangsaan											
8.01.03	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Fasilitasi dan Pendidikan Politik	100%	100%	100%	38,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,300,000,000	100%	40,750,000,000	
8.01.04	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawsan Ormas dalam Kabupaten Merangin	100%	100%	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	750,000,000	
8.01.05	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	1,500,000,000	
8.01.06	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Deteksi Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	4,450,000,000	





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran target keberhasilan pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.



Tabel VIII-1. Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Merangin
Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
			Capaian	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,72	6,02	6,11	6,21	6,35	6,35
2	Nilai PDRB berdasarkan ADHB	(Rp /juta)	20.284,06	17.860,60	22.678,56	24.976,23	25.897,23	25.897,23
3	Nilai PDRB berdasarkan ADHK	Persentase	10.973,80	10.897,44	11.294,54	11.645,60	11.975,78	11.975,78
4	Angka Kemiskinan	Persentase	8,70	8,33	8,15	8,01	7,86	7,86
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,83	4,60	4,50	4,40	4,30	4,30
6	Rasio Gini	Nilai	0,35	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
7	Indeks Pembangunan Manusia	Persentase	69,98	70,28	70,57	70,87	71,17	71,17
8	Pengeluaran per kapita	Rupiah	10,714,000	10,908,000	11,117,667	11,363,556	11,580,074	11,580,074

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih Indikator capaian Kinerja Utama daerah (IKU). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Merangin dapat dilihat pada **Tabel VIII-2**.



**Tabel VIII-2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Merangin
Tahun 2024 - 2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
			Capaian	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	4,95	5,22	5,36	5,42	5,61	5,61
2	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	6,03	6,18	6,21	6,29	6,37	6,37
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase	67.48	67.49	67.87	68.63	68.81	68.81
4	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Persentase	70,76	71,81	62.49	63.54	65.03	65.03
5	Angka Kemiskinan	Persentase	8.70	8.33	8.15	8.01	7.86	7.86
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,83	4,60	4,50	4,40	4,30	4,30
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	58,51	59,56	60,61	60,71	62,53	62,53
8 9	Harapan lama sekolah	Tahun	12,05	12,07	12,09	12,11	12,13	12,13
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,97	8,03	8,10	8,16	8,16
10	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,53	71,65	71,78	71,90	72,02	72,02
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	B	BB	BB

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja daerah dan indicator kinerja kunci ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial yang meliputi indikator kesejahteraan, pemerataan Ekonomi, dan kesejahteraan Sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Tabel VIII-3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Inflasi	%	2,73	3,93	2,89	2,84	2,78	2,78
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,97	8,03	8,10	8,16	8,16
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,05	12,07	12,09	12,11	12,13	12,13
4	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,53	71,65	71,78	71,90	72,02	72,02
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	99	100	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	65,90	66,10	69,50	73	77	77
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	106,63	106,78	107,52	113	119	119
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS.	%	98,70	98,83	100,34	105	111	111
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,82	99,93	99,97	105	110	110
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	78,53	78,73	99,45	104	110	110
8	Angka Melek Huruf	%	98,95	99	99	99	100	100
9	Angka Putus Sekolah	%	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
10	Persentase SD/MI yang Terakreditasi	%	96,20	97,22	100	100	100	100
11	Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi	%	86,34	89,34	92	97	100	100
12	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal	%	N/A	N/A	0	100	100	100
13	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	%	23	23	25	28	30%	30
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	96	98	98	99	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Capaian indikator nasional mutu	%	N/A	N/A	65	67	69	69
4	Puskesmas terakreditasi minimal madya	%	74	77	81	85	88	88
5	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	%	21	28	30	35	40	40

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
6	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	59	61	62	63	64	64
7	Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	%	N/A	N/A	67	72	77	77
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase sawah teraliri irigasi	%	72,38	74,48	73,92	74,45	75,95	75.95
4	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak	%	66,22	66.70	67.04	67.55	68.25	68.25
5	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	%	57,29	58,23	59.23	59.50	60.04	60.04
6	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	%	73,27	74,14	74.48	74.90	75.15	75.15
7	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	52,36	53,11	53.80	54.40	55.05	55.05
8	Persentase pengembangan permukiman dalam kondisi baik	%	53,41	54,30	54.75	55.35	57.45	57.45
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	52,23	53,42	54	54.40	55%	55
10	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	53,21	54,37	55	56%	57	57
11	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	71,01	70.96	42.05	44.07	46.15	46.15
12	Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikasi	%	67,00	73,68	68.15	68.30	68.50	68.50
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	%	87,74	88,01	88,28	88,55	88,82	88.82
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase RTLH yang tertangani	%	78,00	78.80	82	82.50	84	84
4	Penanganan kawasan kumuh	%	266,55 ha	236,33 ha	60	65	68	68
5	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	%	78	70,55	80	83	85	85
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Waktu Tanggap (Respon Time)	Menit	83,00	84,00	15	15	15	15
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	97	100	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	93,78	100	100	100	100	100
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase peningkatan pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	83,33	91,67	93	94	95	95
4	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai SPM dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	%	39,75	43,68	85	90	95	95
5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	17,99	6,48	90	92	94	94
6	Persentase pemenuhan korban bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	55	20,00	100	100	100	100
7	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Lokasi	1	1	1	1	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	%	70	75	80	85	90	90
3	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	15	15	16	18	20	20
4	Persentase sengketa pengusaha-pekerja	%	9,4	9	8,93	8,48	8,05	8
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,35	88,24	88,40	88,60	88,75	88,75
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pengelolaan data gender dan anak	%	N/A	1	66,67	83,33	100	100
4	Kabupaten Kota Layak Anak	Predikat	-	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	BB	BB	BB	A	A
3	Persentase desa tahan pangan	%	52,00	53,00	62	65	67	67
4	Menurunnya Konsumsi Beras	%	101,3	101	100,7	100,5	100,2	100,2
5	Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi	%	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10
6	Persentase Cadangan Pangan daerah	%	26,00	30,00	35	45	50	50
7	Persentase pangan yang aman	%	8	88	90	92	94	94
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	78	87	80	83	85	85
3	Persentase Penatagunaan Tanah	%	78	80	100	100	100	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	99	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
3	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang sesuai Standar	Dokumen	2	2	2	2	2	2

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
4	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu	Kelas	IV	IV	IV	IV	IV	IV
5	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) sesuai dengan ambang batas melalui Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kawasan	20	5	5	6	7	7
6	Persentase pelaku usaha yang limbah B3 nya terkendali	%	90	90	90	90	90	90
7	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup	%	80	90	90	90	90	90
8	Keberadaan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisionl dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang mendapat Pemberdayaan, Kemitraan yang diakui oleh Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	2	2	2	2
9	Persentase Wilayah dalam Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	%	25	25	25	25	25	25
10	Persentase Penghargaan yang diterima dari event yang diikuti	%	80	50	50	50	50	50
11	Persentase pengaduan yang tertangani	%	80	100	100	100	100	100
12	Persentase Pengelolaan Sampah	%	26	27	28	30	32	32
2.12	UURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase penduduk yang memiliki ktp-el	%	98	98,00	98,50	99	99,50	99,50
4	persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	100	100	100	100	100	100
5	persentase anak usia 0-17 kurang sehari yang memiliki KIA	%	42,47	50,00	65,06	72,59	80,12	80,12
6	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	99,70	100	100	100	100	100
7	persentase penduduk mati yang memiliki akta kematian	%	100	100	100	100	100	100
8	persentase jumlah penduduk non muslim yang memiliki akta perkawinan non muslim	%	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
9	Persentase Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	20	30	40	60	80	80
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	25	35	30	30
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase desa tertata dengan baik	%	N/A	15	40	35	25	25
4	Persentase kerjasama antar desa aktif	%	N/A	35	25	30	35	35
5	Persentase kualitas penyelenggaraan administrasi desa	%	45	50	53	55	58	58
6	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	%	10	15	25	30	35	35
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	NILAI AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa	%	74	75	86,00	88.00	90.00	90.00
4	Jumlah Akseptor KB Aktif	Orang	2.752	2.802	63.045	69.349	76.283	76.283
5	Rata-rata ASFR / Kelahiran Kelompok Umur tertentu	%	2,611	2,637	2,700	2,715	2,740	2,740
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	80	85	95	95
2	Nilai AKIP OPD	%	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	80	85	80	85	90	90
4	Persentase Peningkatan kualitas layanan Penerbangan	%	N/A	N/A	75	80	85	85
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	94	95	96	96
2	Nilai AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Persentase Layanan Komunikasi Publik	%	85	85	87	90	93	93
4	Persentase Pemenuhan unsur-unsur SPBE	%	75	90	25	30	35	35
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	96	96	96.50	97	97.50	97.50
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	%	21.05	21.50	22	25	27	27
4	Persentase KSP/USP-Koperasi Berpredikat Sehat	%	3.57	4	5	6	7	7
5	Persentase Pengurus Koperasi Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Koperasi	%	16,45	16,45	17	18	19	19,0
6	Pertumbuhan modal koperasi	%	-5,20	0	1,5	1,5	1,5	4,5
7	Pertumbuhan modal UMKM	%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	5,4
8	Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT	%	-	-	10	10	10	30
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai SAKIP AKPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Penanam Modal yang mendapat Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Rencana Investasi	Milyar Rupiah	146,23	190	228,11	273,74	328,49	328,49
5	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen Perizinan dan non Perizinan	%	59	62	65	70	75	75
6	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	%	74	78	80	83	85	85
8	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara Elektronik	%	75	87	100	100	100	100
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA							
1	Persentase pemuda berprestasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah atlet Daerah yang berprestasi	Orang	68	161	24	26	28	58
3	Jumlah Anggota Pramuka Berprestasi	Orang	100	100	146	152	158	456
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Persentase Data Sektoral Tersedia	%	45	45	50	55	60	60
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Penyelenggaraan Persandian untuk	Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	Pengamanan Informasi							
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Jumlah Kesenian Tradisional Yang dikembangkan	%	25	30	33	32	35	35
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diakui secara nasional	%	25	30	33	32	35	35
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Persentase Perpustakaan yang memenuhi standart	%	55	60	62	64	66	66
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	NILAI AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Persentase pengelolaan arsip daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	19,64	20,69	22,00	24,00	25	25
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang di kelola	%	28	30	25	27	30	30
4	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	%	35	40	42	43	45	45
5	persentase usaha perikanan yang terawasi	%	80	85	86	87	88	88
6	Persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	15	18	20	23	24	24
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase Daya Tarik Destinasi Yang Layak	%	55	65	30	30	40	40
4	Jumlah orang yang mengakses informasi kepariwisataan	Orang	1800	2700	2000	2400	2800	7200
5	Peningkatan Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	Pelaku Usaha	115	130	135	145	155	155

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
6	Peningkatan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompetensi	%	70	80	60	70	80	80
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
3.27	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	%	35	35	26,82	33,97	39,22	39,22
4	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	%	41	40	26,26	33,47	40,00	40,00
5	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan	%	85	85	73,13	78,13	84,38	84,38
6	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan	%	90	90	48,89	54,17	59,44	59,44
7	Persentase penyakit ternak yg tertangani	%	9,50	9,75	9,75	9,75	9,75	10
8	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%	5,00	5,00	5	5	5	5
9	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	%	40	45	40	40	40	40
3.27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	100	100	100	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana TPH	%	50,45	53,80	56	59	62	62
4	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana TPH	%	82,50	84,50	86	87	88	88
5	Persentase TPH yang Terkendali dari Bencana Pertanian	%	46	49	52	55	58	58
6	Jumlah Peningkatan Kelas kemampuan kelompok tani	Kelompok	6	7	95	95	95	285
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	41,98	43	44	45	46	46
2	Rata-Rata Selisih Harga Barang Pokok Tingkat Pasar Rakyat Terhadap Harga Acuan	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
3	Jumlah Pelaku UMKM Unggulan Yang Memiliki Kemampuan Ekspor	Pelaku Usaha	N/A	N/A	3	3	3	3
4	Jumlah Produk Unggulan Yang Memenuhi Syarat Mutu Ekspor	Jenis	N/A	N/A	3	3	3	3
5	Persentase pasar tertib ukur	%	8,33	8,33	8,33	10	10	10
6	Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Produk Yang Dipromosikan	%	6	10	10	10	10	10
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pertumbuhan Nilai Produksi Produk Unggulan Daerah	%	12.74	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	Persentase IKM yang Sudah Sertifikasi (HKI/Halal/PIRT/TKDN/SNI)	%	4,25	10	11	12	13	13
3	Persentase IKM Yang Masuk Kedalam SIINas	%	0,26	0,26	1	1,5	2	2
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Laporan penyelesaian permasalahan transmigrasi	Dokumen	3	3	3	3	3	3
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	BB
3	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	97	97	97	98	98	98
4	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	%	98	98	98	98	98	98
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98,34	98,5	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	91,50	95	96	96,75	98	98
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							
1	-Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat	%	95	95	96	97	97	97

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	Daerah							
4	Nilai Komponen Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	%	80	80	80	82	83	84
5.02	KEUANGAN							
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	96	97	97	97	98	98
5.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	%	A	A	A	A	A	A
3	Persentase peningkatan PAD	%	-1,89	5,12	3,78	2,78	3,13	3,13
5.03	KEPEGAWAIAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	%	87	90	90	92	93	93
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN	%	89	92	92	93	93	93
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Daerah	%	18,80 (Kategori Kurang Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)	35,5 (Kategori Inovatif)
6.01	INSPEKTORAT							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99,91	100	100	100	100	100
2	NILAI AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditindaklanjuti	%	99,93	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
4	Persentase OPD yang Menerapkan ZI WBK WBBM	%	100	100	70	80	90	90
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN BANGKO							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	69,05	74,14	98	98,25	98,40	98,40
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	90,62	97	97,25	97,50	97,75	97,75
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	83,33	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	79,31	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	75	100	100	100	100	100
7.02	KECAMATAN TABIR							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	99	99	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	92	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	72	98	95	96	96	96
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	N/A	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	N/A	100	100	100
7.03	KECAMATAN PAMENANG							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	100	99	99	99
2	Nilai AKIP OPD	%	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	99	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	Pembangunan							
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100
7.04	KECAMATAN PAMENANG BARAT							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99,99	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	100	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	N/A	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100
7.05	KECAMATAN TABIR ULU							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100
7.06	KECAMATAN TABIR SELATAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	100	100	100	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	N/A	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	N/A	100	100	100	100
7.07	KECAMATAN TABIR TIMUR							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	90	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	93,75	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	50	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	75	100	100	100	100	100
7.08	KECAMATAN TABIR ILIR							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	CC	B	B	B	B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	98	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	30	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
7.09	KECAMATAN TABIR BARAT							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	90	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	N/A	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	N/A	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	N/A	100	100	100	100
7.10	KECAMATAN MARGO TABIR							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	95	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	95	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	95	100	100	100	100
7.11	KECAMATAN TABIR LINTAS							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	87	83	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	80	80	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.12	KECAMATAN RENAH PAMENANG							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	97	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	97	98	98	99
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	86	90	90	90	95	95
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	80	80	83	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	94	95	96	97	98	98
7.13	KECAMATAN PAMENANG SELATAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	99	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	CC	B	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	90	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	50	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	80	100	100	100	100	100
7.14	KECAMATAN MUARA SIAU							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99	100	100	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	99,4	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	98,8	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	93	100	100	100	100	100
7.15 KECAMATAN TIANG PUMPUNG								
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	93	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	98	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	N/A	100	100	100	100
7.16 KECAMATAN JANGKAT								
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	64	95	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	95	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
7.17	KECAMATAN JANGKAT TIMUR							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	%	A	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	90	98	90	95	97	97
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	98	100	100	98	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	89	100	97	90	90
7.18	KECAMATAN SUNGAI MANAU							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99,55	100	100	100	100	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC	B	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100
7.19	KECAMATAN RENAH PEMBARAP							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	90	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman	%	40	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	dan ketertiban masyarakat							
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.2	KECAMATAN PANGKALAN JAMBU							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99,55	98	100	100	100	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.21	KECAMATAN BATANG MASUMAI							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	96	96	97	98	99	99
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	99,70	95	96	97	98	98
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	98,30	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.22	KECAMATAN BANGKO BARAT							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	87	97	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	Pembangunan							
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.23	KECAMATAN LEMBAH MASURAI							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	96	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	98	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
7.24	KECAMATAN NALO TANTAN							
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	97	98	98	98	98	98
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan	%	N/A	100	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib	%	N/A	100	100	100	100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	98	98	98	99	99	99

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026



Kode	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kinerja akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Capaian	Target	Target	Target	Target	
	Nilai AKIP OPD	Predikat	A	A	A	A	A	A
	Persentase Peningkatan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	%	99	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Pendidikan Politik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas dalam Kabupaten Merangin	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Deteksi Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100





BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merangin periode tahun 2024-2026 atau periode lima tahunan keempat/akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah periode tahun 2024-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Periode 2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena selain sebagai bagian dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selama periode Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah sebagai akibat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya menghindari kekosongan RKPD, maka RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.



9.1. Pedoman Transisi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah pada masa transisi kepemimpinan pemerintahan, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Merangin Periode Tahun 2024-2026 dan periode RPJMD berikutnya, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan pedoman transisi, sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024, 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah/RPJMD periode berikutnya memuat visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merangin dan arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional. Pelaksanaan RPJMD tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; dan
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi dasar dan acuan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi antara arah pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024-2026, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 kepada masyarakat dan dunia usaha;



2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 menjadi dasar dan acuan dalam pengambilan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
3. Perangkat Daerah dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan strategi, arah kebijakan dan program-program dalam RPD dengan memanfaatkan semua potensi dan kekuatan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
4. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra PD yang memuat tujuan dan sasaran serta strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Renstra PD;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPD ke dalam Renstra PD serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

9.3. Penutup

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah setentak pada tahun 2024-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode kelima RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur



Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Disamping itu juga integrasi dengan pembangunan Provinsi Jambi dimasa mendatang. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026 merupakan pendorong bagi upaya mewujudkan masyarakat merangin yang maju, mandiri, lestari, adil dan berbudaya.